



LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA (RIPPARKAP) KABUPATEN PESISIR SELATAN 2026 - 2045



TIM BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN AKHIR

**PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNGAN PARIWISATA
(RIPPARKAB)
KABUPATEN PESISIR SELATAN 2026-2045**



**LITBANG BAPPEDA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PAINAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tim bisa menyelesaikan penulisan laporan akhir Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (Ripparkab) Kabupaten Pesisir Selatan 2026-2045.

Laporan Akhir ini disusun dengan memperhatikan struktur penulisan dan pertimbangan akademik sehingga didapatkan dokumen laporan yang sistematis yang terdiri dari 12 bab dengan uraian sebagai berikut: (1) pendahuluan, (2) kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan dalam kebijakan pembangunan, (3) kondisi umum wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan (4) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai destinasi pariwisata, (5) industri pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, (6) pasar dan pemasaran pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, (7) kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan, (8) arahan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan, (9) kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan, (10) rencana pembangunan perwilayahan pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, (11) program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan, (12) penutup.

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada berbagai pihak atas kerjasama, bantuan dan kontribusinya pada penyusunan Laporan Akhir ini. Semoga perencanaan yang dibuat dapat memberikan kontribusi pada upaya pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran	3
1.3 Luaran.....	5
1.4 Ruang Lingkup	6
1.5 Metodologi	10
1.6 Jangka Waktu Perencanaan.....	11
1.7 Sistematika Laporan Akhir	12
BAB II KEPARIWISATAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN	
2.1 Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam Kebijakan Pembangunan Nasional	15
2.2 Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.....	26
2.3 Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan	53
BAB III KONDISI WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN	
3.1 Kondisi Fisik.....	60
3.2 Sejarah Sebagai Potensi Pariwisata.....	72
3.3 Kekayaan Ekologi sebagai potensi pariwisata	78
3.4 Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata.....	81
3.5 Perekonomian Pesisir Selatan	82

BAB IV KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

4.1 Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata.....	96
4.2 Fasilitas Pariwisata.....	101
4.3 Aksesibilitas Pendukung Pariwisata	104
4.4 Prasarana Umum Pendukung Pariwisata	110
4.5 Penduduk Sebagai Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata	115

BAB V INDUSTRI PARIWISATA

5.1 Usaha Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan	123
5.2 Usaha Kecil dan Menengah Pendukung Pariwisata.....	139
5.3 Sarana Transportasi.....	162
5.4 Ekonomi Kreatif.....	164
5.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pendukung Pariwisata	167

BAB VI PASAR PARIWISATA DAN UPAYA PEMASARAN

6.1 Jumlah dan Perkembangan Pasar Wisatawan	174
6.2 Karakteristik Pasar Wisatawan	187
6.3 Upaya Pemasaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.	207

BAB VII KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

7.1 Sumber Daya Manusia Pariwisata	214
7.2 Asosiasi Pariwisata.....	219
7.3 Kelembagaan Pemerintah Terkait Pariwisata	220
7.4 Kelembagaan Lain Terkait Pariwisata	224

BAB VIII PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

8.1 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Pariwisata.....	228
8.2 Prinsip Pembangunan Kepariwisataan	229
8.3 Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisataan.....	224

BAB IX KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

9.1 Kebijakan pembangunan kepariwisataan.....	239
9.2 Strategi Pembangunan Kepariwisataan.....	246

BAB X RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

10.1 Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata 254

10.2 Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis
Pariwisata..... 257

**BAB XI PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN 260**

BAB X PENUTUP

12.1 Kesimpulan 290

12.2 Saran 291

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup, keluaran, metodologi, jangka waktu Ripparkab, dan sistematika Laporan Akhir Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan.

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 kabupaten / kota di Propinsi Sumatra Barat, dengan luas wilayah 5.749,89 Km². Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terletak di bagian selatan Propinsi Sumatra Barat, memanjang dari utara ke selatan dengan Panjang garis pantai 234 Km. Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Propinsi Jambi, sebelah selatan dengan Propinsi Bengkulu dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki panorama alam yang cukup cantik dan mempesona. Kawasan Mandeh misalnya, sekarang kawasan wisata ini oleh pemerintah pusat masuk dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) mewakili kawasan barat Indonesia. Kawasan wisata potensial lainnya adalah Jembatan Akar, Water Pall Bayang Sani, Cerocok Beach Painan, Bukit Langkisau, Nyiur Melambai serta sejumlah objek wisata sejarah, seperti Pulau Cingkuak (Cengco), Peninggalan Kerajaan Inderapura dan Rumah Gadang Mandeh Rubiah Lunang. Bila semua potensi pariwisata Pesisir Selatan tersebut dapat dikelola secara profesional tentu akan jadi sumber PAD andalan daerah pada masa mendatang. Untuk itu pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka diri selebar lebarnya kepada investor yang berminat menanamkan modalnya di daerah ini.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, pembangunan kepariwisataaan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan kepariwisataaan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan

kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pasal 8 ayat 1 Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sangat penting dilakukan baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2015-2025. Dalam kurun waktu hingga sekarang, telah banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi, baik terkait peraturan dan kebijakan kepariwisataan, maupun kondisi kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan secara khusus, dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya. Munculnya Undang-undang Kepariwisata yang terbaru di tahun 2009, diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas, Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Ripparprov Sumatera Barat, maupun pembaruan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, sangat berpengaruh terhadap perencanaan dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 2026-2045.

Penyusunan Ripparprov dan Ripparkab/kota juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam permen tersebut, telah diatur muatan yang harus tercantum dalam Ripparkab serta hal-hal yang harus dipertimbangkan dan dilakukan dalam menyusun Ripparkab suatu daerah.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga melakukan penyusunan Review Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan untuk menghasilkan dokumen Ripparkab baru sebagai acuan bagi pembangunan kepariwisataan daerah

Kabupaten Pesisir Selatan yang bersinergi dengan pengembangan sektor lainnya. Lebih lanjut, Ripparkab ini akan memiliki kekuatan hukum dengan ditindaklanjuti melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadi pedoman dalam mengarahkan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Review Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk menghasilkan dokumen Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi arahan dan pedoman dalam pembangunan kepariwisataan daerah. Penyusunan Ripparkab ini juga ditujukan untuk mempersiapkan dokumen penetapan Peraturan Daerah tentang Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat menjadi pedoman dan arahan pembangunan sektor pariwisata kabupaten yang dapat :

1. Mengembangkan potensi kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, baik budaya, alam maupun buatan, untuk tumbuh dan berkembang sebagai destinasi yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif secara regional dan nasional.
2. Meningkatkan peran dan kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor pembangunan perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Mendorong pelestarian dan konservasi lingkungan, khususnya potensi alam, sejarah dan budaya dengan pengelolaan dan pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pertanian, perikanan dan kelautan, maupun sektor terkait lainnya.
4. Mendorong pengembangan wilayah melalui kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pembangunan pariwisata

berbasis masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun sasaran yang harus dicapai pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Terkajinya berbagai kebijakan pembangunan kepariwisataan dan yang terkait, baik di tingkat nasional, Provinsi Sumatera Barat, maupun Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Teranalisisnya potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Terumuskannya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Terumuskannya kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, yang mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran, serta pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
5. Terumuskannya rencana perwilayahan pariwisata Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan yang memuat (1) rencana struktur perwilayahan pariwisata kabupaten, (2) rencana Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Kabupaten Pesisir Selatan, (3) rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), serta (4) rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Terumuskannya program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah kabupaten keseluruhan.
7. Terwujudnya nilai budaya kepariwisataan masyarakat Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Luaran

Keluaran Studi Penyusunan Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan 2026-2045 ini terdiri dari:

1. Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kabupaten Pesisir Selatan, berisikan:
 - a. Hasil analisis berbagai potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran serta konsep pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Rumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, yang mencakup aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, serta kelembagaan kepariwisataan;
 - d. Rumusan rencana pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan yang memuat: (1) rencana struktur perwilayahan pariwisata kabupaten, (2) rencana Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Kabupaten Pesisir Selatan, (3) rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), serta (4) rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kabupaten Pesisir Selatan;
 - f. Rumusan program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan keseluruhan.
2. Dokumen Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kabupaten Pesisir Selatan yang dilengkapi dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kabupaten Pesisir Selatan, yang berisikan:
 - a. Kajian teoritis dan praktik empiris kepariwisataan Kabupaten

Kabupaten Pesisir Selatan

- b. Evaluasi dan analisis peraturan perundangan-undangan terkait
- c. Landasan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Ripparkab
- d. Arah pengaturan dan muatan materi dalam rancangan peraturan daerah
- e. Draf rancangan peraturan daerah tentang Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan yang dilengkapi dengan lampiran sesuai kebutuhan.

1.4 Ruang Lingkup

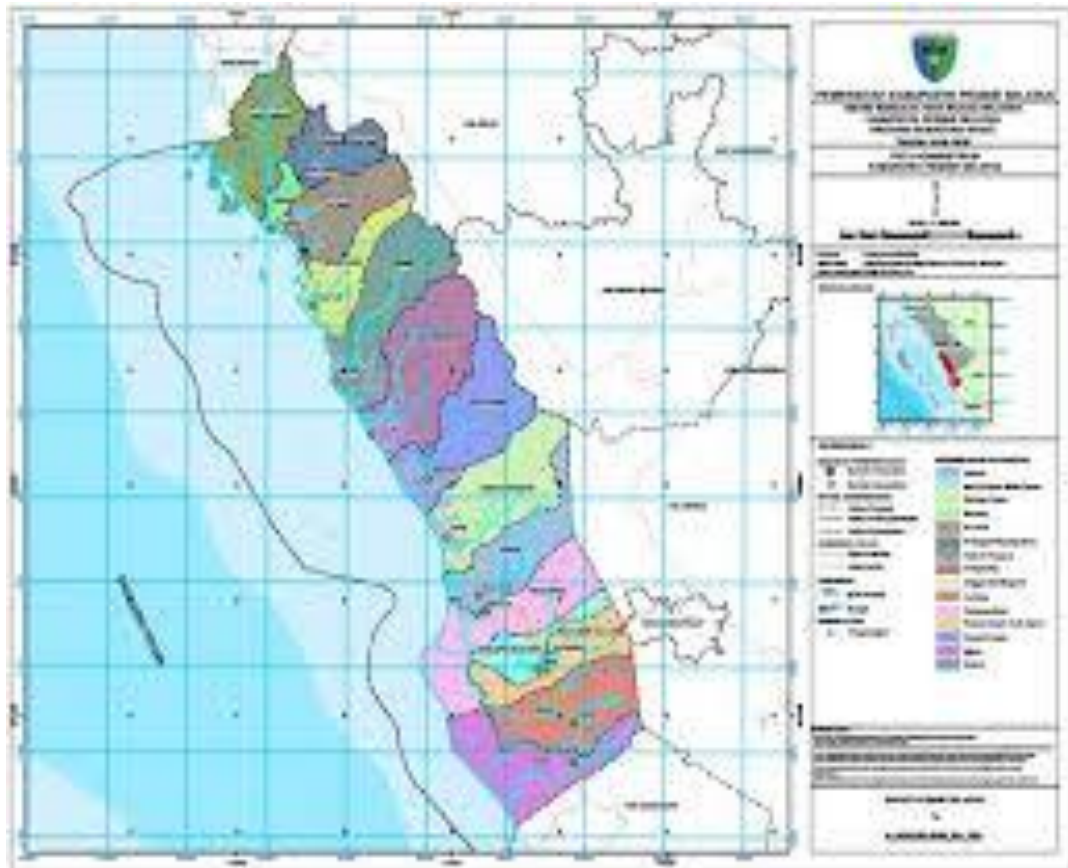
1.4.1 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah studi penyusunan Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah wilayah administratif Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan seluas 5.749,89 km², yang terdiri dari 15 (sebelas) kecamatan, yaitu : 1) IV Jurai, 2) IV Nagari Bayang Utara, 3) Airpura, 4) Basa Ampek Balai Tapan, 5) Batang Kapas, 6) Bayang, 7) Koto XI Tarusan, 8) Lengayang, 9) Linggo Sari Baganti, 10) Lunang, 11) Pancung Soal, 12) Ranah Ampek Hulu Tapan, 13) Ranah Pesisir, 14) Silaut, 15) Sutera.

Ripparkab ini akan fokus pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan wilayah yang lebih luas. Adapun batas administrasi wilayah studi adalah:

- Sebelah Utara : Padang
- Sebelah Selatan : Muko-Muko
- Sebelah Barat : Samudra Hindia
- Sebelah Timur : Solok, Solok Selatan, Kerinci, dan Sungai Penuh

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 1.1 Lingkup Wilayah Studi Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan berikut.



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan

1.4.2 Lingkup Materi

Materi penyusunan Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan akan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pembangunan destinasi pariwisata: meliputi perwilayahan pembangunan pariwisata; pembangunan daya tarik wisata; aksesibilitas pariwisata; prasarana umum; fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan pengembangan investasi di bidang pariwisata;
2. Pembangunan industri pariwisata: meliputi penguatan struktur industri pariwisata; peningkatan daya saing produk pariwisata; pengembangan kemitraan usaha pariwisata; penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
3. Pembangunan pemasaran pariwisata: meliputi pengembangan pasar

wisatawan; pengembangan citra pariwisata; pengembangan kemitraan; dan pengembangan promosi pariwisata;

4. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan: meliputi penguatan organisasi kepariwisataan; pengembangan SDM pariwisata; dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Lingkup substansi Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan selengkapnya untuk setiap aspek dapat dilihat pada Diagram 1.2 berikut.



Gambar 1.2
Diagram Aspek Pembangunan Kepariwisata dalam Ripparkab
Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber : Ripparnas Tahun 2010-2025

1.4.3 Lingkup Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan, tahapan yang dilakukan terdiri dari:

1. Persiapan Studi, meliputi penyepakatan tujuan, keluaran, lingkup pekerjaan, metodologi yang digunakan, pengayaan substansi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Pada tahapan ini juga dilakukan kajian pustaka, pengayaan substansi atau pendalaman materi, identifikasi awal

potensi, serta kajian Pustaka yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan daerah.

2. Pengumpulan Data, meliputi kegiatan inventarisasi dan entri data sesuai daftar kebutuhan data dan informasi yang telah disusun. Pada tahap ini juga dilakukan survei primer (dengan wawancara terstruktur, observasi lapangan, dokumentasi) maupun survei sekunder ke berbagai instansi atau lembaga terkait lainnya. Diskusi kelompok terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD) akan dilakukan dengan stakeholder terkait, meliputi asosiasi, pemerintah daerah, perwakilan masyarakat dan lainnya.
3. Identifikasi Dan Analisis, meliputi identifikasi dan analisis potensi dan permasalahan kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, analisis perwilayahan pariwisata, analisis potensi pasar pariwisata, analisis industri pariwisata, serta analisis kelembagaan kepariwisataan.
4. Perumusan Rencana, meliputi perumusan isu-isu strategis, prinsip-prinsip, visi, misi, tujuan, konsep, kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan. Termasuk didalamnya rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pengkajian, Pembahasan Dan Pemantapan substansi Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan, melalui pelaksanaan diskusi dan FGD dengan pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Penyusunan Program, meliputi perumusan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan dilengkapi dengan program pengendalian pembangunan. Perumusan program pembangunan kepariwisataan memuat:
 - a. Judul program
 - b. Deskripsi program
 - c. Waktu pelaksanaan program

- d. Pemangku kepentingan sebagai penanggung jawab pelaksanaan program
 - e. Pemangku kepentingan sebagai pendukung pelaksanaan program
7. Penyusunan Naskah Akademik Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan, yang memuat gagasan pengaturan dan materi muatan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.

Dokumen Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah tersusun akan menjadi substansi dalam Naskah Akademik dan Draf Raperda Ripparkab.

1.5 Metodologi

Berdasarkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) seperti yang tertuang pada tujuan dan sasaran pekerjaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai pemikiran awal dalam rangka menanggapi kerangka acuan kerja tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini perlu dipertajam dengan formulasi tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan sehingga mampu tumbuh dan berkembang sebagai tujuan wisata yang mempunyai daya tarik khusus dan peran strategis bagi pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Meningkatkan kualitas fisik dan lingkungan tata ruang Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga dapat dikelola dan dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan yang kompetitif, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara;
3. Membangun sikap apresiasi yang mendalam baik kepada wisatawan maupun masyarakat terhadap pelestarian dan konservasi Kabupaten Pesisir Selatan melalui pengembangan pariwisata yang terarah, terpadu dan berwawasan lingkungan;

4. Meningkatkan peran efektif pariwisata sebagai agen pengembangan wilayah serta pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam ikut meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

1.6 Jangka Waktu Perencanaan

Jangka waktu Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 Ayat (2), yang menyatakan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. RPJPN memiliki jangka waktu 2005-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Barat (Perda Nomor 9 Tahun 2009) memiliki jangka waktu 2005-2025, demikian juga dengan RPJPD Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan (Perda Nomor 3 Tahun 2007) memiliki jangka waktu 2005-2025. Dalam lingkup kepariwisataan nasional, Ripparnas memiliki jangka waktu 2010-2025, sedangkan Ripparprov Sumatera Barat yang juga menjadi acuan dalam penyusunan Ripparkab memiliki jangka waktu 2021-2030.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya pada Bab 1 bagian D, butir 6 dinyatakan bahwa Ripparkab/Ripparkot adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan untuk periode waktu **15-25 tahun**. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka jangka waktu perencanaan Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan adalah 20 tahun, yaitu dari tahun **2026-2045** dengan program dirinci untuk 5 tahun pertama, yang dimulai pada tahun 2026. Pertimbangan lainnya juga adalah jangka waktu yang cukup setelah Ripparnas maupun Ripparprov Sumatera Barat habis masa berlakunya atau kemudian dikaji kembali, untuk Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan tetap mengacu pada Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan ini.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan dinamisnya perkembangan

sektor pariwisata dan pembangunan wilayah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan dan untuk mengakomodir berbagai perubahan yang mungkin terjadi dalam kurun waktu tersebut, maka Ripparkab dapat ditinjau kembali dalam 5 (lima) tahun, atau sesuai perkembangan, jika terjadi keadaan khusus yang perlu segera disesuaikan.

1.7 Sistematika Laporan Akhir

Sistematika Laporan Akhir Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan ini terdiri dari:

Bab I merupakan Pendahuluan, berisikan uraian tentang latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, keluaran, serta jangka waktu Ripparkab Kabupaten Pesisir Selatan.

Bab II merupakan kajian terhadap Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, menjelaskan tentang posisi kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional, Provinsi Sumatera Barat, serta kajian pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan dalam kebijakan dan pembangunan wilayah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.

Bab III merupakan analisis terhadap Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, yang berisikan analisis kondisi fisik wilayah, yang mencakup administratif dan geografis, geomorfologi, topografi, iklim dan curah hujan.

Bab IV menjelaskan kondisi Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Destinasi Pariwisata, yang menguraikan analisis potensi dan permasalahan kepariwisataan untuk aspek pembangunan destinasi pariwisata, yang meliputi daya tarik wisata, aksesibilitas pariwisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, prasarana umum pendukung pariwisata, masyarakat, dan investasi pariwisata

Bab V menjelaskan analisis kondisi Industri Pariwisata Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, mencakup kondisi usaha pariwisata,

serta usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata, baik potensi maupun permasalahan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.

Bab VI memaparkan hasil analisis terhadap aspek Pemasaran Pariwisata Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, menjelaskan kondisi pasar wisatawan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, karakteristik segmen pasar eksisting dan potensial, serta program pemasaran dan promosi yang sudah dilakukan.

Bab VII menjelaskan kondisi Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan yang menganalisis kondisi sumber daya manusia pariwisata, asosiasi dan kelembagaan pemerintah maupun swasta lainnya yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.

Bab VIII merupakan Arahana Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan yang berisikan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan kabupaten, visi, misi, tujuan, sasaran, dan target pembangunan kepariwisataan wilayah.

Bab IX Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, berisikan kebijakan dan strategi pembangunan berdasarkan 4 aspek, yaitu aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Bab X menjelaskan Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, yang berisikan rencana struktur perwilayahan pariwisata kabupaten, rencana pengembangan destinasi pariwisata, serta rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kabupaten Pesisir Selatan.

Bab XI berisikan Program dan Indikasi Kegiatan Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, yang

mendetailkan program dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan prioritas waktu pelaksanaan, serta institusi penanggung jawab dan pendukung pelaksanaan kegiatan masing-masing.

Bab XII merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap tindaklanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Ripparkab ini

BAB 2

KEPARIWISATAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota merupakan bagian dari pembangunan nasional dan provinsi yang saling terkait. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Pesisir Selatan perlu mengkaji posisi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rencana pembangunan yang dituangkan dalam produk-produk rencana spasial maupun fungsional, baik di tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Barat, maupun di Kabupaten Pesisir Selatan.

2.1 Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam Kebijakan Pembangunan Nasional

Kebijakan di tingkat nasional memiliki pengaruh dalam mengarahkan perencanaan pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan nasional yang mengarah pada pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2027; dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025. Kedua dokumen tersebut memberikan arahan yang menjadi koridor bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerahnya.

2.1.1 Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, dan mengalami perubahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah

dan pemanfaatan ruang wilayah negara untuk periode perencanaan tahun 2008-2027. Kebijakan dan pemanfaatan ruang wilayah di tingkat nasional diantaranya mengatur tentang struktur ruang dan pola ruang nasional. Rencana struktur ruang RTRWN, membagi sistem perkotaan nasional menjadi tiga, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), seperti dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Sistem Perkotaan Nasional di Provinsi Sumatera Barat

Sistem Perkotaan	Perkotaan	Keterangan
PKN	Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Agung - Pariaman (Palapa) (II/C/1)	Pengembangan/peningkatan fungsi kota-kota pusat Pertumbuhan Nasional
PKW	Pariaman (III C/1)	Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi
	Sawahlunto (II/C/1)	Pengembangan/peningkatan fungsi kota-kota pusat Pertumbuhan Nasional
	Muarasiberut (II/C/2)	Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota-Kota pusat Pertumbuhan Nasional
	Bukittinggi (II/C/1)	Pengembangan/peningkatan fungsi kota-kota pusat Pertumbuhan Nasional
	Solok (II/C/2)	Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota-Kota pusat Pertumbuhan Nasional
	Payakumbuh (II/C/2)	Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota-Kota pusat Pertumbuhan Nasional
	Tuapejat (II/C/2)	Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota-Kota pusat Pertumbuhan Nasional

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Lampiran II

Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang bersebelahan langsung dengan Kota Padang, merupakan **PKW** dengan kriteria pengembangan/peningkatan fungsi kota-kota pusat Pertumbuhan Nasional. Selain membagi struktur ruang, RTRWN merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di dalam bumi yang disusun dalam kesatuan wilayah. Wilayah diartikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang

batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional.

Dalam penataan ruang, wilayah dapat dibagi menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung nasional dalam RTRWN terdiri atas:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
2. Kawasan perlindungan setempat;
3. Kawasan konservasi;
4. Kawasan lindung geologi; dan
5. Kawasan lindung lainnya.

Adapun kawasan lindung yang umumnya dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, antara lain:

1. Kawasan konservasi terdiri atas:
 - a. Kawasan suaka alam, yang terdiri atas suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut;
 - b. Kawasan pelestarian alam, yang terdiri atas taman nasional, taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut;
 - c. Kawasan taman berburu; dan
 - d. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang terdiri atas:
 - Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi suaka pesisir, suaka pulau kecil, taman pesisir, dan taman pulau kecil;
 - Kawasan konservasi maritim yang meliputi daerah perlindungan adat maritim dan daerah perlindungan budaya maritim; dan
 - Kawasan konservasi perairan.
2. Kawasan lindung geologi terdiri atas:
 - a. Kawasan cagar alam geologi, meliputi :

- Kawasan keunikan batuan dan fosil;
 - Kawasan keunikan bentang alam; dan
 - Kawasan keunikan proses geologi.
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
3. Kawasan lindung lainnya terdiri dari cagar biosfer, Ramsar, cagar budaya, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan kawasan ekosistem mangrove.

Kawasan lindung yang berada di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kawasan Lindung Nasional di Provinsi Sumatera Barat

No	Kawasan Lindung Nasional	Keterangan
1	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Air Putih	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung suaka margasatwa
2	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Air Tarusan	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung suaka margasatwa
3	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Arau Hilir	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung suaka margasatwa
4	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Barisan I	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung suaka alam
5	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Batang Pangean I	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung suaka alam
6	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Gunung Merapi	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung suaka alam
7	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Gunung Sago	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung suaka alam
8	Kawasan Suaka Alam/Kawasan pelestarian Alam Malampah Alahan Paniang	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung suaka margasatwa
9	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Maninjau Utara-Selatan	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung suaka alam
10	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Pagai Selatan	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung suaka alam
11	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Saibi Sarabua	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung suaka alam
12	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Singgalang Tandikat	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung suaka alam

13	Cagar Alam Lembah Anai (II/B/3)	Pengembangan Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
14	Cagar Alam Batang Pansean II Reg 49 (III/B/3)	Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
15	Cagar Alam Batans Palupuh (II/B/3)	Pengembangan Cagar Alam
16	Cagar Alam Berinein Sati (II/B/3)	Pengembangan Cagar Alam
17	Cagar Alam Lembah Harau (II/B/3)	Pengembangan Cagar Alam
18	Cagar Alam Rimbo Panti (II/B/3)	Pengembangan Cagar Alam
19	Taman Nasional Siberut (II/A/4)	Pengembangan Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
20	Taman Nasional Kerinci Seblat (II/A/4)	Pengembangan Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
21	Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta (II/B/5)	Pengembangan Cagar Alam
22	Taman Wisata Alam Lembah Harau (II/B/6)	Pengembangan Cagar Alam
23	Taman Wisata Alam Mesa Mendune (II/B/6)	Pengembangan Cagar Alam
24	Taman Wisata Alam Rimbo Panti (II/B/6)	Pengembangan Cagar Alam

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Lampiran VIII

Berdasarkan tabel di atas, kawasan lindung nasional yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Air Tarusan dan Taman Nasional Kerinci Seblat (II/A/4). Selain mengatur tentang kawasan lindung, RTRWN juga mengatur kawasan budi daya. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi wilayah tersebut. Dalam penataan ruang, kawasan pariwisata merupakan bagian dari kawasan budi daya. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan kawasan peruntukan pariwisata adalah:

1. Memiliki daya tarik wisata; dan/atau
2. Mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.

RTRWN mengatur bahwa peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan

pariwisata; dan

- d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada butir c. di atas.

Salah satu pembagian kawasan budidaya adalah kawasan andalan yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya. Kawasan andalan dalam RTRWN terbagi atas kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut, seperti dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Kawasan Andalan Nasional di Provinsi Sumatera Barat

No	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan	Keterangan
1	Kawasan Padang Pariaman dan Sekitarnya	Industri (II/D/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan
		Perikanan Laut (II/G/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan
		Pertanian (II/A/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian
		Pariwisata (II/E/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk pariwisata
		Perikanan (II/F/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan
2	Kawasan Agam-Bukit Tinggi (PLTA Kuto Panjang)	Perkebunan (III/B/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan
		Pariwisata (II/E/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk pariwisata
		Pertanian (II/A/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian
		Panas Bumi (II/I/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Panas Bumi
3	Kawasan Mentawai dan Sekitarnya	Pertanian (II/A/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian
		Perikanan (II/F/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan
		Pariwisata (II/E/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk pariwisata
4	Kawasan Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Diatas/ Dibawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung- Ketaping)	Pertambangan (III/C/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk pertambangan
		Pertanian (II/A/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian
		Perkebunan (III/B/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan

		Pariwisata (II/E/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk pariwisata
		Industri (III/D/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan
		Perikanan (II/F/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan
		Panas Bumi (II/I/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Panas Bumi
		Minyak dan Gas Bumi (II/J/1)	Pengendalian Kawasan Andalan untuk Minyak dan Gas Bumi
5	Kawasan Andalan Laut Mentawai-Siberut dan Sekitarnya	Perikanan Laut (II/G/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan
		Pariwisata (II/E/2)	Pengembangan Kawasan Andalan untuk pariwisata

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Lampiran IX

Kawasan andalan nasional di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang mencakup Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pengembangan Kawasan Andalan untuk pariwisata dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan. Selain kawasan andalan, di Provinsi Sumatera Barat juga ditetapkan beberapa kawasan strategis nasional, dengan berbagai sudut kepentingan yaitu:

1. Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh
2. Taman Nasional Kerinci Seblat
3. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Kototabang
4. Kepulauan terluar Sibarubarau dan Sinyanyau
5. Proyek Strategis Nasional Tol Padang – Sicincin

2.1.2 Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas) Tahun 2010 – 2025

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas) disusun sebagai pedoman pembangunan kepariwisataan nasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025, pembangunan kepariwisataan di Indonesia mempunyai visi untuk: “Mewujudkan Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan

daerah, dan kesejahteraan rakyat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah disusun 4 misi pembangunan kepariwisataan nasional, sebagai berikut:

- a. “Destinasi Pariwisata” yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat;
- b. “Pemasaran Pariwisata” yang sinergi unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat;
- c. “Industri Pariwisata” yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. “Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Regulasi, dan Mekanisme Operasional” yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

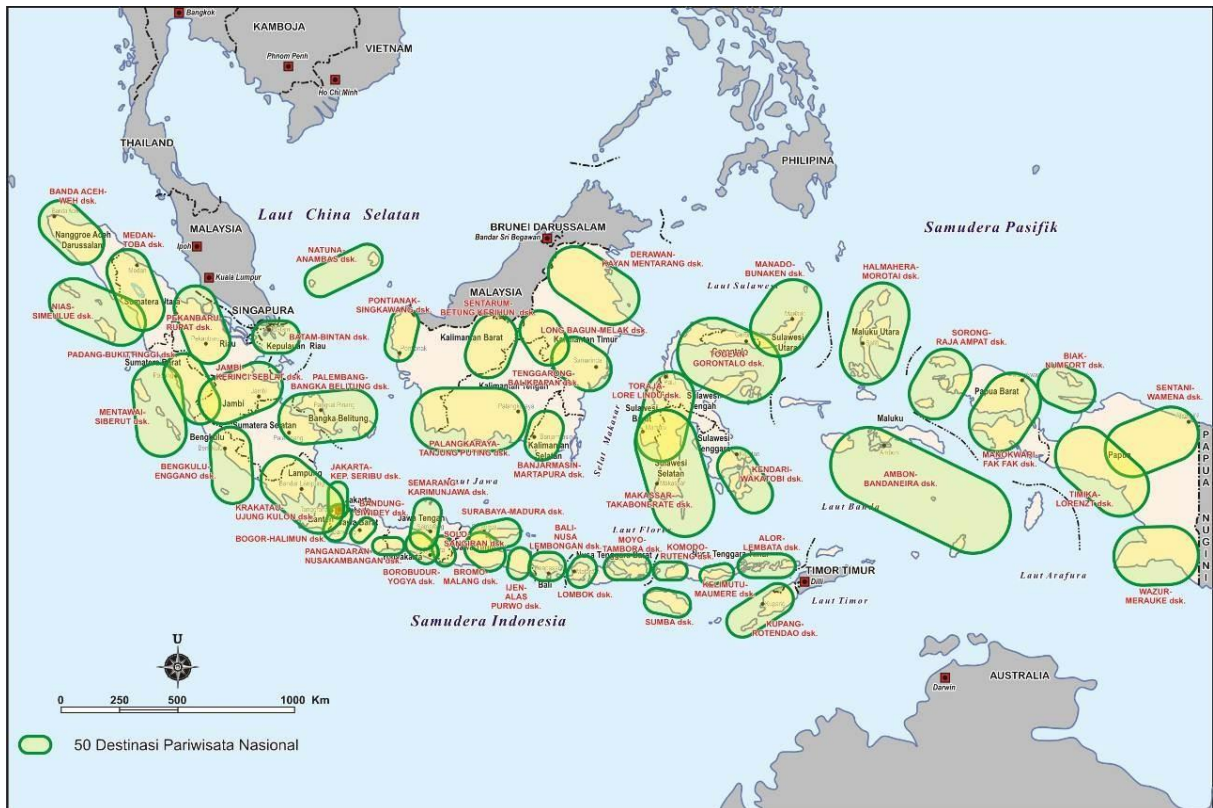
Adapun arah dari pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan atas dasar:

- a. Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. Berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. Sistem tata kelola yang baik;
- d. Terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. Mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Dalam proses pembangunan kepariwisataan di Indonesia, perencanaan perwilayahan pembangunan pariwisata dibagi menjadi:

- a. 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)
- b. 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
- c. 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).

Pembangunan DPN ditujukan untuk pembangunan perwilayahan, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan aksesibilitas pariwisata, pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, dan pembangunan investasi di bidang pariwisata, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.2
Peta Sebaran DPN di Indonesia

Sumber: PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Tahun 2010-2025

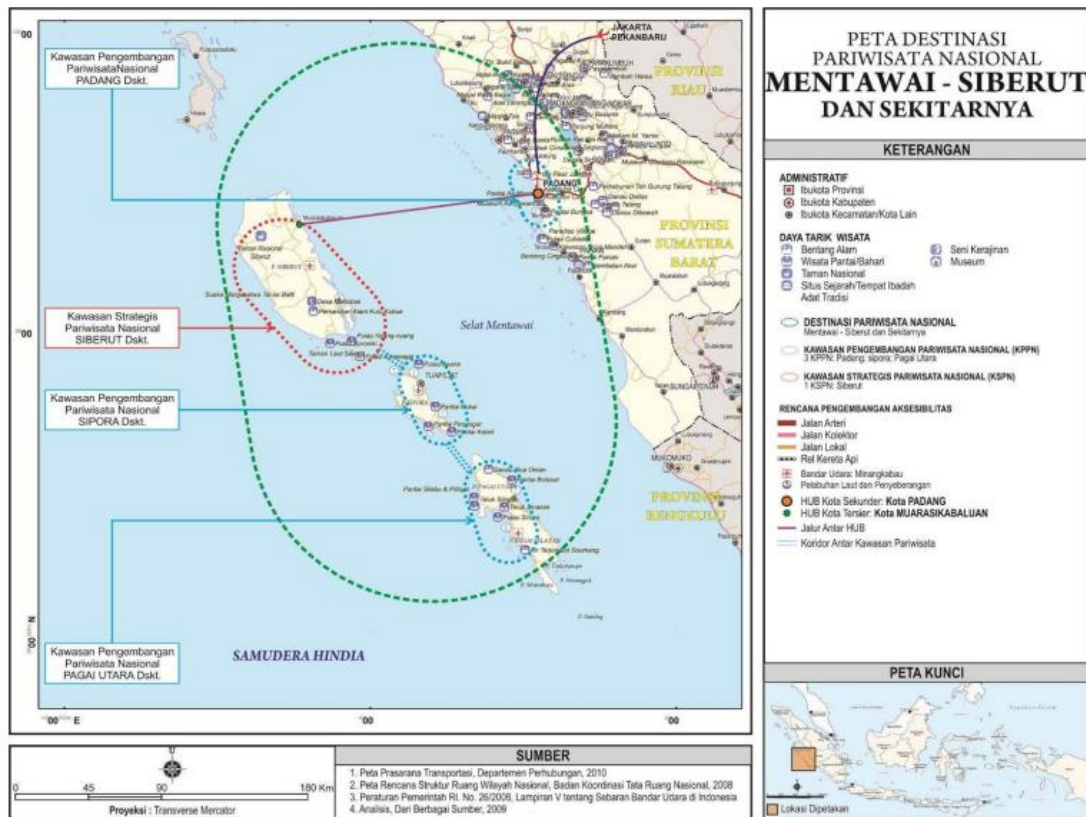
Sesuai ketentuan Ripparnas 2010-2025, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian dari Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu KPPN Pesisir Selatan dan sekitarnya. Hal ini memperlihatkan posisi penting Kabupaten Pesisir Selatan dalam pembangunan kepariwisataan nasional.

Tabel 2.4
DPN, KPPN, dan KSPN di Provinsi Sumatera Barat

No	DPN	KPPN	KSPN
1	DPN Mentawai - Siberut dan sekitarnya	1. KPPN Siberut dan sekitarnya	
		2. KPPN Siberut dan sekitarnya	
		3. KPPN Pagai Utara dan sekitarnya	
2	DPN Padang - Bukittinggi dan sekitarnya	1. KPPN Padang dan sekitarnya	
		2. KPPN Bukittinggi dan sekitarnya	
		3. KPPN Singkarak dan sekitarnya	KSPN. Singkarak dan sekitarnya
		4. KPPN Batu Sangkar dan sekitarnya	
		5. KPPN Maninjau dan sekitarnya	KSPN. Maninjau dan sekitarnya
		6. KPPN Sawahlunto dan sekitarnya	
		7. KPPN Pesisir Selatan dan sekitarnya	

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas, Lampiran II, III

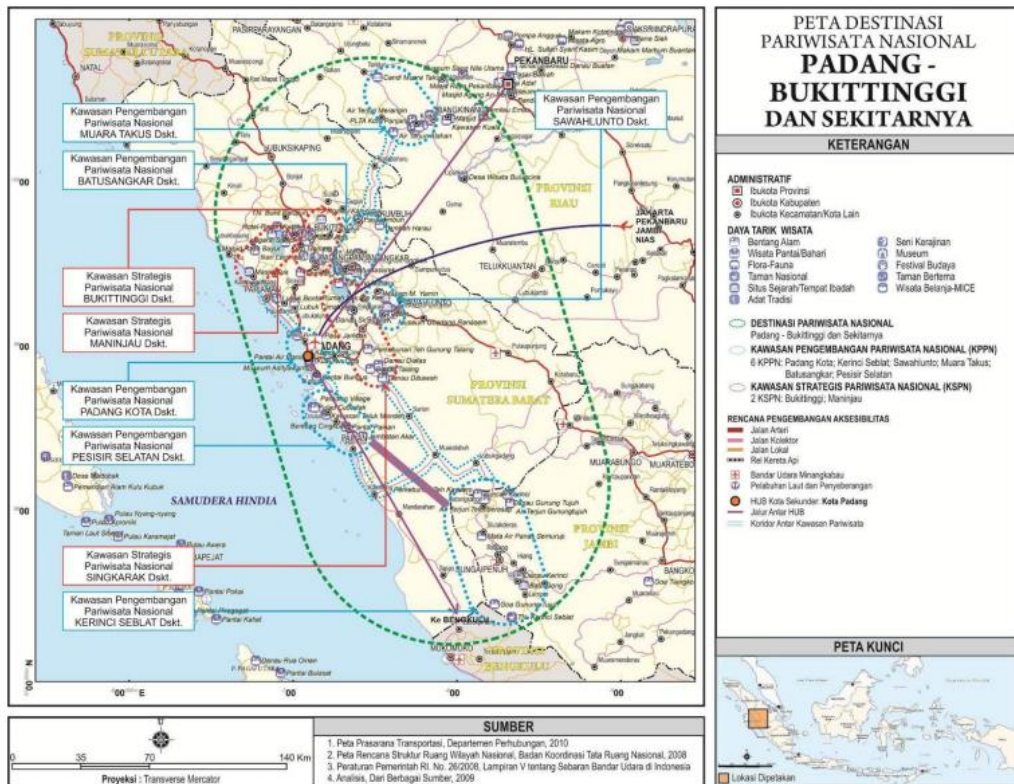
Berikut ini ditampilkan peta DPN Mentawai - Siberut dan sekitarnya dan DPN Padang - Bukittinggi dan sekitarnya yang terletak di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 2.3

Peta DPN Mentawai – Siberut dan Sekitarnya

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Lampiran II



Gambar 2.3
Peta DPN Padang – Bukittinggi dan Sekitarnya
Sumber: PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas Lampiran II

2.2 Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang mengarahkan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan terdapat dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Periode 2021 – 2026, Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032, Perda Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Ripparprov Sumatera Barat 2014-2025.

2.2.1 Kepariwisataaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat yang diatur dalam Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Barat Tahun 2012-2032, mempunyai tujuan penataan ruang wilayah adalah “Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Tahun 2029 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan”.

RTRW Provinsi Sumatera Barat mengadopsi pola penentuan struktur ruang RTRWN dengan menentukan sistem perkotaan PKN, PKW, dan PKL. Berdasarkan ketentuan tersebut, sistem perkotaan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.5
Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat

No	Pusat Pelayanan	Fungsi	Kawasan Perkotaan
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Sumatera Barat, nasional dan internasional	Kota Padang
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa Kabupaten/Kota dalam Sumatera Barat	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Pariaman 3. Kota Sawahlunto 4. Kota Solok 5. Muara Siberut
3	Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh Provinsi (PKWp)	Suatu kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi PKW	1. Kota Payakumbuh 2. Pulau Punjung 3. Tapan 4. Simpang Empat.
4	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota	1. Painan 2. Kota Padang Panjang 3. Lubuk Sikaping 4. Sari Lamak 5. Batusangkar 6. Padang Aro 7. Tuapejat

			8. Lubuk Basung 9. Muaro Sijunjung 10. Lubuk Alung 11. Aro Suka 12. Parik Malintang
--	--	--	---

Sumber: Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW, 2024

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh Provinsi (PKWp) yaitu Tapan, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan. Pengembangan sistem transportasi Provinsi Sumatera Barat yang melalui Kabupaten Pesisir Selatan berupa jaringan jalan bebas hambatan yaitu ruas jalan yang menghubungkan Padang – Pesisir Selatan - Bengkulu. Sedangkan terminal penumpang yang akan dikembangkan berupa :

1. Pembangunan Terminal Regional baru Tipe A di Tapan /Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pengembangan terminal regional tipe B yaitu Terminal Sago di Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya juga dilakukan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Peningkatan jaringan transportasi sungai dan danau ditujukan untuk menunjang kegiatan pariwisata di Danau Maninjau Kabupaten Agam, Danau Singkarak Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Danau Kembar (Danau Diatas dan Danau Dibawah) dan Danau Talang Kabupaten Solok, Danau Buatan Koto Panjang Kabupaten Limapuluh Kota (batas Provinsi Riau), dan Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya, serta peningkatan dermaga sungai dan danau.

Peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi penyeberangan dilakukan melalui peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan yang meliputi:

- a. Pelabuhan Bungus di Kota Padang;
- b. Pelabuhan Tua Pejat di Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Pelabuhan Sikakap di Pulau Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai
- d. Pelabuhan Muara Siberut di Pulau Siberut Kabupaten Kepulauan

Mentawai; dan

- e. Pelabuhan Simailepet di Pulau Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pengembangan jalur baru yaitu lintasan penyeberangan Carocok Painan-Mentawai terutama untuk angkutan barang yang ditunjang oleh angkutan pengumpan antar pulau di Kepulauan Mentawai. Peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana penyeberangan (dermaga), juga dilakukan pengembangan lintasan penyeberangan:

- a. Painan – Mentawai
- b. Mentawai - Padang - Pantai Barat Wilayah Provinsi
- c. Mentawai - Padang - Jakarta

Selanjutnya juga dilakukan pengembangan sistim transportasi laut yang ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan kegiatan sistem perekonomian antar kawasan maupun internasional. Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan /atau pembangunan pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal serta pembangunan pelabuhan baru. Untuk menunjang pengembangan perekonomian daerah, maka pengembangan pelabuhan dilakukan melalui:

- a. Peningkatan pelabuhan Internasional Teluk Bayur yang merupakan pelabuhan Utama serta pengembangan sistem kontainerisasi dengan kapasitas 40 feet
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan nasional /regional yang merupakan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan yaitu Pelabuhan Muara Padang, pelabuhan Panasahan-Corocok Painan, pelabuhan Sioban, pelabuhan Pokai, pelabuhan Tua Pejat, pelabuhan Simailepet, pelabuhan Sikakap, Muara Sikabalu dan Pelabuhan Bake
- c. Pengembangan angkutan wisata ke Kepulauan Mentawai, dan pengembangan angkutan pesisir Pasaman - Tiku - Bungus - Painan, peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelabuhan sesuai fungsi pelabuhan.
- d. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan untuk menunjang

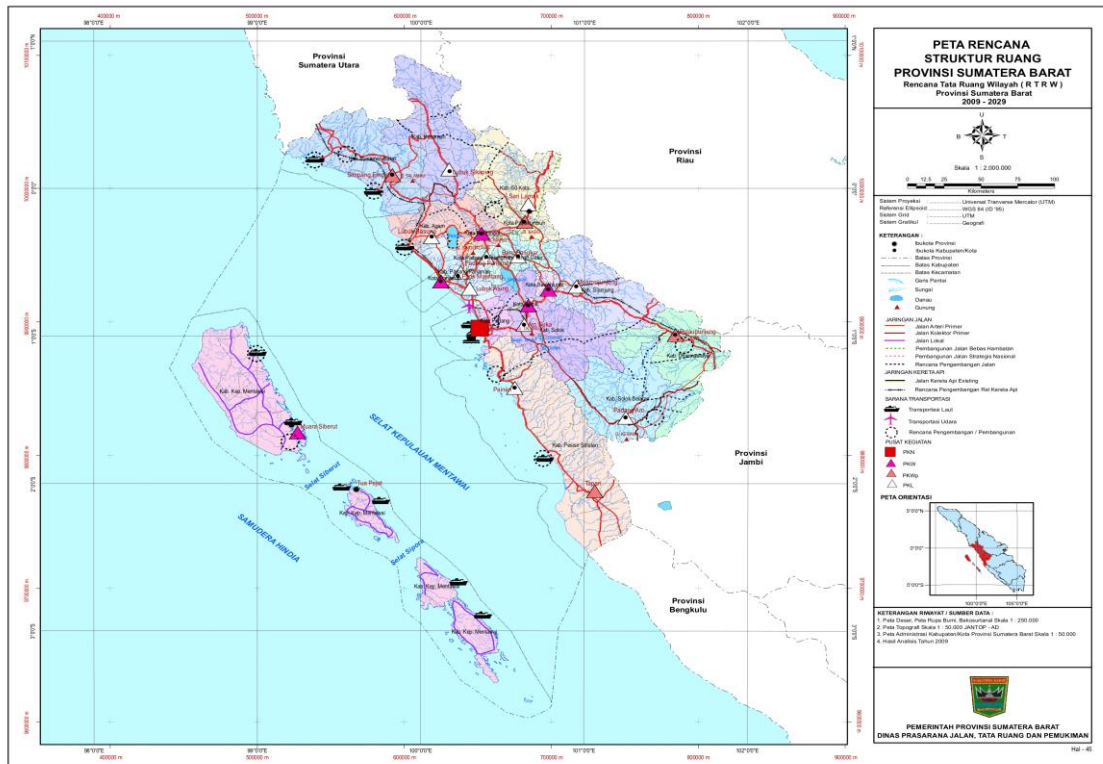
perekonomian daerah antara lain:

- 1) Kabupaten Pasaman Barat, meliputi Pelabuhan Air Bangis dan Pelabuhan Sasak
- 2) Kabupaten Agam, meliputi Pelabuhan Tiku dan Pelabuhan Muaru Putus
- 3) Kabupaten Padang Pariaman, meliputi Pelabuhan Pasir Baru, Pelabuhan Batang Gasan, Pelabuhan Ulakan Tapakis dan Pelabuhan Anai Ketaping
- 4) Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi Pelabuhan Caracok Tarusan, Pelabuhan Caracok Painan, Pelabuhan Muara Batang Kapas, Pelabuhan Surantih, Pelabuhan Pasar Kambang, Pelabuhan Muara Jambu, Pelabuhan Muara Gadang dan Pelabuhan Api-api
- 5) Kabupaten Kepulauan Mentawai, meliputi Pelabuhan Sikakap dan Pelabuhan Tua Pejat
- 6) Kota Padang, meliputi Pelabuhan Bungus, Pelabuhan Muara Anai, Pelabuhan Gaung, Pelabuhan Sungai Pisang dan Pelabuhan Pasie Nan Tigo;
- 7) Kota Pariaman, meliputi Pelabuhan Muaro Pariaman, Pelabuhan Karan Awur dan Pelabuhan Nareh.

Untuk meningkatkan pelayanan angkutan laut, direncanakan pembangunan pelabuhan baru berupa pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan yang meliputi:

- a. Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat
- b. Pelabuhan Malakopak di Kabupaten Kepulauan Mentawai
- c. Pelabuhan Muara Saibi di Kabupaten Kepulauan Mentawai
- d. Pelabuhan Singapokna di Kabupaten Kepulauan Mentawai
- e. Pelabuhan Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai
- f. Pelabuhan Sinakak di Kabupaten Kepulauan Mentawai
- g. Pelabuhan Berilau, Pasapat /Simanganyak, Pei-pe /Teluk Katurai, Taleleu di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Adapun peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.4
Rencana Struktur Ruang Provinsi Sumatera Barat
Sumber: Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW, Lampiran I

Adapun rencana pola ruang di Provinsi Sumatera Barat, terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Penetapan kawasan lindung sebagaimana dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi dan Kabupaten/Kota. Penetapan kawasan budi daya dilakukan dengan mengacu pada kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan kawasan budi daya provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam;
- e. Kawasan lindung geologi; dan

f. Kawasan lindung lainnya.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi:

- a. Kawasan hutan lindung seluas 1.001.780,43 Ha, yang menyebar di seluruh wilayah kabupaten /kota kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan Kota Pariaman
- b. Kawasan bergambut, yang menyebar di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam bagian barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Kawasan resapan air, yang menyebar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang.

Kawasan perlindungan setempat meliputi:

- a. Sempadan pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat
- b. Sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di provinsi, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan
- c. Kawasan sekitar danau /waduk, yaitu Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas dan Danau Dibawah (Danau Kembar), Danau Talang, dan Danau buatan Koto Panjang
- d. Kawasan sempadan mata air yang menyebar di seluruh wilayah provinsi; dan
- e. Kawasan terbuka hijau kota, yang menyebar di kawasan perkotaan dan bukan perkotaan.

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi:

- a. Cagar Alam, yang tetap akan dikembangkan di Cagar Alam Rimbo Panti dan Cagar Alam Malampah Alahan Panjang di Kabupaten Pasaman, Cagar Alam Lembah Anai dan Cagar Alam Baringin Sakti di Kabupaten Tanah Datar, Cagar Alam Batang Pangean I dan Cagar Alam Batang Pangean II di Kabupaten Sijunjung, Cagar Alam Arau Hilir di Kota Padang, Cagar Alam Gunung Sago di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar, Cagar Alam

- Maninjau Utara dan Selatan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman, Cagar Alam Gunung Singgalang Tandikat di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar, Cagar Alam Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Cagar Alam Air Putih dan Cagar Alam Lembah Harau di Kabupaten Limapuluh Kota, Cagar Alam Barisan I di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Cagar Alam Air Tarusan di Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan, Cagar Alam Batang Palupuh di Kabupaten Agam
- b. Kawasan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut di Pulau Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pulau Penyu, Pulau Marak, Pulau Nyamuk di Kabupaten Pesisir Selatan, dan Pulau Panjang di Kabupaten Padang Pariaman
 - c. Kawasan Suaka Alam Selasih Talang di Kabupaten Solok
 - d. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya adalah kawasan konservasi laut daerah Pulau Pasumpahan dan Pulau Pisang, kawasan pengawasan keanekaragaman hayati biota laut di Pulau Sikuai, kawasan konservasi laut daerah Pulau Ujung Agam, daerah perlindungan laut Tiku Agam, kawasan perlindungan laut daerah berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara (Pulau Batu Bakudung), dan perbatasan dengan Provinsi Bengkulu (Pulau Baringin)
 - e. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, berada di daerah Batang Tomak, Air Bangis, dan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat; Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan; sebagian besar kawasan pantai Kepulauan Mentawai; Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Bungus Teluk Kabung di Kota Padang;
 - f. Kawasan Taman Nasional, adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, dan Taman Nasional Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - g. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), adalah Taman Hutan Raya Bung Hatta di Kota Padang;
 - h. Kawasan Taman Wisata Alam, meliputi Taman Wisata Alam Mega Mendung di Kabupaten Tanah Datar, Taman Wisata Alam Lembah Harau di Kabupaten

Limapuluh Kota, Taman Wisata Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman, Taman Wisata Alam Bukit Batu Patah di Kabupaten Tanah Datar; serta taman wisata alam di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi;

- i. Kawasan Taman Wisata Alam Laut di Pulau Pieh Kabupaten Padang Pariaman dan Teluk Saibi Sarabua Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- j. Kawasan Cagar Budaya diarahkan pengembangannya di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- k. Konservasi terumbu karang dan kawasan wisata bahari Pulau Ujung, Pulau Tengah dan Pulau Angso di Kabupaten Padang Pariaman;
- l. Konservasi penyu dan kawasan wisata bahari Pulau Kasiak di Kabupaten Padang Pariaman;
- m. Kawasan konservasi perairan payau Jorong Maligi di Kabupaten Pasaman Barat;
- n. Kawasan konservasi laut daerah Kepulauan Mentawai (lokasi Desa Saibi, Samukop, Saliguma, dan Desa Katurai) di Kabupaten Mentawai;
- o. Kawasan konservasi suaka alam perairan Batang Gasang di Kabupaten Padang Pariaman;
- p. Kawasan konservasi dan wisata laut Pulau Penyu di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- q. Taman wisata perairan Pulau Pieh dan laut disekitarnya di Kabupaten Padang Pariaman.

Kawasan rawan bencana alam meliputi:

- a. Kawasan rawan tanah longsor, tersebar di seluruh wilayah provinsi terutama sepanjang jalur sesar aktif (Patahan Semangko), mulai dari Kabupaten Pasaman sampai pada perbatasan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai wilayah perbatasan Provinsi Riau, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan hingga ke perbatasan Provinsi Bengkulu;
- b. Kawasan rawan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai di

Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- c. Kawasan rawan banjir, tersebar di kawasan Kinali, Air Bangis, dan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat, kawasan Painan, Air Haji, Lunang Silaut, Tarusan, dan Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan, kawasan Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Agam

Kawasan lindung geologi meliputi:

- a. Kawasan cagar alam geologi, adalah kawasan keunikan bentang alam berupa kawasan karst di daerah Kubah Batusangkar, dan bukit-bukit karst di Sungaidareh Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Ngarai Sianok di Kota Bukittinggi, Lembah Harau, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas, dan Danau Dibawah
- b. Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri dari:
 1. Kawasan rawan letusan gunung berapi yang terdapat di kawasan gunung api aktif yaitu kawasan sekitar Gunung Marapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci;
 2. Kawasan rawan gempa bumi sepanjang pantai barat Sumatera mencakup Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 3. Kawasan rawan gerakan tanah tersebar di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif berada di sekitar patahan Semangko yang mencakup wilayah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima

Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kabupaten Solok Selatan;

5. Kawasan rawan bencana tsunami, menyebar diseluruh kawasan pesisir pantai wilayah provinsi termasuk Kepulauan Mentawai beserta pulau-pulau kecil lainnya;
 6. Kawasan rawan abrasi pantai menyebar mulai dari Kota Padang hingga Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan serta Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, meliputi:
1. Kawasan imbuhan air tanah; dan
 2. Sempadan mata air.

Kawasan lindung lainnya meliputi :

- a. Cagar biosfer, di Taman Nasional Siberut;
- b. Taman buru di Bukit Sidoali;
- c. Kawasan perlindungan Plasma Nutfah, adalah kawasan di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan di Kawasan Taman Nasional Siberut;
- d. Terumbu karang, ditetapkan di seluruh kawasan perairan laut yang potensial dan sesuai untuk pengembangan terumbu karang; dan
- e. Alur migrasi hewan laut yang dilindungi.
- f. Lubuk larangan yang terdapat di Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Padang

Selanjutnya diatur juga tentang rencana pengembangan kawasan budi daya yang terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukkan hutan produksi
- b. Kawasan peruntukkan hutan rakyat
- c. Kawasan peruntukkan pertanian
- d. Kawasan peruntukkan perikanan
- e. Kawasan peruntukkan pertambangan

- f. Kawasan peruntukkan industri
- g. Kawasan peruntukkan pariwisata
- h. Kawasan peruntukkan permukiman
- i. Kawasan peruntukkan lainnya

Rencana pengembangan kawasan pariwisata memperhatikan Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) yang terdiri dari :

- a. DPP I, meliputi koridor Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kota Payakumbuh. Dominasi atraksi adalah budaya, belanja, MICE, kerajinan, kesenian, peninggalan sejarah, danau, pegunungan, serta flora dan fauna dengan pusat layanan di Kota Bukittinggi;
- b. DPP II, meliputi koridor Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dominasi atraksi adalah jenis wisata bahari seperti pantai, pulau-pulau, serta MICE, peninggalan sejarah, budaya, kesenian, pegunungan, sungai, dan hutan dengan pusat layanan di Kota Padang;
- c. DPP III, meliputi koridor Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dimana didominasi jenis wisata budaya, peninggalan sejarah, kesenian, rekreasi, danau, agro, olah raga, pegunungan, hutan, dan kerajinan dengan pusat layanan di Batusangkar;
- d. DPP IV, meliputi koridor Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Solok dengan pusat layanan di Arosuka yang didominasi jenis wisata rekreasi danau dan sungai, pegunungan, hutan, agro, taman nasional budaya dan kesenian;
- e. DPP V, meliputi koridor Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya yang didominasi oleh jenis wisata peninggalan sejarah, tambang, rekreasi agro, olah raga, hutan dengan pusat layanan di Kota Sawahlunto;
- f. DPP VI, meliputi Kabupaten Pesisir Selatan dengan pusat layanan di Painan, berupa objek wisata bahari, seperti Kawasan Wisata Mandeh, yang berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Wisata Bahari Wilayah Barat;

- g. DPP VII, meliputi Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan pusat layanan Tua Pejat /Muara Siberut. Sesuai dengan kondisi geografis berupa kepulauan dan berbatasan langsung dengan laut lepas Samudera Hindia, maka kawasan ini didominasi oleh wisata bahari yang dilengkapi dengan wisata budaya, alam laut, dan rekreasi.

Pada Provinsi Sumatera Barat juga telah diatur tentang pengembangan kawasan pariwisata pada kawasan unggulan wisata maupun kawasan potensial wisata, yaitu:

- a. Kawasan Wisata Pesisir Kota Padang;
- b. Kawasan Wisata Mandeh Pesisir Selatan;
- c. Kawasan Wisata Koridor Anai Resort - Minangkabau Village – Amur Sekitarnya;
- d. Kawasan Wisata Teluk Katurai Siberut;
- e. Kawasan Wisata Taman Nasional Siberut;
- f. Kawasan Wisata Kota Tambang Sawahlunto;
- g. Kawasan Wisata Danau Kembar Sekitarnya;
- h. Kawasan Wisata Taman Nasional Kerinci Seblat;
- i. Kawasan Wisata Bukittinggi sekitarnya;
- j. Kawasan Wisata Lembah Harau;
- k. Kawasan Wisata Maninjau Sekitarnya;
- l. Kawasan Wisata Danau Singkarak;
- m. Kawasan Wisata Istana Pagaruyung Sekitarnya;
- n. Kawasan Wisata Perkampungan Lama di Kabupaten Tanah Datar (Balimbing dan Pariangan);
- o. Kawasan Wisata Cagar Alam Rimbo Panti;
- p. Pengembangan paket kereta api wisata Padang – Sawahlunto

Selanjutnya juga telah ditentukan beberapa arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;

- b. Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- d. Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
- e. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
- f. Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.

2.2.2 Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Barat

Penyusunan rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 diatur melalui Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018, merupakan bentuk pendekatan untuk mengintegrasikan sektor yang berkepentingan di wilayah pesisir melalui pengalokasian ruang WP3K untuk aktivitas/sektor tertentu berdasarkan daya dukung dan kesesuaian peruntukannya. Kondisi ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Sumatera Barat, sehingga kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan perlu mempertimbangkan rencana WP3K ini.

RZWP-3-K berfungsi sebagai:

- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Acuan dalam penyusunan RPWP-3-K dan RAPWP-3-K;
- c. Instrumen penataan ruang di perairan pesisir;
- d. Dasar alokasi ruang di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. Dasar pemberian izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelolaan dalam melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir;
- f. Acuan dalam rujukan konflik di perairan pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan

- g. Acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 menjelaskan bahwa zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. Zona Pariwisata, yang selanjutnya disingkat dengan KPU-W adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan untuk kegiatan pariwisata.

Sub zona adalah bagian dari zona dalam pengalokasian ruang wilayah laut. Sub zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat dengan KPU-W-P3K adalah ruang wilayah pantai dan laut pada zona pariwisata yang dialokasikan untuk wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil. Sub zona Wisata Alam Bawah Laut, yang selanjutnya disingkat dengan KPU-W-ABL adalah ruang wilayah laut pada zona pariwisata yang dialokasikan untuk kegiatan wisata alam bawah laut yaitu diving dan snorkling. Sub zona Wisata Olah Raga Air, yang selanjutnya disingkat dengan KPU-W-ORA adalah ruang wilayah laut pada zona pariwisata yang dialokasikan untuk kegiatan wisata olah raga air yaitu surfing atau selancar.

Zona KPU-W terdiri atas sub zona:

- a. KPU-W-P3K (Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
- b. KPU-W-ABL (Wisata Alam Bawah Laut)
- c. KPU-W-ORA (Wisata Olah Raga Air)

Adapun pengembangan zona KPU-W (Zona Pariwisata) adalah:

- a. Sub zona KPU-W-P3K meliputi:
 1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
 - a) Pantai Muaro Bayang;
 - b) Pantai Pasir Batu Putih;
 - c) Pantai Timur Pulau Cubadak;
 - d) Pantai Barat Pulau Cubadak;
 - e) Pantai Sambungo;
 - f) Pantai Salido;
 - g) Pantai Pamutusan;

- h) Pantai Sago;
- i) Pantai Sungai Pinang;
- j) Pantai Pulau Karam;
- k) Pantai Bukit Ameh;
- l) Pantai Mandeh;
- m) Pantai Bukit Rangsam;
- n) Pantai Batu Kalang;
- o) Pantai Sungai Nyalo;
- p) Pulau Semangki Gadang;
- q) Pulau Semangki Ketek;
- r) Pulau Marak;
- s) Pulau Pagang;
- t) Pulau Setan Gadang;
- u) Pulau Setan Ketek;
- v) Pulau Sironjong Gadang;
- w) Pulau Sironjong Ketek;
- x) Pulau Traju;
- y) Pulau Nyamuk;
- z) Pulau Batu Rimau;
- aa) Pulau Batu Basanggua;
- bb) Pulau Batu Dandang Utara;
- cc) Pulau Batu Ajuang Ketek;
- dd) Pulau Sibunta Sungai Pinang;
- ee) Pulau Karanggo;
- ff) Pulau Kumbang;
- gg) Pulau Labuhan Sundai;
- hh) Pulau Nibuang Utara;
- ii) Pulau Batu Rakik-rakik;
- jj) Pulau Batu Sironjong;
- kk) Pulau Babi;
- ll) Pulau Babi Ketek;

- mm) Pulau Nibuang Api-api;
 - nn) Pulau Batu Puti;
 - oo) Pulau Batu Dandang; dan
 - pp) Pulau Batu Dandang Selatan.
2. Kota Padang terdiri dari:
 - a) Pantai Padang;
 - b) Pantai Pasir Jambak;
 - c) Ujung Batu, Pasie Nan Tigo; dan
 - d) Pulau Sao.
 3. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:
 - a) Pantai Arga;
 - b) Pantai Arta;
 - c) Pantai Ketaping; dan
 - d) Pantai Tiram.
 4. Kabupaten Agam terdiri dari:
 - a) Pantai Bandar Gadang;
 - b) Pantai Muaro Putuih;
 - c) Pantai Pasie Paneh;
 - d) Pantai Pasie Tiku;
 - e) Pantai Jorong Ujuang Labuang;
 - f) Pantai Masang;
 - g) Pantai Gasan Kaciak;
 - h) Pantai Labuhan; dan
 - i) Pantai Subang-subang.
 5. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:
 - a) Pantai Muara Binguang;
 - b) Pantai Sikabau;
 - c) Pantai Sasak;
 - d) Pantai Maligi;
 - e) Pantai Sikilang;
 - f) Pantai Air Bangis;

- g) Pulau Panjang;
 - h) Pulau Unggeh;
 - i) Pulau Harimau;
 - j) Pulau Nibung Ateh;
 - k) Pulau Nibung Bawah; dan
 - l) Pulau Tamiang.
6. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:
- a) Pantai Sibigau, Desa Malakopak;
 - b) Pantai Silabu, Desa Silabu;
 - c) Pantai Lobajat, Desa Sigapokna;
 - d) Pantai Masilok, Desa Katurai;
 - e) Pantai Tanjung Malilimok, Desa Katurai;
 - f) Pantai Teluk Sarabua, Desa Saliguma;
 - g) Pantai Teluk Pokai;
 - h) Pantai Katiet, Desa Bosua;
 - i) Pulau Tanopo; dan
 - j) Pulau Siruamata, Desa Beriuleu.
- b. Sub zona KPU-W-ABL meliputi:
1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:
 - a) Pulau Semangki Gadang;
 - b) Pulau Semangki Ketek;
 - c) Pulau Sironjong Gadang;
 - d) Pulau Setan Gadang;
 - e) Pulau Setan Ketek;
 - f) Pulau Marak;
 - g) Pulau Pagang; dan
 - h) Pulau Taraju.
 2. Kabupaten Pasaman Barat yaitu Pulau Panjang.
 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:
 - a) Pulau Bitoyat Sabeu;
 - b) Gosong Sibaru Baru, Desa Bulasat;

- c) Pulau Sirpasabela Sigoiso;
 - d) Singingi, Desa Sinaka;
 - e) Desa Makalo;
 - f) Siopa, Desa Malakopak;
 - g) Desa Malakopak;
 - h) Pulau Labatjau, Desa Sinaka;
 - i) Pulau Tanopo, Desa Sinaka;
 - j) Pulau Sirpasabela, Desa Sinaka;
 - k) Pulau Silau, Desa Bulasat;
 - l) Pulau Beriloga Sigoiso, Desa Sinaka;
 - m) Pulau Beriloga Sabeu, Desa Sinaka;
 - n) Desa Sigapokna dan Perairan Pulau Simasingit;
 - o) Desa Sigapokna;
 - p) Pokai, Desa Muara Sikabalu;
 - q) Desa Malancan;
 - r) Pulau Pela, Desa Malancan;
 - s) Binua, Desa Sikakap;
 - t) Siatanusa, Desa Sikakap; dan
 - u) Desa Nemnem Leu.
- c. Sub zona KPU-W-ORA yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:
1. Perairan Sekitar Pulau Siumang Timur;
 2. Perairan Sekitar Desa Malakopak;
 3. Perairan Sekitar Pulau Pittoijat Sabeu;
 4. Perairan Sekitar Pulau Sibigeu;
 5. Perairan Sekitar Pulau Solau;
 6. Perairan Sekitar Pulau Beusag;
 7. Perairan Sekitar Pulau Libbut;
 8. Perairan Sekitar Dusun Gobi Bosua;
 9. Perairan Sekitar Ujung Tanjung Selatan Pulau Beusag;
 10. Perairan Sekitar Dusun Katiet;
 11. Perairan Sekitar Tanjung Matababairak;

12. Perairan Sekitar Desa Betumonga; dan

13. Perairan Sekitar Pulau Nuko.

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan sekitarnya yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) terdiri dari :

1. KKP3K-TP-PDG di Kota Padang meliputi:
 - a) Pulau Pasumpahan
 - b) Pulau Sikuai;
 - c) Pulau Sirandah;
 - d) Pulau Sironjong;
 - e) Pulau Ular;
 - f) Pulau Bindalang;
 - g) Pulau Sibonta; dan
 - h) Pulau Setan.
2. KKP3K-TP-BG di Padang Pariaman meliputi:
 - a) Gosong Kariang;
 - b) Gosong Penyu;
 - c) Gosong Sirundang Ketek;
 - d) Pantai Korong Batang Gasan; dan
 - e) Pantai Korong V Malai Suku.

Adapun Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. KKP-N-PIEH di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman meliputi:
 - a) Pulau Toran;

- b) Pulau Pandan;
 - c) Pulau Air;
 - d) Pulau Pieh; dan
 - e) Pulau Bando.
2. KKP-D-KM di Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi:
- a) Pulau Jujuat;
 - b) Pulau Niau;
 - c) Pulau Koroniki;
 - d) Pulau Silaoinak;
 - e) Pulau Nyang-Nyang;
 - f) Pulau Mainuk;
 - g) Pulau Botik;
 - h) Pulau Panggalat Sabeu;
 - i) Pulau Karangmajat;
 - j) Pulau Batu Tongga;
 - k) Pulau Siburu/Panjang;
 - l) Pulau Simakakang;
 - m) Pulau Hawera/Putotogat;
 - n) Pulau Pitojat Sigoisok;
 - o) Pulau Pitojat Sabeu;
 - p) Pulau Pamderai;
 - q) Pulau Maseai;
 - r) Pulau Logui;
 - s) Pulau Beuasak;
 - t) Pulau Rau Sabeu;
 - u) Pulau Bukkusimapususika Berek;
 - v) Pulau Pananggalat Sigoiso;
 - w) Pulau Sibitti;
 - x) Pulau Bukkusimapususima Piok;
 - y) Pulau Berekai;
 - z) Pulau Bukkusimapususitka Yaman;

- aa) Pulau Umat Siteut; dan
 - bb) Pulau Rausitkalaut.
3. KKP-SAP-PS di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi:
- a) Pulau Aua Gadang;
 - b) Pulau Aua Ketek;
 - c) Pulau Penyu;
 - d) Pulau Kerabak Ketek;
 - e) Pulau Kerabak Gadang;
 - f) Pulau Gosong;
 - g) Pulau Katangkatang;
 - h) Pulau Beringin;
 - i) Pulau Cingkuak;
 - j) Pulau Batu Kereta;
 - k) Pulau Batu Badatuih;
 - l) Pulau Batu Mandi Ateh;
 - m) Pulau Batu Mandi Tengah; dan
 - n) Pulau Nibuang Sungai Nipah.
4. KKP-D-PR di Kota Pariaman meliputi:
- a) Pulau Kasiak;
 - b) Pulau Tengah;
 - c) Pulau Ujung; dan
 - d) Pulau Angso.
5. KKP-D-AG di Kabupaten Agam meliputi:
- a) Pulau Tengah; dan
 - b) Pulau Ujung.
6. KKP-D-PB di Kabupaten Pasaman Barat meliputi:
- a) Pulau Pigago;
 - b) Pulau Pangka; dan
 - c) Pulau Talua.

2.2.3 Kepariwisataaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat 2025

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda) Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Barat 2014-2025 adalah pokok-pokok kebijaksanaan dan pengembangan yang merupakan perwujudan, pemanfaatan, dan perencanaan pembangunan pariwisata yang di dalamnya meliputi masalah tata ruang, tata guna tanah dan rencana fisik serta penetapan wilayah yang mendapat prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan, pengendalian, dan pengawasan pengembangan kepariwisataan daerah.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat 2014-2025 adalah:

- a. Pariwisata berkelanjutan
- b. Pariwisata berbasis mitigasi bencana; dan
- c. Pariwisata berbasis norma agama dan budaya.

Visi pembangunan kepariwisataan Sumatera Barat tahun 2020 merupakan penjabaran keadaan yang ingin dicapai oleh kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan Visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat adalah: “Terwujudnya Sumatera Barat sebagai destinasi utama Pariwisata berkelas dunia yang berbasis agama dan budaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat”.

Adapun misi pembangunan kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat seperti yang tercantum dalam Ripparprov tersebut dijabarkan pada tabel berikut ini:

- a. Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berbasis agama dan budaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Mengembangkan Pemasaran Pariwisata secara selektif, fokus, sinergis, efektif

- dan efisien berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif produk wisata;
- c. Mengembangkan Industri Pariwisata yang profesional dan berdaya saing, mampu menggerakkan kemitraan usaha yang berwawasan lingkungan; dan
 - d. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dengan pola kemitraan, kualitas manajemen, regulasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang bersih, aman, nyaman dan bebas maksiat sehingga mampu memenuhi kebutuhan ibadah wisatawan dan menggerakkan perekonomian;
- b. Mewujudkan optimalisasi dan ekstensifikasi pasar potensial Pariwisata melalui strategi pemasaran bersama;
- c. Mewujudkan Industri Pariwisata sebagai penggerak utama kegiatan Kepariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi; dan
- d. Mengembangkan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan usaha Kepariwisata yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan Kepariwisata Provinsi di Provinsi Sumatera Barat adalah

- a. Terwujudnya Destinasi Pariwisata sebagai penggerak perekonomian;
- b. Terwujudnya optimalisasi dan ekstensifikasi pasar sebagai dampak strategi pemasaran bersama;
- c. Meningkatnya peran industri Pariwisata dalam memajukan perekonomian daerah; dan
- d. Meningkatnya produktifitas usaha Kepariwisata yang berkelanjutan berbasis profesionalitas kelembagaan.

Sasaran pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat meliputi:

- a. Terwujudnya Destinasi Pariwisata sebagai penggerak perekonomian
- b. Terwujudnya optimalisasi dan ekstensifikasi pasar sebagai dampak strategi pemasaran bersama

- c. Meningkatnya peran industri Pariwisata dalam memajukan perekonomian daerah
- d. Meningkatnya produktifitas usaha Kepariwisataaan yang berkelanjutan berbasis profesionalitas kelembagaan

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi: 1) pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata, DPP, KSPP, dan KPPP. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataaan yang didasarkan atas analisa kualitas destinasi beserta daya dukungnya yang terbagi atas lima perwilayahan kepariwisataaan. Pusat Pelayanan Primer adalah pintu gerbang masuk wisatawan, pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan pusat penyebaran pariwisata ke kabupaten kota. Pusat Pelayanan Sekunder adalah pusat pertumbuhan pariwisata di wilayah tertentu atau pusat kegiatan wilayah dari provinsi.

Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata dan kawasan potensi pengembangan pariwisata yang telah berkembang ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatifnya, menjadi pemicu tujuan perjalanan wisatawan mancanegara dan domestik, karena tema pengembangan pariwisatanya. DPP ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan/atau lintas kabupaten/kota yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata provinsi, yang diantaranya merupakan KSPP;
- b. Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas serta membentuk jejaring produk pariwisata dalam bentuk paket perjalanan wisata dan pola kunjungan wisatawan ;
- c. Memiliki jaringan transportasi sebagai elemen pengikat, aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan
- d. Memiliki tema produk Pariwisata yang melekat kuat sebagai komponen

pencitraan kawasan Pariwisata yang mendorong kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara.

Perwilayahan pembangunan DPP di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

- a. DPP Padang dan sekitarnya mencakup wilayah Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dengan tema utama kawasan pengembangan destinasi pantai dan pulau (*Marine Tourism*)
- b. DPP Bukittinggi dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Taman Bumi (*Geopark*)
- c. DPP Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan minangkabau tempo dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*)
- d. DPP Sawahlunto dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan wisata warisan budaya tambang batu bara (*Coal Mining Heritage Tourism*)
- e. DPP Kepulauan Mentawai dan sekitarnya yang mencakup wilayah Sipora, Siberut, Pagai Utara dan Pagai Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan destinasi selancar dan ombak (*Whitesand Tourism*)

Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan provinsi. KSPP ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan/atau lintas kabupaten/kota yang memiliki fungsi utama pariwisata provinsi atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata.
- b. Mempunyai nilai strategis dan pengaruh penting dari beberapa aspek seperti pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan provinsi.

KSPP meliputi :

- a. KSPP Mandeh dan sekitarnya;
- b. KSPP Bukittinggi dan sekitarnya;
- c. KSPP Maninjau dan sekitarnya;
- d. KSPP Singkarak dan sekitarnya;
- e. KSPP Danau Kembar dan sekitarnya;
- f. KSPP Siberut dan sekitarnya; dan
- g. KSPP Sawahlunto dan sekitarnya.

Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. KPPP ditetapkan dengan kriteria:

- a. Ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya;
- b. Memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
- c. Memiliki wisata unggulan dan pendukung;
- d. Memiliki target wisatawan yang jelas; dan/atau
- e. Memiliki sistem keterkaitan pariwisata dengan kawasan pariwisata di sekitarnya.

KPPP meliputi :

- a. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang- Kota Tua dan sekitarnya ;

- b. Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh - Carocok Painan dan sekitarnya
- c. Kawasan pariwisata bahari Pantai Gandoriah - Tiram dan sekitarnya;
- d. Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau - Tarusan Kamang dan sekitarnya
- e. Kawasan geowisata dan budaya Silokek, Kampung Padang Ranah - Candi Padang Roco dan sekitarnya
- f. Kawasan geowisata Harau-Kelok Sembilan - Ngalau Indah dan sekitarnya;
- g. Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak - Talamau dan sekitarnya ;
- h. Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang – Goa Batu Kapal-TNKS dan sekitarnya;
- i. Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan sekitarnya;
- j. Kawasan heritage Istano Basa Pagaruyuang – Nagari Tuo Pariangan - PDIKM dan sekitarnya ;
- k. Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak - Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya;
- l. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator - Rimbo Panti dan sekitarnya ;
- m. Kawasan Gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya; dan
- n. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto dan sekitarnya

2.3 Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan

Rencana pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan erat dengan rencana pembangunan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan. Dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dikaji arah pembangunan pariwisata dalam rencana pembangunan jangka menengah

daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025 yang tertuang pada Perda Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030 yang tertuang pada Perda Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARKAB) Pesisir Selatan 2015-2025 yang tertuang pada Perda Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2015.

2.3.1 Kepariwisataaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Selanjutnya RPJMD nantinya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan lainnya serta acuan penyusunan RAPBD Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tertuang dalam Perda Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Pesisir Selatan Periode 2021-2026. RPJMD Pesisir Selatan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. RPJMD Pesisir Selatan merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pesisir Selatan dan Wakil Bupati. Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026, yaitu: **“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**

Adapun misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Pada misi ke-4, mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. Pada misi keempat ini terdapat dua kata kunci (1) Wisata yang Nyaman berkesan, dan (2) Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi bagi kesejahteraan. Membangun sektor pariwisata, tidak bisa dilepaskan dengan membangun manusia. Paradigma yang selama ini beranggapan bahwa membangun pariwisata itu lebih terfokus pada pembangunan destinasi dan infrastruktur saja perlu digeser kepada paradigma baru bahwa fokus utama pembangunan pariwisata itu adalah pembangunan manusianya (pelakunya). Oleh karena itu arah pengembangan kepariwisataan ke depan lebih dititikberatkan kepada pembenahan manajemen pengelolaan destinasi, penguatan peran pentahelix dan pemberdayaan masyarakat pelaku wisata.

Ke depan, Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi berfokus pada upaya menjual keindahan alam semata, namun akan ditingkatkan pada upaya menjual keunikan ragam budaya, keramahtamahan masyarakat, kenyamanan destinasi dan kreatifitas masyarakat dan generasi muda. Karena itu kedepannya akan diberikan perhatian yang lebih kepada upaya pemberdayaan masyarakat pelaku wisata, pengembangan potensi kekayaan budaya dan kearifan lokal serta memperkuat peran nagari dalam memanfaatkan peluang daya ungkit pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata ini.

Dengan semakin meningkatnya kualitas masyarakat yang mengamalkan Sapta Pesona, maka wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dan terkesan

sehingga dapat tinggal lebih lama dan akan berkunjung kembali ke Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga harapan bahwa Pesisir Selatan menjadi daerah wisata favorit yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dapat terwujud.

Upaya untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan target 7.200 orang, pada tahun 2026.

Rencana peruntukan kawasan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas lebih kurang 805 hektar, yang dikembangkan melalui pengembangan:

1. Destinasi Wisata, yang meliputi:
 - a. Destinasi utama wisata bahari Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - b. Destinasi utama Kawasan Wisata Carocok di Kecamatan IV Jurai;
 - c. Destinasi utama kawasan wisata Pasir Putih Kambang di Kecamatan Lengayang;
 - d. Destinasi utama Rumah Gadang Mande Rubiah di Kecamatan Lunang.
2. Kawasan Strategis Pariwisata
 - a. Kawasan strategis pariwisata berupa objek wisata yang terdapat di Kecamatan Bayang dan Bayang Utara;
 - b. kawasan strategis pariwisata berupa objek wisata yang berada di Kecamatan Batang Kapas dan Sutera;
 - c. Kawasan strategis pariwisata berupa objek wisata yang berada di Kecamatan Ranah Pesisir, serta yang menjadi kawasan potensial pariwisata adalah objek wisata yang berada di Kecamatan Linggo Sari Beganti; dan
 - d. Kawasan strategis pariwisata berupa objek wisata yang berada di Kecamatan Airpura, Kecamatan Silaut, Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Basa IV Balai Tapan.
3. Kawasan Potensial Pariwisata berupa objek wisata yang berada pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.

2.3.2 Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2040

RTRW Kabupaten Pesisir Selatan adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pantai barat bagian selatan Provinsi Sumatera Barat menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai gerbang masuk wilayah Selatan Provinsi Sumatera Barat yang perlu didukung penyusunan konsep RTRW yang mampu memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan serta kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan seperti halnya kebutuhan kesediaan lahan, rencana struktur ruang, pola ruang serta kawasan strategis.

Oleh karena itu agar peranan Perda RTRW Kabupaten Pesisir Selatan dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam bidang tata ruang dapat terpenuhi perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Pesisir Selatan dengan kegiatan pemantauan, penelaahan serta dengan menghormati hak perorangan atau lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum adat atau kebiasaan yang berlaku.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada RTRW Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030 merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020.

Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat ataupun di laut yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Strategi perwujudan pengembangan kawasan wisata yang terpadu antara daya dukung lingkungan, pengembangan ekonomi dan sosial budaya melalui:

1. Menetapkan dan mengembangkan kawasan wisata unggulan yang berwawasan lingkungan;
2. Mengembangkan industri pariwisata melalui pengembangan wilayah berbasis kawasan; dan
3. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.

Kawasan pariwisata memperhatikan kawasan dan jenis wisata yang dikembangkan melalui destinasi pariwisata yang meliputi;

- a. Kawasan strategis pariwisata Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan;
- b. Kawasan wisata Carocok di Kecamatan IV Jurai;
- c. Kawasan wisata Pasir Putih Kambang di Kecamatan Lengayang; dan
- d. Rumah Gadang Mande Rubiah di Kecamatan Lunang.

Sistem perwilayahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam RTRW tersebut meliputi PKL, PPK, PPL sebagaimana diterangkan berikut ini.

- a. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan Kabupaten dan beberapa kecamatan.
- b. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa nagari.
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nagari atau antar nagari.

Untuk lebih jelasnya tentang PKL, PPK, PPL dapat dilihat dalam

Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Sistem Perwilayahan Kabupaten Pesisir Selatan

Sistem Perwilayahan	Lokasi
PKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Painan 2. Kambang 3. Tapan
PPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarusan di Kecamatan Koto XI Tarusan; 2. Pasar Baru di Kecamatan Bayang; 3. Inderapura di Kecamatan Pancung Soal; dan 4. Lunang di Kecamatan Lunang
PKL	<ol style="list-style-type: none"> a. Barung-barung Belantai di Kecamatan Koto XI Tarusan; b. Asam Kumbang di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara; c. Lumpo pada di Kecamatan IV Jurai; d. Pasar Kuok di Kecamatan Batang Kapas; e. Surantih di Kecamatan Sutera; f. Amping Parak di Kecamatan Sutera; g. Koto Baru di Kecamatan Lengayang; h. Lubuk Sariak di Kecamatan Lengayang; i. Lakitan di Kecamatan Lengayang; j. Balai Salasa di Kecamatan Ranah Pesisir; k. Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti; l. Muaro Sakai di Kecamatan Pancung Soal; m. Sindang di Kecamatan Lunang; n. Silaut di Kecamatan Silaut; o. Kumbang di Kecamatan Lunang; p. Tamuan di Kecamatan Air Pura; q. Pasar Beriang di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan r. Punggasan di Kecamatan Linggo Sari Baganti

BAB 3

KONDISI WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

3.1 Kondisi Fisik

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan terletak di bagian Selatan Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada koordinat $0^{\circ} 59' - 2^{\circ} 28,6'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 19' - 101^{\circ} 18'$ Bujur Timur, dan memiliki luas wilayah $\pm 5.794,89$ km² atau sebesar 13,70 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat, termasuk di dalamnya sekitar 25 pulau (kecil), serta luas perairan (laut) $\pm 84,312$ km² dengan panjang pantai ± 234 km yang memiliki 47 pulau-pulau kecil dengan luas $\pm 1.212,67$ km². Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Untuk kondisi topografi atau ketinggian tanah berkisar antara 0 - 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl). Daerah ini merupakan dataran rendah dan berbukit, yang merupakan perpanjangan dari Bukit Barisan. Batas-batas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara geografis sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko (Provinsi Bengkulu)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Kerinci (Provinsi Jambi)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

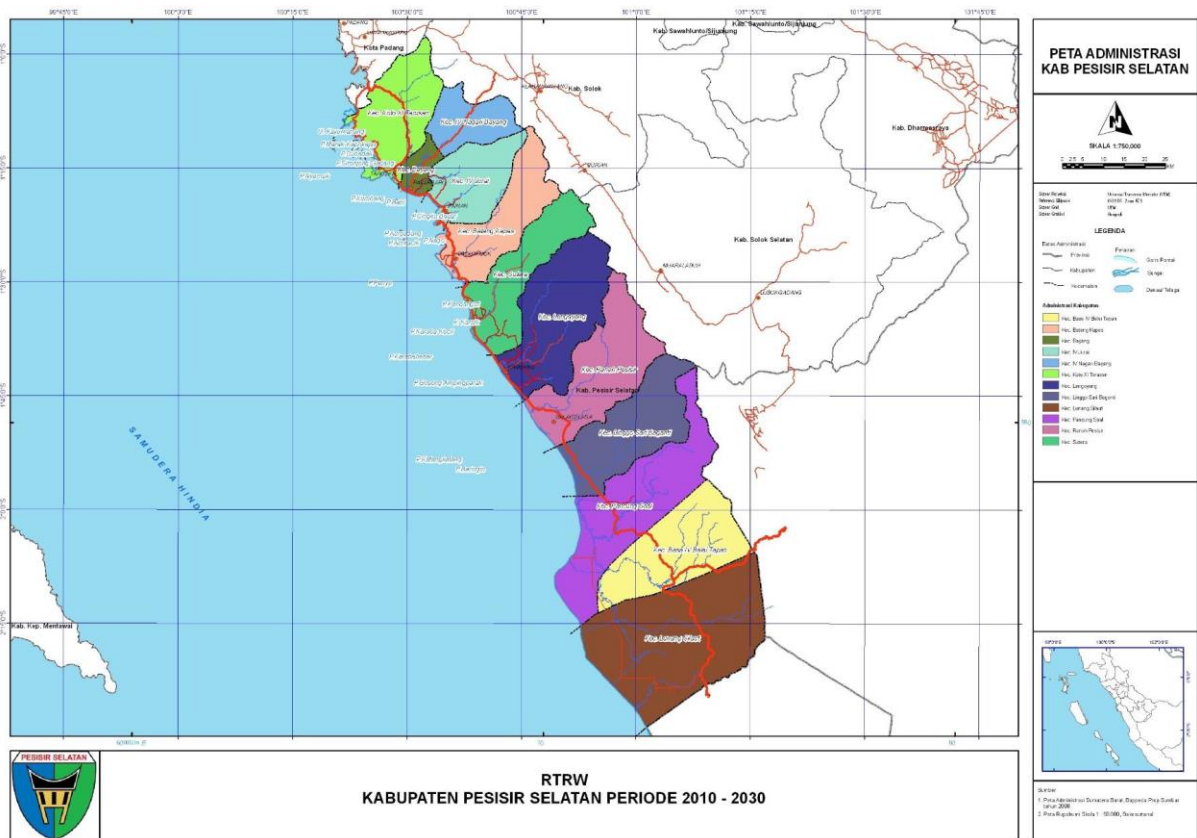
Sedangkan secara administrasi terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Nagari, lebih jelasnya mengenai letak dan luas wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Daftar Kecamatan, Nagari, Kampung dan Luas Wilayah
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Nagari	Kampung	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
1	Silaut	10	27	365,50	6,36
2	Lunang	10	28	564,00	9,81
3	Basa IV Balai Tapan	10	20	300,93	5,23
4	Ranah IV Hulu Tapan	10	20	376,57	6,55
5	Pacung Soal	10	24	426,10	7,41
6	Airpura	10	20	314,00	5,46
7	Linggo Sari Baganti	16	43	315,41	5,49
8	Ranah Pesisir	10	27	564,39	9,82
9	Lengayang	9	45	590,60	10,27
10	Sutera	12	32	445,65	7,75
11	Batang Kapas	9	29	359,07	6,24
12	IV Jurai	20	52	373,80	6,50
13	Bayang	17	45	77,50	1,35
14	IV Nagari Bayang Utara	6	17	250,74	4,36
15	Koto XI Tarusan	23	51	425,63	7,40
Jumlah		182	480	5.794,89	100,00

Dari tabel 3.1 diatas, diketahui bahwa Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lengayang (590,60 Km²) dan Kecamatan Ranah Pesisir (564,39 Km²) serta Kecamatan Lunang (564,00 Km²). Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Bayang dengan luas (77,50 Km²) dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan luas (250,74 Km²).

Dari jumlah nagari dan kampung, Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan nagari yang terbanyak yaitu, mempunyai 23 (dua puluh tiga) nagari dan 51 (lima puluh satu) kampung. Kecamatan IV Jurai merupakan Kecamatan yang mempunyai nagari terbanyak kedua setelah Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu 20 (dua puluh) nagari dan 52 (lima puluh dua) kampung, sedangkan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara merupakan kecamatan yang memiliki nagari terkecil yaitu 6 (enam) nagari dan 17 (tujuh belas) kampung.



Gambar 3.1
RTRW Kabupaten Pesisir Selatan

3.1.1 Topografi

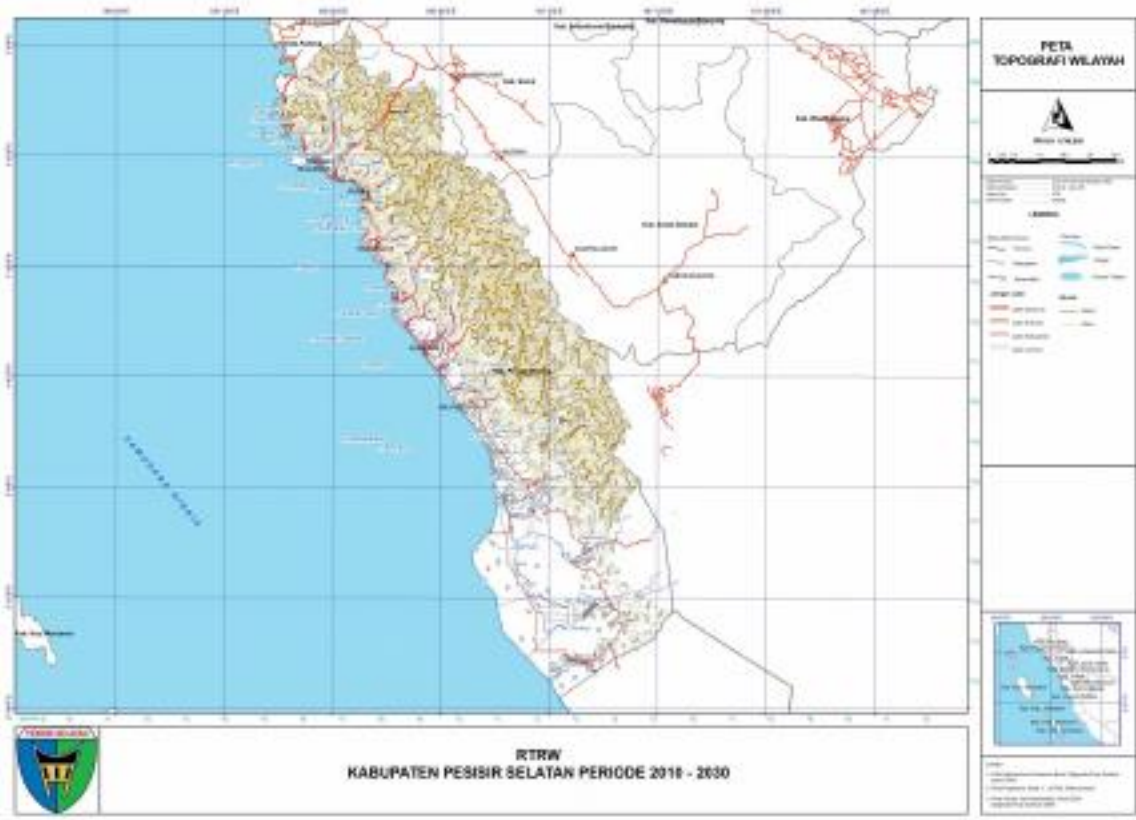
Kabupaten Pesisir Selatan memiliki garis pantai yang panjang membentang sepanjang pantai barat Sumatra. Garis pantai ini mencakup berbagai pantai berpasir yang indah serta formasi batuan dan teluk yang menawarkan potensi besar untuk pariwisata bahari. Bagian timur kabupaten ini didominasi oleh Pegunungan Bukit Barisan, yang membentang dari utara ke selatan Sumatra. Pegunungan ini menghadirkan topografi yang bergelombang hingga berbukit-bukit dengan ketinggian yang bervariasi.

Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Sumatera, juga berada di dekat kawasan ini, meskipun sebagian besar berada di Provinsi Jambi. Gunung dan perbukitan ini menawarkan potensi wisata alam seperti pendakian, wisata ekologi, dan pengamatan alam. Pesisir Selatan juga memiliki beberapa wilayah dataran rendah dan lembah subur yang berada di antara pegunungan dan wilayah pesisir.

Lembah-lembah ini sering dialiri sungai-sungai yang mengalir dari perbukitan ke laut. Lembah-lembah subur ini mendukung aktivitas pertanian, terutama sawah dan perkebunan, yang menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal sekaligus menawarkan lanskap yang indah untuk agrowisata.

Terdapat banyak sungai yang mengalir dari wilayah pegunungan menuju ke laut, melewati lembah-lembah yang indah. Sungai-sungai seperti Batang Tarusan dan Batang Lumbo seringkali juga membentuk air terjun di beberapa titik. Air terjun seperti Air Terjun Bayang Sani dan Air Terjun Timbulun menawarkan keindahan alam yang menjadi daya tarik wisata. Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki beberapa pulau kecil di lepas pantainya, seperti Pulau Cubadak dan Pulau Pagang, yang menjadi daya tarik wisata bahari eksklusif. Pulau-pulau ini terkenal dengan pantai pasir putih dan keindahan bawah laut yang kaya dengan terumbu karang.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah dengan kondisi topografi bervariasi mulai dari dataran rendah, datar, bergelombang, perbukitan yang merupakan perpanjangan bukit barisan dengan elevasi 0–1.000 m dpl. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berbukit dengan ketinggian berkisar 0 – 1.000 M dari permukaan laut, kondisi topografi wilayah memiliki keberagaman, dengan kemiringan lereng berkisar antara 0-40 persen dan 40 %

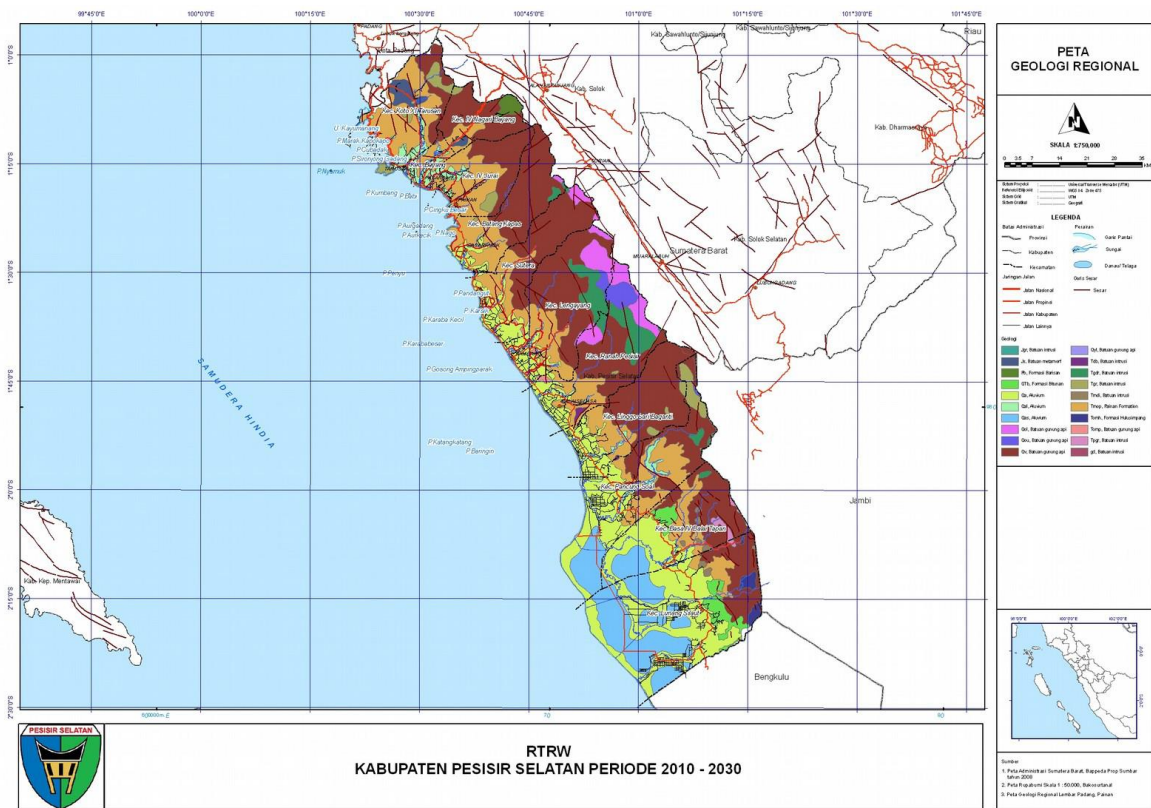


Gambar 3.2
Topografi Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

3.1.2 Geologi dan Geomorfologi

Kondisi geologi dan geomorfologi Kabupaten Pesisir Selatan berperan penting dalam menentukan bentuk bentang alam, potensi sumber daya alam, dan tingkat kerawanan terhadap bencana. Berdasarkan peta Geologi, lembaran Padang, lembaran Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai beberapa formasi geologi:

1. Anggota bawah formasi Ombilin batu kuarsa yang mengandung mika, sisipan arkose, serpih lempungan (liat), konglomerat kuarsa dan batubara.
2. Anggota filit dan serpih formasi kuantan, serpih dan filit sisipan batusabak, batu lanau, rijang dan aliran lava.
3. Granit kapur bersusun leuco-granit sampai menzonit kuarsa, umumnya berstruktur faneritik-forliritik.
4. Formasi brani, konglomerat dengan sisipan pasir dan batu apung.



Gambar 3.3
Formasi Geologi Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di zona subduksi aktif antara Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia, yang menjadikannya wilayah dengan aktivitas seismik tinggi. Hal ini membuat kawasan ini rawan terhadap gempa bumi dan tsunami, terutama karena letaknya yang dekat dengan zona Megathrust Sunda di Samudra Hindia.

Pergerakan lempeng ini juga mempengaruhi pembentukan pegunungan dan patahan geologis di wilayah ini. Patahan Sumatra merupakan salah satu elemen penting dalam struktur geologi daerah ini. Batuan di Pesisir Selatan terdiri dari berbagai formasi geologi, termasuk batuan vulkanik dari era Tersier dan Kuartar. Batuan ini terbentuk dari aktivitas gunung api yang terjadi jutaan tahun lalu.

Di bagian pantai, terdapat formasi sedimen kuartar seperti batu pasir, lempung, dan konglomerat. Sedangkan di bagian pegunungan Bukit Barisan

terdapat formasi batuan vulkanik tua dan batuan metamorf yang mencakup batuan basal, andesit, dan granit.

Di beberapa tempat, ditemukan juga endapan batuan kapur dan terumbu karang purba yang kini menjadi bagian dari daratan. Endapan ini biasanya terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di lepas pantai. Meskipun tidak terdapat gunung api aktif secara langsung di Kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten ini berada dekat dengan beberapa gunung api di Sumatra, seperti Gunung Talang di sebelah utara dan Gunung Kerinci di sebelah timur. Aktivitas gunung api di masa lalu turut mempengaruhi pembentukan topografi dan tanah vulkanik subur di beberapa wilayah.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan, yang memanjang dari utara ke selatan Sumatra. Pegunungan ini membentuk tulang punggung utama pulau Sumatra dan memiliki ketinggian bervariasi, dengan puncak-puncak yang mencapai lebih dari 2.000 meter di beberapa tempat. Geomorfologi wilayah ini didominasi oleh lereng terjal dan bukit-bukit curam yang merupakan hasil dari proses tektonik serta erosi yang terus menerus. Pegunungan Bukit Barisan ini juga menghasilkan banyak sungai yang mengalir ke arah barat, menuju Samudra Hindia.

Di bagian barat kabupaten, topografi berubah menjadi dataran rendah yang terdiri dari endapan sungai dan laut. Dataran rendah ini biasanya ditemukan di sekitar muara sungai besar dan di sepanjang pantai, yang memiliki potensi untuk pertanian dan pengembangan pemukiman. Garis pantai Kabupaten Pesisir Selatan cukup kompleks, terdiri dari pantai berpasir, teluk, tanjung, dan delta sungai. Teluk seperti Teluk Mandeh memiliki potensi wisata bahari yang besar, karena dilindungi oleh formasi pulau-pulau kecil dan memiliki perairan yang tenang.

Beberapa bagian pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki bentuk lahan karst, yang terbentuk dari batuan kapur yang tererosi. Bentang alam karst ini menciptakan gugusan tebing terjal, gua-gua, dan formasi batuan unik, yang sering kali menjadi daya tarik wisata. Pulau-pulau kecil di sekitar Pesisir Selatan, seperti Pulau Cubadak dan Pulau Pagang, terbentuk dari material vulkanik dan sedimen laut yang terangkat akibat aktivitas tektonik.

Geomorfologi Pesisir Selatan juga dipengaruhi oleh sistem sungai yang mengalir dari pegunungan ke arah laut. Sungai-sungai ini membentuk lembah-lembah curam, beberapa di antaranya memiliki potensi sebagai lokasi wisata air terjun dan olahraga air. Di daerah lembah dan dataran rendah, sungai-sungai ini sering membentuk delta di muara, menciptakan dataran aluvial yang subur.

Karena posisinya yang berada dekat dengan zona subduksi, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi besar dan tsunami. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut dapat memicu tsunami, seperti yang pernah terjadi di Sumatra Barat pada tahun 2009. Kondisi ini perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur pariwisata, dengan mempertimbangkan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur yang tahan gempa.

Dengan topografi yang sebagian besar terdiri dari lereng terjal, Pesisir Selatan juga rawan terhadap longsor, terutama di daerah perbukitan dan pegunungan. Longsor sering kali dipicu oleh curah hujan tinggi, terutama selama musim hujan.

3.1.3 Hidrologi

Hidrologi adalah yang berkaitan dengan pergerakan, distribusi, dan kualitas air, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air baik air tanah maupun air permukaan. Kondisi hidrologi suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, jenis batuan, jenis tanah serta tingkat kelerengan dan kondisi tutupan lahan. Kondisi hidrologi di kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Dengan pola aliran bersifat dendritik hal ini dibuktikan dengan banyak sumber air.

Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir dipermukaan seperti mata air, sungai, dan rawa. Potensi air permukaan dipengaruhi oleh kondisi topografi, jenis batuan dan material penyusun tanah, penggunaan lahan, curah hujan dan aktifitas manusia. Potensi air permukaan sebagian besar berasal dari berbagai mata air yang banyak terdapat di kawasan ini mengalir melalui sungaisungai kecil disekitar perbukitan dengan pola aliran berbentuk radial serta berbentuk dendritik untuk cabang-cabang sungai besar. Kebanyakan dari air sungai-sungai tersebut, bersumber dari lereng-lereng bukit sepanjang bukit barisan yang hulunya rata – rata

berasal dari Kabupaten Solok Selatan termasuk kawasan Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) dan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Sebagian besar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke arah barat laut Samudera Indonesia dengan pola dendritik terutama untuk sungai – sungai besar.

Air tanah merupakan air yang terdapat atau tersimpan dalam lapisan tanah dan batuan. Air tanah mengisi lapisan tanah karena proses infiltrasi dan proses perkolasi. Proses infiltrasi adalah gerakan meresapnya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, sedangkan proses perkolasi adalah gerakan air yang meresap ke dalam tanah melalui celah batuan hingga menjadi jenuh. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam bumi dan dapat keluar ke permukaan bumi dalam bentuk mata air atau resapan. Di Kabupaten Pesisir Selatan masyarakat menggunakan sumur gali sebagai cadangan persediaan air bersih pada saat air PDAM mengalami gangguan. Kawasan masyarakat yang menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya daerah perkotaan.

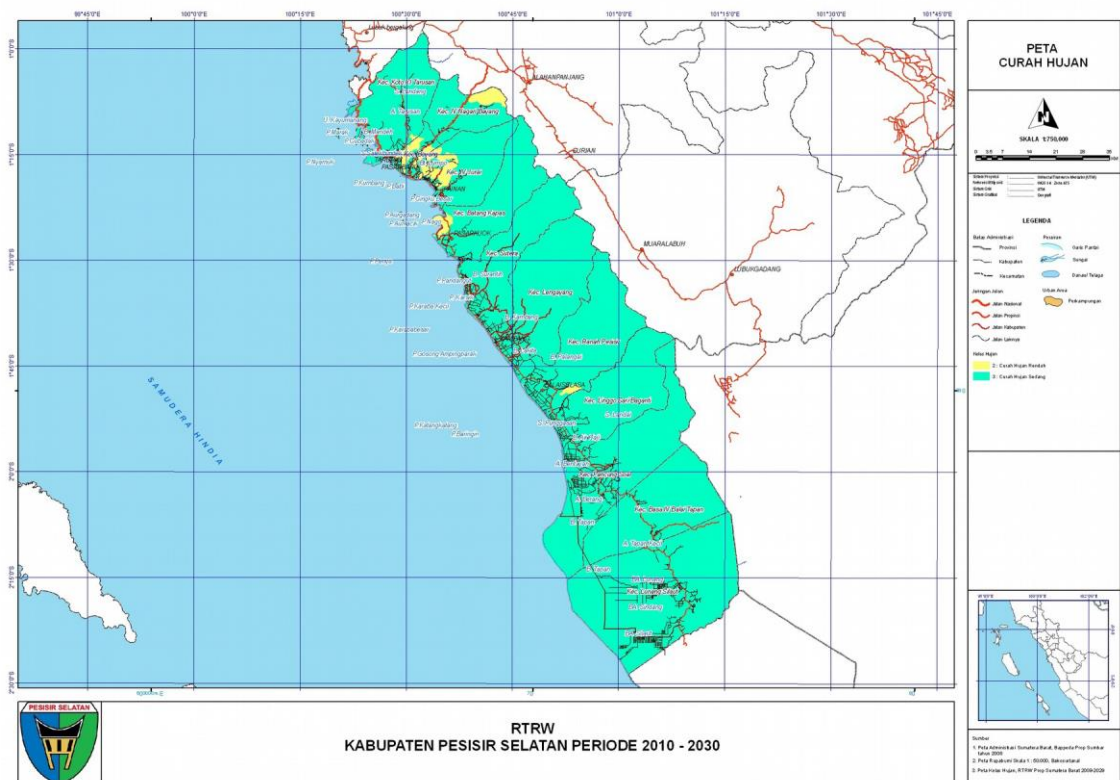
3.1.4 Klimatologi

Temperatur di Pesisir Selatan rata-rata adalah 22°C hingga 32°C, dengan hari hujan rata-rata 118 hari/tahun dan curah hujan rata-rata 2.708,2 mm/tahun. Hari hujan terbanyak terjadi di Kecamatan Batang Kapas, yaitu sebanyak 155 hari/tahun sedangkan curah hujan terbesar terjadi di Kecamatan Koto XI Tarusan, yaitu 3.538 mm/tahun.

Berdasarkan peta agroklimat Provinsi Sumatera Barat (zona iklim menurut oldeman), Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai beberapa zona, yaitu:

1. Wilayah bagian barat mempunyai zona iklim A dan B1, dimana zona iklim A mempunyai bulan basah lebih dari 9 bulan/tahun dan bulan kering kurang dari 2 bulan/tahun, sedangkan zona iklim B1 mempunyai zona basah 7-9 bulan/tahun dan bulan kering 2 bulan/tahun (bulan basah: curah hujan besar dari 200 mm / bulan dan bulan kering: curah hujan kecil dari 100 mm/bulan).

2. Wilayah bagian tengah dan utara mempunyai zona iklim C1, dengan bulan basah 5-6 bulan/tahun dan bulan kering kurang dari 2 bulan/tahun, zona iklim D1 dengan bulan basah 3-4 bulan/tahun dengan bulan keringnya kurang dari 2 bulan/tahun
3. Wilayah bagian timur dan selatan mempunyai zona iklim D2 dengan bulan basah 3-4 bulan/tahun dengan bulan kering 2-3 bulan/tahun



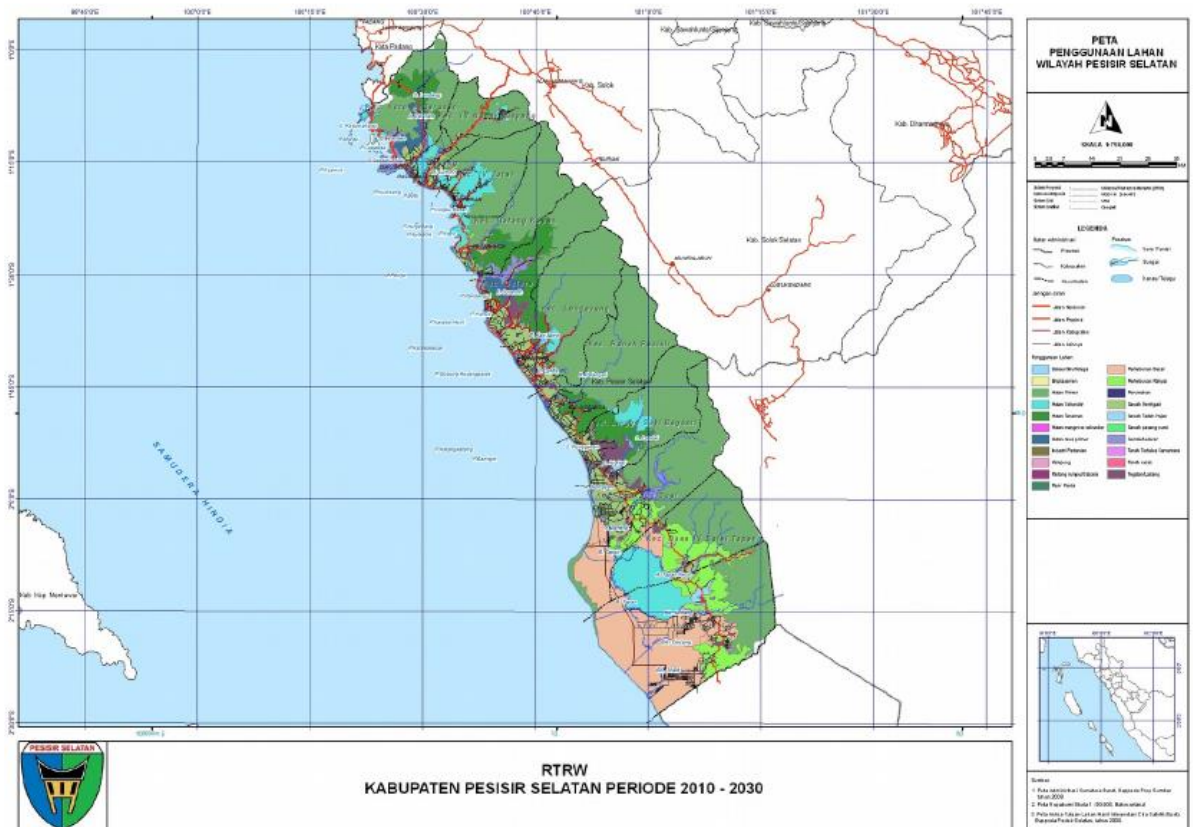
Gambar 3.4
Zona Iklim Kabupaten Pesisir Selatan

3.1.5 Penggunaan lahan

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh hutan diikuti oleh perkebunan rakyat dan swasta, pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Data penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan bahan di Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data Penggunaan Lahan di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JENIS PENGGUNAAN	LUAS AREAL (Km2)	%
1	Kampung/Pemukiman	180,01	3,13
2	Sawah	256,95	4,47
3	Tegal/kebun/lading	69,30	1,21
4	Perkebunan	361,54	6,29
5	Kebun campuan	250,48	4,36
6	Hutan lebat	3.558,25	61,88
7	Hutan belukar	609,68	10,60
8	Hutan sejenis	20,86	0,36
9	Semak/ alang-alang	99,58	1,73
10	Hutan rawa	192,97	3,36
11	Lainnya	150,26	2,61
Jumlah		574,989	100,00



Gambar 3.5
Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pesisir Selatan

3.1.6 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki bentang alam yang bervariasi yaitu posisinya yang berada disepanjang bukit barisan dan sepanjang pantai samudera Indonesia, banyak dilalui sungai-sungai besar serta dilalui jalur sesar besar Sumatera (Sesar Semangko) sehingga menyebabkan Kabupaten Pesisir Selatan rentan terhadap bencana.

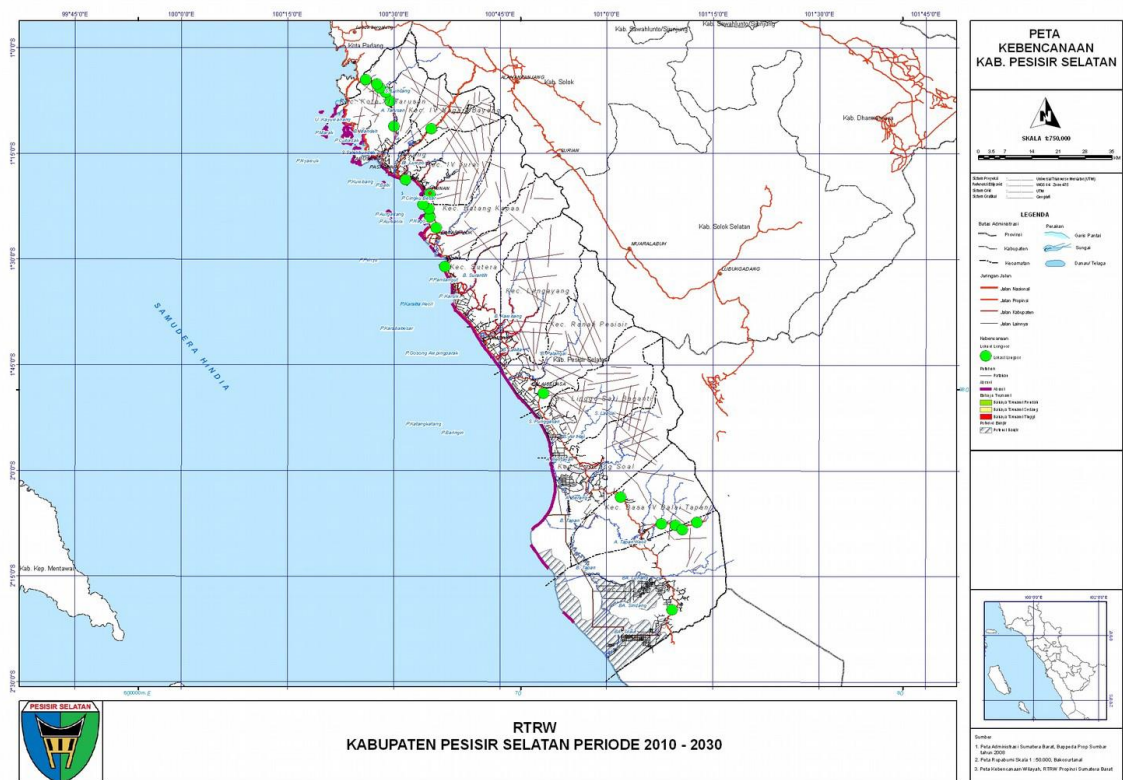
Gempa Bumi

Gempa tektonik di Kabupaten Pesisir. disebabkan adanya jalur sesar aktif yang melalui wilayah Pesisir Selatan. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan rawan gempa karena terletak disepanjang pantai Samudera Indonesia.

Gerakan Tanah (Longsoran)

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan bagian dari jajaran bukit barisan. Secara geologi memiliki potensi terjadi gerakan tanah. beberapa penyebab terjadinya gerakan tanah, antara lain :

- Factor keairan (curah hujan) yang tinggi dan geologi yang kompleks pada wilayah ini.
- Aktivitas manusia merupakan factor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya bencana gerakan tanah, misalnya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan topografi dan struktur geologi setempat, pemotongan kaki bukit untuk wilayah permukiman, pemotongan dan pelebaran jalan.
- Kondisi morfologi yang bergelombang.



Gambar 3.6
Peta Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan

3.2 Sejarah Sebagai Potensi Pariwisata

3.2.1 Potensi Wisata Sejarah

Sejarah sebagai potensi pariwisata merupakan pendekatan yang menggabungkan pemahaman tentang nilai sejarah suatu daerah dengan strategi pengembangan pariwisata berbasis warisan budaya. Pariwisata sejarah memiliki peran penting dalam memperkenalkan, melestarikan, dan merayakan warisan sejarah yang unik dari suatu tempat, sekaligus memberikan pengalaman edukatif dan rekreatif bagi wisatawan.

Berikut adalah penjelasan tentang konsep dan teori sejarah sebagai potensi pariwisata, serta kaitannya dengan potensi pariwisata sejarah di Pesisir Selatan:

1. Warisan Sejarah dan Budaya Warisan sejarah (heritage) merupakan peninggalan budaya, tradisi, dan peristiwa masa lalu yang masih memiliki relevansi dan nilai penting di masa kini. Warisan sejarah bisa berupa situs,

bangunan, monumen, artefak, maupun tradisi lisan. Dalam konteks pariwisata, warisan ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin mempelajari dan merasakan langsung sejarah dan kebudayaan suatu daerah.

2. **Atraksi Wisata Berbasis Sejarah** Dalam pariwisata berbasis sejarah, daya tarik utama adalah narasi sejarah dan warisan fisik yang dimiliki suatu daerah. Atraksi wisata sejarah bisa berupa:
 - Situs bersejarah seperti bangunan kolonial, benteng, atau masjid kuno.
 - Monumen peringatan dan tempat bersejarah yang menjadi saksi peristiwa penting.
 - Museum dan pusat informasi yang menampilkan koleksi dan dokumentasi sejarah.
 - Rute wisata sejarah yang dirancang untuk membawa wisatawan menjelajahi tempat-tempat bersejarah secara terstruktur.
3. **Pengalaman Edukatif Sejarah** sebagai potensi pariwisata memiliki elemen edukasi yang sangat kuat. Wisata sejarah memberi kesempatan bagi wisatawan untuk belajar langsung tentang masa lalu, termasuk kebudayaan, peristiwa penting, dan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pembentukan identitas daerah tersebut.
4. **Pelestarian dan Revitalisasi Pengembangan** pariwisata sejarah membantu dalam pelestarian situs-situs dan warisan sejarah yang ada. Dengan memanfaatkan situs-situs ini sebagai destinasi wisata, ada peluang untuk menjaga dan merawatnya sehingga tetap lestari bagi generasi mendatang. Selain itu, revitalisasi kawasan bersejarah bisa meningkatkan perekonomian lokal dan memperkuat identitas budaya.

3.2.2 Potensi Pariwisata Sejarah di Pesisir Selatan

Pesisir Selatan memiliki banyak potensi sejarah yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata. Beberapa elemen sejarah di Pesisir Selatan yang relevan dengan konsep dan teori di atas adalah:

1. **Situs-Situs Bersejarah dan Warisan Budaya**

- a. Kesultanan Inderapura: Sejarah Kesultanan Inderapura, yang pernah berjaya di wilayah ini, merupakan aset berharga untuk dikembangkan sebagai wisata sejarah. Situs peninggalan, seperti istana, masjid tua, dan makam para sultan, bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik pada sejarah kerajaan Nusantara.
- b. Pengaruh Kolonial Belanda: Beberapa peninggalan arsitektur dari masa kolonial, seperti bangunan tua, benteng, dan infrastruktur, dapat dijadikan bagian dari wisata sejarah. Narasi tentang pengaruh kolonial Belanda dalam perkembangan ekonomi dan sosial di Pesisir Selatan bisa menjadi bagian menarik dalam tur wisata sejarah.
- c. Perang Kemerdekaan: Pesisir Selatan juga memiliki catatan penting dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Situs-situs pertempuran, markas pejuang, dan monumen peringatan perjuangan bisa dikemas sebagai destinasi wisata sejarah yang menarik bagi generasi muda dan pelajar.

2. Narasi Sejarah Maritim

Pesisir Selatan terletak di tepi Samudra Hindia dan memiliki sejarah panjang sebagai jalur perdagangan maritim. Sejarah maritim yang melibatkan pedagang lokal, serta interaksi dengan bangsa asing seperti India, Arab, dan Eropa, dapat dijadikan daya tarik wisata. Wisatawan dapat mengunjungi pelabuhan-pelabuhan tua dan mendengarkan cerita tentang masa kejayaan perdagangan laut di masa lampau.

3. Arsitektur Tradisional dan Warisan Budaya

Pesisir Selatan memiliki warisan arsitektur tradisional Rumah Gadang, serta adat istiadat Minangkabau yang khas. Wisatawan yang tertarik pada budaya dan sejarah sosial masyarakat dapat mengunjungi rumah-rumah adat, serta mempelajari sejarah adat dan tradisi lokal. Upacara adat, festival budaya, dan kuliner tradisional juga bisa menjadi daya tarik tambahan yang memperkaya pengalaman wisata sejarah.

4. Wisata Edukasi

Potensi wisata sejarah di Pesisir Selatan juga dapat diarahkan pada wisata edukasi, dengan menawarkan tur sejarah yang berfokus pada pengajaran tentang

peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, khususnya terkait dengan wilayah Sumatra Barat. Program wisata edukatif ini bisa menargetkan siswa, mahasiswa, serta peneliti yang ingin mendalami sejarah lokal.

5. Pengembangan Wisata Tematik

Konsep wisata tematik dapat diterapkan dengan mengembangkan paket wisata yang berfokus pada aspek sejarah tertentu, seperti wisata kerajaan, wisata kolonial, atau wisata revolusi kemerdekaan. Paket wisata ini bisa dirancang dengan rute yang mengunjungi situs-situs bersejarah terkait, dengan pemandu yang menceritakan kisah sejarah setempat.

Warisan sejarah mencakup semua peninggalan budaya, baik yang bersifat material seperti bangunan, artefak, dan situs, maupun immaterial seperti cerita rakyat, adat istiadat, dan tradisi. Dalam pariwisata, warisan ini dianggap berharga karena dapat memperkenalkan pengunjung pada identitas dan perjalanan sejarah suatu daerah.

Contoh di Pesisir Selatan yaitu Situs Kesultanan Inderapura: Kesultanan Inderapura memiliki sejarah yang kaya dan pengaruh yang kuat di wilayah Pesisir Selatan. Warisan peninggalan kesultanan, seperti Istana Inderapura dan Masjid Tuo Inderapura, bisa dijadikan atraksi wisata utama. Situs ini memiliki nilai sejarah karena menggambarkan masa kejayaan kerajaan di Sumatra Barat yang pernah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Pengembangan situs-situs ini sebagai destinasi wisata bisa menarik wisatawan yang tertarik pada sejarah kerajaan di Nusantara. Tur edukatif yang menjelaskan tentang Kesultanan Inderapura, hubungannya dengan kerajaan lain di Sumatra dan Jawa, serta peran strategisnya dalam perdagangan di masa lampau, akan menjadi daya tarik tersendiri.

3.2.3 Atraksi Wisata Berbasis Sejarah

Atraksi wisata berbasis sejarah fokus pada penyajian tempat-tempat bersejarah yang dapat dikunjungi wisatawan untuk belajar dan merasakan langsung jejak masa lalu. Wisatawan tidak hanya mengunjungi tempat, tetapi juga mendapatkan narasi sejarah yang hidup melalui tur pemandu, museum, atau interpretasi multimedia. Atraksi yang bisa dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan:

Benteng Relawan di Batang Kapas: Benteng ini merupakan salah satu peninggalan dari masa perjuangan melawan penjajahan Belanda. Tempat ini menjadi saksi perjuangan rakyat Pesisir Selatan dalam mempertahankan kedaulatan. Sebagai situs sejarah, benteng ini dapat dikembangkan menjadi wisata edukasi yang mengangkat narasi perlawanan rakyat Minang terhadap kolonialisme. Dengan menjadikannya bagian dari tur sejarah yang terstruktur, benteng ini bisa menjadi destinasi menarik bagi wisatawan domestik maupun internasional, khususnya mereka yang tertarik pada sejarah perjuangan Indonesia. Pengalaman ini bisa diperkaya dengan pameran multimedia tentang pertempuran dan cerita para pejuang lokal.

Pariwisata sejarah memberikan pengalaman edukatif yang kuat, di mana wisatawan dapat mempelajari peristiwa-peristiwa penting, tokoh-tokoh sejarah, serta perkembangan budaya dan sosial suatu daerah. Tempat-tempat bersejarah sering kali diintegrasikan dengan museum atau pusat informasi yang memberikan wawasan mendalam. Museum Sejarah Lokal: Pengembangan museum yang menampilkan sejarah Pesisir Selatan dari masa prasejarah hingga kemerdekaan Indonesia dapat memberikan pengalaman edukatif bagi wisatawan. Museum ini bisa memuat koleksi artefak peninggalan kolonial, peninggalan Kesultanan Inderapura, serta dokumentasi mengenai tokoh-tokoh pejuang dari Pesisir Selatan. Dengan adanya museum sejarah yang komprehensif, wisatawan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya Pesisir Selatan dalam sejarah nasional. Program wisata edukasi yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau universitas juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan pelajar dan akademisi.

Pengembangan pariwisata sejarah sering kali sejalan dengan pelestarian warisan sejarah. Pariwisata memberikan insentif ekonomi untuk memulihkan dan merawat situs-situs bersejarah, sekaligus memperkenalkan nilai penting warisan tersebut kepada publik.

Revitalisasi Kampung Tua: Di beberapa kawasan Pesisir Selatan, terdapat desa-desa tradisional dengan rumah-rumah gadang yang khas Minangkabau. Revitalisasi desa-desa ini bisa menjadikannya destinasi wisata budaya dan sejarah, di mana wisatawan bisa melihat langsung arsitektur tradisional serta kehidupan

masyarakat yang masih mempraktikkan adat istiadat lokal. Revitalisasi kampung tua bisa mendukung program pelestarian budaya sekaligus menciptakan desa wisata. Wisatawan dapat terlibat dalam kegiatan adat, seperti upacara pernikahan atau penyambutan tamu dengan tarian tradisional, sehingga memperkuat daya tarik wisata berbasis sejarah dan budaya.

Wisatawan cenderung mencari pengalaman autentik saat mengunjungi destinasi sejarah. Keaslian dari bangunan, narasi, dan cara penyampaian sejarah sangat penting. Sebuah situs sejarah yang dipertahankan dengan baik dan dikaitkan dengan cerita-cerita asli memberikan kesan mendalam dan memikat bagi pengunjung. Rumah Gadang dan Tradisi Matrilineal: Pesisir Selatan yang kental dengan budaya Minangkabau menawarkan keaslian budaya yang bisa dikemas menjadi daya tarik wisata. Rumah gadang, sebagai representasi arsitektur tradisional, serta sistem matrilineal yang unik di Minangkabau, bisa dipresentasikan melalui tur budaya yang mendalam. Mengunjungi dan belajar tentang rumah gadang serta sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau memberikan pengalaman yang autentik bagi wisatawan. Ini juga bisa menjadi bagian dari wisata hidup bersama penduduk lokal (*living tourism*), di mana wisatawan tinggal di rumah gadang, berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan mengikuti kegiatan harian mereka.

Dalam konsep pariwisata sejarah, pelibatan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan. Masyarakat adalah bagian integral dari sejarah dan warisan yang ditawarkan kepada wisatawan. Mereka bisa menjadi pemandu wisata, pengelola situs bersejarah, atau pelaku dalam upacara adat yang ditampilkan sebagai atraksi wisata. Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah: Masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di sekitar situs-situs bersejarah, dapat dilatih menjadi pemandu wisata profesional yang dapat menceritakan sejarah setempat dengan menarik dan mendetail. Ini akan memberikan nilai tambah pada pariwisata lokal serta memberdayakan masyarakat setempat secara ekonomi. Dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pemandu, wisatawan akan mendapatkan informasi sejarah yang lebih autentik, sementara masyarakat akan merasa lebih terhubung dengan

upaya pelestarian warisan sejarah mereka sendiri. Hal ini juga akan meningkatkan sense of ownership dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan sejarah lokal.

3.3 Kekayaan Ekologi sebagai potensi pariwisata

3.3.1. Potensi Wisata Ekologi (Ekowisata)

Pariwisata ekologis (ekowisata) adalah konsep pariwisata yang berfokus pada pengalaman wisata berbasis alam, di mana tujuan utamanya adalah untuk melestarikan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Pariwisata ekologis memanfaatkan kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta ekosistem yang unik sebagai daya tarik utama, dan mendorong partisipasi wisatawan dalam pelestarian alam.

Konsep ini menekankan pada aspek-aspek berikut:

1. Pelestarian alam dan lingkungan: Ekowisata bertujuan melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Edukasi dan kesadaran lingkungan: Ekowisata tidak hanya berfokus pada keindahan alam, tetapi juga memberikan pengalaman edukatif tentang ekosistem, satwa, dan tumbuhan lokal, serta pentingnya menjaga lingkungan.
3. Keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal: Ekowisata mengedepankan partisipasi masyarakat setempat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam mereka secara berkelanjutan.
4. Pengembangan ekonomi lokal: Ekowisata memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha berbasis pariwisata, seperti homestay, pemandu wisata, atau penjualan produk lokal.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis ekologis atau ekowisata. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan ekosistem yang unik, yang dapat menjadi daya tarik pariwisata bagi wisatawan domestik maupun internasional. Beberapa contoh dan relevansinya adalah sebagai berikut:

- 1) Ekosistem Pesisir dan Laut

Pesisir Selatan memiliki banyak pantai yang indah, seperti Pantai Carocok, Pantai Sago, dan kawasan Teluk Mandeh, yang terkenal dengan pemandangan laut dan pulau-pulau kecilnya. Selain itu, kawasan ini memiliki terumbu karang yang masih alami dan kaya dengan keanekaragaman biota laut, yang menarik untuk snorkeling dan diving.

Wisata berbasis ekosistem laut dapat dikembangkan melalui ekowisata bahari, di mana pengunjung diajak untuk menikmati keindahan laut sambil belajar tentang pentingnya konservasi terumbu karang dan mangrove. Wisata edukatif tentang pelestarian terumbu karang dan restorasi ekosistem laut dapat diintegrasikan, sehingga pengunjung dapat berpartisipasi dalam kegiatan seperti transplantasi karang atau penanaman mangrove.

Kawasan Mandeh, yang sering disebut sebagai "Raja Ampat dari Sumatra", memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi ekowisata yang berkelanjutan. Di sini, wisatawan dapat menikmati wisata bahari, island hopping, dan snorkeling di perairan yang jernih sambil ikut serta dalam program pelestarian lingkungan laut.

2) Hutan Lindung dan Pegunungan

Pesisir Selatan juga memiliki hutan tropis yang kaya dengan keanekaragaman flora dan fauna, termasuk hutan lindung dan hutan konservasi. Kawasan hutan di daerah ini menawarkan peluang untuk wisata trekking, pengamatan burung, dan wisata petualangan alam.

Ekowisata hutan dapat dikembangkan dengan pendekatan edukatif dan interaktif, di mana wisatawan dapat melakukan penjelajahan hutan (jungle trekking) sambil belajar tentang ekosistem hutan tropis, spesies endemik, dan pentingnya menjaga kelestarian alam. Wisata berbasis konservasi satwa liar juga dapat diterapkan, misalnya pengamatan satwa seperti burung-burung langka atau kera ekor panjang, dengan memperhatikan etika konservasi. Hutan Lindung Pesisir Selatan menawarkan potensi untuk wisata trekking, pengamatan satwa, serta ekowisata petualangan. Misalnya, pengunjung dapat melakukan pendakian ringan di bukit-bukit setempat, dengan rute yang dirancang untuk meminimalkan dampak

lingkungan. Ekowisata ini bisa dikombinasikan dengan kegiatan edukasi tentang konservasi hutan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

3) Air Terjun dan Wisata Sungai

Di Pesisir Selatan, terdapat sejumlah air terjun yang spektakuler, seperti Air Terjun Bayang Sani dan Air Terjun Timbulun, yang memiliki daya tarik pariwisata alam yang tinggi. Selain itu, terdapat beberapa sungai yang cocok untuk kegiatan wisata petualangan seperti arung jeram atau rafting. Pengembangan wisata alam air bisa dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan, di mana wisatawan didorong untuk menikmati keindahan alam sambil menjaga kebersihan dan kelestarian sumber daya air.

Wisata sungai dan air terjun juga dapat dikombinasikan dengan kegiatan edukasi lingkungan, seperti pengelolaan air dan konservasi sumber daya alam lokal. Air Terjun Bayang Sani dapat dikembangkan sebagai destinasi ekowisata air yang berkelanjutan, di mana pengunjung bisa menikmati alam sambil berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian sumber daya air, seperti menjaga kebersihan lingkungan air terjun dan sungai.

4) Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas)

Pesisir Selatan kaya akan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Mangrove di wilayah pesisir, hutan tropis di pegunungan, serta berbagai spesies satwa liar, semuanya merupakan daya tarik yang unik. Pengembangan wisata konservasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati. Pengunjung dapat ikut serta dalam program restorasi ekosistem, seperti penanaman mangrove, yang tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga pengalaman wisata yang bermakna. Wisata edukasi tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati, seperti tur pengenalan spesies tumbuhan dan hewan lokal, serta peran mereka dalam ekosistem.

Ekosistem Mangrove di Pesisir Selatan dapat menjadi potensi untuk wisata mangrove berbasis ekologi, di mana pengunjung dapat belajar tentang pentingnya ekosistem ini dalam melindungi pantai dari erosi dan sebagai habitat bagi spesies laut.

5) Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Ekowisata

Pemberdayaan masyarakat lokal melalui ekowisata memberikan peluang untuk melibatkan mereka dalam mengelola kawasan wisata secara berkelanjutan. Masyarakat dapat terlibat sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, atau pengrajin lokal. Melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan ekowisata akan mendorong pengelolaan yang lebih berkelanjutan, karena mereka memiliki kepentingan langsung terhadap kelestarian lingkungan. Pemberdayaan komunitas lokal juga bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat. Di kawasan seperti kawasan Mandeh, masyarakat lokal dapat dilatih untuk menjadi pemandu wisata yang berfokus pada pariwisata bahari berkelanjutan, mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dan terumbu karang.

3.4 Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata

Kondisi sosial budaya dapat menjadi potensi pariwisata karena budaya merupakan simbol masyarakat yang memiliki makna dan kaitannya dengan pariwisata. Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya dan pariwisata:

1) Keberagaman budaya

Keberagaman budaya menjadi daya tarik utama bagi industri pariwisata. Wisatawan datang untuk menikmati kerajinan, kuliner, dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah.

2) Pelestarian budaya

Pengembangan pariwisata dapat berdampak positif pada pelestarian budaya lokal, seperti adat istiadat, kegiatan keagamaan, dan tradisi.

3) Dampak negatif sosial budaya

Dampak negatif sosial budaya dapat diminimalkan dengan mengembangkan pariwisata secara bertahap dan terus dipantau. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat beradaptasi terhadap perubahan tanpa meninggalkan ciri budaya lokal.

4) Peran pelaku wisata

Pemahaman lintas budaya dapat membantu pelaku wisata berinteraksi dengan orang lain, memperlancar kegiatan wisata, dan meminimalisir kesalahan akibat permasalahan budaya.

5) Pariwisata budaya

Pariwisata budaya merupakan kegiatan wisata yang berfokus pada daya tarik wisata yang berasal dari seni budaya daerah, seperti adat istiadat, peninggalan sejarah, dan kerajinan masyarakat.

3.5 Perekonomian Pesisir Selatan

Salah satu tujuan pembangunan daerah termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan pada era pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Mankew (2007), Kuncoro (2004) dan Brojonegoro (2006) pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi suatu daerah. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut hendaklah memperhatikan antara lain; kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, kemampuan daya saing daerah serta infrastruktur yang tersedia (Sukirno, 2009). Dengan mempertimbangkan beberapa aspek tersebut maka selanjutnya disusunlah perencanaan pembangunan daerah serta berbagai macam program dan kegiatan yang relevan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penyusunan strategi pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan membutuhkan penanaman modal yang terencana. Berkaitan dengan hal itu, maka pada bagian ini akan diuraikan mengenai perkembangan Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusinya, Pendapatan Per-Kapita serta perkembangan Investasi atau Penanaman Modal di wilayah Kota Solok.

3.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung berdasarkan atas dasar harga konstan yang semakin meningkat. Berdasarkan harga konstan 2020, nilai

PDRB Pesisir Selatan pada tahun 2022 meningkat dibandingkan Tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Pesisir Selatan Tahun 2022 mencapai Rp.10.183.465,97 juta rupiah. Angka tersebut meningkat sebesar 4,19% tahun 2023 menjadi Rp.10.608.290 juta rupiah. Kontributor terbesar terhadap PDRB berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta lapangan usaha Konstruksi. Ketiga lapangan usaha ini meningkat sangat signifikan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.397.781,12	3.492.085,98	3.489.733,69	3.603.352,03	3.740.889,55	3.856.640
B	Pertambangan dan Penggalian	336.620,10	357.531,08	344.973,57	347.620,10	355.164,90	370.010
C	Industri Pengolahan	763.253,04	722.643,09	700.366,28	725.443,55	741.259,55	759.550
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.113,32	3.214,00	3.046,05	3.080,01	3.225,79	3.360
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.365,91	6.581,45	6.497,28	6.655,91	6.784,46	7.090
F	Konstruksi	946.616,44	1.029.866,49	969.752,54	983.934,90	1.010.511,48	1.070.570
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.165.042,49	1.262.517,69	1.257.576,26	1.297.622,34	1.373.117,77	1.440.700
H	Transportasi dan Pergudangan	375.375,57	405.895,42	360.631,49	382.489,51	399.220,83	421.160
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	100.790,35	10.8892,45	94.708,10	101.195,35	112.429,96	120.680
J	Informasi dan Komunikasi	684.570,40	745.455,95	799.209,01	851.900,50	913.298,77	979.860
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	189.666,02	194.789,68	195.346,05	206.737,55	214.364,15	223.020
L	Real Estate	128.884,75	135.872,35	135.940,26	137.984,75	142.963,89	150.750
M, N	Jasa Perusahaan	4.939,73	5.245,41	5.036,61	5.039,73	5.260,00	5.520
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	547.329,20	576.008,60	572.041,34	577.509,17	571.050,54	579.880

Lapangan Usaha		Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Wajib						
P	Jasa Pendidikan	268.259,23	288.682,15	300.800,84	312.259,23	327.445,71	333.110
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121.484,26	130.608,57	139.142,94	147.454,51	154.245,65	165.050
R,S T,U	Jasa lainnya	99.880,38	110.773,76	95.980,36	100.080,38	112.232,96	121.330
PRODUKDOMESTIK REGIONALBRUTO		9.139.972,32	9.576.664,10	9.470.782,68	9.790.359,53	10.183.465,97	10.608.290

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2023

Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (pengeluaran). Selama periode enam tahun terakhir (2018-2023), struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; Informasi dan komunikasi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.4
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 (%)

Lapangan Usaha		Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.28	38.27	37.76	37.22	36.93	36,49
B	Pertambangan dan Penggalian	3.64	3.67	3.57	3,41	3.26	3,34
C	Industri Pengolahan	7.73	6.40	6.43	6.80	6.80	6,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0,06
F	Konstruksi	10.88	11.55	11.57	11.59	11.66	11,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.94	12.29	12.16	11.89	12.48	12,68
H	Transportasi dan Pergudangan	3.82	3.96	3.66	3.73	3.78	3,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.25	1.34	1.19	1.23	1.27	1,29
J	Informasi dan Komunikasi	6.06	6.44	6.86	7.01	7.18	7,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.12	2.12	2.17	2.25	2.21	2,16
L	Real Estate	1.35	1.37	1.38	1.36	1.32	1,36

Lapangan Usaha		Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
M,N	Jasa Perusahaan	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.13	6.49	7.02	7.23	6.80	6,64
P	Jasa Pendidikan	3.20	3.36	3.51	3.48	3.46	3,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.27	1.33	1.46	1.50	1.48	1,52
R,S,T, U	Jasainnya	1.16	1.25	1.11	1.13	1.21	1,26
PRODUK DOMESTIKREGIONALBRUTO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Pada tahun 2023 kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai 36.49%. Capaian ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 36.95%. Pada urutan kedua lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, berkontribusi sebesar 12,68%. Selanjutnya 11,92% berasal dari lapangan usaha Konstruksi, 7,26% dan 6,64% masing-masing berasal dari sektor Informasi dan komunikasi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Disisi lain apabila kita tinjau PDRB menurut pengeluaran yang terbentuk dari total kontribusi seluruh komponen pengeluaran terdiri dari konsumsi rumah tangga (PKRT), konsumsi LNPRT (PKLNPRT), konsumsi pemerintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan net ekspor barang dan jasa (X-M). Jika dilihat berdasarkan komponennya, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2018-2023. Rata-rata distribusi PKRT dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tersebut adalah sebesar 50%.

Setelah PKRT, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen kedua terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Komponen ini menjelaskan bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran sebagian dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital berperan sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi

domestik maupun hasil impor. Namun jika dilihat perkembangan distribusi selama periode 2018-2023, PMTB memiliki kecenderungan penurunan. Distribusi PMTB tahun 2018 sebesar 30,26 menurun menjadi 29,16 tahun 2023.

Sejalan dengan PMTB, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah secara distribusi pun mengalami kecenderungan penurunan dalam sejak tahun 2020- 2023. Tahun 2023 komponen ini sebesar 9,13% cenderung terus turun dibandingkan sejak tahun 2020 sebesar 11,37%. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Persentase distribusi komponen net ekspor barang dan jasa secara umum di Kabupaten Pesisir Selatan cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2019-2023 hampir sebesar 2% setiap tahunnya. Kenaikkan ini menjadi motivasi bagi daerah dalam mengembangkan produk-produk unggulan yang dapat memiliki kualitas untuk diekspor, secara lebih rinci semua komponen PDRB menurut pengeluaran.

Tabel 3.5
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2023

Komponen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	54,12	55,35	52,72	52,01	51,83	50,96
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,11	1,19	1,13	1,10	1,03	1,05
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,54	12,41	11,37	10,99	9,90	9,13
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,26	30,31	29,69	29,28	28,57	29,16
Perubahan Inventori	0,08	0,03	0,12	0,27	0,39	-0,56
Net Ekspor BarangdanJasa	1,89	0,71	4,97	6,34	8,28	10,26
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

3.5.2 Analisis Sektor Basis Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan

Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan daya saing daerah baik pada level lokal maupun nasional secara keseluruhan. Upaya mencapai tingakta daya saing dilakukan melalui evaluasi kondisi ekonomi daerah terlebih dahulu, kemudian menetapkan kebijakan yang tepat untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial.

Dalam lingkup ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan sektor ekonomi di daerah tersebut. Suatu sektor dapat dikategorikan sebagai basis ekonomi ketika sektor itu mampu memenuhi kebutuhan internal daerah kemudian mengekspor sektor tersebut ke luar daerah penghasil. Sebaliknya ada sektor non basis yaitu sektor yang hanya mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam suatu daerah. Kontribusi sektor basis terhadap perekonomian suatu daerah membuat sektor basis ini sering disebut sebagai sektor unggulan. Analisis Static Location Quatient (SLQ) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan tentang besarnya peranan suatu sektor di setiap daerah (kabupaten) terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat provinsi. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah (kabupaten) tersebut. Nilai $SLQ \geq 1$ berarti peranan suatu sektor di kabupaten lebih dominan dibandingkan sektor di tingkat provinsi dan mengindikasikan bahwa kabupaten surplus akan produk sektor tersebut. Sebaliknya, apabila nilai $SLQ < 1$ berarti peranan suatu sektor di kota lebih kecil dibanding sektor ditingkat provinsi. Nilai SLQ dapat dijadikan dasar menentukan mana yang termasuk sektor basis dan mana yang termasuk sektor non basis.

Berdasarkan hasil perhitungan SLQ yang disajikan pada tabel menunjukkan bahwa terdapat 5 sektor yang termasuk sektor basis dengan hasil perhitungan nilai $SLQ > 1$, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan sektor Komunikasi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Static Location Quotation Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata LQ	Sektor Basis/Non Basis
		2019	2020	2021	2022	2023		
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,67	1,64	1,66	1,67	1,67	1,66	Sektor Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	0,90	0,88	0,90	0,90	0,90	0,90	Sektor Non Basis
C	Industri Pengolahan	0,81	0,78	0,78	0,79	0,78	0,79	Sektor Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	Sektor Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,70	0,69	0,67	0,66	0,67	0,68	Sektor Non Basis
F	Konstruksi	1,13	1,09	1,09	1,09	1,10	1,10	Sektor Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	0,81	0,82	0,80	0,81	0,81	0,81	Sektor Non Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,35	0,37	0,38	0,38	0,38	0,37	Sektor Non Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,99	1,02	1,03	0,99	0,99	1,00	Sektor Basis
J	Informasi dan Komunikasi	1,05	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	Sektor Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,73	0,72	0,70	0,70	0,71	0,72	Sektor Non Basis
L	Real Estat	0,72	0,72	0,71	0,70	0,70	0,71	Sektor Non Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Sektor Non Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,06	1,05	1,05	1,03	1,03	1,04	Sektor Basis
P	Jasa Pendidikan	0,75	0,74	0,76	0,76	0,76	0,75	Sektor Non Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93	Sektor Non Basis
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,64	0,62	0,60	0,60	0,61	0,61	Sektor Non Basis

Sumber : BPS, PDRB Kab. Pesisir Selatan, (hasil analisis) 2024

Sementara sektor lainnya yang memiliki $SLQ < 1$ tergolong dalam sektor non basis yang tidak dapat mengekspor ke luar daerahnya melainkan hanya mampu memenuhi kebutuhan daerahnya atau mengimpor barang ke dalam daerah. Perubahan perekonomian lokal pada kurun waktu tertentu dapat dianalisis melalui *Dynamic Location Quotient (DLQ)* sehingga perubahan sektoral dapat diketahui. DLQ merupakan bentuk modifikasi dari SLQ dengan mengakomodasi besarnya PDRB dari nilai produksi sektor atau sub sektor dari waktu ke waktu. Berdasarkan metode analisis ini, peneliti melihat sektor mana yang nilai $DLQ \geq 1$, maka potensi perkembangan sektor i di suatu daerah lebih cepat jika dibanding dengan sektor yang sama dalam lingkup provinsi. Sebaliknya, jika $DLQ < 1$, maka potensi

perkembangan sektor i di daerah lebih rendah jika dibanding provinsi secara keseluruhan.

Hasil perhitungan DLQ menunjukkan bahwa, terdapat 15 sektor ekonomi yang memiliki nilai DLQ lebih dari satu ($DLQ > 1$). Artinya sebagian besar sektor ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki perkembangan lebih cepat, berpotensi untuk dikembangkan dan prospektif. Hanya 2 sektor yang tidak prospektif yaitu sektor konstruksi dan Jasa Lainnya yang memiliki $DLQ < 1$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Dynamic Location Quation Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun				Rata-rata DLQ	Keterangan
		2020	2021	2022	2023		
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,97	1,03	1,01	0,99	1,0001	Prospektif
B	Pertambangan dan Penggalian	0,93	1,08	1,01	0,99	1,0012	Prospektif
C	Industri Pengolahan	0,95	1,00	1,05	1,00	1,0002	Prospektif
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,05	0,93	1,04	0,99	1,0020	Prospektif
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,02	0,94	0,96	1,09	1,0021	Prospektif
F	Konstruksi	0,94	1,00	1,03	1,03	0,9994	Tidak Prospektif
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	1,03	0,95	1,01	1,01	1,0007	Prospektif
H	Transportasi dan Pergudangan	1,13	1,05	0,91	0,94	1,0092	Prospektif
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,12	1,04	0,89	1,00	1,0108	Prospektif
J	Informasi dan Komunikasi	0,95	1,02	1,02	1,01	1,0006	Prospektif
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,99	0,95	1,00	1,06	1,0012	Prospektif
L	Real Estat	1,03	1,00	0,97	1,01	1,0005	Prospektif
M,N	Jasa Perusahaan	1,04	1,01	0,96	0,99	1,0016	Prospektif
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,02	1,02	0,96	1,01	1,0002	Prospektif
P	Jasa Pendidikan	0,97	1,05	0,99	0,99	1,0007	Prospektif
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	1,02	1,02	1,01	1,0006	Prospektif
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,93	0,96	1,05	1,04	0,9975	Tidak Prospektif

Sumber : BPS 2024, diolah

Kombinasi antara nilai LQ dan DLQ digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan masing-masing aktivitas ekonomi ke dalam bagan Tipologi Klassen. Bagan tipologi Klassen memuat empat kuadran proyeksi sektor ekonomi

berdasarkan penghitungan LQ dan DLQ. Hasil penggabungan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Terdapat empat sektor basis di Kabupaten Pesisir Selatan yang prospektif untuk dikembangkan, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Penyediaan akomodasi dan makan minum, Informasi dan Komunikasi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

<p>LQ > 1, DLQ > 1 KUADRAN I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3. Informasi dan Komunikasi 4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib <p>sektor basis, prospektif</p>	<p>LQ > 1, DLQ < 1 KUADRAN III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi <p>sektor basis, non prospektif</p>
<p>LQ < 1, DLQ > 1 KUADRAN II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Industri Pengolahan 3. Pengadaan Listrik dan Gas 4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 5. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil 6. Transportasi dan Pergudangan 7. Jasa Keuangan dan Asuransi 8. Real Estat 9. Jasa Perusahaan 10. Jasa Pendidikan 11. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 	<p>LQ < 1, DLQ < 1 KUADRAN IV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Lainnya <p>sektor non basis, non prospektif</p>

Gambar 3.7
Static Location Quotation dan Dynamic Location Quotation
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023
Sumber : BPS 2024, diolah

3.5.3 Analisis Shift Share

Analisis shift share menganalisis perbandingan antara perubahan struktur ekonomi daerah dengan perekonomian daerah yang lebih besar atau di atasnya, baik regional maupun nasional untuk menentukan kinerja ataupun produktivitas perekonomian daerah. Shift-share merupakan suatu metode alternatif untuk mengukur laju pertumbuhan dan daya saing suatu wilayah. Melalui metode ini, suatu sektor ekonomi dapat diukur cepat atau lambatnya tingkat pertumbuhan suatu wilayah, termasuk sektor yang menjadi penyumbang daya saing suatu wilayah terhadap wilayah lain.

Analisis shift-share Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan menghitung *Nij* atau pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dari sisi eksternal. Pertumbuhan proporsional (*Mij*) digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (*Cij*) digunakan untuk melihat tingkat daya saing Kabupaten Pesisir Selatan terhadap wilayah lain.

Tabel 3.8
Analisis Shift Share Kabupaten Pesisir Selatan 2018-2023 (Juta Rp)

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Regional (<i>Nij</i>)	Pertumbuhan Proporsional (<i>Mij</i>)	Keunggulan Kompetitif/Pertumbuhan Pangsa Wilayah (<i>Cij</i>)	Pergeseran Bersih (<i>Dij</i>)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	386079,34	-54135,67	11164,75698	343108,43
B	Pertambangan dan Penggalian	38249,09886	-21519,7545	1815,455604	18544,8
C	Industri Pengolahan	86726,07779	-64777,2195	-43942,3483	-21993,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	353,7569042	-248,35555	7,068647981	112,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	723,3386268	273,0163106	-577,804937	418,55
F	Konstruksi	107561,0927	-10767,1906	-32898,8621	63895,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	132380,1679	73495,47206	2199,639992	208075,28
H	Transportasi dan Pergudangan	42652,76282	-60411,6761	41604,17324	23845,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	11452,49515	-177,794911	364,9097657	11639,61
J	Informasi dan Komunikasi	77785,61323	165863,3649	-14920,6082	228728,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	21551,16212	11682,68354	-8535,71566	24698,13
L	Real Estat	14644,77476	5876,486915	-6442,12167	14079,14
M,N	Jasa Perusahaan	561,2862128	-33,3385375	-207,677675	320,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	62191,32095	-17331,2221	-21138,7589	23721,34
P	Jasa Pendidikan	30481,46503	26850,18487	1854,830093	59186,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13803,88001	22083,28512	-3125,77513	32761,39
R,S, T,U	Jasa Lainnya	11349,09807	4427,905086	-3424,42316	12352,58

Sumber : BPS 2024, diolah

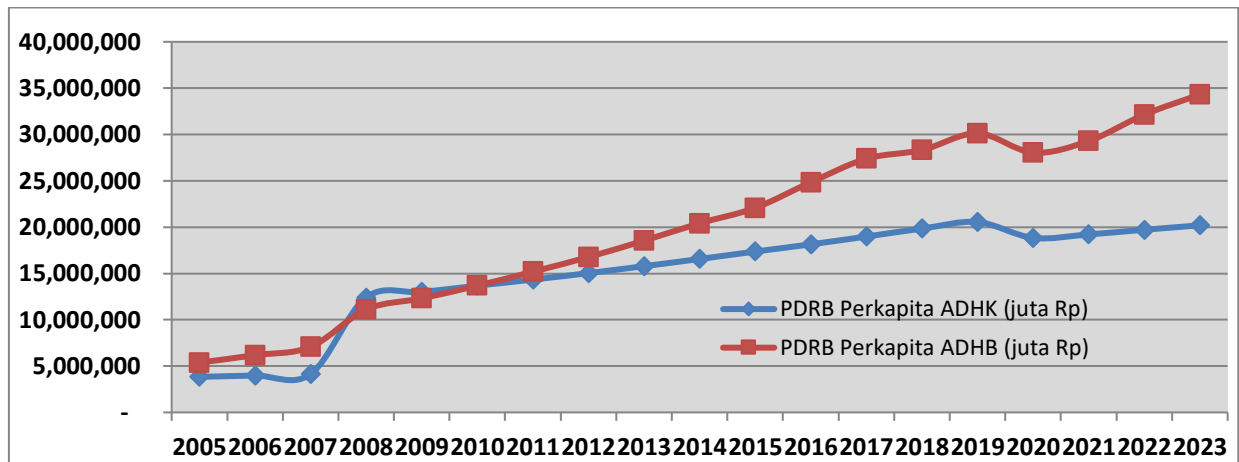
Hasil analisis *shift share* dengan pendekatan klasik disajikan pada tabel diatas menunjukkan secara keseluruhan sektor di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai komponen *Nij* yang positif. Hal ini menggambarkan pertumbuhan sektor-sektor tersebut secara positif dipengaruhi oleh pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini kebijakan umum secara provinsi berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan sektor pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya komponen pertumbuhan proporsional (*Mij*) pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Konstruksi, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Perusahaan, dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, menunjukkan nilai yang negatif (-), yang mengindikasikan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan sektor tersebut di Kabupaten Pesisir Selatan lebih lambat dibandingkan dengan sektor di Provinsi Sumatera Barat. Komponen keunggulan kompetitif (*Cij*) untuk Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan sektor Jasa Pendidikan menunjukkan nilai positif (+). Hal ini mengindikasikan sektor tersebut di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Sumatera Barat.

3.5.4 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara atau daerah. Pendapatan perkapita adalah total penghasilan negara atau daerah dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga nilainya mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk negara atau daerah tersebut.

Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu negara atau daerah, akan mencerminkan semakin sejahtera masyarakat negara atau daerah yang bersangkutan. Perkembangan nilai pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang periode 2005-2023 terlihat adanya kecenderungan peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,10% untuk nilai berdasarkan harga konstan dan 0,11% untuk nilai berdasarkan harga berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.10 berikut ini.



Gambar 3.6
Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan ADHK Tahun 2010 dan PDRB Perkapita ADHB Tahun 2005-
2023

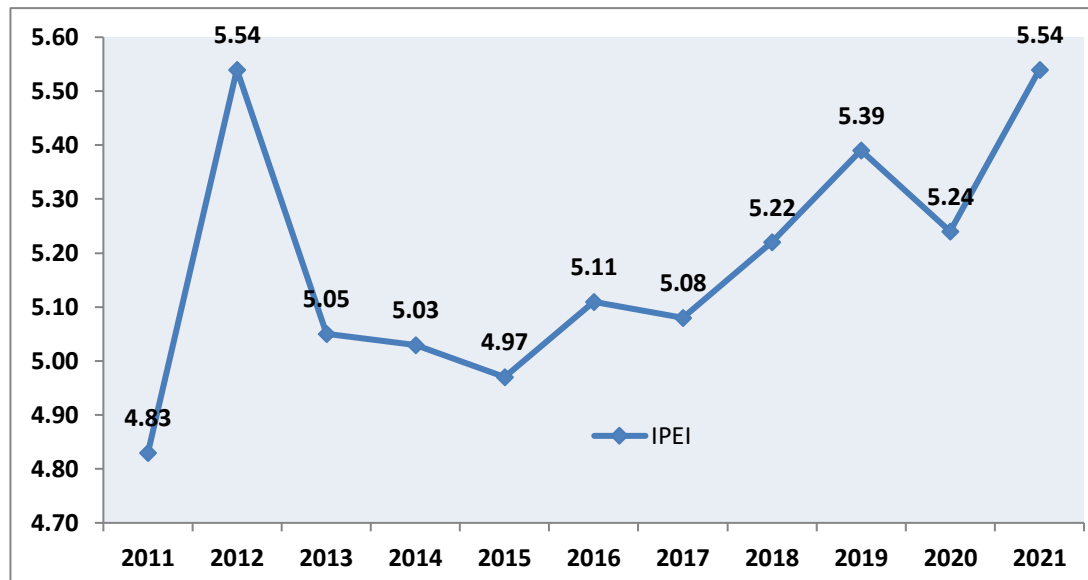
Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Hal demikian ini mengartikan bahwa terjadi gap atau kesenjangan antara pendapatan perkapita nominal dengan pendapatan perkapita riil semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan riil melaju lebih lambat dibandingkan pendapatan nominal yang mengandung unsur inflasi. Tentu saja akibatnya tingkat daya beli dan kesejahteraan masyarakat pun bertumbuh lebih lambat.

3.5.5 Indeks Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Ekonomi yang inklusif diukur melalui indeks, yaitu Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). IPEI mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan serta akses dan kesempatan. Penilaian IPEI berdasarkan skala : 1-3 kurang memuaskan; 4-7 memuaskan; 8-10 sangat memuaskan. Tahun 2021 IPEI Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 5,54 yang berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan telah

berpredikat memuaskan dalam fokus dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.8
Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2021

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2023

3.5.6 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB digunakan untuk mengukur kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB daerah itu sendiri. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara nilai berfluktuatif. Capaian tertinggi dalam 6 tahun terakhir terjadi tahun 2018 dimana kontribusi Rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar 0,182%. Angka ini terus menurun hingga tahun 3 tahun kemudian. Namun tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 0,020 dari tahun 2021 menjadi 0,167% akan tetapi belum dapat menyamai capaian tertinggi yang terjadi pada tahun 2018. Sementara tahun 2023 kembali turun menjadi 0,152%. Nilai Rasio pajak daerah terhadap PDRB yang masih kecil ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan belum dapat mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah atau masih tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari Pusat. Capaian Rasio pajak daerah terhadap

PDRB diKabupaten Pesisir Selatan selengkapnya dapat dilihat dalam Gambar berikut.



Gambar 3.9
Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023
Sumber: BPKPAD Kab.Pesisir Selatan, 2023 (data diolah)

BAB 4

KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

4.1 Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata

Menurut Permenparekraf Nomor 10 Tahun 2016 bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi pariwisata yang begitu beragam, khususnya dari sisi produk wisata. Dengan potensi alam dan budaya yang dimiliki, Kabupaten Pesisir Selatan menawarkan berbagai daya tarik wisata. Produk wisata Kabupaten Pesisir Selatan memiliki keragaman, baik alam yang terdiri pantai, laut dan terumbu karang serta biota lautnya, dataran rendah dengan pola kehidupan masyarakat pesisirnya, dataran tinggi dengan pemandangan alam dan kehidupan masyarakatnya serta berbagai spesies flora dan fauna pada pegunungan.

Daya tarik wisata alam adalah segala sesuatu yang menarik wisatawan karena keindahan, keunikan, dan kekayaan alamnya. Daya tarik wisata budaya merupakan kegiatan wisata yang berfokus pada hasil-hasil seni budaya daerah, seperti adat istiadat, upacara keagamaan, tata hidup masyarakat, dan peninggalan sejarah, dan hasil seni dan kerajinan masyarakat. Kebudayaan bisa menjadi daya tarik wisata karena memiliki nilai-nilai estetika, historis, dan filosofis. Salah satu manfaat dari wisata budaya adalah membantu melestarikan budaya dari tempat yang dikunjungi.

Adapun data daya tarik wisata alam, budaya dan buatan manusia di Kabupaten Pesisir disajikan pada data berikut ini.

Tabel 4.1
Daftar Destinasi Wisata di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Destinasi	Kategori	Sub Kategori	Aktifitas Wisata	Alamat	Kecamatan
1	Pantai Sambungo	Alam	Bahari	Pantai	Nagari Sambungo	Kecamatan Silaut
2	Jembatan Merah	Alam	Wisata Alam	Sungai, Flora dan Fauna	Nagari Sungai Gambir Sako	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
3	Talun Tujuh Bidadari	Alam	Ekowisata	Sungai	Nagari Pelangai Gadang	Kecamatan Pancung Soal
4	Pantai Taluak Kualo	Alam	Bahari	Pantai	Nagari Taluak Kualo	Kecamatan Pancung Soal
5	Pulau Baringin	Alam	Bahari	Atas Laut, Bawah Laut	Nagari Pasa Lamo Muaro Air Haji	Kecamatan Linggo Sari Baganti
6	Pantai Katang-Katang	Alam	Bahari	Pantai	Nagari Pasa Lamo Muaro Air Haji	Kecamatan Linggo Sari Baganti
7	Pantai Muaro Kandi	Alam	Bahari	Pantai	Nagari Muaro Kandi	Kecamatan Linggo Sari Baganti
8	Pantai Muaro Jambu	Alam	Bahari	Pantai	Nagari Muaro Jambu	Kecamatan Linggo Sari Baganti
9	Air Terjun Sei Liku	Alam	Ekowisata	Sungai	Nagari Sungai Liku Pelangai	Kecamatan Ranah Pesisir
10	Air Terjun Pelangai Gadang	Alam	Ekowisata	Sungai	Nagari Pelangai Gadang	Kecamatan Ranah Pesisir
11	Pantai Sumedang Jaya Wisata	Alam	Bahari	Pantai	Nagari Nyiur Melambai	Kecamatan Ranah Pesisir
12	Air Terjun Palano	Alam	Ekowisata	Sungai	Nagari Lakitan Timur	Kecamatan Lengayang
13	Pemandian Kapalo Banda	Alam	Ekowisata	Sungai	Kambang Timur Lengayang	Kecamatan Lengayang
14	Pulau Gosong	Alam	Bahari	Atas dan Bawah Laut	Kec. Lengayang	Kecamatan Lengayang
15	Pasir Putih	Alam	Bahari	Pantai	Kambang Barat Lengayang	Kecamatan Lengayang
16	Bukit Taratak	Alam	Petualangan	Panoramic	Nagari Taratak	Kecamatan Sutera
17	Pulau Gerabak Besar	Alam	Bahari	Pantai, Atas Laut	Kec. Sutera	Kecamatan Sutera
18	Pantai Simpang Tigo Buayo Putih	Alam	Bahari	Pantai	Nagari Taratak	Kecamatan Sutera
19	Pemandian Lubuak Kualo	Alam	Ekowisata	Sungai	Anduriang, Nagari IV Koto Hilie	Kecamatan Batang Kapas
20	Pemandian Induriang Jalamu	Alam	Ekowisata	Sungai	Jalamu, Nagari IV Koto Hilie	Kecamatan Batang Kapas
21	Objek Wisata Batu Kudo	Alam	Ekowisata	Sungai	Nagari Taluak Tigo Sakato	Kecamatan Batang Kapas
22	Pulau Batu Nago	Alam	Bahari	Atas Laut, Bawah Laut, Pantai	Nagari Koto Nan Duo	Kecamatan Batang Kapas
23	Teluk Tempurung	Alam	Bahari	Atas Laut, Bawah Laut, Pantai	Sei Pampan, Nagari Koto Nan Tigo	Kecamatan Batang Kapas
24	Labuang Baruak	Alam	Bahari	Atas Laut, Bawah Laut, Pantai	Sungai Bungin, Nagari Koto Nan Duo	Kecamatan Batang Kapas
25	Pantai Tan Sridano	Alam	Bahari dan Ekowisata	Atas Laut, Bawah Laut, Pantai, sungai	Nagari Taluk	Kecamatan Batang Kapas

26	Pantai Sungai Bungin	Alam	Bahari	Pantai	Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie	Kecamatan Batang Kapas
27	Pantai Taluak Kasai	Alam	Bahari	Pantai	Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie	Kecamatan Batang Kapas
28	Air Terjun Timbulun Painan	Alam	Ekowisata	Sungai	Nagari Painan Timur	Kecamatan IV Jurai
29	Air Terjun Sarasah Talang	Alam	Ekowisata	Sungai	Nagari Lumpo	Kecamatan IV Jurai
30	Air Terjun Lumpo	Alam	Ekowisata	Sungai	Nagari Lumpo	Kecamatan IV Jurai
31	Pemandian Batu Biduak Limau Gadang Lumpo	Alam	Ekowisata	Sungai	Nagari Lumpo	Kecamatan IV Jurai
32	Pulau Semangki Gadang dan Ketek	Alam	Bahari	Atas Laut, Bawah laut dan Pantai	Nagari Painan Selatan	Kecamatan IV Jurai
33	Pulau Aur Gadang dan Ketek	Alam	Bahari	Atas Laut, Bawah laut dan Pantai	Nagari Painan Selatan	Kecamatan IV Jurai
34	Pulau penyu	Alam	Bahari	Atas Laut, Bawah laut dan Pantai	Nagari Painan Selatan	Kecamatan IV Jurai
35	Pantai Bukit Biawak	Alam	Bahari	Pantai	Nagari Painan Selatan	Kecamatan IV Jurai
36	Pantai Salido	Alam	Bahari	Pantai	Nagari Salido	Kecamatan IV Jurai
37	Pantai Sago	Alam	Bahari	Pantai	Nagari Sago	Kecamatan IV Jurai
38	Jembatan Pelangi	Alam	Wisata Alam	Olahraga Air	Nagari Salido Sari Bulan	Kecamatan IV Jurai
39	Air Terjun Bayang sani	Alam	Ekowisata	Sungai	Nagari Koto Berapak	Kecamatan Bayang
40	Pantai Muaro Pasar Baru Bayang	Alam	Bahari	Pantai	Pasar Baru	Kecamatan Bayang
41	Pantai Api-Api	Alam	Bahari	Pantai	Nagari Api-api	Kecamatan Bayang
42	Jembatan Akar	Alam	Ekowisata	Bentang Alam Khusus	Nagari Pulut-Pulut	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
43	Puncak Gunjantino	Alam	Ekowisata, Petualangan	Ekologi Hutan, Jelajah dan Panoramic	Nagari Pulut-Pulut	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
44	Air Terjun Batuang	Alam	Ekowisata	Sungai	Nagari Pulut-Pulut	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
45	Air Terjun Lembah Dewa	Alam	Ekowisata	Sungai	Nagari Koto Ranah	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
46	Pantai Batu Kalang	Alam	Bahari	Pantai	Nagari Ampang Pulai	Kecamatan Koto XI Tarusan
47	Air Terjun Sarasah Siguntua Tuo	Alam	Ekowisata	Sungai	Nagari Siguntur Tua	Kecamatan Koto XI Tarusan
48	Tarasah Sungai Tawar	Alam	Ekowisata	Sungai	Nagari Nanggalo	Kecamatan Koto XI Tarusan
49	Kompleks Rumah Gadang Mandeh Rubiah	Budaya	Sejarah dan Tradisi	Keagamaan, Pendidikan dan Pusaka	Kampung Sitepung, Nagari Lunang	Kecamatan Lunang

50	Situs Peninggalan Sejarah Kerajaan dan Makam Raja-Raja Inderapura	Budaya	Sejarah dan Tradisi	Keagamaan, Pendidikan dan Pusaka	Kampung Muaro Sakai, Nagari Inderapura	Kecamatan Pancung Soal
51	Komplek Makam Tuanku Berdarah Putih	Budaya	Sejarah dan Tradisi	Keagamaan, Pendidikan dan Pusaka	Kampung Palokan Hilir, Indera Pura	Kecamatan Pancung Soal
52	Situs Kerajaan Inderapura	Budaya	Sejarah dan Tradisi	Keagamaan, Pendidikan dan Pusaka	Nagari Pulau Rajo	Kecamatan Air Pura
53	Masjid Al Iman	Budaya	Sejarah dan Tradisi	Keagamaan, Pendidikan dan Pusaka	Kampung Koto Baru, Nagari Kambang	Kecamatan Lengayang
54	Rumah Percetakan Uang	Budaya	Sejarah dan Tradisi	Pendidikan dan Pusaka	Kampung Koto Pulai, Nagari Kambang	Kecamatan Lengayang
55	Tugu Uang	Budaya	Sejarah dan Tradisi	Pendidikan dan Pusaka	Kampung Koto Pulai, Nagari Kambang	Kecamatan Lengayang
56	Surau Tanjung	Budaya	Sejarah dan Tradisi	Keagamaan, Pendidikan dan Pusaka	Limau Sundai, Nagari IV Koto Hilie	Kecamatan Batang Kapas
57	Makam H. Ilyas Yakub di Kapencong	Budaya	Sejarah dan Tradisi	Pendidikan dan Pusaka	Nagari Kapencong	Kecamatan Bayang
58	Makam Syekh Muhammad Jamil	Budaya	Sejarah dan Tradisi	Keagamaan, Pendidikan dan Pusaka	Nagari Koto Baru	Kecamatan Bayang
59	Situs Kursi Rajo	Budaya	Sejarah dan Tradisi	Pendidikan dan Pusaka	Nagari Pulut-Pulut	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
60	Makam Syekh Buyung Mudo	Budaya	Sejarah dan Tradisi	Keagamaan, Pendidikan dan Pusaka	Nagari Pulut-Pulut	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
61	Komplek Makam Sultan Perhimpunan Alam	Budaya	Sejarah dan Tradisi	Keagamaan, Pendidikan dan Pusaka	Nagari Duku	Kecamatan Koto XI Tarusan
62	Pemandian Muaro Sako	Buatan Manusia	Wisata Olahraga	Olahraga Renang	Nagari Muaro Sako	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
63	Arum Jeram	Buatan Manusia	Wisata Olahraga	Extreme	Nagari Pelangai Gadang	Kecamatan Ranah Pesisir
64	Rumah Pohon	Buatan Manusia	Wisata Kawasan Terpadu	Wisata Taman	Nagari Limau-Limau.	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
65	Pulau Rajo	Alam, Budaya	Bahari, Sejarah dan Tradisi	Pantai, Keagamaan, Pendidikan dan Pusaka	Nagari Pulau Rajo	Kecamatan Air Pura

66	Pulau Gerabak Kecil	Alam, Buatan Manusia	Bahari, Ekowisata	Pantai, Atas Laut, Ekologi Laut	Kec. Sutera	Kecamatan Sutera
67	Penangkaran Penyu Ampiang Parak	Alam, Buatan Manusia	Bahari, Ekowisata	Pantai, Ekologi Hutan Mangrove, Sungai, Konservasi	Nagari Ampiang Parak	Kecamatan Sutera
68	Bukit Langkisau	Alam, Buatan Manusia	Petualangan, Wisata Olahraga,	Panoramic, Olahraga.	Nag. Painan Selatan	Kecamatan IV Jurai
69	Pemandian Lubuak Pauh	Alam, Buatan Manusia	Ekowisata, Wisata Olahraga	Sungai, Extreme	Nagari Pulut-Pulut	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
70	Kawasan Pantai Carocok Painan (Pulau Kereta, Pulau Cingkuk dan Situs Cagar Budaya Benteng Portugis dan Makam Van kempen).	Alam, Budaya, Buatan Manusia	Bahari, Ekowisata, Petualangan, Kuliner dan Belanja, Sejarah dan Tradisi, Mice, Wisata Kawasan Terpadu, Wisata Olahraga	Atas Laut, Bawah Laut, Pantai, Bentang Alam Khusus, Panoramic, Budaya, Gastronomi, Tradisi, Keagamaan, Pendidikan, Pusaka, Meeting, Wisata Restoran, Wisata Taman, Wisata Extreme, Kesehatan dan Olahraga.	Carocok, Nagari Painan Selatan	Kecamatan IV Jurai
71	Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh	Alam, Budaya, Buatan Manusia	Bahari, Ekowisata, Petualangan, Kuliner Belanja, Sejarah dan Tradisi, MICE, Wisata Kawasan Terpadu, Wisata Olahraga.	Atas taut, Bawah Laut, Pantai, Bentang Alam Khusus, Ekologi Hulan, Sungai, Jelajah, Panoramic, Budaya, Gastronomi, Tradisi, Pendidikan, Pusaka, Meeting, Wisata Restoran, Wisata Taman, Wisata Extreme, Kesehatan Olahraga	Nagari Ampang Pulau, Carocok Anau, Setara Nanggalo, Mandeh, Sungai Nyalo, Sungai Pinang.	Kecamatan Koto XI Tarusan

Adapun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke beberapa destinasi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Destinasi Wisata di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023

No	Nama Destinasi	Jumlah Pengunjung (Orang)
1	Carocok Painan	842.042
2	Kawasan Mandeh	768.715
3	Sumedang Jaya Wisata	191.307
4	Rumah Gadang Mandeh Rubiah	118.173
5	Batu Kalang	93.596
6	Pantai Family	35.430
7	Ampiang Parak	16.764
8	Jembatan Akar	7.946
9	Pantai Tansridano	7.073
10	Pantai Biru	6.812
11	Pantai Suta	6.777
12	Pulau Karam	5.340
13	Bayang Sani	3.810
	Jumlah	2.104.144

4.2 Fasilitas Pariwisata

Menurut Permenparekraf Nomor 10 Tahun 2016 bahwa fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. Selain keberadaan keanekaragaman potensi daya tarik wisata sebagai komponen utama yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan, maka ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata memegang peran penting dalam memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan selama kunjungannya di Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun jenis dan kondisi sarana prasarana pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut.

4.2.1 Fasilitas Jalan

Jalan merupakan salah satu fasilitas transportasi darat yang memegang peran penting dalam menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan serta antara Kabupaten Pesisir Selatan dengan kabupaten lainnya di provinsi Sumatera Barat. Panjang jalan dengan tingkat kewenangan Kabupaten di Kabupaten Pesisir Selatan di sampai dengan tahun 2022 adalah 2.333,32 Km. Data mengenai panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintahan yang berwenang mengelolanya di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2020–2022

No	Status Kewenangan	Panjang Jalan (Km)		
		2020	2021	2022
1	Pusat	-	-	-
2	Provinsi	91,55	91,55	91,55
3	Kabupaten	2.333,18	2.333,18	2.333,32

Sumber : BPS, 2024

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan akses jalan dalam menunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan secara umum cukup memadai, walaupun belum mampu menjangkau seluruh potensi daya Tarik wisata, khususnya pada wilayah pulau-pulau diluar pulau daratan utama Kabupaten Pesisir Selatan. Selain ketersediaan panjang jalan, faktor kondisi jalan juga memegang peranan penting dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat termasuk wisatawan pada saat melakukan perjalanan di Kabupaten Pesisir Selatan. Data mengenai kondisi dan jenis permukaan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2022

No	Status Kewenangan	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Pusat	-	-	-	-
2	Provinsi	-	-	-	-
3	Kabupaten	754,59	245,38	371,56	961,78

4.2.2 Prasarana Listrik

Tabel 4.2.1
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2023

No	Kecamatan	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Teroasang (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
1	Silaut
2	Lunang
3	Basa Ampek Balai Tapan
4	Ranah Ampek Hulu Tapan
5	Pancung Soal
6	Airpura
7	Linggo Sari Baganti
8	Ranah Pesisir
9	Lengayang
10	Sutera	12.061.250	-	18.722.580	-	1.359.259
11	Batang kapas	6.261.200	-	9.719.210	-	705.615
12	IV Jurai	19.968.200	-	30.996.474	56.026	2.250.344
13	Bayang	9.154.650	-	14.210.689	-	1.031.696
14	IV Nagari Bayang Utara	5.266.050	-	8.174.447	-	593.465
15	Koto XI Tarusan	13.216.750	-	20.516.253	-	1.489.480
		65.928.100	-	102.339.653	56.026	6.132.078

4.3 Aksesibilitas Pendukung Pariwisata

Aksesibilitas adalah salah satu elemen kunci dalam industri pariwisata yang memainkan peran penting dalam menentukan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi wisatawan dalam mencapai suatu destinasi. Secara sederhana, aksesibilitas dalam konteks pariwisata mengacu pada bagaimana wisatawan dapat mencapai dan bergerak di dalam sebuah destinasi. Tanpa aksesibilitas yang baik, potensi sebuah destinasi wisata tidak akan maksimal, terlepas dari daya tarik wisata yang dimilikinya. Dalam konteks pengembangan pariwisata, aksesibilitas mencakup segala hal mulai dari transportasi, infrastruktur, hingga keterhubungan dengan wilayah lain.

Aksesibilitas dalam pariwisata merujuk pada kemudahan dan kemampuan wisatawan untuk mencapai destinasi wisata serta bergerak di dalamnya. Ini mencakup semua jenis transportasi, baik darat, laut, udara, maupun fasilitas pendukung lain seperti infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara. Selain itu, aksesibilitas juga mencakup bagaimana wisatawan dari berbagai latar belakang dan kemampuan fisik dapat menikmati destinasi wisata tanpa hambatan yang berarti.

Dalam kerangka pengembangan pariwisata berkelanjutan, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan jumlah dan kualitas infrastruktur, tetapi juga dengan keberlanjutan serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, aksesibilitas yang baik adalah yang mampu memberikan kenyamanan, efisiensi, serta meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan budaya setempat.

1. Transportasi

Transportasi merupakan tulang punggung aksesibilitas dalam pariwisata. Kualitas, frekuensi, dan keterjangkauan transportasi mempengaruhi pilihan wisatawan dalam menentukan tujuan wisata. Ada tiga bentuk transportasi utama yang mendukung aksesibilitas wisata:

- a. Transportasi Darat: Mencakup jalan raya, rel kereta, dan jaringan bus. Keberadaan jalan raya yang memadai, lancar, serta infrastruktur jalan yang baik merupakan faktor penting. Di destinasi wisata yang berada di kawasan

pegunungan atau terpencil, akses darat sering kali menjadi tantangan. Oleh karena itu, pengembangan jalan raya dan jembatan harus direncanakan dengan baik agar wisatawan dapat mencapai tempat-tempat yang sulit diakses. Sebagai contoh, Jalan Lintas Sumatra di Indonesia adalah salah satu jalur utama yang mendukung pariwisata di wilayah barat Indonesia. Jalan ini memungkinkan wisatawan mengakses destinasi wisata dari Lampung hingga Aceh.

- b. Transportasi Udara: Dalam pariwisata internasional, transportasi udara adalah komponen yang sangat krusial. Bandara berfungsi sebagai gerbang utama masuknya wisatawan dari berbagai negara. Infrastruktur bandara yang memadai, termasuk layanan transportasi dari dan ke bandara, merupakan hal esensial untuk mendukung pariwisata. Bandara Internasional Minangkabau di Padang, Sumatera Barat, misalnya, berperan penting dalam mendukung aksesibilitas wisatawan yang ingin mengunjungi kawasan Pesisir Selatan.
- c. Transportasi Laut: Bagi destinasi wisata yang berada di wilayah kepulauan atau di pesisir, transportasi laut memainkan peranan penting. Pelabuhan yang memadai dan layanan kapal yang aman serta nyaman menjadi faktor penting dalam aksesibilitas wisata. Destinasi seperti pulau-pulau kecil di Kabupaten Pesisir Selatan sangat bergantung pada transportasi laut untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, pengembangan pelabuhan yang memadai dan layanan transportasi laut khususnya untuk wisata yang efisien harus diperhatikan.

2. Infrastruktur Jalan dan Konektivitas

Selain jenis transportasi, infrastruktur jalan dan konektivitas antara satu destinasi ke destinasi lain adalah komponen penting aksesibilitas pariwisata. Infrastruktur jalan yang baik akan memudahkan pergerakan wisatawan dalam mencapai tempat wisata. Hal ini mencakup jaringan jalan yang terpelihara dengan baik, fasilitas penunjang seperti tempat istirahat, rambu lalu lintas, dan jalan tol yang mempercepat akses antar destinasi.

Di kawasan pariwisata yang tersebar di beberapa tempat di Pesisir Selatan, penting untuk memiliki konektivitas antar destinasi wisata. Pembangunan jalan penghubung antara destinasi utama, tempat penginapan, restoran, dan tempat wisata

lain harus direncanakan secara strategis agar wisatawan mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya.

Dalam dunia pariwisata modern, aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi fokus utama. Destinasi wisata yang ramah disabilitas memiliki infrastruktur yang mendukung, seperti jalan khusus untuk kursi roda, lift di tempat-tempat wisata, dan tanda arah yang jelas. Penyediaan fasilitas khusus ini sangat penting agar setiap individu, tanpa memandang kondisi fisiknya, dapat menikmati pengalaman wisata yang inklusif.

Faktor utama untuk kelancaran perhubungan darat adalah tersedianya sarana jalan dan jembatan, oleh karena jalan dan jembatan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Dilihat dari status kewenangannya, jalan di Kabupaten Pesisir Selatan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu : jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten.

3. Transportasi Lokal dan Mobilitas di Destinasi Wisata

Selain transportasi untuk menuju destinasi, aksesibilitas di dalam destinasi itu sendiri juga sangat penting. Transportasi lokal seperti bus wisata, taksi, atau transportasi online menjadi bagian integral dalam mobilitas wisatawan. Di beberapa pesisir selatan, transportasi lokal menjadi bagian penting dari pengalaman wisata itu sendiri. Misalnya, perahu wisata di kawasan Mandeh bukan hanya alat transportasi, tetapi juga menjadi atraksi wisata yang unik.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki pelabuhan dan dermaga yang ada di Kabupaten sebanyak 13 buah

Tabel 4.3
Daftar Pelabuhan dan Dermaga di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi	Fungsi
1.	Pelabuhan Panasahan Painan	Painan	Pelabuhan Regional / antar pulau dalam wilayah Indonesia
2.	Dermaga Carocok Tarusan	Batu Kalang	Penyeberangan dan Perikanan
3.	Dermaga Muaro Surantih	Surantih	Perikanan
4.	Dermaga Kambang	Kambang	Perikanan
5.	Dermaga Muaro Gadan	Muaro Gadang	Perikanan
6.	Dermaga Muaro Air Haji	Air Haji	Perikanan
7.	Dermaga Muaro Sakai	Inderapura	Penyeberangan
8.	Dermaga Alang Rambah	Tapan	Penyeberangan
9.	Dermaga Sei Nyalo	Tarusan	Penyeberangan Antar Pulau
10.	Dermaga Pulau Cingkuak	IV Jurai	Penyeberangan
11	Dermaga Batu Kereta	Painan	Penyeberangan
12	Dermaga Kandang Jawi	Painan	Penyeberangan
13	Pelabuhan Kapo-Kapo	Tarusan	Penyeberangan dan Perikanan

4. Informasi dan Teknologi Pendukung Aksesibilitas

Di era digital ini, teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam aksesibilitas wisata. Keberadaan aplikasi peta digital, seperti Google Maps atau aplikasi navigasi lainnya, memudahkan wisatawan menemukan rute terbaik menuju destinasi wisata. Selain itu, aplikasi transportasi online seperti Gojek atau Grab juga sangat membantu dalam menyediakan transportasi lokal bagi wisatawan, terutama di kawasan perkotaan.

Selain itu, informasi pariwisata yang jelas dan mudah diakses juga sangat penting. Ini termasuk tanda-tanda jalan yang mudah dibaca, informasi tentang jadwal transportasi, dan peta lokasi wisata. Di banyak destinasi wisata

internasional, pusat informasi wisata menyediakan brosur dan peta dalam berbagai bahasa, yang sangat membantu wisatawan mancanegara dalam menavigasi destinasi yang mereka kunjungi.

5. Konektivitas Digital

Akses internet dan konektivitas digital juga menjadi bagian penting dari aksesibilitas dalam dunia pariwisata modern. Banyak wisatawan yang sangat bergantung pada internet untuk merencanakan perjalanan mereka, memesan tiket, mengakses layanan transportasi, hingga berbagi pengalaman mereka di media sosial. Oleh karena itu, keberadaan Wi-Fi gratis di tempat-tempat umum, penginapan, dan tempat wisata menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi wisatawan saat ini.

Misalnya, di beberapa destinasi wisata di Eropa, fasilitas Wi-Fi gratis sudah tersedia di hampir setiap tempat wisata utama, dari museum hingga stasiun kereta. Di Indonesia, meskipun beberapa destinasi sudah mulai menyediakan Wi-Fi publik, ada banyak tempat yang masih perlu meningkatkan konektivitas internet untuk mendukung kenyamanan wisatawan.

Sarana Telekomunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di Era Globalisasi baik untuk komunikasi maupun untuk berbagi dan memperoleh informasi. Berbagai sarana telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat memenuhi kebutuhan komunikasi dan informasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan internet. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana telekomunikasi tersebut yaitu membangun tower Jaringan telepon seluler melalui pihak swasta, sebanyak 147 menara telekomunikasi tersebar di semua kecamatan sampai tahun 2016. Dengan adanya menara telekomunikasi ini, sehingga telepon seluler dapat menjangkau sampai ke daerah-daerah pelosok yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelas jumlah dan lokasi menara telekomunikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Kecamatan	JUMLAH
1	Koto XI Tarusan	13
2	Bayang	10
3	IV Nagari Bayang Utara	3
4	IV Jurai	21
5	Batang kapas	8
6	Sutera	7
7	Lengayang	11
8	Ranah Pesisir	7
9	Linggo Sari Baganti	7
10	Pancung Soal	7
11	Airpura	2
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	1
13	Basa Ampek Balai Tapan	4
14	Lunang	6
15	Silaut	4
	JUMLAH	111

6. Keamanan dan Kenyamanan

Faktor keamanan dan kenyamanan juga menjadi komponen penting dalam aksesibilitas wisata. Keamanan transportasi, baik di darat, laut, maupun udara, harus dipastikan agar wisatawan merasa aman dalam perjalanan mereka. Selain itu, keamanan jalan raya, terutama di destinasi wisata yang terpencil, juga harus diperhatikan. Wisatawan yang merasa aman dalam perjalanan mereka cenderung akan menikmati pengalaman wisata mereka dengan lebih baik.

Selain itu, kenyamanan fasilitas umum seperti toilet umum, rest area, dan tempat makan yang mudah dijangkau juga menjadi bagian dari aksesibilitas yang harus dipertimbangkan.

7. Implementasi Aksesibilitas Pariwisata di Pesisir Selatan

Dalam konteks pengembangan pariwisata di Pesisir Selatan, Sumatera Barat, aksesibilitas menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Daerah ini memiliki potensi wisata yang sangat besar, termasuk wisata alam, pantai, dan budaya. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, aksesibilitas harus ditingkatkan.

Misalnya, pembangunan jalan yang lebih baik menuju destinasi wisata seperti Pantai Carocok, Teluk Mandeh, dan Jembatan Akar sangat penting untuk

memudahkan wisatawan dalam mencapai tempat-tempat tersebut. Selain itu, peningkatan akses transportasi udara melalui Bandara Internasional Minangkabau juga akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang ingin menjelajahi keindahan Pesisir Selatan.

Peningkatan fasilitas transportasi lokal, seperti penyediaan bus wisata atau transportasi online yang lebih terorganisir, juga dapat membantu wisatawan dalam menjelajahi kawasan Pesisir Selatan dengan lebih mudah. Konektivitas digital juga dapat ditingkatkan dengan menyediakan Wi-Fi di tempat-tempat wisata utama untuk memberikan kenyamanan lebih bagi wisatawan modern yang sangat bergantung pada internet.

4.4 Prasarana Umum Pendukung Pariwisata

4.4.1 Komponen-Komponen Prasarana Umum Pendukung Pariwisata

Prasarana umum pendukung pariwisata adalah segala bentuk infrastruktur fisik yang memungkinkan dan memudahkan aktivitas pariwisata di suatu destinasi. Prasarana ini mencakup fasilitas dasar yang dibutuhkan oleh wisatawan, termasuk transportasi, komunikasi, air bersih, listrik, sanitasi, serta fasilitas kesehatan. Keberadaan prasarana umum yang memadai sangat penting untuk menunjang kenyamanan dan pengalaman wisatawan selama mereka berkunjung ke suatu daerah.

Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pariwisata besar, baik dari segi keindahan alam, kekayaan budaya, hingga daya tarik ekowisata. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, perlu adanya prasarana umum yang mendukung. Dalam dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan, prasarana umum adalah faktor penting yang harus direncanakan dengan baik untuk menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan, nyaman, dan aman.

Prasarana umum pendukung pariwisata adalah infrastruktur fisik yang berfungsi sebagai fondasi utama dalam menyediakan kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas bagi wisatawan. Tanpa prasarana umum yang memadai, destinasi

wisata akan sulit berkembang, karena wisatawan membutuhkan fasilitas dasar yang bisa mendukung aktivitas mereka selama berada di suatu destinasi.

Prasarana umum dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

1. Prasarana transportasi seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, dan terminal.
2. Prasarana komunikasi yang mencakup jaringan telepon, internet, serta pusat informasi pariwisata.
3. Prasarana kesehatan, termasuk klinik, rumah sakit, dan apotek.
4. Prasarana utilitas umum, seperti penyediaan air bersih, listrik, sanitasi, dan pengelolaan limbah.

Prasarana ini harus dibangun secara terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan daya dukung dari kawasan tersebut, agar tidak merusak ekosistem alam dan sosial masyarakat lokal. Komponen-Komponen Prasarana Umum Pendukung Pariwisata

1. Jaringan Transportasi

Jalan Raya: Jalan adalah elemen penting yang memudahkan wisatawan untuk mengakses berbagai destinasi. Di Pesisir Selatan, kondisi jalan mempengaruhi seberapa mudah wisatawan dapat menjelajahi tempat-tempat wisata seperti Pantai Carocok, Mandeh, dan Jembatan Akar. Keberadaan jaringan jalan yang terpelihara dengan baik akan meningkatkan daya tarik wisata, karena wisatawan tidak akan merasa kesulitan untuk mencapai tempat wisata. Kualitas jalan yang buruk, sebaliknya, dapat menghalangi perkembangan pariwisata.

Pelabuhan dan Dermaga: Karena Kabupaten Pesisir Selatan terletak di sepanjang garis pantai, pelabuhan dan dermaga juga memainkan peran penting. Wilayah ini, terutama Teluk Mandeh, merupakan destinasi wisata yang sering diakses melalui jalur laut. Oleh karena itu, fasilitas pelabuhan yang memadai, dermaga yang aman, serta kapal-kapal yang bisa diandalkan adalah bagian penting dari prasarana transportasi wisata.

Bandara: Meskipun Pesisir Selatan tidak memiliki bandara sendiri, Bandara Internasional Minangkabau di Padang berfungsi sebagai gerbang masuk utama bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Pesisir Selatan. Oleh karena itu,

keberadaan akses jalan yang menghubungkan bandara dengan wilayah Pesisir Selatan sangat penting untuk mendukung arus wisatawan yang datang dari luar Sumatera Barat.

2. Sarana Komunikasi

Internet dan Telekomunikasi: Di era digital saat ini, akses terhadap jaringan internet menjadi kebutuhan penting bagi wisatawan. Wisatawan sering kali menggunakan internet untuk mencari informasi tentang tempat wisata, mengunggah pengalaman mereka di media sosial, serta menggunakan aplikasi peta atau transportasi online. Di Pesisir Selatan, ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet masih terbatas di beberapa daerah, terutama di wilayah yang terpencil dan jauh dari pusat kota. Peningkatan infrastruktur telekomunikasi ini sangat penting untuk mendukung pariwisata modern.

Pusat Informasi Wisata: Pusat informasi wisata adalah fasilitas di mana wisatawan dapat mengakses berbagai informasi tentang destinasi wisata, rute, akomodasi, dan aktivitas yang bisa dilakukan. Pusat ini juga harus dilengkapi dengan staf yang profesional dan ramah untuk memberikan pelayanan informasi. Di Pesisir Selatan, pusat informasi wisata masih perlu ditingkatkan jumlahnya, terutama di destinasi wisata populer seperti Pantai Carocok atau Kawasan Mandeh, agar wisatawan dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

3. Sarana Kesehatan

Rumah Sakit dan Klinik: Fasilitas kesehatan adalah elemen penting dalam prasarana umum, terutama di destinasi wisata yang terpencil atau rawan bencana alam. Wisatawan membutuhkan jaminan bahwa jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka akan dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan cepat dan mudah. Di Pesisir Selatan, fasilitas kesehatan masih terpusat di daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, pembangunan atau peningkatan klinik atau fasilitas kesehatan di dekat lokasi wisata sangat penting.

Apotek dan Toko Obat: Selain rumah sakit dan klinik, apotek yang menyediakan obat-obatan dasar juga merupakan bagian penting dari prasarana umum. Wisatawan yang menderita penyakit ringan atau membutuhkan obat

tertentu harus dapat mengakses apotek dengan mudah. Toko-toko obat ini harus tersebar di area-area wisata utama agar wisatawan tidak kesulitan mencarinya.

4. Fasilitas Utilitas Umum

Air Bersih: Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap destinasi wisata. Wisatawan membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan minum. Di Pesisir Selatan, pengelolaan air bersih di beberapa wilayah masih memerlukan peningkatan, terutama di destinasi wisata yang terpencil dan belum tersentuh oleh infrastruktur air yang memadai.

Listrik: Ketersediaan listrik yang stabil sangat penting untuk kenyamanan wisatawan. Banyak aktivitas wisata yang bergantung pada listrik, seperti penerangan, pengisian daya perangkat elektronik, dan sebagainya. Di beberapa kawasan di Pesisir Selatan, terutama yang jauh dari pusat kota, suplai listrik masih belum optimal. Pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya atau mikro hidro juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan ketersediaan listrik di daerah-daerah tersebut.

Sanitasi dan Pengelolaan Limbah: Destinasi wisata harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang baik, seperti toilet umum yang bersih dan pengelolaan limbah yang efektif. Jika fasilitas ini diabaikan, bukan hanya akan menimbulkan masalah kesehatan, tetapi juga dapat merusak citra destinasi wisata tersebut. Di beberapa pantai di Pesisir Selatan, seperti Pantai Carocok, fasilitas sanitasi perlu ditingkatkan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan wisatawan.

5. Sarana Pendukung Lainnya

Akomodasi: Akomodasi adalah bagian integral dari infrastruktur wisata. Di Pesisir Selatan, keberadaan hotel, penginapan, dan homestay yang memadai sangat penting untuk mendukung kedatangan wisatawan. Beberapa destinasi seperti Teluk Mandeh dan Pantai Carocok sudah memiliki beberapa fasilitas akomodasi, namun jumlahnya masih terbatas dan perlu ditingkatkan kualitas serta kuantitasnya.

Restoran dan Tempat Makan: Wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata memerlukan tempat makan yang nyaman dan aman. Di Pesisir Selatan, keberadaan restoran yang menyajikan masakan lokal dan internasional dapat menjadi daya tarik tambahan. Selain itu, kebersihan dan kualitas makanan di restoran juga sangat penting untuk diperhatikan.

Pusat Perbelanjaan dan Cenderamata: Salah satu aktivitas favorit wisatawan adalah berbelanja oleh-oleh atau cenderamata. Pusat-pusat perbelanjaan yang menyediakan produk-produk lokal seperti kerajinan tangan, kain tradisional, atau makanan khas akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal. Di Pesisir Selatan, pusat cenderamata masih bisa lebih dikembangkan untuk mendukung ekonomi kreatif masyarakat setempat.

4.4.2 Prasarana Umum Pendukung Pariwisata di Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat, namun masih banyak tantangan terkait prasarana umum yang harus diatasi. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan prasarana umum pendukung pariwisata di daerah ini:

- 1) Peningkatan Jaringan Transportasi: Kondisi jalan yang menghubungkan destinasi wisata utama seperti Pantai Carocok, Teluk Mandeh, dan Painan harus ditingkatkan untuk memudahkan akses wisatawan. Selain itu, perlu ada pengembangan pelabuhan yang lebih baik untuk mendukung wisata bahari, serta memperbaiki jalur transportasi umum yang terhubung dengan Bandara Internasional Minangkabau.
- 2) Peningkatan Sarana Komunikasi: Jaringan internet di beberapa destinasi wisata perlu diperluas dan diperkuat. Penyediaan pusat informasi wisata juga harus dioptimalkan, baik secara offline maupun online, agar wisatawan dapat dengan mudah menemukan informasi terkait destinasi wisata, fasilitas, dan aktivitas yang tersedia.
- 3) Pembangunan Fasilitas Kesehatan di Destinasi Wisata: Pesisir Selatan harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan, baik dalam bentuk klinik maupun

apotek, tersedia di sekitar destinasi wisata utama untuk menjamin keselamatan dan kesehatan wisatawan.

- 4) Pengelolaan Air Bersih dan Limbah: Penyediaan air bersih dan pengelolaan limbah yang efektif harus menjadi prioritas, terutama di destinasi wisata alam dan pantai. Instalasi pengelolaan air bersih serta fasilitas sanitasi yang baik akan membantu menciptakan lingkungan wisata yang bersih dan nyaman.
- 5) Pengembangan Fasilitas Akomodasi dan Tempat Makan: Fasilitas akomodasi dan tempat makan yang berkualitas akan meningkatkan kenyamanan wisatawan selama berada di Pesisir Selatan. Upaya untuk mendukung pengembangan homestay dan restoran lokal juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Dengan pengembangan prasarana umum yang terintegrasi dan berkelanjutan, Pesisir Selatan memiliki potensi untuk menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Ketersediaan prasarana yang memadai akan menciptakan pengalaman wisata yang lebih baik, meningkatkan kepuasan wisatawan, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata secara keseluruhan.

4.5 Penduduk Sebagai Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu komponen paling penting dalam industri pariwisata. SDM berkualitas mampu memberikan pelayanan prima kepada wisatawan, menciptakan pengalaman positif yang membuat wisatawan ingin kembali berkunjung, dan membantu mempromosikan destinasi wisata. Penduduk lokal sebagai sumber daya manusia pariwisata memegang peranan kunci dalam pengembangan destinasi wisata karena mereka memiliki pengetahuan lokal, budaya, serta akses langsung ke sumber daya wisata.

Kabupaten Pesisir Selatan, dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis pada keterlibatan penduduk lokal sebagai aktor utama dalam pelayanan wisata. Pengelolaan SDM yang baik, mulai dari pelatihan hingga pemberdayaan masyarakat, akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Dalam konteks penyusunan

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Pesisir Selatan 2025-2045, pemanfaatan penduduk sebagai potensi sumber daya manusia (SDM) pariwisata sangat penting untuk memperkuat posisi daerah ini sebagai destinasi wisata yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.

Dalam pengembangan pariwisata, penduduk lokal sering kali menjadi bagian integral dari sektor ini. Mereka tidak hanya menjadi tenaga kerja di bidang pariwisata, tetapi juga aktor utama yang terlibat langsung dalam berbagai aktivitas pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata, pengelola homestay, pengrajin produk lokal, serta pekerja di restoran dan hotel.

Penduduk lokal juga memiliki peran besar dalam membentuk citra suatu destinasi wisata. Pariwisata berbasis komunitas, atau *community-based tourism*, mengedepankan keterlibatan aktif penduduk dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan wisata di daerah mereka sendiri. Melalui pendekatan ini, tidak hanya wisatawan yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat lokal yang akan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari kehadiran wisatawan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah 457.285 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki 226.783 jiwa dan penduduk perempuan 230.502 jiwa dan sex ratio penduduk 98,39%. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten pesisir Selatan pada tahun 2017 adalah 79,53 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan Bayang dengan kepadatan penduduk 474,59 jiwa/km² diikuti kecamatan Linggo Sari Baganti 143,24 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Bayang Utara Kepadatan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Kavupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah penduduk			Kepadatan penduduk Per Km ²
			Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Kt XI Tarusan	425,63	24.079	7.207	48.555	114,08
2.	IV Nagari Bayang Utara	250,74	3.475	10.555	7.277	29,02
3.	Bayang	77,50	17.683	6.944	36.781	474,59
4.	IV Jurai	373,80	23.022	7.576	46.502	124,40
5.	Batang Kapas	359,07	15.471	13.059	31.480	87,67
6.	Sutera	445,65	25.204	7.946	50.516	113,35
7.	Lengayang	590,60	25.722	22.599	52.592	89,05
8.	Ranah Pesisir	564,39	14.745	15.568	30.313	53,71
9.	Linggo Sari Baganti	315,41	22.581	26.870	45.180	143,24
10.	Airpura	314,00	8.073	25.312	16.019	51,02
11.	Pancung Soal	426,10	13.436	16.009	26.495	62,18
12.	Ranah IV Hulu Tapan	312,22	7.583	23.480	15.159	48,55
13.	Basa Ampek Balai Tapan	365,28	6.849	19.098	13.793	37,76
14.	Lunang	564,00	10.975	3.802	21.530	38,17
15.	Silaut	365,50	7.886	24.477	15.093	41,29

Di Kabupaten Pesisir Selatan, potensi SDM pariwisata ini sangat besar. Penduduk lokal dapat diberdayakan untuk menjadi aktor utama dalam pengembangan pariwisata, dengan memperhatikan potensi alam, budaya, dan tradisi yang mereka miliki. Keberagaman adat istiadat, keterampilan seni, serta pengetahuan lokal tentang ekosistem alam menjadi modal yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Komponen dan Item-Item SDM Pariwisata

1. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan Formal dan Non-Formal: Salah satu tantangan utama dalam pengembangan SDM pariwisata di daerah terpencil adalah kualitas pendidikan formal yang masih rendah. Di Pesisir Selatan, peningkatan pendidikan formal di bidang pariwisata, seperti kejuruan pariwisata, sangat penting untuk mencetak tenaga kerja yang siap terjun ke industri ini. Selain itu, pendidikan non-formal seperti kursus bahasa asing, pelatihan manajemen pariwisata, dan keterampilan

hospitality dapat membantu penduduk lokal untuk siap bersaing di sektor pariwisata.

Pelatihan Pemandu Wisata: Penduduk lokal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang budaya dan lingkungan alam setempat dapat dilatih menjadi pemandu wisata. Mereka bisa menawarkan tur yang lebih personal dan autentik, sehingga pengalaman wisatawan lebih berkesan. Pelatihan pemandu wisata juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemandu dapat terus mengembangkan pengetahuannya dan beradaptasi dengan perubahan tren pariwisata.

Pelatihan Kewirausahaan: Sebagian besar penduduk lokal memiliki potensi untuk berwirausaha, terutama dalam pengelolaan homestay, restoran lokal, serta produksi kerajinan tangan dan oleh-oleh. Dengan pelatihan kewirausahaan, penduduk dapat diberdayakan untuk mengelola usaha pariwisata secara profesional dan berkelanjutan.

2. Keterlibatan Masyarakat Lokal

Pengelolaan Wisata Berbasis Komunitas: Pengembangan pariwisata berbasis komunitas sangat penting dalam memanfaatkan penduduk lokal sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata. Dalam konteks ini, masyarakat lokal terlibat langsung dalam merencanakan, mengelola, dan mempromosikan destinasi wisata. Hal ini memberikan keuntungan ekonomi yang lebih merata, meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap destinasi wisata, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal.

Homestay dan Akomodasi Lokal: Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat lokal yang dapat dikembangkan di Pesisir Selatan adalah homestay. Wisatawan yang mencari pengalaman autentik cenderung memilih tinggal di homestay, di mana mereka bisa berinteraksi langsung dengan penduduk setempat, menikmati kuliner tradisional, serta belajar tentang adat istiadat lokal. Masyarakat lokal perlu didorong untuk mengembangkan homestay dengan kualitas pelayanan yang baik agar wisatawan merasa nyaman.

3. Keterampilan Layanan Wisata

Hospitality (Keramahan): Keramahan adalah salah satu faktor penting dalam pariwisata. Wisatawan sering kali menilai suatu destinasi berdasarkan

pengalaman mereka terhadap keramahan penduduk lokal. Di Pesisir Selatan, penduduk lokal memiliki potensi besar untuk mengembangkan keterampilan ini. Pelatihan di bidang hospitality, seperti bagaimana memberikan sambutan hangat, melayani dengan sopan, dan menangani keluhan wisatawan, sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Bahasa Asing: Bahasa adalah jembatan yang menghubungkan wisatawan dengan penduduk lokal. Di Pesisir Selatan, sebagian besar wisatawan yang datang adalah wisatawan domestik, namun potensi untuk menarik wisatawan internasional juga besar, terutama dengan keindahan alam dan kebudayaan yang dimiliki. Oleh karena itu, pelatihan bahasa asing seperti Bahasa Inggris, atau bahkan bahasa dari negara-negara sumber wisatawan utama seperti Jepang atau Perancis, akan sangat membantu dalam meningkatkan komunikasi antara wisatawan dan penduduk lokal.

4. Pemanfaatan Budaya dan Tradisi Lokal

Festival Budaya: Salah satu bentuk pariwisata berbasis budaya yang dapat dikembangkan di Pesisir Selatan adalah festival budaya. Festival ini bisa menjadi ajang bagi penduduk lokal untuk menunjukkan kebudayaan mereka, seperti tarian tradisional, musik, dan kerajinan tangan. Festival juga menjadi sarana untuk mempromosikan destinasi wisata, menarik wisatawan, serta memberdayakan penduduk lokal untuk berpartisipasi aktif dalam sektor pariwisata.

Kerajinan Tangan dan Souvenir: Penduduk lokal dapat diberdayakan untuk membuat kerajinan tangan yang khas sebagai oleh-oleh bagi wisatawan. Ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga melestarikan kebudayaan lokal. Kerajinan tangan seperti anyaman, ukiran kayu, dan tekstil tradisional bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin membawa pulang kenang-kenangan dari Pesisir Selatan.

5. Keterlibatan Pemerintah dan Swasta

Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat: Pemerintah daerah harus aktif dalam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat lokal, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM. Program pelatihan,

akses permodalan untuk usaha kecil, serta promosi destinasi wisata yang melibatkan masyarakat lokal harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan pariwisata di Pesisir Selatan.

Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Pelibatan sektor swasta, seperti hotel, agen perjalanan, dan perusahaan tour operator, dapat membantu mempercepat pengembangan SDM pariwisata di Pesisir Selatan. Misalnya, hotel-hotel besar bisa mengadakan program magang bagi penduduk lokal untuk belajar tentang manajemen hotel, sementara agen perjalanan bisa melatih pemandu wisata lokal agar memiliki sertifikasi profesional.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki populasi penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Namun, potensi pariwisata yang terus berkembang di wilayah ini memberikan peluang baru bagi penduduk lokal untuk terlibat dalam sektor pariwisata. Berikut adalah kondisi eksisting dan penerapan pengembangan SDM pariwisata di Pesisir Selatan:

1. Pelatihan SDM Pariwisata: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Pariwisata, telah mulai mengadakan berbagai pelatihan untuk penduduk lokal, terutama di bidang hospitality dan pemandu wisata. Namun, pelatihan ini masih terbatas dan memerlukan perluasan, baik dari segi skala maupun variasi program pelatihan.
2. Pemberdayaan Pengelola Homestay: Beberapa daerah di Pesisir Selatan, seperti Kawasan Mandeh dan Pantai Carocok, sudah mulai mengembangkan homestay yang dikelola oleh penduduk lokal. Ini adalah langkah positif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata. Namun, kualitas layanan homestay perlu ditingkatkan dengan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut.

Festival Budaya dan Event Pariwisata: Pesisir Selatan memiliki berbagai festival budaya dan kegiatan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal, seperti Festival Mandeh dan Festival Bahari Pesisir Selatan. Festival-festival ini tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memperkuat keterlibatan penduduk lokal dalam mempromosikan budaya dan tradisi mereka.

BAB V

INDUSTRI PARIWISATA

Pertumbuhan sektor pariwisata berikutan sektor usaha lain yang berada di hulu maupun hilir serta sektor usaha lain yang menjadi turunannya telah membuat sektor ini menjadi satu sektor yang cukup besar dan penting, sehingga secara otomatis sektor pariwisata telah berkembang sedemikian rupa menjadi satu industri yang memiliki kontribusi cukup penting bagi perekonomian Indonesia saat ini. Sektor ini berkontribusi sebesar 3,9 % terhadap PDB dan mempekerjakan lebih dari 22 juta orang. Angka ini meningkat sebanyak kurang lebih 8.33% dari tahun sebelumnya. Selain itu, sektor ini juga terkait erat dengan ekonomi kreatif. Jika digabungkan, kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia akan lebih signifikan. Sementara itu untuk kontribusi sector wisata terhadap PDB Sumbar juga menunjukkan kontribusi yang bertumbuh walaupun belum signifikan, dimana pada tahun 2022 kontribusi sektor wisata terhadap PDB mencapai 1,82 % dan terus bertumbuh sedikit mencapai 1,89%, ditahun 2023.

Sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai DPP (Destinasi Pariwisata Provinsi) yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Sumatera Barat. Sektor hulu dan hilir industri pariwisata merasakan imbas positif dari perkembangan pariwisata kabupaten. Sebagian masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan bergerak dalam industri jasa dan perdagangan yang mendukung industri pariwisata. Secara tradisional, industri pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari beberapa hal yang saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Ketiga hal tersebut adalah keberadaan hal-hal berikut:

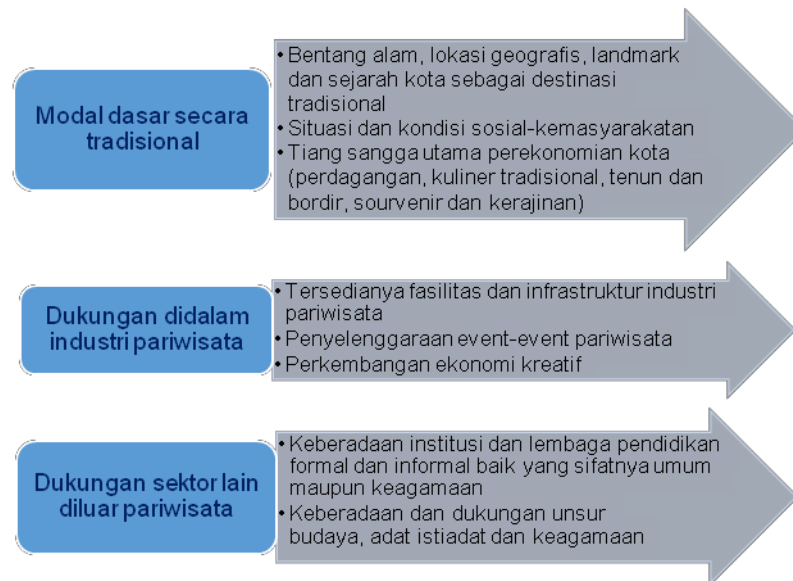
- a) Kekayaan alam, letak geografis, landmark serta sejarah Kabupaten Pesisir Selatan seperti keberadaan bentang alam yang mendukung aktivitas pariwisata. Pesisir Selatan adalah surganya wisata alam di Sumatera Barat. Dengan keindahan alamnya yang mempesona, Tempat Wisata Pesisir Selatan kerap kali digandrungi wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Kabupaten Pesisir Selatan

memiliki garis pantai sepanjang 234 kilometer, yang membentang dari utara ke selatan. Garis pantai yang panjang ini menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu daerah tujuan wisata alam yang potensial di Sumatera Barat. Pantai-pantai di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki keindahan yang beragam, mulai dari pantai berpasir putih dengan air laut yang jernih hingga pantai dengan pasir hitam yang eksotis.

- b) Situasi dan kondisi sosial-kemasyarakatan Kabupaten Pesisir Selatan yang ramah dan bersedia menerima serta mendukung aktivitas pariwisata, dan
- c) Tiang sangga utama perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan secara tradisional dalam bentuk perdagangan, kuliner tradisional, souvenir dan kerajinan rakyat lainnya.

Ketiga hal yang tersebut secara tradisional membentuk daya saing Kabupaten Pesisir Selatan sebagai destinasi wisata unggulan. Ketiga modal utama yang dimiliki Pesisir Selatan ini lebih lanjut dilengkapi dengan berbagai pendukung industri pariwisata yang cukup banyak namun tetap mempertahankan budaya dan kearifan lokal.

Seiring dengan keberadaan bentang alam yang mempesona, budaya, adat istiadat dan unsur keagamaan yang cukup kental dan masih dianut/dipraktikkan oleh masyarakat, kesemua hal diatas dengan sendirinya merupakan unsur pembentuk citra dan image Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu kota destinasi yang ramah terhadap pariwisata baik bagi wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman). Modal dasar dan sumber industri pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diperlihatkan melalui model/figur berikut.



Gambar 5.1
Sumber dan Modal Dasar Pembentukan Industri Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

5.1 Usaha Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

Mengikuti klasifikasi jenis lapangan usaha atau sector usaha sebagaimana yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) dan diselaraskan dengan industri pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan maka kita dapat mengetahui beberapa sektor pendukung utama industri pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

- a. Penyediaan makan dan minum;
- b. Penyediaan akomodasi
- c. Transportasi
- d. Perdagangan eceran
- e. Jasa lainnya.

Namun demikian, mengingat cukup dinamis dan berkembangnya industri pariwisata, maka dalam dokumen ini sektor utama pendukung pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan diperluas dengan menambah beberapa sektor pendukung lainnya, yaitu:

- a. Agen perjalanan dan jasa wisata lainnya;
- b. Kerajinan, souvenir dan cinderamata;
- c. Transportasi;

d. Ekonomi kreatif.

Industri pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan beserta sektor turunan dan pendukungnya dinilai merupakan sebuah kesatuan yang saling bersinergi antara sesamanya, dengan Kabupaten Pesisir Selatan diposisikan sebagai destinasi wisata. Keberadaan destinasi wisata ini beserta sinergi antar sektor pendukungnya diperlihatkan pada ilustrasi berikut.

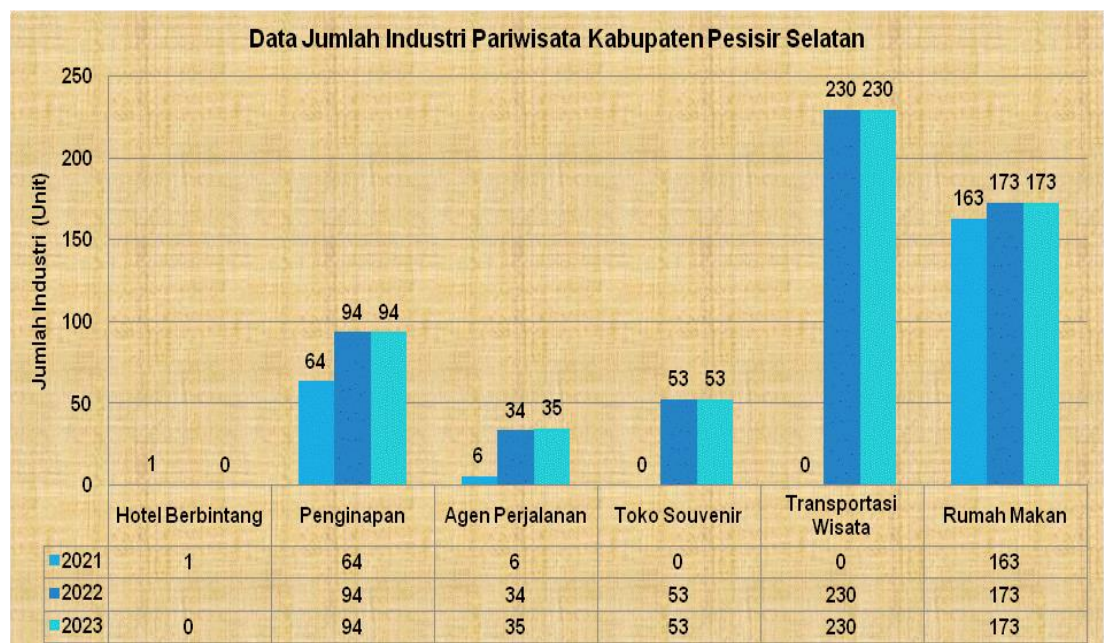


Gambar 5.2
Model Sinergitas Industri Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

Sebagaimana halnya industri pariwisata disebagian besar wilayah Indonesia, pelaku usaha industri pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan juga didominasi oleh pelaku usaha mikro-kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan pelaku usaha lokal. Walaupun ada pelaku usaha besar, tapi jumlahnya sangat terbatas dan dapat dikategorikan sebagai cabang usaha besar yang memiliki jaringan usaha diseluruh atau disebagian wilayah Indonesia. Hal ini wajar karena para pelaku usaha lokal di Kabupaten Pesisir Selatan cenderung tetap mempertahankan sistem dan pola usaha secara tradisional yang lebih cenderung dikategorikan pada skala UMKM. Situasi ini juga dipengaruhi oleh unsur lokalitas, administratif dan geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang dibatasi oleh lingkungan alam, yang membuat proses pengembangan dan perluasan skala usaha juga cenderung terbatas mengakibatkan pelaku usaha Kabupaten Pesisir Selatan cenderung untuk lebih memilih pengembangan dan perluasan skala usaha dengan jalan membuka cabang usaha di kota lain idalam dan diluar Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, pilihan sistem dan pola usaha tradisional pelaku usaha tetap membuat skala usaha mereka

tidak beranjak dari skala UMKM.

Walaupun demikian, industri pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan yang didominasi oleh pelaku UMKM ini secara langsung membawa dampak positif dan manfaat pada masyarakat lokal dan pemerintah daerah tentunya. Hal ini dalam bentuk terserapnya tenaga kerja yang berasal dari angkatan kerja lokal Kabupaten Pesisir Selatan, pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih besar untuk industri pariwisata serta keberadaan pasar/konsumen lokal Kabupaten Pesisir Selatan maupun Sumatera Barat yang tetap ada/eksis sehingga menjadi basis pasar bagi industri pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan. Skala usaha dan kondisi yang terjadi pada pelaku UMKM industri pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan ini membuat industri ini relatif tahan krisis dan mampu bertahan walaupun terjadi ketidakstabilan kondisi perekonomian nasional, sehingga dengan segala kesederhanaan yang dimilikinya, industri pariwisata tetap menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan .secara umum berikut gambaran pertumbuhan industry pariwisata di Pesisir selatan



Gambar 5.3
Data Jumlah Industri Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

Terlihat pertumbuhan industry yang cukup signifikan dari masing masing sektor usaha pendukung pariwisata seperti terlihat pada gambar diatas. Untuk detail nya setiap usaha akan dijelaskan pada sub bab berikut

5.1.1. Usaha Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan (Akomodasi)

Akomodasi/penginapan merupakan salah satu fasilitas dan infrastruktur utama pendukung industri pariwisata. Keberadaan akomodasi sangat mendukung berjalannya aktivitas wisata bahkan tak jarang menjadi puller utama dari kunjungan wisnus maupun wisman. Berikut perkembangan jumlah akomodasi hotel berdasarkan kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 hingga 2023

Tabel 5.1
Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2022–2023

No	Kecamatan	Hotel		Kamar	
		2022	2023	2022	2023
1	KOTO XI TARUSAN		10		75
2	BAYANG	1	2	46	46
3	IV NAGARI BAYANG UTARA				
4	IV JURAI	11	23	187	229
5	BATANG KAPAS				
6	SUTERA				
7	LENGAYANG	1	1	17	17
8	RANAH PESISIR	4	4	60	60
9	LINGGO SARI BAGANTI	1	1	10	10
10	PANCUNG SOAL	2	2	26	26
11	AIR PURA				
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN	6	6	80	80
13	RANAH AMPEK HULU TAPAN				
14	LUNANG	5	5	72	72
15	SILAUT	2	2	7	7
T O T A L		33	56	505	622

Sumber : Pessel dalam angka 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah yang cukup signifikan dari hotel di Pesisir Selatan hingga 59%. Begitu juga dari jumlah kamar meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023 hingga 81%. Hal ini mengindikasikan bahwa arus wisatawan meningkat tajam satu tahun terakhir yang berimplikasi pada peningkatan jumlah akomodasi. Penambahan signifikan terjadi di kecamatan IV jurai, dimana terjadi pertumbuhan lebih dari 100%, hal ini disebabkan oleh tingginya intensitas kunjungan ke wisata mandeh. Secara total

jumlah penginapan atau akomodasi dalam berbagai bentuk apakah itu hotel , homestay, dan lain sebagainya dapat dilihat pada tabel berikut berdasarkan jumlah per kecamatan

Tabel 5.2
Jumlah Penginapan di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Jumlah (Unit)
1	KOTO XI TARUSAN	35
2	BAYANG	2
3	IV NAGARI BAYANG UTARA	
4	IV JURAI	30
5	BATANG KAPAS	
6	SUTERA	2
7	LENGAYANG	2
8	RANAH PESISIR	4
9	LINGGO SARI BAGANTI	4
10	PANCUNG SOAL	2
11	AIR PURA	
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN	6
13	RANAH AMPEK HULU TAPAN	
14	LUNANG	4
15	SILAUT	3
TOTAL		94

Sumber : Pessel dalam Angka 2024

Menilik jumlah akomodasi penginapan sebagaimana tabel diatas dan dibandingkan dengan data jumlah kunjungan wisnus dan wisman yang telah mencapai lebih kurang 2,6 juta kunjungan wisatawan (baik wisnus maupun wisman) bahwa sebenarnya Kabupaten Pesisir Selatan mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan fasilitas akomodasi untuk mendukung industri pariwisatanya apalagi pada saat peak season. Berikut ditampilkan daftar penginapan yang ada di Pesisir Selatan menurut data dari Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 5.3
Daftar Nama Penginapan di Pesisir Selatan

NO	NAMA OBJEK PENDATAAN	NAMA PEMILIK	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KECAMATAN
1	SAGA MURNI	H.FIRDAUS	2016	JLN.JEND SUDIRMAN	20	34	IV JURAI
2	PENGINAPAN AL-BARQAH	HJ.ROSNANI	2017	JLN.JEND SUDIRMAN	11	11	IV JURAI
3	LANGKISAU RESORT	ADITYAWARMAN	2014	JL.LANGKISAU SALIDO	22	37	IV JURAI
4	ANORDIO	DEWANTO	2006	PAINAN,KEC.IV JURAI	10	28	IV JURAI
5	TRIZA HOTEL	FERRA YANTI	2014	JL.DR.MOH.HATTA	14	24	IV JURAI
6	PENGINAPAN AA	EDI MELAYU	2016	JL.H.ILYAS YACUB	7	7	IV JURAI
7	HOME STAY DENA	DENA SRI HANDAYANI	2013	JL.CAROCOK PAINAN	7	10	IV JURAI
8	HOME STAY DORIA	MARIA	2014	JL.TENTARA PELAJAR	5	7	IV JURAI
9	HOME STAY DELIMA	DILA	2013	JL.TENTARA PELAJAR	5	5	IV JURAI
10	HOME STAY CIKHA	NURTINAS	2016	JL.TENTARA PELAJAR	5	5	IV JURAI
11	HOME STAY RAPINBI	ROSNI	2016	JL.TENTARA PELAJAR	3	3	IV JURAI
12	HANNAH HOTEL	H.MELDIAN	2016	JL.H.ILYAS YACUB	22	48	IV JURAI
13	GUEST HOUSE ANGGREK	NANIK IDA ISIANI	2015	JL.TRIKORA	3	3	IV JURAI
14	GUEST HOUSE PULAU CINGKUAK	RAHMI KARIDA	2016	JL.TRIKORA	8	8	IV JURAI
15	HOME STAY WISMA PURI	H.SAIDAL MASFIYUDDIN	2010	JL.PAGARUYUANG 3	9	18	IV JURAI
16	HOME STAY RUMAH PUTI	YOGI DIRGANTARA	2014	JL.PAGARUYUANG	9	15	IV JURAI

NO	NAMA OBJEK PENDATAAN	NAMA PEMILIK	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KECAMATAN
17	HOME STAY NANDA	NANDA	2015	JL.PICURAN BOGA	3	3	IV JURAI
18	PENGINAPAN SIVIA	YUSHARNI	2016	JL.TENTARA PELAJAR	3	3	IV JURAI
19	PENGINAPAN WATI	YUNIDARWATI	2015	JL.TENTARA PELAJAR	3	3	IV JURAI
20	PENGINAPAN SEDERHANA	JUSMAINI	2016	JL.TENTARA PELAJAR	3	3	IV JURAI
21	PENGINAPAN MAWAR	MAWAR	2015	JL.TENTARA PELAJAR	4	4	IV JURAI
22	HOTEL AIDA	H.MUNAF MALIN KAYO	1972	JL.SUTAN SYAHRIR	12	24	IV JURAI
23	PENGINAPAN URUNG HOUSE		2015	JL.SULT.HASANUDDIN	7	11	IV JURAI
24	EDOTEL	PEMDA	2006	JL.MOH.HATTA			IV JURAI
25	BURMA RESDENCE SYARIAH			JL.H.AGUS SALIM	7	7	IV JURAI
26	PENGINAPAN LIMA SAUDARA			JL.SUDIRMAN	5	6	IV JURAI
27	HOTEL RIHAN			JL. JENDRAL SUDIRMAN	7	7	IV JURAI
28	PENGINAPAN RUMAH MAMA			JL. JENDRAL SUDIRMAN	4	4	IV JURAI
29	ANUGRAH PENGINAPAN			JL. PAGARUYUNG III	5	8	IV JURAI

NO	NAMA OBJEK PENDATAAN	NAMA PEMILIK	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KECAMATAN
30	HOTEL ADIKARYA		2000	JL. ILYAS YACUB PAINAN	25	34	IV JURAI
31	LOSMEN GRANDITA		2000	JL. KOTO TINGGI PAINAN	7	11	IV JURAI
32	HOTEL ANDIKA		2000	JL. PEMUDA	9	15	IV JURAI
33	BARAZAKI HOUSE			PERUMAHAN SMK SAGO	5	7	IV JURAI
34	HOTEL ANDINI			JL. PROF. HAMKA	12	18	IV JURAI
35	PENGINAPAN AIDA	HEIDA	2016	JLN. SAWAH LIAT KAPUH UTARA	4	6	KOTO XI TARUSAN
36	HOMESTAY INCIM	DARLIS	2016	PULAU KOPO-KOPO	5	10	KOTO XI TARUSAN
37	HOMESTAY UNSU	SYAMSIDAR	2016	PULAU KOPO-KOPO	2	4	KOTO XI TARUSAN
38	HOMESTAY BOY	BOY	2017	PULAU KOPO-KOPO	3	6	KOTO XI TARUSAN
39	KAPO-KAPO BEACH VILLA	ZULRIZUL CANIAGO		SEI NYALO KAWASAN MANDEH	2	4	KOTO XI TARUSAN
40	HOMESTAY ASILA	BERNADI		BATU HAMBAR	2	4	KOTO XI TARUSAN

NO	NAMA OBJEK PENDATAAN	NAMA PEMILIK	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KECAMATAN
41	HOMESTAY JAMBU KETEK	DEDI		KAWSAN MANDEH	2	4	KOTO XI TARUSAN
42	PENGINAPAN LABUN SUNDAY	PENGERAN		CAROCOK ANAUKAWSAN MANDEH	15	30	KOTO XI TARUSAN
43	PENGINAPAN MANDEH HAVANA	NENG SUHAILA	2015	JLN. TAMBANG KENAGARIAN AMPANG PULAI	3	25	KOTO XI TARUSAN
44	PENGINAPAN RAMBAHAN	NOVA YANTI	2016	JLN. CAROCOK ANAU	4	6	KOTO XI TARUSAN
45	PENGINAPAN BUNDA MANDIRI	DENI TRIA PUTRA	2015	JLN. AMPANG PULAI	15	25	KOTO XI TARUSAN
46	PENGINAPAN AIR LAND	HJ. EMI	2016	JLN. BARUNG-BARUNG BALANTAI	13	16	KOTO XI TARUSAN
47	KARAMBIA CONDONG	RIRI	2016	JLN. API-API	4	4	BAYANG
48	GISZELLA HOTEL	ROZEKMAL/NELIATI	2016	JLN. RAYA-PAINAN PASAR BARU	16	24	BAYANG
49	PENGINAPAN UNIANG	SALMAN	2012	JLN. KAMBANG LAKITAN	13	26	LENGAYANG
50	PENGINAPAN BUNGA TANJUNG	HENDRI HARIADI	1990	AIR HAJI	5	10	LINGGO SB
51	PENGINAPAN ACEH MINANG	OSIN	2015	INDERAPURA	8	16	PC. SOAL

NO	NAMA OBJEK PENDATAAN	NAMA PEMILIK	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KECAMATAN
52	PENGINAPAN BUNDA	HEL	1996	INDERAPURA	5	5	PC. SOAL
53	PENGINAPAN RRR	SUMIATI	2015	TAPAN	4	6	B.A.B TAPAN
54	PENGINAPAN AZIZAH	UNANG	2013	TAPAN	9	12	B.A.B TAPAN
55	PENGINAPAN PASTA			TAPAN	5	10	B.A.B TAPAN
56	HOTEL FELIA	MARNI	2017	TAPAN	7	14	B.A.B TAPAN
57	HOTEL BUNGA FACHRI	MARLINDA WATI	2015	TAPAN	5	10	B.A.B TAPAN
58	PENGINAPAN BAGUS	BURHANUDDIN	2016	TAPAN	10	20	B.A.B TAPAN
59	PENGINAPAN KASIAN OMBAK	ETI	2016	LUNANG	19	38	LUNANG
60	PENGINAPAN REGIL	ABU SANTO	2017	LUNANG	7	14	LUNANG
61	PENGINAPAN NURUL HIDAYAH	MAIHENDRA	2003	LUNANG	7	14	LUNANG
62	PENGINAPAN DINDA	IRFAN	2018	LUNANG	5	10	LUNANG

NO	NAMA OBJEK PENDATAAN	NAMA PEMILIK	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KECAMATAN
63	PENGINAPAN RINI	RINI	2017	LUNANG	3	6	LUNANG
64	PENGINAPAN LISA	KAR	2002	SILAUT	3	3	SILAUT
65	PENGINAPAN YAUMI	SYAFRISON	2017	SILAUT	4	4	SILAUT
66	PENGINAPAN SILTA			SILAUT			SILAUT
67	PENGINAPAN LADIRA SILAUT			SILAUT			SILAUT
68	SILAUT HOTEL			SILAUT			SILAUT
69	PENGINAPAN RAFI DAN LUTVI						
70	PENGINAPAN BUK EMI			INDERAPURA			INDERAPURA
71	PENGINAPAN HASKI			INDERAPURA			INDERAPURA
72	PENGINAPAN AL HAVIS			INDERAPURA			INDERAPURA
73	PENGINAPAN DAN CAFE AIYUMI			SUNGAI AQSA			SUNGAI AQSA

NO	NAMA OBJEK PENDATAAN	NAMA PEMILIK	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KECAMATAN
74	PENGINAPAN SHUHADA			INDERAPURA			INDERAPURA
75	PENGINAPAN ANISA			TANJUNG MEDAN			TANJUNG MEDAN
76	HOTEL BALAI SALASA INDAH						
77	PENGINAPAN BUNDA			BALAI SELASA			RANAH PESISIR
78	PENGINAPAN BUNDA BARU			BALAI SELASA			RANAH PESISIR
79	PENGINAPAN CHESYA						
80	PENGINAPAN MES TERABANG LAYANG			BUKIK LANGKISAU			BUKIK LANGKISAU
81	PENGINAPAN ADRIL LANGKISAU						
82	HOTEL DAN VILLA BUKIT LANGKISAU			PUNCAK LANGKISAU			PUNCAK LANGKISAU
83	HOTEL AROMA						
84	PENGINAPAN ADELIN' S			RAWANG PAINAN			RAWANG PAINAN

NO	NAMA OBJEK PENDATAAN	NAMA PEMILIK	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KECAMATAN
85	PENGINAPAN KELUARGA			RAWANG PAINAN			RAWANG PAINAN
86	PENGINAPAN HOMESTAY			BUKIT LANGKISAU			BUKIT LANGKISAU
87	WISMA AA						
88	PENGINAPAN GIRA						
89	PENGINAPAN MUTIARA			SAGO			SAGO
90	EDO HOTEL LANGKISAU			SMK 1 PAINAN			SMK 1 PAINAN
91	VIONY HOUSE PAINAN			SD 26 PAINAN SELATAN			SD 26 PAINAN SELATAN
92	PENGINAPAN AMANDA P CINGKUK			DI PULAU CINGKUK			DI PULAU CINGKUK
93	PENGINAPAN RUMAH SINGGAH KAMPUNG			KAMPUNG JAO			KAMPUNG JAO
94	PENGINAPAN LIORY			KAMPUNG JAO			KAMPUNG JAO
95	PENGINAPAN KASIH IBU			KAMPUNG CAROCOK			KAMPUNG CAROCOK

NO	NAMA OBJEK PENDATAAN	NAMA PEMILIK	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KECAMATAN
96	PENGINAPAN S WARUNG IBU			KAMPUNG CAROCOK			KAMPUNG CAROCOK
97	PENGINAPAN IZZLA			KAMPUNG CAROCOK			KAMPUNG CAROCOK
98	PENGINAPAN MANDEH			KAMPUNG CAROCOK			KAMPUNG CAROCOK
99	PENGINAPAN DRIMA			KAMPUNG CAROCOK			KAMPUNG CAROCOK
100	PENGINAPAN CAROCOK			KAMPUNG CAROCOK			KAMPUNG CAROCOK
101	PENGINAPAN ALETA			K SIMPANG AJINOMOTO			K SIMPANG AJINOMOTO
102	PENGINAPAN PANTAI API-API						
103	PENGINAPAN GINA						
104	PENGINAPAN BATU KALANG						
105	PENGINAPAN DUA PUTRI						
106	MANJUTI BEACH HOMSTEY						

NO	NAMA OBJEK PENDATAAN	NAMA PEMILIK	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KECAMATAN
107	BATU TABUAN BEACH						
108	HOMSTY PULAU PEMUTUSAN			PULAU PEMUTUSAN			PULAU PEMUTUSAN
109	HOMSTY PULAU PAGANG			PULAU PAGANG			PULAU PAGANG
110	PENGINAPAN BERLIAN			PASAR BUKIT AIR HAJI			LINGGO SARI BAGANTI
111	PENGINAPAN NAGITA			AKOMODASI			AKOMODASI
112	HOME STAY DELIMA			JLN TENTARA PELAJAR			JLN TENTARA PELAJAR
113	GUEST HOUSE ANGGREK			JLN, TRIKORA			JLN, TRIKORA
114	PENGINAPAN URUNG HOUSE			JLN URUNG HOUSE			JLN URUNG HOUSE
115	BURMA RES DENCE SYARIAH			JLN, H AGUS SALIM			JLN, H AGUS SALIM
116	BARAZAKI HOUSE			PERUMAHAN SMK SAGO			PERUMAHAN SMK SAGO
117	HOMES STAY BOY			PULAU KUDO-KUDO			PULAU KUDO- KUDO
118	HOME STAY ASILA			BATU HAMBAR			BATU HAMBAR

NO	NAMA OBJEK PENDATAAN	NAMA PEMILIK	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TEMPAT TIDUR	KECAMATAN
119	HOME STAY JAMBU KETEK			KAWASAN MANDEH			KAWASAN MANDEH
120	PENGINAPAN MANDEH HAYATI			JLN, TAMBANG			JLN, TAMBANG
121	PENGINAPAN RAMBALAI			JLN, CAROCOK ANAU			JLN, CAROCOK ANAU
122	PENGINAPAN UNIANG			JLN, KAMBANG LAKITAN			JLN, KAMBANG LAKITAN
123	PENGINAPAN GUMILANG			PS. BUKIT			LINGGO SARI BAGANTI
124	PANDAN VIEW			KAWASAN MANDEH			KOTO XI TARUSAN

Sumber : Dinas Pariwisata, 202

5.2 Usaha Kecil dan Menengah Pendukung Pariwisata

Langkah dan alternatif terbaik yang disarankan dan dapat dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah mempromosikan dan memperbanyak berdirinya *homestay*/rumah wisata ataupun *guesthouse*/ pesanggrahan yang setara dengan fasilitas yang ditawarkan akomodasi wisata berbintang 1 dan 2. Ini dapat dilakukan dengan cara memberdayakan rumah/tempat tinggal milik masyarakat yang dinilai layak untuk dijadikan akomodasi wisata. Sesuai dengan kekuatan adat-istiadat, budaya lokal dan keagamaan masyarakat Pessel dan seiring-sejalan dengan pilihan Provinsi Sumatera Barat yang telah menetapkan Halal Tourism sebagai visi dan strategi pengembangan industri pariwisatanya, maka pilihan dalam bentuk rumah wisata syariah dan pesanggrahan syariah dengan fokus pada wisatawan keluarga dan group wisatawan akan menjadi pilihan konsep akomodasi yang paling ideal bagi Kabupaten Pesisir Selatan.

Pilihan alternatif ini amat memungkinkan karena dinilai akan semakin meningkatkan partisipasi dan usaha masyarakat dalam industri pariwisata dengan jalan melakukan *sharing economy* terutama pada rumah-rumah tinggal yang berkategori layak sebagai akomodasi wisata. Selain itu, terdapat pula manfaat yang dapat dirasakan wisnus dan wisman dengan keberadaan rumah wisata ataupun pesanggrahan ini. Wisnus dan wisman dengan sendirinya dapat memiliki *experiential tourism* yang diperoleh langsung melalui pengalaman berinteraksi dan hidup berdampingan dengan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini memungkinkan terjadinya akulturasi budaya dan rasa saling menghargai antara wisatawan dengan masyarakat lokal yang tentunya akan membawa dampak positif terhadap keberlanjutan industri pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan.

5.2.1 Biro-Agen Perjalanan Wisata (Tour and ravel)

Biro-agen perjalanan wisata merupakan *stakeholder* yang tidak dapat dipisahkan dalam industri pariwisata karena mereka merupakan salah satu ujung tombak dalam pemasaran jasa yang ditawarkan industri pariwisata. Pentingnya peran yang dimiliki ini membuat biro-agen perjalanan wisata selalu menjadi bagian penting dari proses pengembangan industri pariwisata, termasuk di Kabupaten

Pesisir Selatan. Dalam posisinya sebagai ujung tombak industri pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dengan sendirinya amatlah penting bagi biro-agen perjalanan wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan untuk memiliki standard kualitas layanan prima, yang mampu membangkitkan kepercayaan dan gambaran positif dalam penawaran paket wisata di Kabupaten Pesisir Selatan Sebagaimana disampaikan terdahulu, pelaku usaha dalam industri pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh pelaku UMKM. Hal ini juga berlaku dengan usaha biro-agen perjalanan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkarakteristik usaha skala kecil sampai menengah, memiliki aspek lokalitas (tenaga kerja, kepemilikan usaha, lingkup dan jangkauan usaha dan sumberdaya) yang sangat kental, serta keberadaan pasar/konsumen

Secara umum, jasa yang ditawarkan biro-agen perjalanan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan tidaklah jauh berbeda dengan jasa yang ditawarkan oleh biro-agen perjalanan wisata di daerah lain, yaitu: [a] fasilitas pemesanan tiket pesawat, kereta api, kapal laut, [b] pemesanan kamar hotel, [c] pemesanan sewa kendaraan/*private rental*, [d] jasa pramuwisata/*tour guide*, [e] jasa paket *tour* dan *travel*, dan [f] jasa antar jemput bandara/*airport shuttle service*. Selain penawaran jasa layanan wisata tersebut, biro-agen perjalanan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki layanan dan jasa pengurusan keberangkatan ibadah umrah dan haji khusus bagi para pemeluk agama Islam. Jasa yang berkembang cukup signifikan 2 tahun terakhir adalah permainan bawah laut yang sangat menantang bagi wisatawan.

Biro-agen perjalanan wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dinilai telah memiliki kualitas yang cukup baik dengan variasi layanan yang cukup beragam, walaupun dari segi skala usaha masih berada dalam skala kecil dan/atau menengah. Kualitas yang terbentuk pada biro-agen perjalanan wisata ini tidak terlepas dari jumlah kunjungan wisnus dan wisman yang cukup padat sepanjang tahun yang membuat para pemilik dan pengelola biro-agen perjalanan wisata selalu berupaya untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas layanannya. Tingkat persaingan antar biro-agen perjalanan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan juga dinilai cukup kondusif, yang membuat masing-masing pengelola senantiasa untuk

meningkatkan kapasitas dan kompetensi karyawannya. Pada tabel berikut ditampilkan pertumbuhan biro-agen perjalanan wisata yang aktif di Kabupaten Pesisir Selatan selama tiga tahun terakhir

Tabel 5.4
Pertumbuhan Biro Perjalanan

NO	KECAMATAN	2021	2022	2023
1	KOTO XI TARUSAN	2	4	4
2	BAYANG	1	1	2
3	IV NAGARI BAYANG UTARA			
4	IV JURAI	5	8	8
5	BATANG KAPAS		3	3
6	SUTERA		2	2
7	LENGAYANG	1	3	3
8	RANAH PESISIR		1	1
9	LINGGO SARI BAGANTI		4	4
10	PANCUNG SOAL		2	2
11	AIR PURA		2	2
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN		1	1
13	RANAH AMPEK HULU TAPAN		1	1
14	LUNANG		1	1
15	SILAUT		1	1
TOTAL		9	34	35

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat pertumbuhan yang sangat signifikan dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah wisatawan yang juga signifikan dari tahun 2021 ke 2022 . pertumbuhan ini seiring dengan semakin meningkatnya branding wisata Pesisir Selatan sebagai Raja Empat nya Sumatera dengan puller utamanya adalah kawasan mandeh yang sangat fenomenal.

Tabel 5.5
Daftar Tour dan Travel di Pesisir Selatan

NO	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN
1	MIA Tour and Travel	H. Ilyas Yakub No 27 Painan, IV Jurai	IV Jurai
2	P.O. HPS Travel Painan	Jl. Raya Painan-Salido	IV Jurai
3	korasaki tour and Travel	Jl. Sutan Syahrir, Painan	IV Jurai
4	Pilar Tour Travel	simpang Tiga, Jl Merdeka No.15, Ps. Baru	Bayang
5	Loket Travel Sakire Group	Muaro Sakai Inderapura	Pancung Soal
6	Win Travel	Jl. Raya Padang - Painan No.122, Nanggalo	XI Tarusan
7	Tour & Travel Painan-Pekanbaru	Lumpo	IV Jurai

Sumber : diolah, 2024

Dari penelusuran lanjutan yang dilakukan, masih ada biro-agen perjalanan wisata tersebut yang memiliki keterbatasan dalam melakukan penyebaran informasi yang *update* tentang usaha dan jasa-jasa yang mereka tawarkan. Untuk itu, dinilai perlu bagi biro-agen perjalanan wisata Kabupaten Pesisir Selatan untuk memanfaatkan *platform* pemasaran jasa berbasis *portal*, *website* dan *internet* secara berkelanjutan dan terjamin dalam hal *up-dating* data kepada wisatawan. Biro-agen perjalanan wisata dinilai juga tetap perlu melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi personal/individual karyawan mereka secara *continue* (misal dalam hal penguasaan bahasa asing lain selain bahasa Inggris, kemampuan administrasi dan manajerial jasa wisata dll) agar jasa yang mereka tawarkan tetap memiliki daya saing dan bernilai bagi calon wisatawan yang hendak menggunakan jasa mereka. Satu hal yang juga dapat dijadikan pilihan adalah mengembangkan *portal* pemasaran bersama jasa wisata yang melibatkan biro-agen perjalanan wisata Kabupaten Pesisir Selatan sebagai aktor utama yang akan melayani jasa wisata yang ditawarkan melalui *portal* tersebut. Kesemua hal tersebut diatas dapat dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi peningkatan kapasitas pemasaran jasa wisata antara Dinas Pariwisata bersama dengan asosiasi dan komunitas biro-agen perjalanan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan

5.2.2 Makan dan Restoran

Keberadaan usaha kuliner di Kabupaten Pesisir Selatan tentunya merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi industri pariwisata karena di banyak tempat industri pariwisata akan selalu berdampingan dan bersinergi secara positif dengan usaha kuliner. Usaha kuliner adalah salah satu industry yang mendukung pariwisata. Dihampir seluruh sudut dan bagian Kabupaten Pesisir Selata pasti akan ditemui usaha kuliner yang unik dan tentunya enak. Hal paling unik yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah keberadaan kuliner lokal-tradisional, yang membuat wisatawan selalu teringat dengan makanan khas daerah ini dari manapun mereka berasal. Tabel berikut memperlihatkan usaha kuliner yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 5.6
Jumlah Rumah Makan dan Restoran Di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021 hingga 2023

NO	KECAMATAN	2021	2022	2023
1	KOTO XI TARUSAN	19	25	25
2	BAYANG	18	21	21
3	IV NAGARI BAYANG UTARA	2	3	3
4	IV JURAI	28	37	37
5	BATANG KAPAS	5	7	7
6	SUTERA	13	15	15
7	LENGAYANG	8	10	10
8	RANAH PESISIR	8	8	8
9	LINGGO SARI BAGANTI	4	9	9
10	PANCUNG SOAL	7	10	10
11	AIR PURA	12	3	3
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN	7	12	12
13	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3	4	4
14	LUNANG	6	6	6
15	SILAUT	6	6	6
TOTAL		146	176	176

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selata, 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Berikut daftar beberapa rumah makan, café dan bakery yang ada di Pesisir Selatan

Tabel 5.7
Daftar Rumah Makan, Cae dan bakery di Pesisir Selatan

NO	Nama Objek Pendataan	Tahun Berdiri	Alamat	Fasilitas Yang ada	Izin Usaha	Kecamatan
1	RM. CAHAYA BINTANG	2013	Jln. Gurun Panjang	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Koto XI Tarusan
2	RM. MANDE KANDUANG	2014	Jln. Raya Padang - Tarusan	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Koto XI Tarusan
3	RM. SUKO MANANTI	2014	Jln. Raya Padang Tarusan km.55	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Koto XI Tarusan
4	RM.GULAI KAMBING	2017	Jln. Pasa Pagi Duku	Tempat Parkir	Tidak Ada	Koto XI Tarusan
5	RM. PONDOK RASO	1997	Jln. Padang - Painan	Tempat Parkir	Tidak Ada	Koto XI Tarusan
6	RM. BUNDO KANDUANG	1964	Jln. Padang - Painan	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Tidak Ada	Koto XI Tarusan
7	RM. ALEXANDRIA	2012	Jln. Kayu Gadang	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Koto XI Tarusan
8	RM. AIA LANDAI	2014	Jln. Padang Painan Berlan	Tempat Parkir, WC	Ada	Koto XI Tarusan
9	RM. NUANSA ALAM	2000	Jln. Sungai Lundang	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Tidak Ada	Koto XI Tarusan

NO	Nama Objek Pendataan	Tahun Berdiri	Alamat	Fasilitas Yang ada	Izin Usaha	Kecamatan
10	RM. ANGIN GUNUNG	1995	Jln. Sungai Lundang	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Koto XI Tarusan
11	RM. PONDOK KITA	2002	Jln. Sungai Lundang	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Koto XI Tarusan
12	RM. DOA BASAMO	2011	Jln. Siguntur	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Koto XI Tarusan
13	RM. UNI KITO SEAFOOD	2016	Jln. Simpang Mandeh	Tempat Parkir, WC	Tidak Ada	Koto XI Tarusan
14	RM. RANDANG LOKAN	2017	Jln. Jembatan Mandeh	Tempat Parkir, WC	Tidak Ada	Koto XI Tarusan
15	RM. WAHYU SUCI	2016	Jln. Carocok Anau	WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Koto XI Tarusan
16	RM. IYOK	1998	Jln. Carocok Anau	Tempat Parkir, WC	Tidak Ada	Koto XI Tarusan
17	RM. UNI ANI	2017	Jln. Carocok Anau	Tempat Parkir, WC	Tidak Ada	Koto XI Tarusan
18	RM. DENDENG BATOKOK	2016	Jln. Carocok Anau	Tempat Parkir, WC	Tidak Ada	Koto XI Tarusan
19	RM. UNIANG	2015	Jln. Simpang Tarusan	Tempat Parkir, WC	Tidak Ada	Koto XI Tarusan
20	Warung Nasi Uni Upik	2010	Jln. Puluik-Puluik	Tempat Parkir	Tidak Ada	Bayang Utara

NO	Nama Objek Pendataan	Tahun Berdiri	Alamat	Fasilitas Yang ada	Izin Usaha	Kecamatan
21	RM. SIMPANG BAYANG SANI	2014	Jln. Asam Kumbang	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Bayang
22	RM. SIMPANG TUGU	2007	Jln. Koto Baru	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Bayang
23	RM. HABIBAH	2014	Jln. Koto Baru	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Ada	Bayang
24	AMPERA UNI ROY	2016	Jln. Koto Berapak	Tempat Parkir	Tidak Ada	Bayang
25	AMPERA YANCE	2012	Jln. Ambacang	Tempat Parkir	Tidak Ada	Bayang
26	RM. PALANTA RESTO	2009	Jln. Lohonh Selayang Pandang	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Bayang
27	AMPERA KITA	2012	Jln. Ambacang	Tempat Parkir	Tidak Ada	Bayang
28	AMPERA SAMBA LADO	2017	Jln. Toko Limo Asam	Tempat Parkir	Tidak Ada	Bayang
29	RM. CAMAY	2018	Jln. Tanjung Durian	Tempat Parkir	Tidak Ada	Bayang
30	SOTO RIFAI	1996	Jln. Api-api	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Ada	Bayang
31	RM. PUTI BUNGSU	2004	Jln. Api-api	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Bayang
32	AMPERA PANCA RASO	2016	Jln. Taluak Lokan	Tempat Parkir	Tidak Ada	Bayang
33	AMPERA TIGA RASO	2018	Jln. Pasar Baru	Tempat Parkir	Tidak Ada	Bayang

NO	Nama Objek Pendataan	Tahun Berdiri	Alamat	Fasilitas Yang ada	Izin Usaha	Kecamatan
34	AMPERA SIMPANG	2015	Jln. Pasar Baru	Tempat Parkir	Ada	Bayang
35	PONDOK LESEHAN MAKASAR	2014	Jln. Pasar Baru	Tempat Parkir	Ada	Bayang
36	RM. CANIA	1968	Jln. Pasar Baru	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Bayang
37	GISZELLA CAFÉ	2016	Jln. Pasar Baru	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Bayang
38	RM.H. MALIN	1995	Jln Karang Pauah	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Bayang
39	RM. SELAYANG PANDANG	1998	Jln. Karang Pauah	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Bayang
40	AMPERA 33 SALERO KAMPUANG	2016	Jln. Jendral Sudirman No. 542	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	VI Jurai
41	CAFE INDAH	2005	Jln. Jendral Sudirman	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
42	R.M. BUNDA	1998	Jln. Jendral Sudirman	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
43	R.M. PONDOK JATI ONANG	2017	Jn. Pantai Salido	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
44	R.M DUA SAUDARA	2014	Jln. Raya Padang - Painan	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai

NO	Nama Objek Pendataan	Tahun Berdiri	Alamat	Fasilitas Yang ada	Izin Usaha	Kecamatan
45	R.M. GIRA 2	2003	Jln. Raya Padang - Painan	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
45	R.M. GIRA 1	2003	Jl. Zaini Zein Painan	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
46	R.M. PONDOK BAMBU	2016	Jln. Raya Padang - Painan	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
47	R.M. DENA	2013	Jln. Carocok Painan	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
48	CAFE YANI	2017	Jln. Tentara Pelajar	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
49	R.M. IPIT	2014	Jln. Tentara Pelajar	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
50	R.M. WIDURI	2000	Jln. Pemuda Painan	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
51	R.M. BUYUNG	1998	Jln. Koto Tinggi Painan	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
52	R.M. SAIYO	2014	Jln. Moh Hatta Painan	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
53	R.M. UNIANG	1997	Jln. Perintes Kemerdekaan	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
54	R.M. HARI	1994	Jln. St Syahrir Painan	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai

NO	Nama Objek Pendataan	Tahun Berdiri	Alamat	Fasilitas Yang ada	Izin Usaha	Kecamatan
55	R.M. RINI	2014	Jln. Carocok Painan	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
56	R.M. WAHYU	2001	Jln. Carocok Painan	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
57	R.M. DENDENG BATOKOK	2011	Jln. Batu Batembak	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
58	R.M. BERKAT YAKIN	2002	Jln. Bukit Biawak	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
59	R.M. BUNGA PARIS	2011	Jln. Sungai Nipah	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
60	R.M. ROZA MURNI	1994	Jln. Bunga Pasang 1	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
61	R.M. LUSI	1995	Jln. Sudirman Sago	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
62	R.M. BUNDO KAMARIAH	2015	Jln. Ilyas Yakub	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
63	PINANG CAFE	2017	Jln. Langkisau	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
64	CAFE NANDA	2015	Jln. Pincuran Boga	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
65	CAFE GAUL	2010	Jln. Jenderal Sudirman	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai

NO	Nama Objek Pendataan	Tahun Berdiri	Alamat	Fasilitas Yang ada	Izin Usaha	Kecamatan
66	CAFE GARIS PANTAI	2001	Jln. Jenderal Sudirman	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
67	R.M. SITUJUAH	2017	Jln. Jenderal Sudirman	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	ADA	VI Jurai
67	CAFÉ MIE AYAM BAKSO MAS TARDIK	2016	Jln. Prof. DR. Hamka	Tempat Parkir, WC,	ADA	VI Jurai
67	CAFÉ SHELTER	2017	Jln. Rawang Painan	Tempat Parkir, WC,	Tidak Ada	VI Jurai
67	CAFÉ RUMAH ES KRIM NAZIZA	2018	Jl. Muin Painan	Tempat Parkir, WC,	Tidak Ada	VI Jurai
68	ELOK SAIYO	2018	Batang Kapas	Tempat Parkir	Tidak Ada	Batang Kapas
69	RM.YULIA	2017	Batang Kapas	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Batang Kapas
70	CAFÉ YIAR	2000	Batang Kapas	Tempat Parkir	Tidak Ada	Batang Kapas
71	PONDOK MUMU	2015	Batang Kapas	Tempat Parkir	Tidak Ada	Batang Kapas
72	RM. SABA MANANTI	2011	Batang Kapas	Tempat Parkir, WC	Tidak Ada	Batang Kapas
73	RM. CAMARA II	2016	Surantih	Tempat Parkir	Tidak Ada	Sutera
74	RM. LUBUK BEGALUNG	2017	Surantih	Tempat Parkir, WC	Tidak Ada	Sutera
75	PONDOK MUMU	2009	Surantiah	Tempat Parkir	Tidak Ada	Sutera
76	RM. KELUARGA	2000	Surantih	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Sutera
77	BOFET DEBI	2000	Surantih	Tempat Parkir	Tidak Ada	Sutera

NO	Nama Objek Pendataan	Tahun Berdiri	Alamat	Fasilitas Yang ada	Izin Usaha	Kecamatan
78	RM. SEDERHANA	2005	Surantih	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Tidak Ada	Sutera
79	RM.CEYSYA	2010	Surantih	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Sutera
80	RM. BATU MANDAMAI	2008	Surantih	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Sutera
81	RM. FIRMAN JAYA 2	2017	Surantih	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Tidak Ada	Sutera
82	CAFÉ PSA (Sate Lokan)	2003	Surantih	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Tidak Ada	Sutera
83	CAFE SMBS	2005	Surantih	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Sutera
84	CAFÉ CAROND	2017	Surantih	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Ada	Sutera
85	RM. NILA	2002	Surantih	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Tidak Ada	Sutera
86	RM. UNIANG	2012	Kambang	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Lengayang
87	RM. PONDOK BAMBU	2007	Kambang	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Lengayang
88	RM. TAKANA JUO	2000	Kambang	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Lengayang

NO	Nama Objek Pendataan	Tahun Berdiri	Alamat	Fasilitas Yang ada	Izin Usaha	Kecamatan
89	CAFÉ PONDOK BAMBU BAJITU BANDANG	2014	Kambang	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Lengayang
90	RM. PONDOK BAMBU SAKINAH	2015	Kambang	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Lengayang
91	PONDOK SATE HAIKEL	2018	Kambang	Tempat Parkir	Tidak Ada	Lengayang
92	CAFÉ NADIA	2015	Kambang	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Tidak Ada	Lengayang
93	CAFÉ GAZEBO	2015	Kambang	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Lengayang
94	RM. SEDERHANA	2015	Balai Selasa	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Ranah Pasisia
95	RM. PONDOK KELAPA	2012	Jl. Kayu Sabatang	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Tidak Ada	Ranah Pasisia
96	RM. ACC	1970	Balai Selasa	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Tidak Ada	Ranah Pasisia
97	RM. SIANG MALAM	1980	Balai Selasa	Tempat Parkir, Kamar Mandi	Tidak Ada	Ranah Pasisia
98	RM. TESA	2005	Balai Selasa	Tempat Parkir, Kamar Mandi	Ada	Ranah Pasisia
99	KADAI KOPI YEN	2008	Balai Selasa	Tempat Parkir, Kamar Mandi	Tidak Ada	Ranah Pasisia

NO	Nama Objek Pendataan	Tahun Berdiri	Alamat	Fasilitas Yang ada	Izin Usaha	Kecamatan
100	AMPERA BARANGIN	2017	Labuan	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Tidak Ada	Ranah Pasisia
101	AMPERA SAMBA LADO	2017	Sumedang	Tempat Parkir	Tidak Ada	Ranah Pasisia
102	AMPERA LINGGO	2014	Air Haji	Tempat Parkir	Tidak Ada	Linggo Sari Baganti
103	AMPERA ONE DEN	2012	Punggasan	Tempat Parkir	Tidak Ada	Linggo Sari Baganti
104	CAFÉ BAMBURU	2017	Jl. Raya Koto Panai	Tempat Parkir, WC	Tidak Ada	Linggo Sari Baganti
105	CAFÉ DIERRY	2015	Jl. Raya Koto Panai	Tempat Parkir, WC	Ada	Linggo Sari Baganti
106	RM. SIANG MALAM	1997	Air Pura	Tempat Parkir, WC	Tidak Ada	Linggo Sari Baganti
107	RM. MANDE RUBIAH	1997	Air Pura	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Tidak Ada	Linggo Sari Baganti
108	RM. TANIA	2014	Jl. Palokan	Tempat Parkir, WC	Tidak Ada	Linggo Sari Baganti
109	RM. SINAR BARU 2	2017	Jl. Blokan	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Linggo Sari Baganti
110	RM. BUNGA PARIS	1996	Jl. Padang Bengkulu	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Linggo Sari Baganti
111	CAFÉ BUNGA	2017	Jl. Ilalang Panjang	Tempat Parkir, WC	Tidak Ada	Linggo Sari Baganti
112	AMPERA BUNDA	2014	Jl. Padang Bengkulu	Tempat Parkir, WC	Tidak Ada	Linggo Sari Baganti
113	BOFET NAZILA	2013	Jl. Padang Bengkulu	Tempat Parkir, WC	Ada	Linggo Sari Baganti

NO	Nama Objek Pendataan	Tahun Berdiri	Alamat	Fasilitas Yang ada	Izin Usaha	Kecamatan
114	CAFÉ RAJA	2015	Jl. Taluak Medan	Tempat Parkir, WC	Tidak Ada	Linggo Sari Baganti
115	RM. TIGA SAUDARA	2018	Jl. Taluak Medan	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Tidak Ada	Linggo Sari Baganti
116	CAFÉ FAMILY	2017	Jl. Simp. Tigo Tugu	Tempat Parkir	Tidak Ada	Linggo Sari Baganti
117	CAFÉ DENSIKO	2017	Jl. Kampuang Baru	Tempat Parkir, WC	Tidak Ada	Linggo Sari Baganti
118	RM. BAGUS	2008	Tapan	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Ada	Tapan
119	RM.FEKIA	2010	Tapan	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Ada	Tapan
120	RM. WIWIT	2013	Tapan	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Tapan
121	RM. RIMBA RAYA	2000	Sako	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Tapan
122	RM. AD	1997	Sako	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Tapan
123	RM. ANGAH	1990	Sako	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Tapan
124	RM.SURYA SOSIAL	2000	Jangkia Ayam	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Tapan

NO	Nama Objek Pendataan	Tahun Berdiri	Alamat	Fasilitas Yang ada	Izin Usaha	Kecamatan
125	RM. SARI RASO	1995	Tapan	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Ada	Tapan
126	ELEGAN CAFÉ	2018	Tapan	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Tapan
127	RM. SUNGAI DURIAN	2018	Tapan	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Tapan
128	BOFET BARELANG	2017	Inderapura	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Ada	Tapan
129	RM. ACEH MINANG		Inderapura	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Ada	Tapan
130	CAFÉ SENADA	2011	Inderapura	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Ada	Tapan
131	CAFÉ HAWA	2013	Inderapura	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Ada	Tapan
132	RM. BUNDA 1	2000	Inderapura	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Ada	Tapan
133	RM. BUNDA 2	2005	Inderapura	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Ada	Tapan
134	MANDA CAFÉ	2014	Inderapura	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Ada	Tapan
135	RM.KANG UDIN	1995	Lunang	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Lunang

NO	Nama Objek Pendataan	Tahun Berdiri	Alamat	Fasilitas Yang ada	Izin Usaha	Kecamatan
136	AMPERA INTAN	2018	Lunang	Tempat Parkir	Tidak Ada	Lunang
137	RM. KASIAN OMBAK	2014	Lunang	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Ada	Lunang
138	RM. KELOK INDAH	2014	Lunang	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Lunang
139	RM. BAREH SOLOK	2007	Lunang	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Tidak Ada	Lunang
140	RM. RINI	1994	Lunang	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Tidak Ada	Lunang
141	RM. DANU	2016	Silaut	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Ada	Silaut
142	RM. PUTRA HAMBANG	2014	Silaut	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Ada	Silaut
143	RM. BAGADANG	2018	Silaut	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Silaut
144	RM. MINANG MAIMBAU	2012	Silaut	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Silaut
145	RM. DINDA	2017	Silaut	Tempat Parkir, WC, Kamar Mandi	Tidak Ada	Silaut

NO	Nama Objek Pendataan	Tahun Berdiri	Alamat	Fasilitas Yang ada	Izin Usaha	Kecamatan
146	SATE MADORA CAKMIN	2011	Silaut	Tempat Parkir, WC, Mushalla, Kamar Mandi	Tidak Ada	Silaut

Sumber : DPMPTSP Pesisir Selatan, 2024

Keberadaan kuliner pesisir selatan yang unik ditambah dengan view yang menarik menjadi kombinasi yang dapat menjadi puller dalam kunjungan wisata ke Pesisir selatan. Namun demikian, usaha kuliner di Kabupaten Pesisir Selata (terutama kuliner lokal- tradisional) pengelolaannya kebanyakan masih sangat tradisional, jauh tertinggal dari unsur pelayanan dan kenyamanan bagi konsumen dan infrastruktur dan perlengkapan operasional yang kurang memadai dan sesuai standard sebagaimana layaknya bisnis kuliner. Ini semua tentunya merupakan sebuah tantangan besar bagi pelaku usaha kuliner di Kabupaten Pesisir Selata karena wisatawan atau secara umum konsumen tentunya tidak selalu mengunjungi sebuah usaha dan pusat kuliner karena cita rasa makanan yang enak. Wisatawan dan konsumen tetap akan memperhatikan unsur pelayanan, kenyamanan dan kebersihan sebagai bagian utama mereka dalam memilih tempat kuliner yang baik dan bermutu. Dengan demikian, perhatian dan upaya-upaya peningkatan yang akan mampu memperbaiki kesemua hal tersebut akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi para pelaku usaha kuliner dan tentunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu instansi teknis pembina usaha kuliner di Kabupaten Pesisir Selata,.Pendataan pelaku usaha kuliner Kabupaten Pesisir Selata berdasarkan kategori rumah makan, cafe dan restoran baik lokal-tradisional, nasional maupun internasional.

5.2.3 Toko Souvenir

Salah satu pendukung industri pariwisata adalah usaha kerajinan, souvenir dan cenderamata yang berkaitan erat dengan usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Pesisir Selata. Sebagai destinasi utama pariwisata Sumatera Barat, cukup banyak usaha kerajinan, souvenir maupun cenderamata yang berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagaimana jenis-jenis usaha lainnya yang mendukung industri pariwisata di Kabupaten Pesisir Selata, usaha kerajinan, souvenir dan cenderamata juga didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) milik pengusaha lokal Kabupaten Pesisir Selatan

Usaha kerajinan, souvenir dan cenderamata di Kabupaten Pesisir Selata telah mampu menyasar wisatawan dari berbagai tingkat dan status ekonomi.

Terdapat beragam usaha kerajinan, souvenir dan cenderamata yang mengkhususkan diri pada pelanggan dengan tingkat pendapatan menengah keatas dan menengah kebawah. Bahkan pada beberapa sudut Kabupaten Pesisir Selata juga dapat ditemui berbagai usaha kerajinan, souvenir dan cenderamata yang menjual berbagai macam cenderamata khas Kabupaten Pesisir Selata dengan harga amat murah. Berikut gambaran perkembangan toko souvenir atau cenderamata di Pesisir selatan dari tahun 2021 hingga 2023

Tabel 5.8
Pertumbuhan jumlah toko souvenir tahun 2021 hingga 2023

NO	KECAMATAN	2021	2022	2023
1	KOTO XI TARUSAN		11	11
2	BAYANG		2	2
3	IV NAGARI BAYANG UTARA		2	2
4	IV JURAI		13	13
5	BATANG KAPAS		3	3
6	SUTERA		2	2
7	LENGAYANG		6	6
8	RANAH PESISIR		3	3
9	LINGGO SARI BAGANTI		2	2
10	PANCUNG SOAL			
11	AIR PURA		1	1
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN		3	3
13	RANAH AMPEK HULU TAPAN		1	1
14	LUNANG		3	3
15	SILAUT		1	1
T O T A L			53	53

Dari tabel diatas terlihat lonjakan jumlah took souvenir dari tahun 2021 hingga 2023. Lonjakan ini seiring dengan meningkat tajamnya jumlah kunjungan wisatawan ke Pesisir Selatan. Keberadaan toko souvenir pada destinasi wisata unggulan semenjak tahun 2022 mulai menjamur hingga sekarang seiring dengan tingginya permintaan akan produk oleh oleh pada destinasi wisata unggulan. Berikut daftar beberapa toko souvenir yang ada di Pesisir Selatan

Tabel 5.9
Daftar Nama Usaha Souvenir di Pesisir Selatan

No	NAMA	NAMA USAHA	ALAMAT	NAGARI	KECAMATAN
1	MAIRAH		Muara Inderapura	Muara Inderapura	Airpura
2	YURNI		Muara Inderapura	Muara Inderapura	Airpura
3	SUHARTI		INDERAPURA UTARA	INDERAPURA UTARA	AIRPURA
4	Izon nofriadi		Tapan	Tapan	Basa Ampek Balai Tapan
5	Prasetia Dego Candra	Sulaman Bayangan Aplikasi	Batang Kapas	Batang Kapas	Batang Kapas
6	NURLELI		API-API	API-API	BAYANG
7	YARNIS		API-API	API-API	BAYANG
8	JONDRI HAMDAN I		API-API	API-API	BAYANG
9	NILVIA YUNITA		APA JAYA	KAPEH PANJI JAYA TALAOK	BAYANG
10	Anjeli Rahmadani putri		Koto baru koto berapak	Koto baru koto berapak	Bayang
11	Reswita	Katidiang Sepatu	Jl. Raya Talaok	Talaok	Bayang
12	EDRIMAN TO		KAPELGAM KOTO BERAPAK	KAPELGAM KOTO BERAPAK	BAYANG
13	Winda Wilis		Ampang Tareh Lumpo	Ampang Tareh Lumpo	IV Jurai
14	MARDAL ENA		PAINAN UTARA	PAINAN UTARA	IV JURAI
15	Egistal Salvia		Ampang Tareh Lumpo	Ampang Tareh Lumpo	IV Jurai
16	ZULFARD I		Lumpo	Lumpo	IV Jurai
17	RISMAW ATI		Puluik-Puluik Selatan	Puluik-Puluik Selatan	IV Nagari Bayang Utara
18	YETI MULYANI		BATU HAMPAR SELATAN	BATU HAMPAR SELATAN	KOTO XI TARUSAN
19	YUSNI ASTITI		ANAU	CAROCOK ANAU AMPANG PULAI	KOTO XI TARUSAN
20	NASNI		LUA PULAU KARAM AMPANG PULAI	PULAU KARAM	KOTO XI TARUSAN
21	ROSMAIN I		PULAU AIR PULAU KARAM AMPANG PULAI	PULAU KARAM	KOTO XI TARUSAN

No	NAMA	NAMA USAHA	ALAMAT	NAGARI	KECAMATAN
22	ZAINAL ARIFIN		Nyiur Gading	Kambang	Lengayang
23	NURFATI HA	ANYAMAN PANDAN SAKAYAN	LUBUK SARIK	LUBUK SARIK	LENGAYANG
24	MARKIS	MARKIS	KAMPUNG PADANG MANDIANGIN,NAGARI LAKITAN UTARA	LAKITAN UTARA	LENGAYANG
25	Yelvi Gusti apriani		Kambang utara	Kambang utara	Lengayang
26	Yul amaria		Kambang utara	Kambang utara	Lengayang
27	Yarnis		Sumbaru	Kambang	Lengayang
28	HELMIZA RWATI		Pasar Lama Muara Air Haji	Pasar Lama Muara Air Haji	Linggo Sari Baganti
29	WIJAYAN I		Pasar Lama Muara Air Haji	Pasar Lama Muara Air Haji	Linggo Sari Baganti
30	MUSTOFA		LUNANG SELATAN	LUNANG SELATAN	LUNANG
31	Jusneli		Lunang	Lunang	Lunang
32	Lidya trisnawati		Lunang	Lunang	Lunang
33	SITI WARNA		Lunang Utara	Lunang Utara	Lunang
34	KARTINA		LUNANG TENGAH	LUNANG TENGAH	LUNANG
35	GHINA SANIA FITRI	AL-FATH	KAMPUNG BARU	KOTO VIII PELANGAI	RANAH PESISIR
36	NOVA ZULIANA	RAJUTAN NOVA	UJUNG AIR	SURANTIAH	SUTERA
37	SYAFRIA NAZAR	VELLYA CAKE DECORATION	JL PERINTIS KEMERDEKAAN	PAINAN TIMUR	IV JURAI
38	YUSNA	KEDAI YUSNA	JLN PADANG PAINAN KAMPUNG SUNGAI TALANG KAPUH UTARA	KAPUH UTARA	KOTO XI TARUSAN
39	ARIF RAHMAN HAKIM		KAMPUNG TANGAH	GURUN PANJAN UTARA	BAYANG
40	HENDRIA NTO		JL SUKARNO HATTA PAINAN	PAINAN SELATAN PAINAN	IV JURAI
41	DEASY SUTRAWATI		PASAR SALIDO	SALIDO	IV JURAI
42	MEGA MONICA RAHMI		GURUN PANJANG	KAPUH	KOTO XI TARUSAN
43	YOSIE IRFANIA WIZRA		JL PASENGGRAHAN	PELANGAI	RANAH PESISIR

No	NAMA	NAMA USAHA	ALAMAT	NAGARI	KECAMATAN
44	WINDA ULFA		LESUNG AIR	PELANGAI	RANAH PESISIR
45	APRIJON		SILAUT	SILAUT	SILAUT

Sumber : data diolah ,2024

Namun demikian produk oleh oleh yang ditawarkan masih belum optimal secara kualitas, masih ditemukan keberadaan produk oleh oleh yang masih minim dalam hal kemasan dan desain. Untuk kedepannya perlu dipikirkan diferensiasi produk oleh oleh dengan menysasar kepada segmen milenial dan gen Z yang merupakan segmen terbesar yang mengunjungi Pesisir Selatan.

5.3 Sarana Transportasi

Seiring dengan semakin berkembangnya industri dan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selata, maka salah satu sektor pendukung pariwisata yang tumbuh dan berkembang dengan marak adalah sektor transportasi, terutama transportasi wisata dan transportasi antar kota serta shuttle antara Kabupaten Pesisir Selata dengan Bandar Udara Minangkabau (BIM). Geografis yang berbukit membuat Kabupaten Pesisir Selatan tidak mempunyai alternatif transportasi wisata lain selain akses transportasi darat, baik dengan kendaraan (mobil) roda empat maupun kendaraan penumpang/bus dengan kategori mini bus, bus kategori sedang dan bus besar yang melayani jasa antar kota, maupun dalam Kabupaten Pesisir Selata. Terdapat pula pengelola usaha transportasi yang khusus menawarkan kendaraan yang dapat dirental/disewakan secara pribadi/individual.

Sebagaimana sektor usaha pendukung pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan lainnya, usaha transportasi juga didominasi oleh pengusaha lokal (lingkup Kabupaten Pesisir Selata maupun Provinsi Sumatera Barat) dengan skala usaha kecil dan menengah. Pengusaha transportasi diwajibkan memiliki izin usaha transportasi tertentu sehingga formalitas usaha dan pengelola usaha transportasi jauh lebih baik dan terjamin dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Hal ini cukup menguntungkan karena pengelola usaha transportasi dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan biro-agen perjalanan wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selata maupun didaerah lain, sehingga keberlanjutan usaha transportasi sebagai pendukung industri pariwisata juga jauh lebih terjamin. Satu hal yang

menarik dan sangat menggembirakan adalah adanya fakta berupa semakin banyak dan meningkatnya pengusaha sektor transportasi yang menyediakan fasilitas kendaraan dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai untuk melayani wisatawan yang menuju Kabupaten Pesisir Selatan. Ini menjadi citra baik bagi industri pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan khususnya dan Sumatera Barat umumnya.

Dari data yang dihimpun dari berbagai sumber, perusahaan transportasi darat yang menuju Kabupaten Pesisir Selatan terus meningkat jumlahnya dari tahun 2021 hingga 2023 seperti yang terlihat pada tabel berikut

Tabel 5.10
Perkembangan Jumlah Penyedia Transportasi Darat 2021 hingga 2023

NO	KECAMATAN	2021	2022	2023
1	KOTO XI TARUSAN		85	85
2	BAYANG		12	12
3	IV NAGARI BAYANG UTARA			
4	IV JURAI		102	102
5	BATANG KAPAS		6	6
6	SUTERA		5	5
7	LENGAYANG		5	5
8	RANAH PESISIR		15	15
9	LINGGO SARI BAGANTI			
10	PANCUNG SOAL			
11	AIR PURA			
12	BASA AMPEK BALAI TAPAN			
13	RANAH AMPEK HULU TAPAN			
14	LUNANG			
15	SILAUT			
TOTAL			230	230

Sumber : Pessel dalam Angka 2024

Keberadaan transportasi pendukung industri pariwisata juga didukung dengan semakin baiknya kualitas jalan yang digunakan sebagai penghubung antar kota di Provinsi Sumatera Barat. Selain fasilitas kendaraan wisata yang harus memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas dengan pertimbangan pada aspek

keselamatan dan kenyamanan, satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam usaha transportasi darat adalah dalam bentuk kualitas pelayanan prima yang seharusnya disediakan oleh pelaksana operasional jasa transportasi. Sudah bukan rahasia lagi jika dikatakan pelayanan jasa transportasi darat yang diberikan oleh awak/*crew* operasional kendaraan di Indonesia cenderung masih membuat wisatawan menjadi tidak nyaman selama dalam perjalanan. Hal ini tentunya jadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha transportasi darat di Kabupaten Pesisir Selatan, agar turut memperhatikan aspek layanan yang diberikan oleh *crew* armada mereka.

5.4 Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama dengan adanya kekayaan budaya, alam, dan tradisi lokal. Sektor ini tidak hanya mendukung pariwisata, tetapi juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat lokal melalui berbagai kegiatan kreatif yang berbasis pada seni, budaya, dan kearifan lokal.

Berikut beberapa aspek ekonomi kreatif yang berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Kerajinan Tangan Tradisional

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tradisi kerajinan tangan yang kaya. Produk-produk seperti anyaman pandan, tenun, dan kerajinan dari bahan alami seperti bambu dan kayu sering kali menjadi komoditas unggulan di pasar lokal dan bagi wisatawan. Produk kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai barang fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi, menjadikannya populer sebagai souvenir. Beberapa pengrajin lokal juga memproduksi perhiasan dari bahan-bahan laut seperti kerang, batu karang, dan bahan alam lainnya yang mencerminkan identitas khas daerah pesisir.

2. Kuliner Khas Pesisir Selatan

Kuliner merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang sangat potensial. Kuliner khas Pesisir Selatan seperti rendang lokan, gulai kepala ikan, dan berbagai olahan laut telah menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. UMKM kuliner terus berkembang dengan menciptakan inovasi-inovasi

baru dalam mengolah hasil laut dan bahan pangan lokal yang kaya. Selain makanan siap saji, UMKM juga memproduksi makanan ringan khas seperti kerupuk ikan, terasi, serta produk olahan ikan lainnya yang banyak diminati sebagai oleh-oleh.

3. Seni Pertunjukan dan Festival Budaya

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tradisi seni pertunjukan yang kaya, seperti tari-tarian tradisional, musik tradisional Minangkabau, dan seni bela diri silat. Seni pertunjukan ini sering kali ditampilkan dalam acara-acara adat, festival lokal, atau untuk menyambut wisatawan. Acara budaya seperti Festival Pesona Mandeh dan Festival Pantai Carocok juga menjadi ajang penting untuk memperkenalkan seni dan budaya lokal kepada wisatawan, sekaligus mempromosikan potensi ekonomi kreatif daerah.

4. Pariwisata Berbasis Budaya dan Alam

Kawasan pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya **Kawasan Wisata Mandeh**, menawarkan potensi besar untuk pariwisata berbasis alam dan budaya. Banyak usaha kreatif lokal yang mendukung kegiatan wisata ini, seperti penyediaan jasa pemandu wisata, pengelolaan ekowisata, dan aktivitas budaya yang dikemas secara kreatif untuk memberikan pengalaman unik bagi wisatawan.

Ekowisata yang dikombinasikan dengan pengenalan budaya lokal, seperti mengajak wisatawan ikut serta dalam kegiatan tradisional seperti memancing, memasak, atau kerajinan tangan, telah menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

5. Fashion dan Kain Tenun Tradisional

Meski belum sebesar daerah lain, Pesisir Selatan memiliki potensi dalam bidang fashion berbasis kain tradisional seperti **tenun** dan **songket Minangkabau**. Beberapa desainer lokal dan pengrajin kain mulai mengeksplorasi produk fashion yang menggabungkan unsur tradisional dengan desain modern, sehingga menarik perhatian pasar yang lebih luas. Kain-kain ini sering digunakan dalam acara-acara adat dan pernikahan, serta menjadi souvenir yang bernilai tinggi.

6. Industri Kreatif Digital

Seiring perkembangan teknologi, industri kreatif digital juga mulai mendapatkan tempat di Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa anak muda mulai

terlibat dalam kegiatan kreatif digital seperti **fotografi wisata**, **videografi**, dan **desain grafis** yang berhubungan dengan promosi pariwisata dan potensi lokal. Mereka menggunakan platform digital seperti media sosial untuk memperkenalkan potensi wisata dan budaya daerah kepada publik yang lebih luas.

7. Desain Produk Lokal

Desain produk lokal menjadi salah satu bidang yang terus berkembang, terutama di sektor kuliner dan kerajinan. Inovasi dalam pengemasan dan desain produk seperti kerupuk ikan, oleh-oleh khas daerah, hingga produk kerajinan tangan membuat produk-produk ini lebih menarik bagi konsumen, baik lokal maupun internasional. Ini juga menciptakan lapangan kerja bagi desainer dan kreator lokal. Dua tahun terakhir sub sector ekraf ini berkembang pesat dimana pertumbuhan umkm dalam sktor usaha ini bertambah jumlahnya secara signifikan dalam 2 tahun terakhir seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa potensinya sangat besar sehingga menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam sub sector ini

8. Wisata Edukasi dan Kreatif

Potensi ekonomi kreatif lainnya yang juga mulai berkembang adalah wisata edukasi, di mana pengunjung diajak untuk belajar langsung tentang budaya, sejarah, dan cara hidup masyarakat lokal. Contohnya, wisatawan dapat ikut serta dalam proses pembuatan kerajinan atau belajar memasak masakan tradisional Pesisir Selatan, yang menciptakan pengalaman unik dan mendalam. Paket wisata ini cukup diminati oleh wisatawan yang berkunjung terutama edukasi dalam hal mengolah kuliner khas Pesisir Selatan.

Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Pesisir Selatan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti:

- Pemerintah daerah: Dapat memfasilitasi pelatihan, penyediaan infrastruktur, serta promosi bagi pelaku ekonomi kreatif.
- Komunitas lokal: Partisipasi aktif masyarakat lokal penting dalam mempertahankan identitas budaya dan menciptakan inovasi baru.

- Kemitraan dengan sektor swasta: Pihak swasta, termasuk pelaku industri pariwisata, dapat bermitra dengan UMKM lokal untuk mendukung promosi produk kreatif.

Dengan memanfaatkan potensi-potensi ini, Kabupaten Pesisir Selatan dapat membangun ekonomi kreatif yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat identitas budaya di mata dunia.

5.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pendukung Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

Industri pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dan sektor-sektor usaha turunannya didominasi oleh pelaku UMKM. UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan berperan penting dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata di daerah ini. Berikut adalah beberapa UMKM yang mendukung pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan:

1. UMKM Kuliner Lokal

Kuliner khas Pesisir Selatan seperti rendang lokan, gulai ikan karang, dan berbagai olahan laut menjadi daya tarik bagi wisatawan. UMKM kuliner yang berupa warung makan, restoran kecil, hingga pedagang kaki lima menyediakan makanan tradisional yang memperkaya pengalaman wisata kuliner.

2. UMKM Kerajinan Tangan dan Souvenir

Pengrajin lokal di Pesisir Selatan banyak memproduksi kerajinan khas, seperti anyaman pandan, kerajinan dari kerang, dan kain tradisional. Souvenir-souvenir ini banyak diminati wisatawan sebagai oleh-oleh, sehingga UMKM kerajinan tangan memainkan peran penting dalam industri pariwisata.

3. Penginapan dan Akomodasi (Homestay dan Guest House)

Di kawasan wisata seperti Pantai Carocok, Mandeh, dan Air Terjun Bayang Sani, banyak UMKM yang menyediakan penginapan sederhana seperti homestay, guest house, dan villa. Penginapan-penginapan ini biasanya dikelola oleh masyarakat lokal dan menawarkan suasana yang nyaman serta harga terjangkau untuk wisatawan.

4. UMKM Jasa Wisata dan Pemandu Lokal

Pemandu wisata lokal yang berfokus pada destinasi seperti Kawasan Wisata Mandeh, Puncak Gobah, dan Pulau Cingkuak sering kali bekerja sebagai bagian dari UMKM yang menyediakan jasa tur dan guide. Selain itu, penyewaan perahu untuk tur laut dan snorkeling juga banyak tersedia sebagai bagian dari usaha mikro.

5. UMKM Produk Olahan Laut

Sebagai daerah pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan kaya akan hasil laut seperti ikan, udang, dan rumput laut. UMKM lokal mengolah hasil laut ini menjadi berbagai produk seperti ikan asin, kerupuk ikan, terasi, dan olahan rumput laut, yang dijadikan oleh-oleh khas daerah bagi wisatawan.

6. UMKM Transportasi Lokal

Wisatawan yang berkunjung ke Pesisir Selatan sering membutuhkan transportasi untuk berpindah antar destinasi. Beberapa UMKM di sektor transportasi menawarkan jasa penyewaan kendaraan seperti motor, mobil, serta perahu untuk menjelajahi kawasan wisata di sepanjang pesisir, terutama untuk menuju pulau-pulau kecil.

7. UMKM Produk Kreatif dan Seni Budaya

Selain destinasi alam, Pesisir Selatan memiliki kekayaan budaya yang diekspresikan melalui seni tari, musik, dan festival lokal. UMKM yang bergerak di bidang seni kreatif dan pertunjukan budaya sering terlibat dalam penyelenggaraan acara-acara budaya, sehingga memberikan daya tarik tambahan bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman budaya yang autentik.

8. UMKM Pengembangan Ekowisata

Pengembangan ekowisata di daerah seperti Kawasan Mandeh melibatkan UMKM yang menyediakan aktivitas wisata berbasis alam, seperti trekking, camping, dan eksplorasi hutan mangrove. UMKM ini mengedepankan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga menarik wisatawan yang peduli dengan kelestarian alam.

Perkembangan data UMKM secara umum dari tahun 2021 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.11

pertumbuhan UMKM di Pesisir Selatan

NO.	SEKTOR EKONOMI	2023			2022			2021			
		USAHA MIKRO	USAHA KECIL	JUMLA H	USAHA MIKRO	USAHA KECIL	JUMLA H	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
1	Agrobisnis	904	4	908	822	6	828	491	344	11	846
2	Fashion	301	2	303	264	3	267	195	155	2	352
3	Jasa	330	9	339	290	2	292	99	44	6	149
4	Kerajinan	49	-	49	39	-	39	195	153	2	350
5	Kuliner	3,643	2	3,645	3,187	11	3,198	2,691	302	4	2,997
6	Otomotif	212	3	215	203	3	206	79	55	2	136
7	Pendidikan	35	-	35	34	-	34	10	41	4	55
8	Perdagangan	4,944	33	4,977	4,435	16	4,451	1,438	1,926	154	3,518
9	Perikanan	346	1	347	320	1	321	129	87	9	225
10	Peternakan	419	2	421	390	2	392	32	148	11	191
11	Teknologi internet							7	2	-	9
12	Lainnya	220	-	220	223	-	223	233	172	16	421
	TOTAL	11,403	56	11,459	10,207	44	10,251	5,599	3,429	221	9,249

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM

Dari data diatas terlihat pertumbuhan yang cukup signifikan dari UMKM yang ada di Pesisir Selatan selama 3 tahun terakhir. Hal yang menarik dari data diatas adalah peningkatan jumlah UMKM dari tahun 2021 hingga 2023 sebesar hampir 24 % juga diiringi menurun drastisnya jumlah usaha kecil yang ada di Pesisir selatan . pada tahun 2021 masih dijumpai sebanyak 221 usaha menengah namun ditahun 2022 sudah tidak ditemukan lagi usaha menengah di Pesisir Selatan. Begitu juga dengan keberadaan kecil dimana pada tahun 2021 masih terdata sebanyak 3429 UMKM , namun pada tahun 2022 jumlahnya menurun tajam hingga hanya menyisakan sebanyak 44 usaha kecil saja. Hal ini diperkirakan banyak dari usaha kecil dan menengah tersebut yang kemudian menurun secara asset dan tenaga kerja sehingga masuk kedalam klaster usaha mikro. Kondisi ini dapat terlihat pada tabel diatas dimana pada tahun 2021 jumlah usaha mikro mencapai 5599, namun di tahun 2022 meningkat tajam hingga 10207 dan meningkat lagi di tahun 2023 mencapai 11403 atau bertumbuh sebesar 100 % atau 2 kali lipat dari tahun 2021.

Selanjutnya jika dikerucutkan terhadap sector usaha yang bergerak dalam industry wisata dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.12
Pertumbuhan UMKM pada Sektor ekonomi penompang Sektor Wisata
Tahun 2021 s/d 2023

NO.	SEKTOR EKONOMI	2023			2022			2021			
		USAHA MIKRO	USAHA KECIL	JUMLA H	USAHA MIKRO	USAHA KECIL	JUMLA H	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
2	Fashion	301	2	303	264	3	267	195	155	2	352
3	Jasa	330	9	339	290	2	292	99	44	6	149
4	Kerajinan	49	-	49	39	-	39	195	153	2	350
5	Kuliner	3,643	2	3,645	3,187	11	3,198	2,691	302	4	2,997
8	Perdagangan	4,944	33	4,977	4,435	16	4,451	1,438	1,926	154	3,518
11	Teknologi internet							7	2	-	9
12	Lainnya	220	-	220	223	-	223	233	172	16	421
	TOTAL	9,487	46	9,533	8,438	32	8,470	4,858	2,754	184	7,796

Terlihat pada tabel diatas sector penyangga sector wisata juga berkembang pesat dalam hal jumlah meskipun untuk usaha kecil dan menengah menurun drastis dari tahun 2021 hingga 2023.

Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan, UMKM di daerah ini memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap ekonomi lokal. Untuk mendukung lebih lanjut pertumbuhan UMKM yang berperan penting dalam pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan, beberapa langkah strategis dan inovatif dapat diambil oleh pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Berikut beberapa langkah yang dapat diimplementasikan:

1. Pengembangan Klaster UMKM Berbasis Wisata

Pemerintah dan pelaku usaha dapat berkolaborasi dalam membentuk klaster UMKM berbasis pariwisata di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata tinggi, seperti di sekitar Pantai Carocok, Kawasan Mandeh, dan pulau-pulau kecil lainnya. Dengan membentuk klaster, pelaku UMKM dapat lebih mudah saling mendukung dan memanfaatkan sinergi dalam pengembangan produk, pemasaran, serta jaringan distribusi.

2. Pelatihan dan Pembinaan Terpadu

Pelaku UMKM sering kali membutuhkan pembinaan yang komprehensif, termasuk dalam hal peningkatan kualitas produk, desain kemasan, dan manajemen keuangan. Pemerintah dapat mengadakan program pelatihan terpadu yang melibatkan para ahli di bidang bisnis, pemasaran, dan teknologi, dengan tujuan agar UMKM dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar wisatawan.

- **Pengembangan Produk:** Membantu UMKM dalam inovasi produk lokal yang diminati wisatawan, seperti kuliner khas daerah dan kerajinan tangan.
- **Pelatihan Pemasaran Digital:** Memberikan pelatihan pemasaran online agar UMKM dapat menjangkau lebih banyak konsumen melalui platform digital seperti media sosial, marketplace, atau website.

3. Kemitraan dengan Industri Pariwisata

Membangun kemitraan strategis antara pelaku UMKM dengan industri pariwisata, seperti hotel, restoran, dan agen perjalanan. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, di mana produk-produk UMKM dapat ditawarkan sebagai bagian dari pengalaman wisata, seperti souvenir di hotel atau makanan khas di restoran.

4. Promosi Produk Lokal pada Event Wisata

Event pariwisata seperti festival budaya, pameran wisata, atau acara lokal lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk mempromosikan produk UMKM. Pameran ini tidak hanya menjadi tempat promosi tetapi juga memperkenalkan wisatawan terhadap keberagaman produk lokal yang mendukung ekosistem pariwisata.

5. Perbaikan Infrastruktur Akses dan Digital

Mengingat pariwisata sangat bergantung pada akses yang mudah dan nyaman, pemerintah perlu terus memperbaiki dan membangun infrastruktur pendukung, terutama akses ke daerah-daerah wisata yang sulit dijangkau. Selain itu, memperkuat infrastruktur digital, seperti jaringan internet, sangat penting untuk memperluas akses pasar bagi UMKM yang sudah beralih ke penjualan online.

6. Sertifikasi dan Standardisasi Produk

Untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, pemerintah dapat memfasilitasi proses sertifikasi dan standardisasi, seperti sertifikasi halal, BPOM, atau standarisasi produk sesuai permintaan pasar wisatawan. Dengan sertifikasi yang jelas, kepercayaan konsumen, terutama dari wisatawan mancanegara, akan meningkat, sehingga produk UMKM dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

7. Penguatan Akses Permodalan

Akses permodalan yang memadai merupakan salah satu kendala utama bagi UMKM di daerah. Pemerintah dan lembaga keuangan dapat meningkatkan akses kredit dengan suku bunga rendah, skema pembiayaan mikro, atau program kredit khusus bagi UMKM yang bergerak di sektor pariwisata. Selain itu, menciptakan ekosistem investasi yang menarik bagi investor lokal dan nasional untuk berinvestasi di sektor UMKM pariwisata.

8. Pengelolaan Limbah dan Pelestarian Lingkungan

Karena sektor pariwisata dapat mempengaruhi kondisi lingkungan, penting bagi UMKM untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam produksi dan pengelolaan limbah. Penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan serta pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi nilai tambah bagi UMKM di mata wisatawan yang semakin sadar akan isu keberlanjutan.

9. Pemasaran Terpadu untuk Produk Unggulan

Pemerintah daerah dapat meluncurkan kampanye pemasaran terpadu yang fokus pada produk unggulan dari Kabupaten Pesisir Selatan, baik melalui platform digital maupun pameran offline. Kampanye ini bisa disinergikan dengan promosi pariwisata, sehingga setiap kali wisatawan tertarik mengunjungi destinasi di Pesisir Selatan, mereka juga akan mengenal produk-produk lokal yang dapat mereka bawa pulang sebagai kenang-kenangan.

10. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan

Mengadakan kolaborasi antara pelaku UMKM dan lembaga pendidikan, seperti universitas atau sekolah kejuruan, untuk penelitian dan pengembangan produk, desain inovatif, serta pengembangan teknologi produksi. Hal ini dapat membantu UMKM untuk lebih maju dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan UMKM pendukung pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata di daerah tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

BAB 6

PASAR PARIWISATA DAN UPAYA PEMASARAN

6.1 Jumlah dan Perkembangan Pasar Wisatawan

Dalam menyusun analisa terhadap pasar pariwisata serta strategi pemasaran yang diperlukan dalam rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan perencanaan yang sesuai berdasarkan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang wisman pada masa-masa sebelumnya. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020, informasi tentang wisatawan mancanegara semakin diperlukan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan pariwisata di masa yang akan datang. Tidak tersedianya data pada masa lalu akan menyulitkan dalam membuat rencana yang cermat dan terarah.

6.1.1 Nasional

Indonesia sebagai negara dengan 17.508 pulau dan dengan keberagaman adat dan suku budaya, serta sejarah, dan posisi geografis pada daerah tropis, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu destinasi tujuan wisata utama di dunia. Hal ini dipandang memungkinkan dengan adanya peningkatan daya saing dan kinerja pariwisata Indonesia dimana menurut *Travel and Tourism Competitiveness Index* melalui *World Economic Forum*, Indonesia berada pada peringkat 22 per 136 negara di dunia pada tahun 2024 meningkat 10 peringkat dari tahun sebelumnya.

Salah satu dampak dari *competitiveness* ini adalah adanya kenaikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sampai dengan tahun 2023 terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Untuk lebih detailnya dapat dilihat tabel berikut jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan asal Negara

Tabel 6.1
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Asal Negara

Kebangsaan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsaan (Kunjungan)		
	2021	2022	2023
Brunei Darussalam	144	4798	13518
Malaysia	480723	1212574	1901242
Filipina	9375	78436	209458
Singapura	18704	736797	1414447
Thailand	3992	61128	111786
Vietnam	2008	68067	121879
Myanmar	3093	22637	40920
Asean Lainnya	10187	223661	435500
TOTAL ASEAN	528226	2408098	4248750
Hong Kong	2432	7086	13885
India	6670	281814	606439
Jepang	5952	73913	251866
Korea Selatan	9497	122221	347185
Pakistan	974	5247	14264
Bangladesh	1001	9593	9373
Sri Lanka	620	3447	7393
Taiwan	1398	25750	155150
Tionghoa	54713	169378	787924
Timor Leste	819488	703780	728586
Asia Lainnya	2096	24159	60598
TOTAL ASIA (Excl. ASEAN)	904841	1426388	2982663
Saudi Arabia	2053	47472	107684
Bahrain	35	894	1825
Kuwait	75	2216	4692
Mesir	611	7326	16832
Uni Emirat Arab	384	5456	8537
Yaman	758	3208	5936
Qatar	43	840	1961
Timur Tengah Lainnya	1680	14422	34091
TOTAL TIMUR TENGAH	5639	81834	181558
Austria	2103	17708	34984
Belgia	798	21120	42888
Denmark	557	20913	39555

Kebangsaan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsaan (Kunjungan)		
	2021	2022	2023
Perancis	3776	134541	273682
Jerman	3429	128634	263534
Italia	2339	47415	104393
Belanda	12229	115052	250201
Spanyol	3255	51563	106581
Portugal	476	14393	32029
Swedia	3516	19885	37481
Swiss	782	23192	48459
Inggris	5177	170881	335209
Finlandia	240	5480	12345
Norwegia	336	10069	19577
Eropa Barat Lainnya	374	18468	40220
Rusia	8392	75578	161323
Eropa Timur Lainnya	8127	85518	198098
TOTAL EROPA	55906	960410	2000559
Amerika Serikat	21962	188764	392310
Kanada	1242	36042	83696
Amerika Tengah	87	717	1896
Amerika Selatan	1450	27434	71773
Amerika Lainnya	332	7138	17208
TOTAL AMERIKA	25073	260095	566883
Australia	3196	655370	1431177
Selandia Baru	482	44125	116603
Papua Nugini	31703	22509	76471
Oceania Lainnya	123	520	1509
TOTAL OCEANIA	35504	722524	1625760
Afrika Selatan	572	13267	31872
Afrika Lainnya	1769	16415	39780
TOTAL AFRICA	2341	29682	71652
GRAND TOTAL	1,557,530.00	5,889,031.00	11,677,825.00

Dari tabel diatas terlihat pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023 dimana jika diperhatikan secara detail kunjungan terbesar berasal dari Negara Negara ASEAN pada umumnya dan Malaysia secara khusus. Jika didetailkan Negara dengan kunjungan terbanyak ke Indonesia ada lah Malaysia,

Singapura, Tionghoa, Timur Leste, India, Belanda dan Inggris. Namun dari data diatas, hal yang menarik lainnya diperhatikan adalah meningkatnya secara signifikan perjalanan turis dari Timur Tengah dan Eropa ke Indonesia selama 2 tahun terakhir. Dengan konsep wisata ramah muslim yang diaplikasikan beberapa tahun terakhir tampaknya cukup signifikan mendorong kunjungan dari Timur Tengah dan Negara muslim lainnya. Hal ini tentu menjadi peluang yang perlu ditindaklanjuti bagi seluruh destinasi yang ada di Indonesia.

Terkait perjalanan wisatawan nusantara selama tahun 2023 juga meningkat tajam dari tahun tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, jumlah wisatawan nusantara (wisnus) di Indonesia diperkirakan mencapai 839,667 juta perjalanan. Data tersebut meningkat cukup pesat dibandingkan kondisi tahun 2022. Hal ini mengindikasikan telah terjadi pemulihan setelah pandemic Covid-19 di 2020–2022. Pada triwulan III 2023, jumlah perjalanan wisnus lebih besar dibandingkan referensi waktu yang sama pada masa pandemi maupun sebelum pandemi. Statistik ini menghadirkan indikasi positif pada pertumbuhan di sektor pariwisata.

Menilik daerah asal dan tujuan wisatawan nusantara, tergambar bahwa provinsi dengan jumlah penduduk besar juga cenderung memiliki jumlah perjalanan wisnus yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjalanan wisatawan nusantara masih didominasi oleh perjalanan dalam provinsi. Data ini bisa dijadikan acuan untuk membuat intervensi dalam meningkatkan jumlah perjalanan. Perlu perhatian untuk meningkatkan aksesibilitas maupun infrastruktur untuk mendukung perjalanan terutama antar provinsi. Data lebih rinci mengenai informasi asal dan tujuan perjalanan dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 6.2
Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan (Perjalanan)

Provinsi	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan (Perjalanan)		
	2023	2022	2021
ACEH	8,943,786.00	6,954,578.00	5,534,405.00
SUMATERA UTARA	27,613,125.00	23,204,456.00	17,758,183.00
SUMATERA BARAT	14,692,245.00	12,339,263.00	9,603,912.00
RIAU	11,147,053.00	8,404,236.00	6,143,269.00
JAMBI	4,783,187.00	3,780,983.00	3,047,167.00
SUMATERA SELATAN	10,994,493.00	8,492,364.00	6,827,337.00
BENGKULU	2,957,142.00	2,113,649.00	1,770,693.00
LAMPUNG	13,760,697.00	10,925,704.00	9,176,866.00
KEP. BANGKA BELITUNG	2,382,969.00	1,578,407.00	1,063,989.00
KEP. RIAU	2,295,496.00	1,511,354.00	835,672.00
DKI JAKARTA	63,622,596.00	56,008,041.00	37,634,468.00
JAWA BARAT	156,224,371.00	123,531,743.00	96,315,313.00
JAWA TENGAH	115,570,236.00	110,345,715.00	147,674,185.00
DI YOGYAKARTA	30,437,069.00	25,743,590.00	22,834,000.00
JAWA TIMUR	207,104,573.00	200,548,137.00	159,077,924.00
BANTEN	44,399,501.00	38,597,642.00	36,733,930.00
BALI	20,833,503.00	14,259,714.00	9,985,110.00
NUSA TENGGARA BARAT	12,922,404.00	4,091,259.00	3,138,788.00
NUSA TENGGARA TIMUR	5,064,324.00	3,849,353.00	3,108,815.00
KALIMANTAN BARAT	4,711,038.00	3,279,863.00	2,411,392.00
KALIMANTAN TENGAH	4,023,322.00	2,683,604.00	1,974,792.00
KALIMANTAN SELATAN	7,869,846.00	5,310,737.00	4,282,529.00
KALIMANTAN TIMUR	7,903,336.00	5,431,717.00	2,492,841.00
KALIMANTAN UTARA	588,871.00	354,580.00	308,841.00
SULAWESI UTARA	5,398,846.00	4,421,855.00	3,732,957.00
SULAWESI TENGAH	6,289,067.00	6,453,017.00	2,026,911.00
SULAWESI SELATAN	25,426,960.00	28,599,212.00	10,228,085.00
SULAWESI TENGGARA	11,069,947.00	12,783,046.00	2,581,155.00
GORONTALO	1,905,921.00	1,478,813.00	1,188,830.00
SULAWESI BARAT	3,510,961.00	4,234,501.00	1,082,502.00
MALUKU	1,061,844.00	612,567.00	639,765.00
MALUKU UTARA	1,808,020.00	1,511,241.00	672,705.00

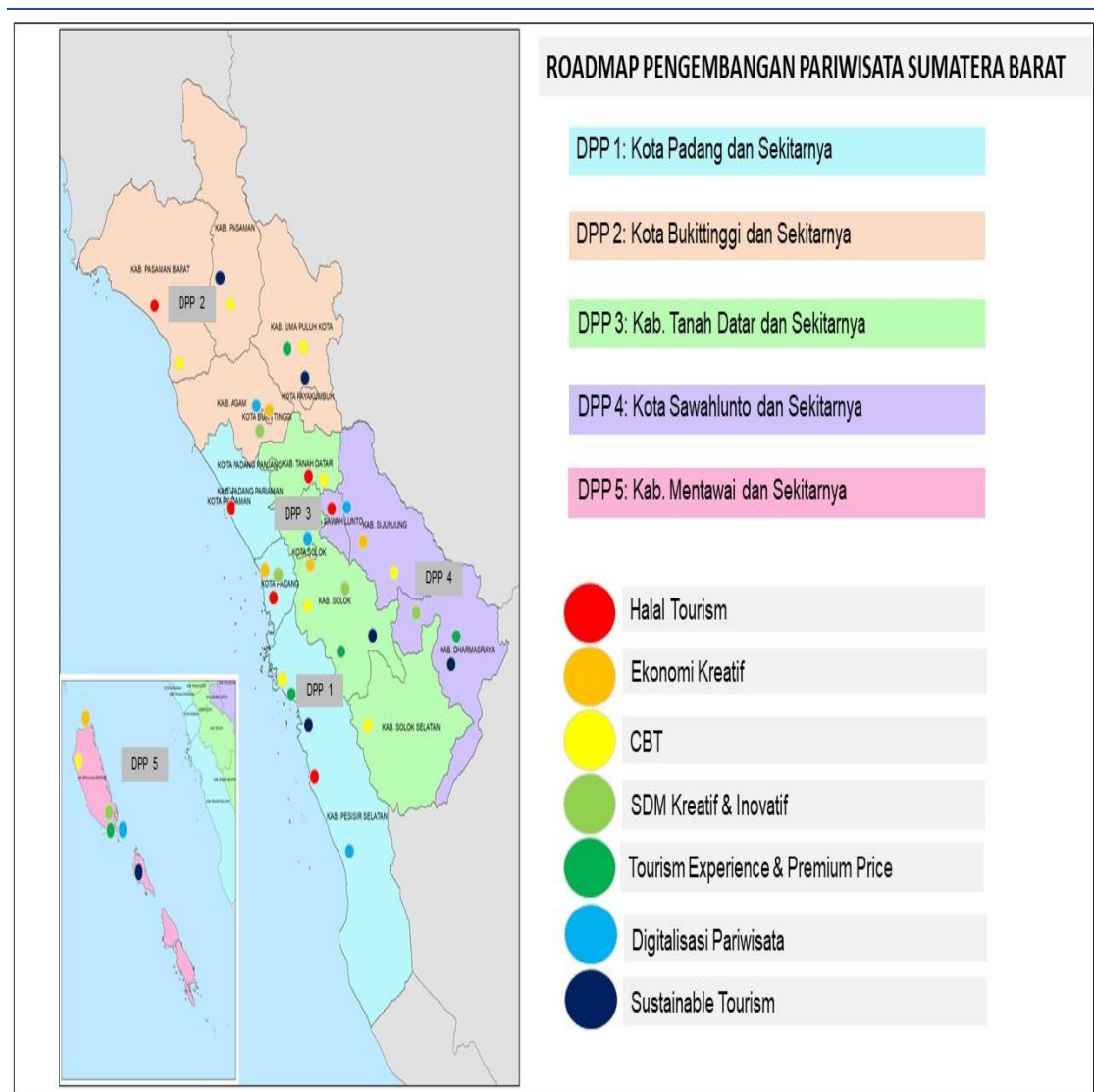
Provinsi	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan (Perjalanan)		
	2023	2022	2021
PAPUA BARAT	762,438.00	469,876.00	485,005.00
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-
PAPUA	1,588,351.00	959,876.00	927,123.00
PAPUA SELATAN	-	-	-
PAPUA TENGAH	-	-	-
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-
INDONESIA	839,667,538.00	734,864,693.00	613,299,459.00

Sumber : BPS (2024)

Dari data diatas terlihat bahwa Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah , Yogyakarta dan Jakarta masih menjadi kota dengan tujuan kunjungan terbanyak oleh wisnus.

6.1.2 Sumatera Barat

Sumatera Barat yang terletak di barat pulau Sumatera, bersentuhan langsung dengan Samudra Hindia, memiliki banyak potensi-potensi pariwisata. Sumatera Barat yang juga dilintasi oleh Bukit Barisan ini memiliki potensi wisata alam gunung dan perbukitan memiliki daya tarik tersendiri. Sebagai daerah yang pernah menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia, Sumatera Barat memiliki banyak daerah penuh sejarah penting bagi Indonesia. Sumatera Barat dalam Rencana Induk Kepariwisata Provinsi telah membagi lima kawasan/zonasi untuk pengembangan pariwisata. Berikut lima zona yang telah ditetapkan berdasarkan RIPK Provinsi Sumatera Barat 2025- 2045

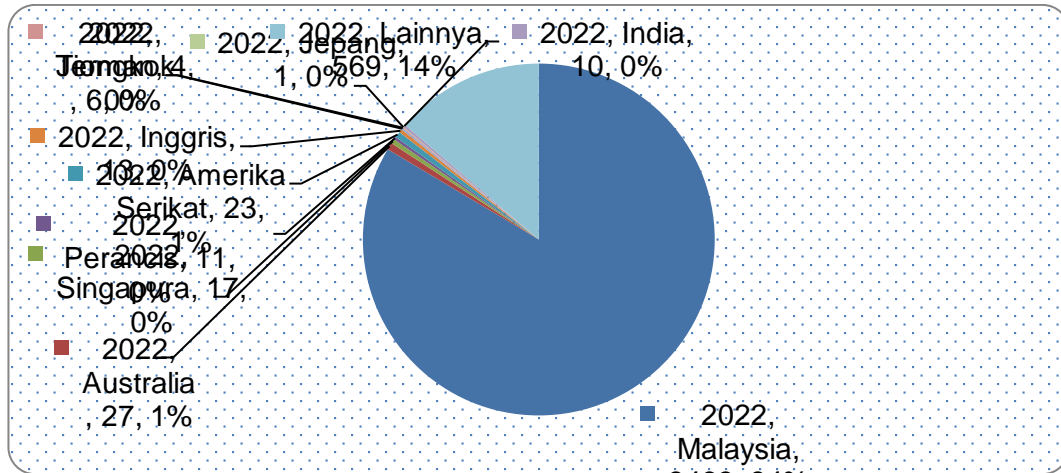


Dari gambar diatas terlihat 5 zonasi utama Destinasi Pariwisata Propinsi dimana untuk isu pembangunann kedepan untuk pariwisata Sumatera Barat adalah halal tourism, ekonomi kreatif, community based tourism, SDM kreatif dan inovatif , tourism experience , digitaalisasi dan sustainable. Diharapkan isu ini akan dapat mengangkat kinerja pariwisata Sumatera Barat kedepannya sehingga bisa menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi utama dan prioritas di Indonesia.

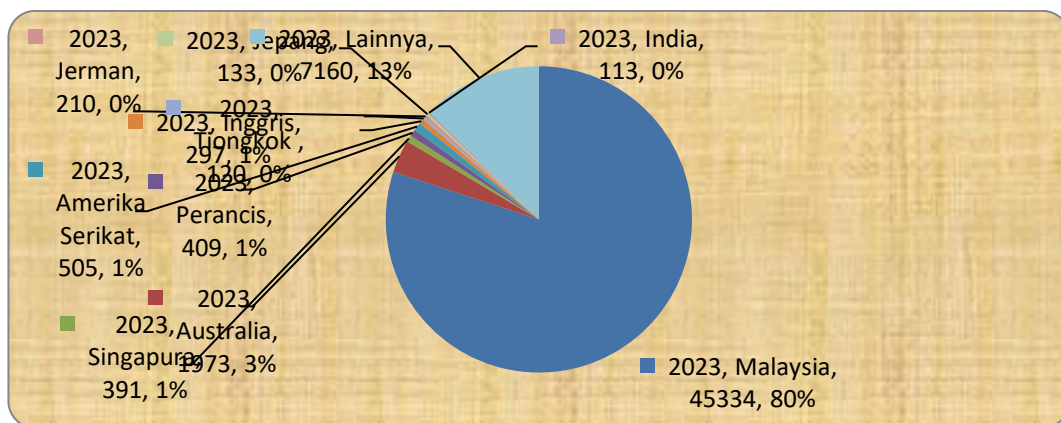
6.1.2.1 Jumlah Wisatawan Mancanegara Sumbar

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 6.1
Kunjungan Wisman Ke Sumatera Barat Tahun 2022



Gambar 6.2
Kunjungan Wisman ke Sumatera Barat Tahun 2023



Dari gambar terlihat pertumbuhan kunjungan yang sangat signifikan dari wisman terutama dari Negara Malaysia selama dua tahun terakhir. Untuk tahun 2021 karena pembatasan kunjungan, wisman tidak dibolehkan untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Tahun 2022 jumlah kunjungan mencapai 4144 dengan mayoritas berasal dari Malaysia hampir 80% dan tahun 2023 jumlah kunjungan wisman meningkat sangat tajam mencapai 56.645 dengan kunjungan mayoritas juga dari Negara Malaysia. Kultur dan budaya yang serupa dan biaya perjalanan yang tidak terlalu mahal diperkirakan menjadi puller utama kunjungan dari wisatawan yang berasal dari Negara Malaysia serta Negara Negara ASEAN ke Sumatera Barat

6.1.2.2 Jumlah Wisatawan Nusantara Sumbar

Jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat pada tahun 2023 mencapai 13.341.025. Key market wisatawan nusantara ke Sumatera Barat adalah Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan DKI Jakarta, dan beberapa kabupaten kota melalui aksesibilitas jalan darat dan udara. Data berikut menampilkan jumlah kunjungan wisnus ke kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat

Tabel 6.3
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (orang)

Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (orang)	
	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	32.979	45.002
Kab. Pesisir Selatan	516.737	605.176
Kab. Solok	716.736	814.931
Kab. Sijunjung	400.429	432.330
Kab. Tanah Datar	668.970	711.590
Kab. Padang Pariaman	1.162.256	1.069.663
Kab. Agam	779.447	810.674
Kab. Lima Puluh Kota	1.104.422	1.148.572
Kab. Pesisir Selatan	329.280	348.595
Kab. Solok Selatan	330.666	329.796
Kab. Dharmasraya	396.629	485.388
Kab. Pesisir Selatan Barat	347.646	383.797
Kota Padang	2.586.342	2.853.244
Kota Solok	315.345	426.174
Kota Sawahlunto	200.689	224.084
Kota Padang Panjang	332.048	315.583
Kota Pesisir Selatan	1.432.016	1.609.458
Kota Payakumbuh	361.232	378.460
Kota Pariaman	325.394	348.508
Provinsi Sumatera Barat	12.339.263	13.341.025

Sumber : BPS, 2024

Untuk industri pendukung pariwisata, Sumatera Barat memiliki hotel berbintang serta hotel non bintang dan jenis penginapan lainnya seperti yang terlihat pada tabel berikut

Tabel 6.4
Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur pada Hotel Bintang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Thun 2023

Kab/Kota	Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang Menurut Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat					
	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
	2023	2023	2023	2022	2022	2022
Kab.Kep.Mentawai	-	-	-	-	-	-
Kab.Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-
Kab.Solok	1	22	30	-	-	-
Kab.Sijunjung	-	-	-	-	-	-
Kab.Tanah Datar	4	236	346	4	236	346
Kab.Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-
Kab.Agam	7	382	643	7	340	618
Kab.Lima Puluh Kota	-	-	-	-	-	-
Kab.Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-
Kab.Solok Selatan	-	-	-	-	-	-
Kab.Dharmasraya	-	-	-	-	-	-
Kab.Pesisir Selatan Barat	-	-	-	-	-	-
Kota Padang	49	3.42	5.24	48	3480	5421
Kota Solok	-	-	-	-	-	-
Kota Sawahlunto	2	60	91	1	20	34
Kota Padang Panjang	2	70	78	2	70	78
Kota Pesisir Selatan	26	1.34	2.44	25	1271	2231
Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-
Kota Pariaman	1	45	80	1	45	80
Total	92	5575	8944	88	5462	8808

Sumber : BPS, 2024

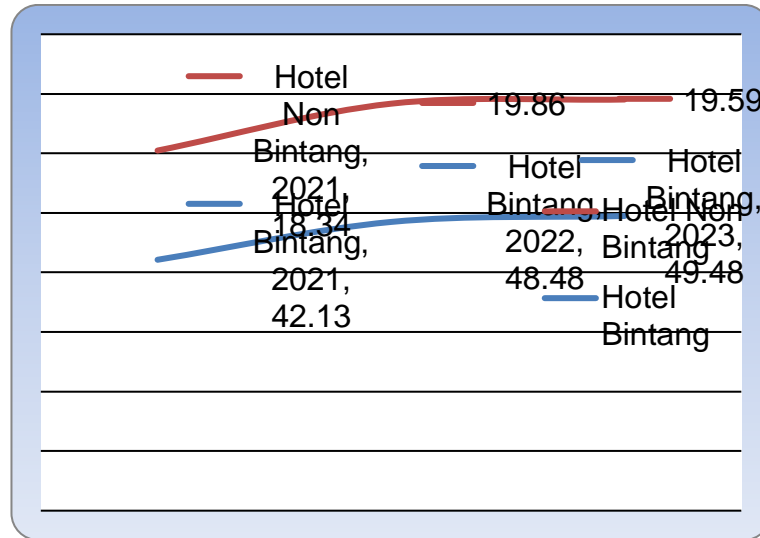
Pada data diatas dapat disimpulkan bahwa selama dua tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur pada Hotel berbintang. Hal ini seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat selama dua tahun terakhir. Begitu juga untuk hotel non bintang juga menunjukkan peningkatan jumlah yang cukup signifikan pada hotel non bintang seperti yang terlihat pada tabel berikut

Tabel 6.5
Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur Pada Hotel Non Bintang
Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

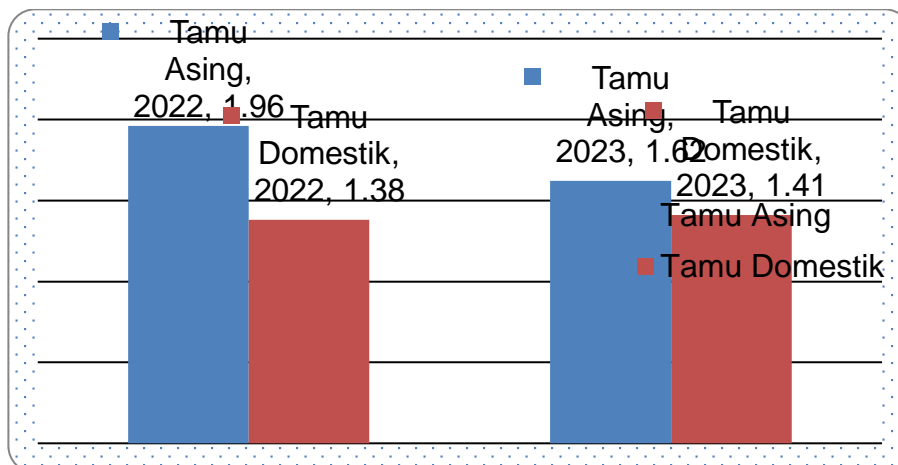
Kab/Kota	Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur Pada Hotel Non Bintang Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat								
	Akomodasi			Kamar			Tempat Tidur		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sumatera Barat	756	872	854	802	903	842	1269	1517	1331
Kab.Kep.Mentawai	90	94	66	742	753	493	1283	1236	824
Kab.Pesisir Selatan	91	97	97	798	832	817	1252	1423	1.36
Kab.Solok	17	22	37	266	299	385	397	443	541
Kab.Sijunjung	18	20	15	244	303	255	358	480	396
Kab.Tanah Datar	16	31	30	179	259	247	268	385	369
Kab.Padang Pariaman	15	14	11	240	222	196	351	284	245
Kab.Agam	42	62	48	378	511	428	590	796	694
Kab.Lima Puluh Kota	61	62	123	522	547	874	611	734	1.1
Kab.Pesisir Selatan	19	20	19	238	239	217	359	477	412
Kab.Solok Selatan	27	28	33	256	236	290	588	544	468
Kab.Dharmasraya	11	11	9	223	230	220	369	381	366
Kab.Pesisir Selatan Barat	18	18	19	282	273	352	526	493	638
Kota Padang	93	111	85	132	165	1.2	2194	3055	1.92
Kota Solok	5	5	10	106	123	160	211	230	273
Kota Sawahlunto	49	52	44	163	212	182	242	373	315
Kota Padang Panjang	36	35	30	368	348	330	494	476	455
Kota Pesisir Selatan	97	125	115	113	138	1.1	1786	2434	1.94
Kota Payakumbuh	23	33	28	296	310	309	473	492	498
Kota Pariaman	28	32	35	266	294	337	347	440	501

Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) pada hotel berbintang menaik sebesar 10 poin dari 48.48 persen tahun 2022 menjadi 49.48 persen tahun 2023. Pada hotel non bintang dan akomodasi lainnya TPK tahun 2022 tercatat sebesar 19.86 persen

menurun pada tahun 2023 menjadi 19.56 persen.(<https://sumbar.bps.go.id>). Untuk detailnya dapat dilihat pada gambar berikut

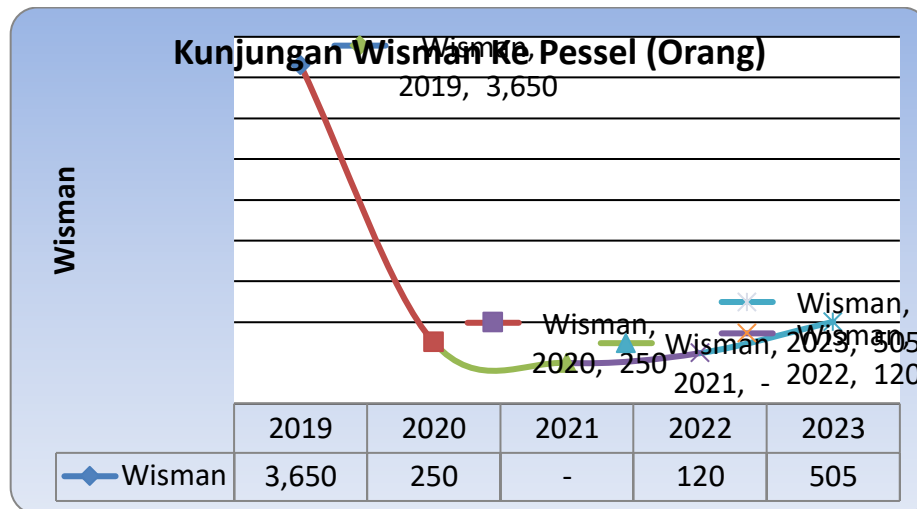


Dari banyaknya para wisatawan yang datang berkunjung, data menunjukkan lama menginap para wisatawan asing maupun domestik di hotel berbintang dan non-berbintang sebagai berikut :

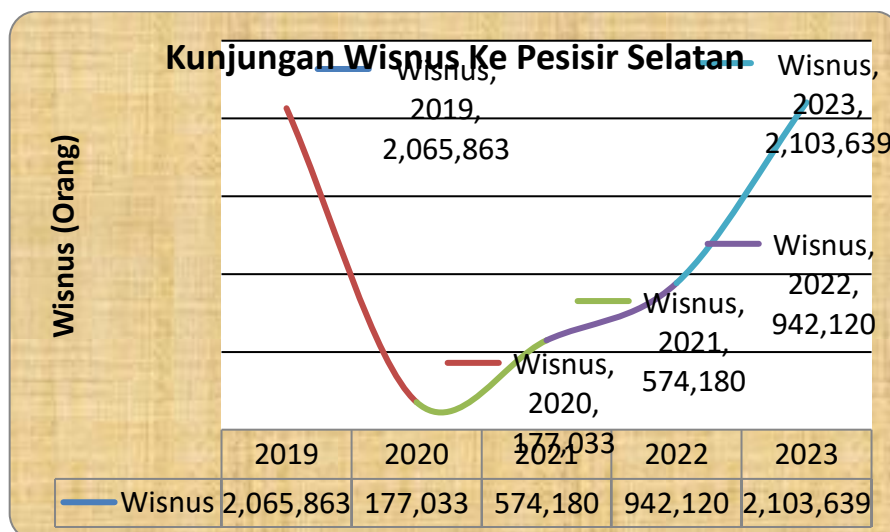


6.1.3 Kabupaten Pesisir Selatan

Potensi wilayah kabupaten Pesisir Selatan memiliki daya tarik *unique value proportion* melalui wisata edukasi berbasis sains. Berikut adalah perkembangan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang datang berkunjung ke Pesisir Selatan



Pada gambar diatas terlihat pergerakan wisatawan mancanegara ke Pesisir selatan selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2019 kunjungan wisman mencapai puncaknya sebelum adanya pandemic covid 19. Promosi yang luar biasa pada saat itu membuat wisman sangat tertarik tuntut datang mengunjungi Raja Ampatnya Sumbar yang promosi nya sudah mendunia. Namun kemudian setelah terjadi pandemic kunjungan menurun sangat tajam hingga tahun 2021 tidak ada kunjungan wisman sama sekali karena ada pembatasan. Namun kemudian setelah border dibuka dan kebijakan pembukaan destinasi wisata secara luas sudah mulai didatangi oleh wisman. Hal yang sama juga terjadi pada pergerakan wisnus ke Pessel seperti yang terlihat pada gambar berikut



Dari gambar diatas terlihat pada tahun 2023 pergerakan wisatawan ke Pessel kembali in bound seiring dengan meningkatnya permintaan kunjungan wisata ke Mandeh serta bermunculannya atraksi lainnya seperti Mesjid Terapung dan lain sebagainya.

6.2 Karakteristik Pasar Wisatawan

Dalam konsep penetrasi pasar, sering sekali terjadi kesalahan strategi pada perencanaan kebijakan. Menjual produk wisata dan event selayanya dilakukan berdasarkan karakteristik pasar yang ada dan pasar potensial. Untuk mendukung city branding dan peningkatan daya saing wisata, konsep pemasaran yang sebaiknya digunakan adalah konsep *Omni Channel*. Dalam perkembangan industri jasa, Kottler & Keller (2014) menjelaskan bahwa transformasi dalam manajemen pemasaran sudah bergeser pada konsep ini. Transformasi konsep pemasaran sebelumnya yang mengacu pada penjualan massal tanpa memperhatikan kebutuhan pasar, atau produk berkualitas yang di produksi hanya dari perspektif pemasok, atau konsep yang memperhatikan kebutuhan pasar tapi peran pemasaran hanya dijalankan oleh satu divisi pemasaran telah bergeser pada konsep *holistic marketing*. Konsep ini mewajibkan seluruh komponen dalam suatu struktur organisasi untuk berorientasi pada pemasaran. Sehingga konsep ini akan membantu akselerasi percepatan pemasaran sebuah kota, meningkatkan tingkat partisipasi, masyarakat dalam memelihara kota/kabupaten.

Dalam pengembangan sektor kepariwisataan diperlukan elaborasi antara destinasi wisata Kabupaten Pessel dan pasar wisatawan. Empat kategori yang harus diperhatikan dalam mengelaborasi daya saing keunggulan kompetitif dan komparatif pariwisata pada suatu daerah dengan pasar wisatawan:

- *Nature of Demand* : daya saing pariwisata agar dapat menciptakan ‘experience’ pada wisatawan
- *Timing of Demand*: kapan demand ini muncul dan kapan perlu melakukan komunikasi pemasaran terintegrasi.
- *Magnitude of Demand* : kekuatan atau magnit daya tarik wisata Kabupaten Pesisir Selatan. Kekuatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi objek-objek

destinasi wisata yang paling potensial di Kabupaten Pessel. Untuk melakukan percepatan, perlu penetapan zona atau kawasan pada setiap titik dan beberapa titik kawasan wisata untuk melakukan penguatan daya saing dan menciptakan *unique selling proposition*.

- *Future Demand* : karena pariwisata merupakan produk yang dinamis *stakeholders* selanjutnya mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam produk wisata untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar.

Trend pariwisata saat ini menunjukkan pergeseran, dari wisatawan konvensional (*mass tourism*) menjadi wisatawan minat khusus (*special interest tourism*) hal ini dipengaruhi oleh minat atau motivasi wisatawan terhadap obyek atau aktivitas wisata tertentu. *Mass tourism* sering diidentikkan dengan wisata bersifat rekreasi umum dan berorientasi pada obyek 4 S (*sea, sand, sun, snow*) ataupun obyek-obyek wisata konvensional yang populer, sedangkan wisatawan minat khusus (*special interest tourist*) berorientasi pada obyek-obyek yang tidak biasa/populer serta mengandung unsur-unsur pengembangan diri melalui bentuk perjalanan yang lebih aktif, dimana wisatawan terlibat secara fisik dan emosional yang lebih mendalam dengan alam dan masyarakat setempat pada suatu kegiatan tertentu sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman berwisata yang berkualitas

Kabupaten Pessel merupakan destinasi potensial yang saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014-2025 berada pada kategori Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) yang merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata dan kawasan potensi pengembangan pariwisata yang telah berkembang ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatifnya, menjadi pemicu tujuan perjalanan wisatawan mancanegara dan domestik, karena tema pengembangan pariwisatanya. Tema utama kawasan pengembangan Kab. Pessel adalah destinasi pantai dan pulau (Marine Tourism). Selain itu Kab. Pessel memiliki potensi pariwisata dari seni dan budaya serta

sejarah yang terkait dengan Minangkabau Kuno.

Tren pemasaran pariwisata nasional saat ini menunjukkan pergeseran menuju arah *e-tourism*, yang menjadikan driver intensi wisatawan nusantara untuk mengunjungi ODTW. Pemasaran pariwisata mengarah pada *crowdsourcing* dimana peranan *word of mouth* sangat menentukan pengenalan titik- titik ODTW baru di nusantara. Di Sumatera Barat sendiri, dari 19 kabupaten kota yang tergabung dalam 5 zonasi Destinasi Pariwisata Propinsi , ada 5 segmentasi produk wisata berdasarkan keunggulan dan karakteristik *pull factors* (keunikan) masing masing kabupaten kota:



Sumber : Paparan Sari Lenggogeni pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Sektor Pariwisata 2015

Pariwisata merupakan salah satu industri yang terbesar pertumbuhannya di dunia dan merupakan salah satu hal terpenting dalam peningkatan pendapatan daerah. Dalam melakukan strategi pemasaran sektor pariwisata, memahami segmentasi, target dan positioning pasar adalah hal yang pertama kali harus dilakukan oleh perencana pariwisata. Dalam hal ini pemahaman segmentasi dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a. Segmentasi geodemografis;
- b. Segmentasi psikografis.

Pada umumnya segmentasi yang sering dilakukan adalah geodemografis, dalam artian data kunjungan wisatawan dilihat dari *country of origin*, pendapatan, gender, jarak tempuh, pendidikan dan lainnya. Sedangkan segmentasi psikografis adalah memahami pasar dengan data psikografis seperti *accompanionship*, atau melakukan perjalanan wisata dengan siapa, motivasi melakukan kunjungan wisata, personality, destinasi yang dipilih dan lainnya. Pada umumnya perencana pariwisata di Indonesia tidak banyak yang mau melakukan analisa segmen pasar secara psikografis.

6.2.1 Karakteristik Wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Sumatera Barat

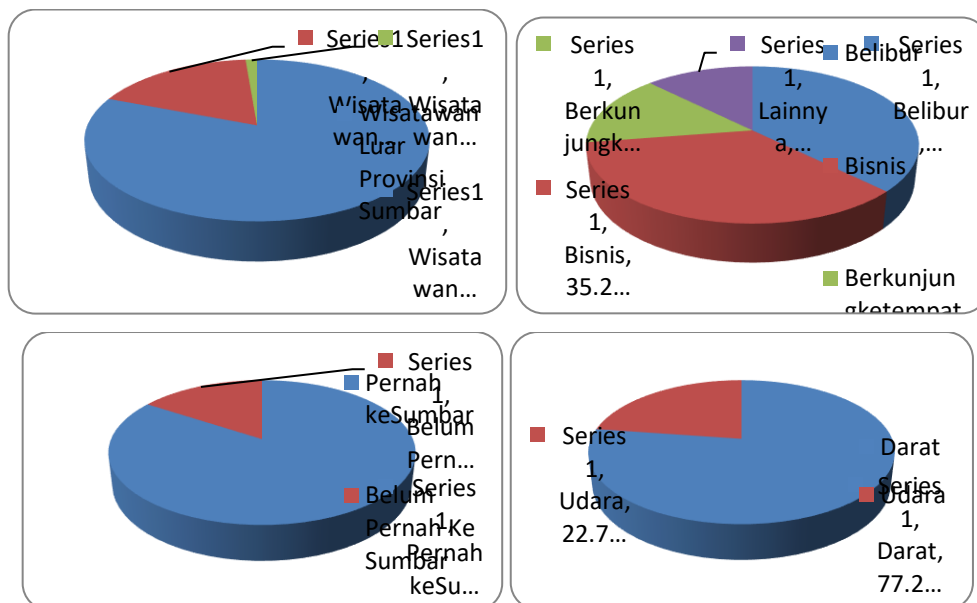
Untuk Provinsi Sumatera Barat, distribusi wisatawan pada Tabel diatas memperlihatkan distribusi kunjungan wisatawan (nusantara dan mancanegara) ke kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2022 hingga 2023. Tabel 6.2 di atas memperlihatkan bahwa terjadi ketimpangan dalam hal daerah yang menjadi tujuan utama para wisatawan dimana Lima puluh Kota, Padang Pariaman, Kab. Solok, Tanah Datar dan Pesisir Selatan menjadi daerah yang sangat dominan. Sementara itu, untuk daerah kota, didominasi oleh kota Padang dan Pesisir Selatan. Kota Padang sebagai ibukota merupakan hub dari destinasi lain di kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Kota Padang secara umum menguasai sekitar 2 juta kunjungan wisatawan dengan Pendapatan Asli daerah tertinggi diikuti oleh kota Pesisir Selatan sebagai tujuan destinasi wisatawan mancanegara ke Provinsi Sumatera Barat

Namun hal menarik adalah setelah pandemic di beberapa kab kota yang

fokus dengan wisata minat khusus mengalami lonjakan kunjungan yaitu diantaranya Pariaman, Pesisir selatan, kab.solok termasuk Pesisir Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa wisatawan nusantara cenderung menghindari mass tourism dan fokus ke special interest yang berbasis experience. Hasil penelitian Tourism Development center dan BI tahun 2022 mengindikasikan bahwa beberapa hal yang diutamakan oleh wisnus pada saat berkunjung ke Sumatera Barat adalah **sistem keamanan berbasis mitigasi bencana, sistem kebersihan, sistem kesehatan dan ketersediaan fasilitas ramah anak di setiap objek wisata. Hal ini harus dipenuhi semua objek wisata untuk meningkatkan kepuasan wisatawan.**

Untuk segmentasi pasar wisata nusantara 3 besar pasar adalah: Pekanbaru, Jakarta, dan Jambi. Segmentasi pasar wisatawan nusantara ini masih didominasi dengan aksesibilitas darat, dan diikuti oleh akses udara. Segmentasi pasar wisata nusantara terbanyak berasal dari Pekanbaru dengan jenis wisata keluarga. Sedangkan untuk segmentasi Jakarta berasal dari jalur udara pada umumnya berasal dari wisata bisnis untuk tujuan MICE dan group. Uniknya wisatawan nusantara ini didominasi oleh perantau.

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Tourism Developmen Center (TDC) Unand terhadap 1250 wisatawan yang datang berkunjung ke Sumatera Barat diperoleh informasi karakteristik dari wisatawan yang berkunjung sebagai berikut

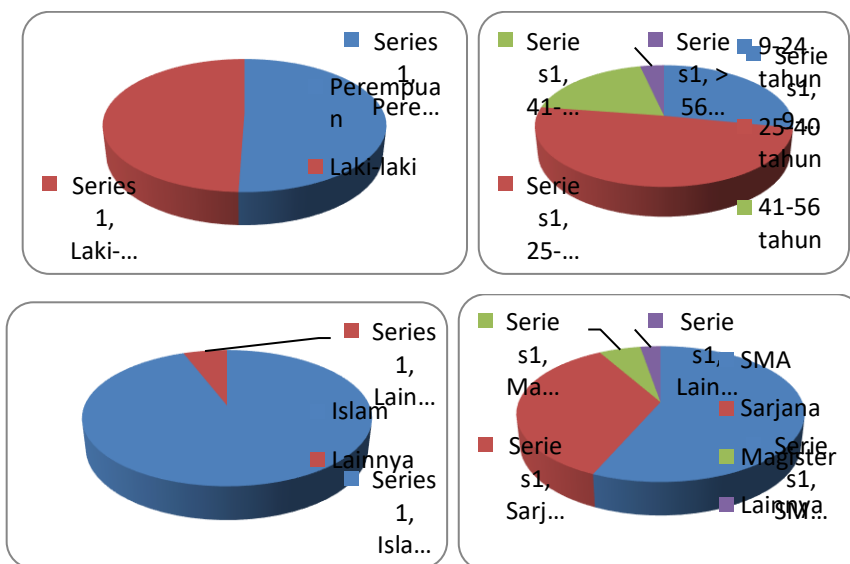


Sumber : Data diolah tahun 2022

Dari informasi diatas diperoleh informasi sebagai berikut:

Mayoritas wisatawan berasal dari luar provinsi Sumatera Barat dan merupakan repeat visitor dan mayoritas wisatawan merupakan road tripper dengan tujuan kunjungan adalah untuk berlibur dan bisnis.

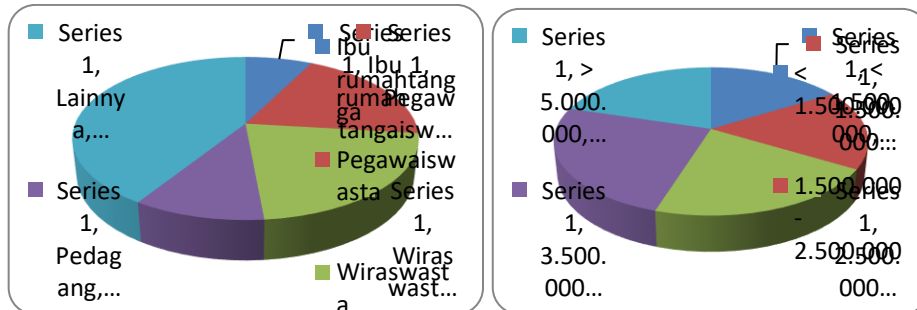
Informasi tersebut diatas sesuai dengan hasil beberapa penelitian terdahulu dimana mayoritas wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat merupakan wisnus yang merupakan repeat visitor dengan mayoritas tujuan adalah berlibur, bisnis dan mengunjungi Saudara (Mardhatillah (2020) , Lisma et al (2016), dan Hasanah (2019)). Informasi selanjutnya mengenai karakteristik wisatawan yang datang berkunjung adalah sebagai berikut :



Sumber : Data diolah tahun 2022

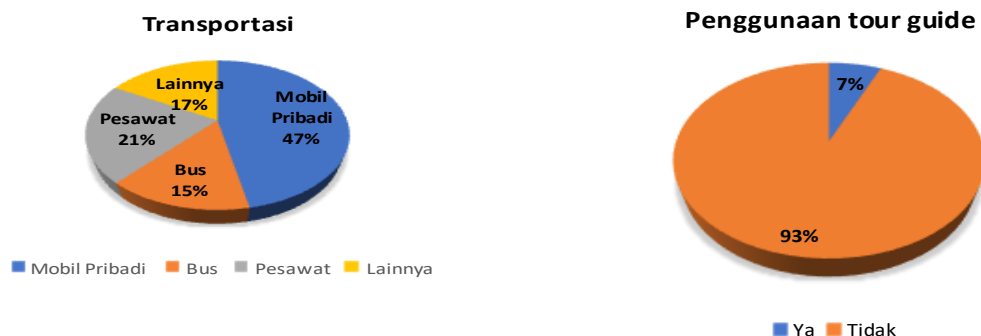
Berdasarkan gender komposisi wisatawan yang datang seimbang antara laki-laki dan perempuan dan wisatawan milenial merupakan segmen yang paling besar. Selain itu wisatawan yang datang berkunjung ke Sumatera Barat sebagian besar adalah Islam dengan pendidikan mayoritas mereka adalah minimal SMA. Terkait dengan brand pariwisata Sumbar sebagai salah satu world best halal destination tentunya hal ini menjadi suatu sentimen positif bagi wisatawan muslim yang ingin berkunjung dengan semua fasilitas ramah muslim yang dimiliki saat ini. Amenitas pendukung halal tourism terus digenjut dimana salah satu bentuknya adalah

meningkatnya jumlah masjid yang sekaligus dijadikan sebagai rest area di sepanjang jalur utama perlintasan antar kota dan provinsi.

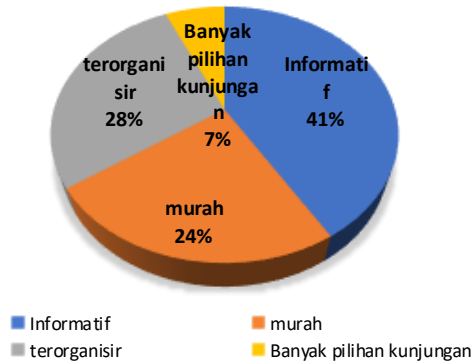


Sumber : Data diolah tahun 2022

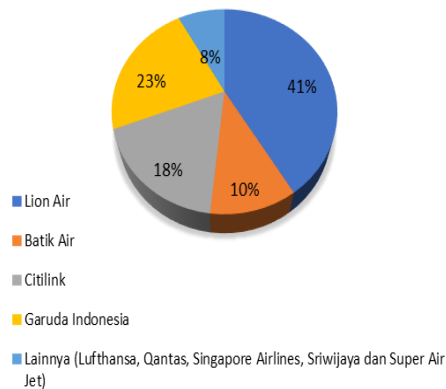
Dilihat dari pekerjaan wisatawan yang berkunjung , mayoritas adalah Ibu Rumah tangga, pegawai swasta dan wiraswasta dengan pendapatan mayoritas mereka adalah minimal 1,5 juta. Terkait dengan sebaran pendapatan wisatawan terlihat hampir merata di semua kelompok pendapatan, mulai dari dibawah 1 juta hingga diatas 5 juta dimana pendapatan antara 3.5 juta hingga 5 juta merupakan kelompok yang paling besar namun tidak signifikan . Hal ini sangat menarik karena bisa dikatakan jenis segmen yg datang ke Sumbar merupakan segmen yang merata dari sisi pendapatan, hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya yang juga mengidentifikasi sebaran pendapatan mulai dari 1 juta hingga diatas 5 juta dari wisnus yang datang ke Sumbar (Hasanah (2019), dwisaputra (2017), Ajis et al (2022)). Berikut informasi terkait dengan perilaku wisatawan yang sedang berkunjung ke Sumatera Barat :



Alasan menggunakan tour travel

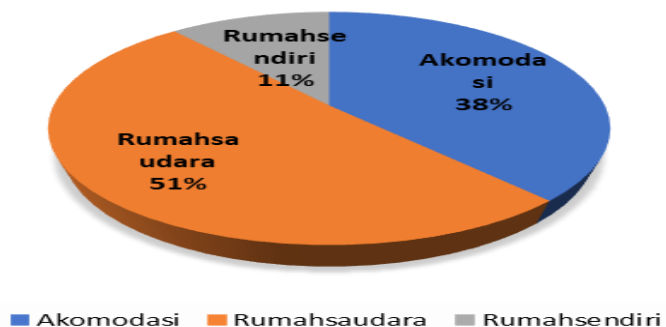


Maskapai yang digunakan jika menggunakan pesawat



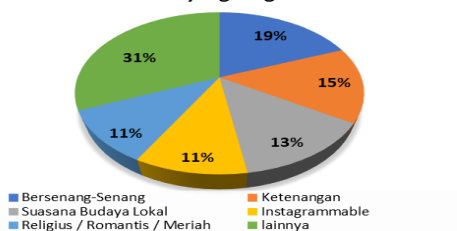
Mayoritas datang berkunjung lewat jalur darat yaitu dengan mobil pribadi dan bus dan mereka datang bersama keluarga atau dengan teman dalam satu rombongan. Lebih jauh mayoritas wisatawan datang ke Sumatera Barat merencanakan perjalanan mereka sendiri tanpa meminta bantuan jasa travel agent. Namun ada sekelompok tertentu rombongan wisatawan yang menggunakan jasa tour travel dengan alasan informative, terorganisir, murah. Adapun yang datang dengan jalur udara mayoritas menggunakan maskapai Lion Air, Garuda Indonesia, Batik Air dan Citilink (berdasarkan pemerinkatan).

Tempat Menginap

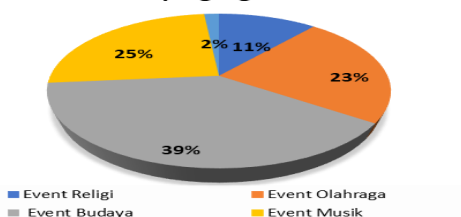


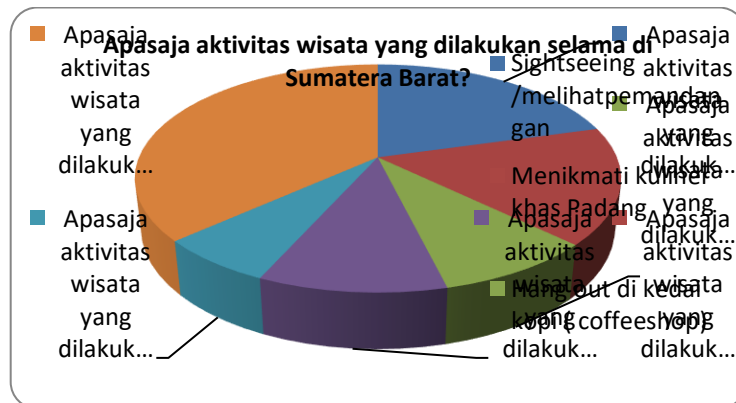
Mayoritas wisatawan menginap di rumah saudara dan di akomodasi, dimana akomodasi yang paling banyak dituju adalah homestay serta hotel bintang 3 dan 4. Berdasarkan informasi di atas juga ditemukan fakta bahwa mayoritas wisatawan puas dengan pilihan akomodasi mereka. Adapun keluhan utama terhadap akomodasi di Sumatera Barat adalah fasilitas yang minim dengan harga yang cukup mahal.

Suasana Destinasi yang diinginkan di Sumbar

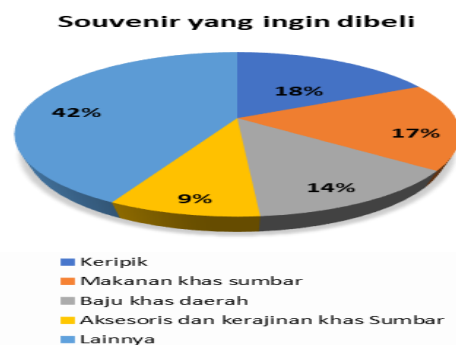


Event yang ingin diikuti



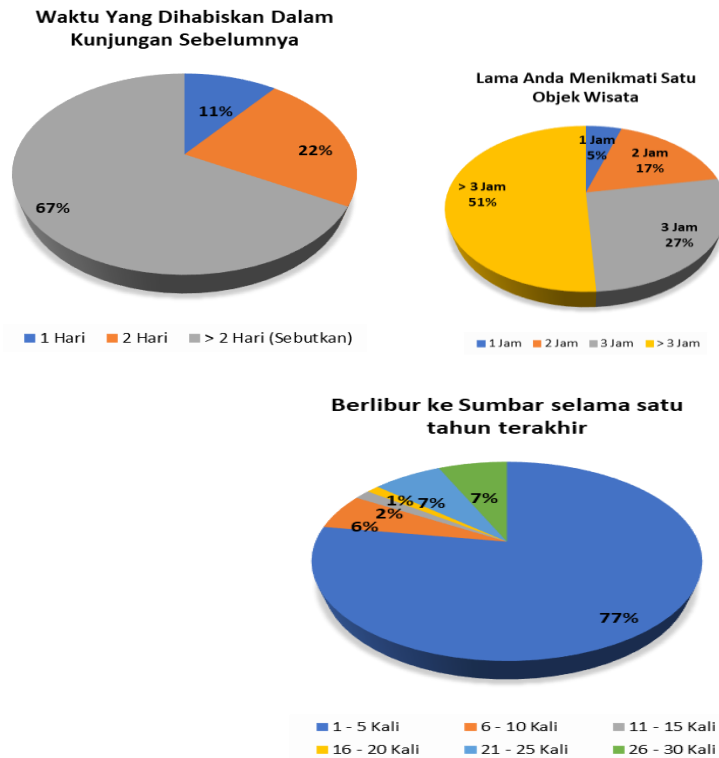


Mayoritas wisatawan yang datang berkunjung ke Sumatera Barat mengharapkan suasana destinasi yang fun, mindfulness, suasana budaya lokal, romantik, serta instagrammable (diurutkan berdasarkan pemeringkatan). Sementara itu untuk event yang ingin diikuti adalah event budaya , event music, event olahraga dan event religi(diurutkan berdasarkan pemeringkatan). Untuk atraksi yang mereka inginkan pada saat mengunjungi desa wisata adalah atraksi olah raga, kesenian dan fashion serta budaya dan adat serta kuliner (diurutkan berdasarkan pemeringkatan). Untuk aktivitas yang dilakukan di Sumbar yang paling banyak adalah sightseeing, menikmati kuliner, melihat sunset, hang out di coffe shop, dan mengunjungi geopark seperti goa dan lembah.



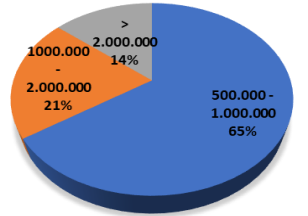
Terkait pembelian oleh-oleh ternyata keripik, makanan khas lainnya serta baju (diurutkan berdasarkan pemeringkatan) merupakan produk oleh-oleh yang paling banyak dibeli pada saat berkunjung ke Sumatera Barat Selanjutnya detail

informasi mengenai review kunjungan sebelumnya dapat dilihat pada chart berikut.



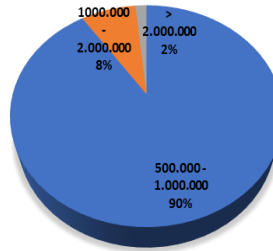
Dalam kunjungan sebelumnya ke Sumatera Barat, mayoritas wisatawan telah berkunjung sebanyak 1-5 kali dalam setahun dimana setiap kunjungan menghabiskan lebih dari 2 hari di Sumatera Barat. Adapun rentang waktu mereka di satu objek wisata diatas 3 jam per objek yang dikunjungi. Terkait lama waktu kunjungan dalam satu objek wisata, informasi ini juga in line dengan hasil penelitian sebelumnya kerjasama BI dan TDC di tahun 2019 dan juga in line dengan hasil neraca satelit pariwisata 2020 yang di release oleh Dinas Pariwisata dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dimana dijelaskan bahwasanya waktu kunjungan rata rata wisnus dalam 1 objek wisata adalah 1 sampai 3 jam.

Pengeluaran responden di objek wisata



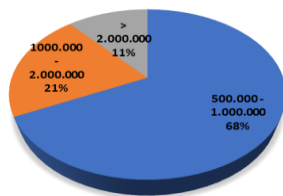
■ 500.000 - 1.000.000 ■ 1000.000 - 2.000.000 ■ > 2.000.000

Pengeluaran Transportasi Dalam Kota



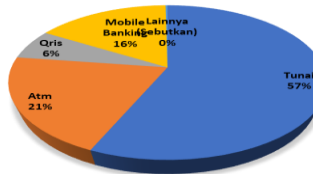
■ 500.000 - 1.000.000 ■ 1000.000 - 2.000.000 ■ > 2.000.000

Pengeluaran Hotel Dalam Kota



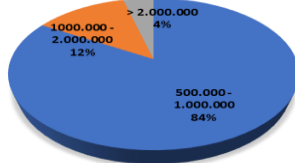
■ 500.000 - 1.000.000 ■ 1000.000 - 2.000.000 ■ > 2.000.000

Metode Pembayaran Yang Dilakukan Selama Kunjungan



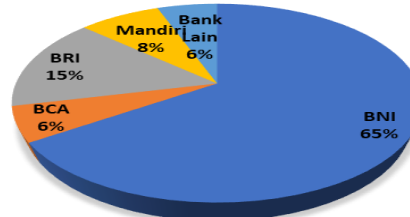
■ Tunai ■ Atm ■ Qris ■ Mobile Banking ■ Lainnya (Sebutkan)

Pengeluaran Makanan Dalam Kota



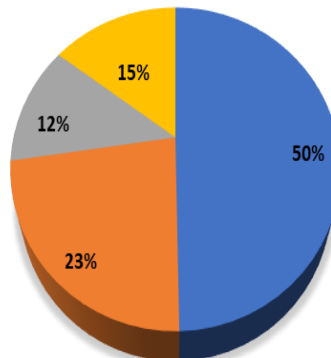
■ 500.000 - 1.000.000 ■ 1000.000 - 2.000.000 ■ > 2.000.000

Bank yang digunakan untuk transaksi mobile banking



■ BNI ■ BCA ■ BRI ■ Mandiri ■ Bank Lain

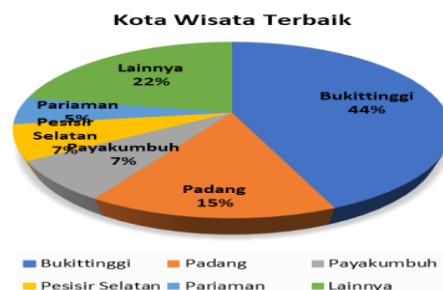
Kendala dalam menggunakan e-money



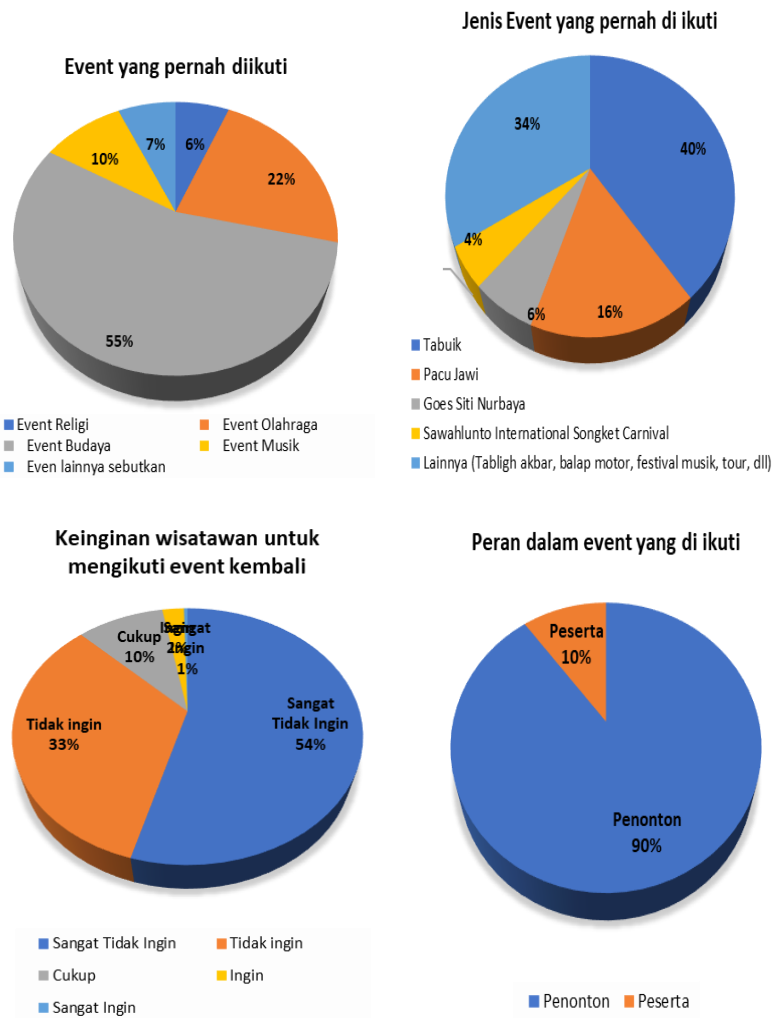
■ Gangguan jaringan internet ■ Fasilitas tidak terdapat disemua tempat ■ Biaya admin ■ Kendala lainnya

Adapun pengeluaran selama di objek wisata adalah sebesar 500.000 – 1.000 .000. Sementara itu untuk pengeluaran transportasi selama kunjungan per hari adalah 500.000 sampai dengan 1 juta, pengeluaran hotel bervariasi mulai dari 500.000 sampai dengan 2 juta per hari, pengeluaran untuk kuliner 500.000 sampai dengan 1 juta serta untuk oleh oleh 500.000 sampai dengan 1 juta.

Untuk alat pembayaran di destinasi wisata, mayoritas wisatawan melakukannya dengan tunai dan ATM. Untuk penggunaan mobile banking mayoritas wisatawan menggunakan BNI dan BRI. Terkait penggunaan mobile banking di destinasi wisata, permasalahan utama yang sering dihadapi dalam penggunaan mobile banking adalah gangguan jaringan. Hasil temuan ini juga diperkuat oleh penelitian oleh Azman (2022) dimana dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa penggunaan e-money masih belum maksimal di Pesisir Selatan. Hanya 20 % dari pengunjung yang datang menggunakan e-money sebagai alat pembayaran.



Preferensi wisatawan mengenai kota wisata terbaik di Sumatera Barat sesuai peringkat adalah Pesisir Selatan, Padang, Payakumbuh, Pesisir Selatan dan Pariaman. Hasil ini sedikit berbeda dengan hasil survey TDC pada tahun 2019 dimana 5 kota wisata terbaik pada saat itu adalah Pesisir Selatan, Padang, Payakumbuh, Kab. Solok, dan Padang panjang. Masuknya Pesisir selatan dan pariaman dalam 5 kota wisata terbaik tahun ini juga terlihat dari melonjaknya jumlah kunjungan dari kedua kota tersebut diatas selama 2 tahun terakhir. Berdasarkan data jumlah kunjungan wisnus ke Pariaman dan Pesisir selatan 2 tahun terakhir (2020 - 2021) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan walaupun dalam kondisi pandemi.



Terkait event yang pernah diikuti, mayoritas wisatawan menyebutkan pernah mengikuti event budaya, event olahraga, event music dan event religi. Adapun jenis event yang paling banyak dikunjungi adalah Tabuik, Pacu jawi dan Gowes Siti Nurbaya. Lebih jauh mayoritas wisatawan bertindak sebagai penonton dalam event yang diikuti. Namun dalam hal penilaian terhadap event yang pernah diikuti tersebut mayoritas menyebutkan event tersebut sangat tidak menarik dan sangat tidak ingin untuk kembali lagi.

6.2.2 Karakteristik Wisatawan Mancanegara

Untuk segmentasi geodemografis, pasar wisatawan di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi secara kesamaan rumpun dan aksesibilitas terdekat yaitu Malaysia dengan share berfluktuasi antara 74,4% sampai 81,7% persen terhadap total kunjungan selama periode 2020 sampai 2023. Dalam hal ini Malaysia lebih didominasi oleh wisata keluarga, dan psikografis wisata berbelanja. Wisatawan Malaysia didominasi oleh pasar muslim. Salah satu faktor tingginya kunjungan wisatawan dari Malaysia ke Provinsi Sumatera Barat adalah akses penerbangan yang tidak sulit dan mudah dan harga terjangkau sehingga wisatawan Malaysia merupakan salah satu wisatawan asing yang paling banyak datang ke Sumatera Barat.

Pasar Australia juga berfluktuasi selama periode 2020 sampai 2023 berkisar sekitar 3.6% sampai dengan 4,9% dan pada umumnya berkunjung karena faktor psikografis yaitu motivasi sebagai bagian *personality adventurer* untuk minat melakukan wisata olahraga surfing.

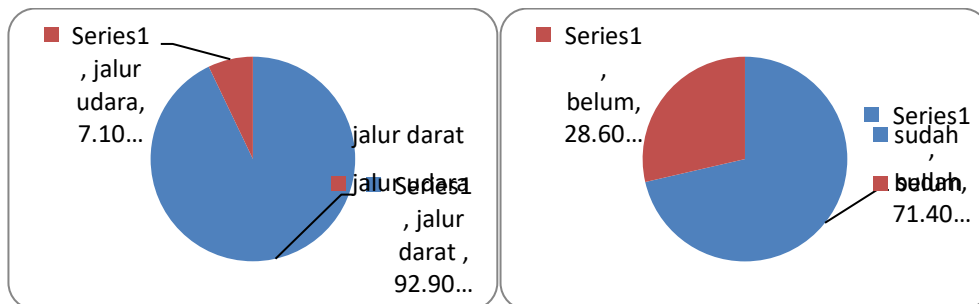
Untuk wisatawan mancanegara, beberapa persepsi yang muncul mengenai *pull factors* (destinasi Sumatera Barat) dari hasil penelitian kerjasama anatar Tourism Development Center Unand dan Bank Indonesia (2022) metode *in depth interview* dengan wisatawan nusantara adalah:

- Ketersediaan fasilitas sarana prasarana kesehatan dan kebersihan dan kesehatan di objek wisata
- Kebersihan lingkungan
- Higienitas makanan
- Keramah tamahan dan keamanan pada saat di objek wisata

Wisatawan Mancanegara memiliki preferensi pada alam dan berbasis *pro-environment* sesuai dengan prinsip *suistanability*. Wisatawan mancanegara cenderung menginginkan tempat yang *private* dan bersih, serta masyarakat yang peduli pada lingkungan. Wisatawan mancanegara juga memiliki preferensi keberagaman *local wisdom* pada masyarakat untuk mendukung *suistanability tourism*.

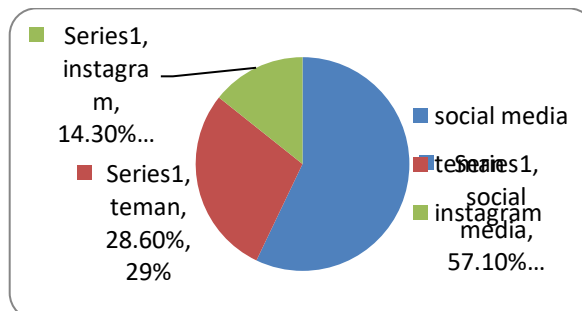
6.2.2 Karakteristik Wisatawan yang berkunjung ke Pesisir Selatan

Untuk segmentasi geodemografis, kunjungan ke pesisir selatan masih didominasi oleh wisatawan dari Jambi dan Pekanbaru selain dari kabupaten dan kota tetangga. Hal yang menarik adalah dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada wisatawan secara online dari Agustus hingga September 2024 diketahui bahwa Pesisir Selatan merupakan tujuan utama dalam itinerary mereka atau menjadi pilihan pada hari pertama dalam rangkaian liburan mereka. Hampir 80,6 % menjawab Pesisir Selatan merupakan tujuan hari pertama barulah setelahnya menuju kabupaten kota lainnya untuk kunjungan wisata. Selanjutnya 92,9% datang ke Pesisir Selatan lewat jalur darat, dan 71,4 % merupakan repeat visitor. Untuk detailnya bisa dilihat pada gambar dibawah ini

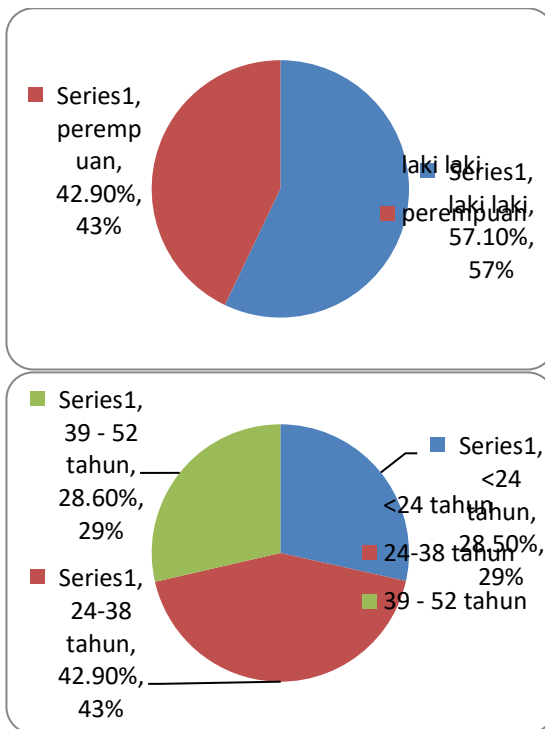


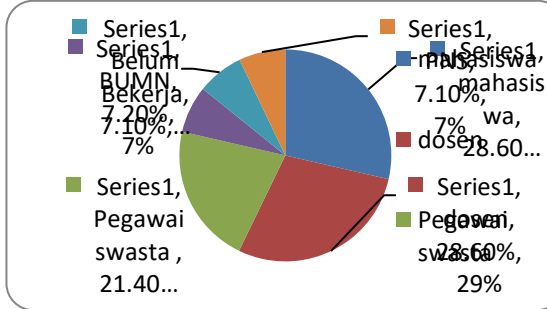
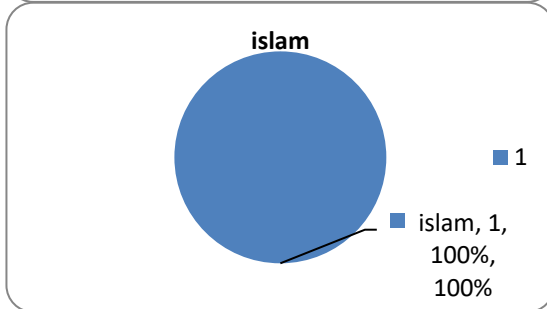
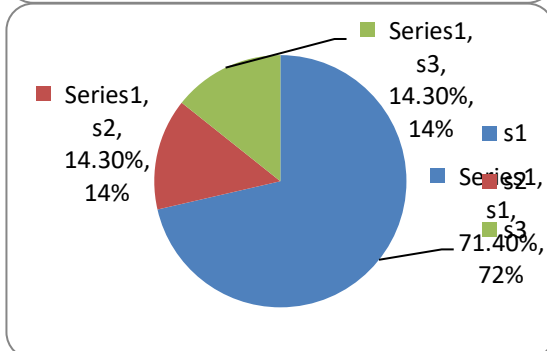
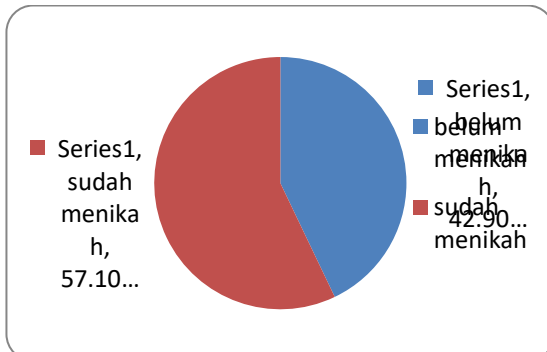
Sumber : data diolah 2024

Selanjutnya terkait informasi mengenai destinasi wisata di Pesisir Selatan kebanyakan mencarinya dari social media sebanyak 85.7 % dan sisanya dari word of mouth

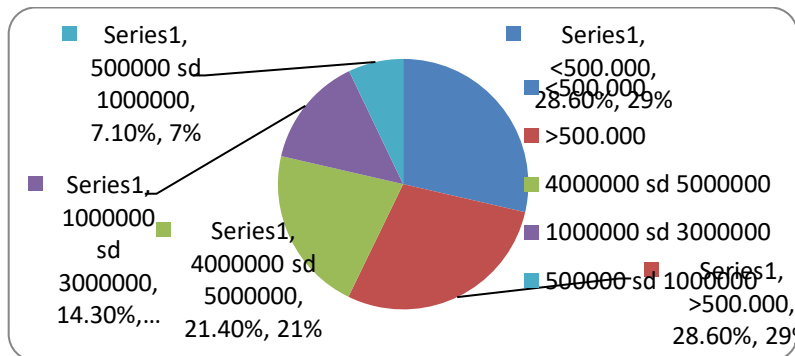


Terkait profil demografis dari pengunjung ke Pesisir Selatan 57.1 % merupakan laki-laki dan terkait rentang usia ternyata yang banyak berkunjung adalah pada rentang usia 24-38 tahun (millennial) dan sisanya adalah Gen Z dan Gen X. untuk status, kebanyakan pengunjung sudah menikah dengan pendidikan terbanyak adalah S1 sebanyak 71.4% dan mayoritas beragama Islam . terkait pekerjaan dari wisatawan yang berkunjung ke Pessel ternyata kebanyakan adalah pegawai BUMN, pelajar dan mahasiswa serta pegawai swasta. Terkait pendapatan dari wisatawan cukup merata dan terbanyak adalah yang berpenghasilan < 500.000 , >500.000 hingga 1.000.000 dan 4.000.000 sd 5.000.000. untukdetailnya profil demografis dari wisatawan yang berkunjung dapat dilihat pada gambar berikut



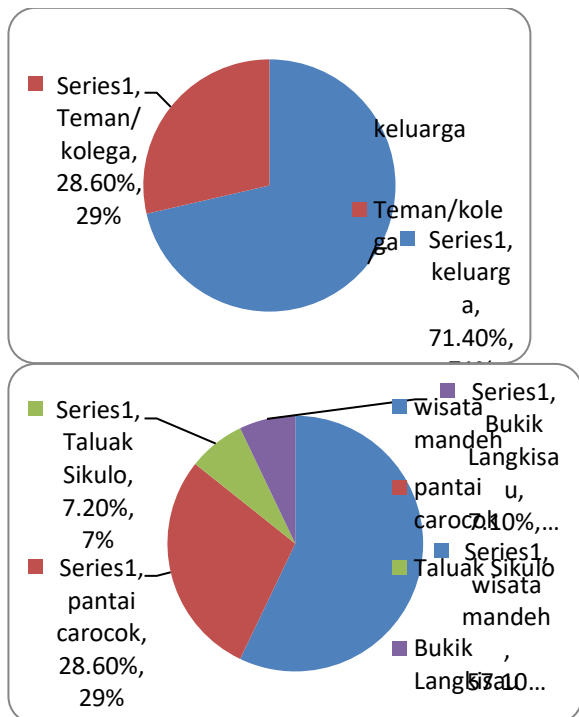


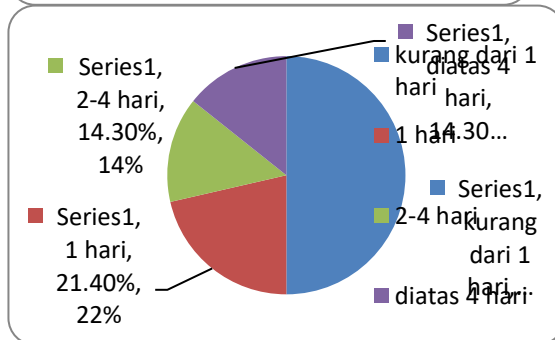
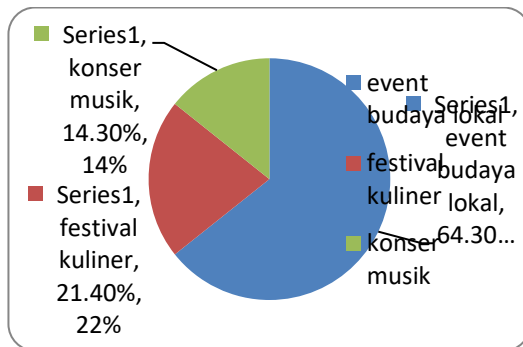
Sumber : Data diolah , 2024



Sumber : Data diolah, 2024

Selanjutnya dari hasil survey dapat diketahui bahwa mayoritas pengunjung adalah family segment sebanyak 71,4 % dan kunjungan bersama kolega sebanyak 28.4 %. Terkait tujuan destinasi favorit di Pessel sebaanyak 57,10 % menyatakan wisata mandeh dan pantai carocok sebanyak 28,6 %. Terkait event yang diinginkanoleh pengunjung atau wisatawan **diadakan** di Pessel adalah sebanyak 64,3 % mengharapkan event budaya lokal , 21,4 % mengharapkan event kuliner dan sisanya mengharapkan konser music. Sementara itu durasi kunjungan wisatawan sebanyak 50% menjawab kurang dari sehari dan 21, 4 % berkunjung selama sehari. Untuk detailnya dapat dilihat pada gambar berikut



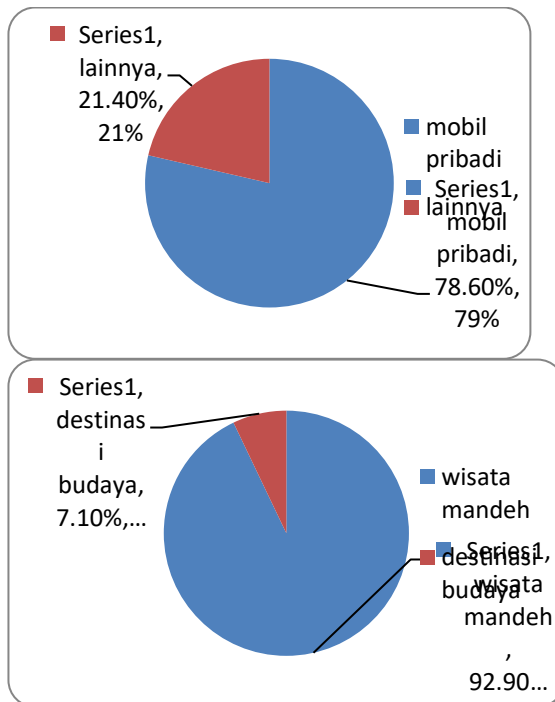


Sumber : data diolah, 2024

Selanjutnya aktivitas wisata yang paling banyak dilakukan oleh wisatawan adalah sebagai berikut

Kegiatan	Persentase
sightseeing	39.13%
swimming	13.04%
snorkling	13.04%
banana boat	21.74%
wisata edukasi	13.04%

Terkait transportasi menuju Pessel kebanyakan menggunakan mobil pribadi sebanyak 78,6 % dan pernyataan yang menarik adalah ternyata Pessel identik dengan Wisata Mandeh , dimana sebanyak 92,9 % membranding Pessel sebagai wisata mandeh



Sumber : data diolah, 2024

6.3 Upaya Pemasaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

6.3.1 Melakukan Positioning Destinasi

Proses pengembangan dan penguatan *positioning* wisata Kabupaten Pesisir Selatan akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan potensi wisata yang ada. Berdasarkan temuan-temuan dari survei yang telah dilakukan maka wisata edukasi, wisata sejarah dan alam adalah daya tarik utama bagi wisatawan.

Proses penguatan *positioning* wisata Kabupaten Pesisir Selatan diperkirakan akan sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan dalam memformulasikan konsep destinasi yang dikembangkan. Kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan *core value* yang ada diharapkan mampu memberikan *value added* wisata pada tingkat persaingan yang dihadapi. Analisis terhadap potensi-potensi yang ada memperlihatkan bahwa ada argumen yang kuat bahwa keunikan Kabupaten Pesisir Selatan yang masih berkembang yaitu di sektor marine tourism selain potensi sejarah budaya. Untuk mengakomodasi kekuatan ini maka *positioning* sebagai kabupaten dengan Wisata marine serta

underwater adventure, sejarah dan budaya diperkirakan sesuai dengan kondisi *real* kabupaten Pesisir Selatan ini. Adapun untuk dapat memaksimalkan tujuan tersebut proses implementasi *marketing mix* yang berbasis kepariwisataan merupakan faktor kunci dalam memaksimalkan multiplier efek perkembangan industrialisasi kepariwisataan secara lebih luas.

6.3.2 Melakukan Strategi Komunikasi Pemasaran Berbasis Advertising, Publisitas dan Selling, Kampanye Media Sosail

Adapun kegiatan pemasaran *advertising* dan yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan beserta asosiasi pariwisata yang ada adalah (1) Advertising dan Publikasi melalui pemasangan Billboard destinasi, publisitas di media massa nasional dan lokal serta menempatkan *tourist information center* di pintu masuk wisatawan, (2) Program selling, dengan mengikuti *Travel Mart*, *Familirization Trip* dan *Table Top*. (3) program kampanye melalui sosial media dapat dilakukan untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Sekaligus untuk *Branding* kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata marine, dengan kekuatan utama ada pada wisata kawasan mandeh yang menyuguhkan pemandangan yang sangat indah dan potensi aktivitas underwater serta wisata pulau yang sangat menantang.

6.3.3 Melakukan Strategi Event

Event merupakan suatu program kegiatan yang akan dilakukan secara terencana terkait dalam mencapai tujuan tertentu. Keragaman pontensi dan keunikan suatu objek merupakan peluang penting dalam mengembangkan konsep event yang relevan. Untuk dapat memaksimalkan pontensi wisata yang ada maka strategi event yang didukung dengan manajemen event yang optimal. Festival Langkisau dapat dijadikan sebagai event utama di Kabupaten Pesisir Selatan, disamping event lainnya. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan dapat diketahui bahwa festival budaya serta festival kuliner dan konser music juga merupakan festival yang diharapkan oleh pengunjung wisata ke Pesisir Selatan.

6.3.4 Tujuan Event

Event merupakan bagian penting dari keseluruhan kegiatan rekreasi yang ditawarkan, kegiatan event banyak melibatkan masyarakat dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan.

1. Tujuan event yaitu untuk membentuk kepuasan wisatawan sehingga jika wisatawan yang datang puas maka keinginan wisatawan untuk kembali datang ketempat wisata semakin tinggi dan akan menyebarkan informasi positif tentang event maupun destinasi;
2. Menciptakan suatu citra untuk menarik wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk bersantai dan berkontribusi misal dalam keikutsertaan dalam event sport tourism.

Untuk memperkuat event, menurut Robert Christie dalam buku (*Tourism The Intenational Business*, 2011) terdapat empat dimensi utama dalam pariwisata harus dipenuhi:

1. Atraksi

Atraksi adalah hal yang dapat menarik orang datang ke sebuah tempat wisata. Atraksi dapat digolongkan menjadi:

- a. *Site attractions* merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi yang tepat yaitu tempat - tempat wisata yang ada di daerah tujuan wisata seperti taman bermain dan museum.
- b. *Event attractions* adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat berubah atau berpindah dengan mudah seperti festival-festival, pameran atau pertunjukan-pertunjukan kesenian. Atraksinya bisa berupa keindahan alam, budaya, sejarah dan hiburan.

2. Fasilitas

Atraksi yang dapat membuat wisatawan datang perlu di dukung dengan fasilitas untuk melayani wisatawan selama berada di sana, perbedaan jarak dan keadaan lingkungan dan fasilitas itu adalah tempat menginap, restoran, pelayanan pendukung dan infrastruktur. Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik sutau lokasi karena fasilitas harus terletak dekat dengan obyek utama.

3. Transportasi

Dasar dari pariwisata adalah keinginan untuk melakukan perjalanan ke tempat berbeda, iklim yang berbeda dan pemandangan yang berbeda. Karena ada kebutuhan tersebut, penting adanya transportasi untuk sampai ke sana dengan adanya kenyamanan. Oleh karena itu sangat penting informasi seputar tentang transportasi untuk mencapai daerah wisata.

4. Keramahtamahan

Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka datangi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus disediakan dan juga keramahtamahan tenaga kerja wisata perlu diperhatikan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama perjalanan wisata. Bagi wisatawan muslim yang menggunakan jasa atau agen perjalanan, mereka memiliki pemandu wisata yang tentunya mengetahui lokasi - lokasi wisata, serta dapat membantu wisatawan muslim untuk memenuhi permintannya, seperti memberi informasi dimana tempat beribadah dan makanan halal di sekitar daerah wisata. Namun, bagi wisatawan muslim yang berwisata tanpa bantuan pemandu wisata akan menjadi terhambat, oleh karena itu di butuhkan keramahtamahan dari para pekerja yang berada di dalam industri pariwisata untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan muslim. Sehingga informasi dan teknologi sangat penting guna mendukung pemasaran pariwisata untuk memfasilitasi wisatawan untuk berkunjung guna mencapai halal digital tourism.

Tabel 1
Strategi Pelaksanaan Event

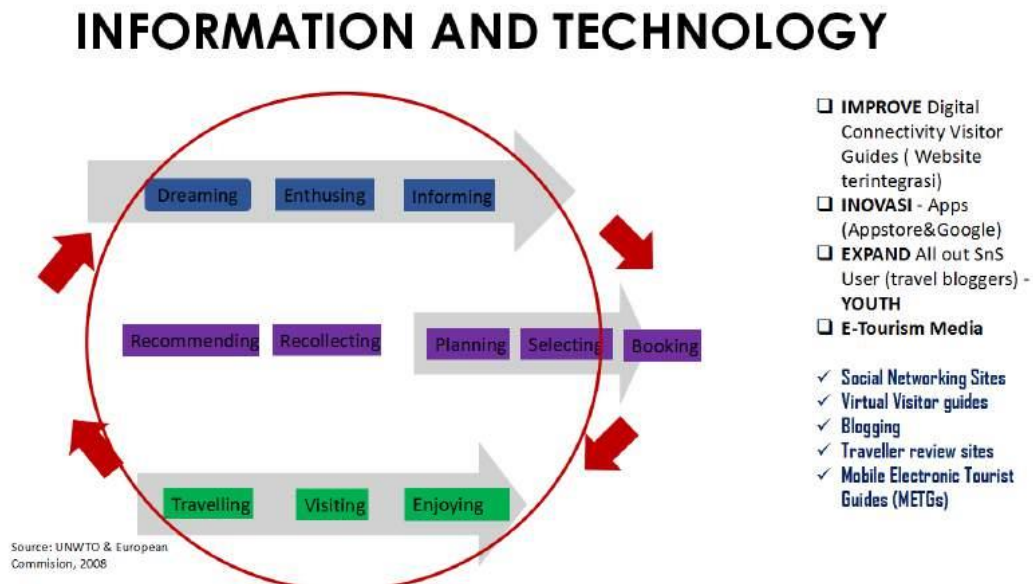
Strategi	Tipe Event	Target	
Timing	Low peak season/ Weekday	Event Edukasi/ Sains	SD/ SMP/SMA Scientist / researcher Perguruan Tinggi,
Exposure	Media Digital dan Media Nasional & Internasional	Event Sport	Atlit dan Pasar Olahraga
Valuasi Event	Eventscape: Atmosfir event disesuaikan dengan tema dengan desain dari pre-event, event, post event	Event Budaya	Wisatawan leisure luar negeri
Interaksi	Maksimalkan engagement dengan Target	Event Pemerintah	Wisatawan bisnis, pemerintah, Forum dan Kelompok Government
Suistanability	Event harus mampu memberikan efek historical melalui reproduksi produk destinasi baru seperti city sign dan lainnya	Event Musik	Teenager dan Mature

Source: tim peneliti, 2024

6.3.5 Melakukan Strategi Komunikasi Pemasaran Berbasis E-Tourism

Selain itu peningkatan diseminisasi produk destinasi melalui komunikasi pemasaran juga mesti dilakukan seiring dengan telah terjadi transformasi perilaku konsumen melalui *e-tourism*. Berikut tahapan penggunaan informasi dan teknologi pariwisata dengan digital.

Gambar 1
Strategi Komunikasi Pemasaran berbasis E- Tourism



Dalam Pembangunan pariwisata adaptasi teknologi dan informasi sangat penting untuk mencapai target pembangunan pariwisata agar tercapainya sasaran dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pesisir Selatan. Untuk dapat memaksimalkan tujuan tersebut maka berikut beberapa hal yang dianggap penting pendekatan *E-Tourism* yang harus dikembangkan oleh pariwisata Pesisir Selatan :

- a. Eksplorasi penguatan nilai destinasi wisata yang terintegrasi dengan pengembangan industrialisasi kepariwisataan Pesisir Selatan;
- b. Mengelaborasi dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam mengembangkan konsep destinasi wisata kota Pesisir Selatan;
- c. Manajemen event sebagai salah satu pendekatan strategis dalam mengkomunikasikan konsep destinasi wisata yang dikembangkan;
- d. Menynergikan adaptasi teknologi informasi komunikasi pemasaran antar pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat kota Pesisir Selatan;
- e. Blending konsep storytelling kekuatan destinasi wisata berbasis teknologi informasi sehingga memberikan penguatan perspektif informasi bagi wisatawan;
- f. Mengintegrasikan perkembangan *Social Networking* ke dalam program komunikasi pemasaran wisata kota Pesisir Selatan.

6.3.5.1 Strategi Pemasaran dan Target Pasar

Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa strategi pasar pada dua periode pembangunan kepariwisataan fokus pada pasar sasaran. Berdasarkan data statistik dapat dilihat bahwa secara geografis segmen pasar wisata kab Pesisir Selatan didominasi oleh pasar Wisatawan Nusantara, yang berasal dari Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Sumatera Selatan selain dari daerah daerah yang ada di Sumatera Barat. Fokus strategi pemasaran BAS (Branding, Advertising dan Selling) dan e-Tourism dapat dilakukan pada wisatawan dri Riau dan Jambi untuk komposisi 75% dari budget total komunikasi pemasaran.

Pasar sasaran untuk jenis wisatawan nusantara skema strategi hampir sama dengan target wisatawan mancanegara diatas, namun tidak sesulit wisatawan mancanegara karena dampak komunikasi pemasaran yang dilakukan dalam domestik akan lebih cepat tersebar melalui *advertising* media massa, seperti cetak dan elektronik serta komunikasi digital sebagai trend yang paling kuat saat ini terutama untuk wisatawan millennial dan keluarga. Komunikasi melalui *Social Networking Sites* melalui aplikasi *E-Tourism* akan lebih mempercepat proses pemasaran.

6.3.5.2 Saluran Distribusi

Untuk distribusi produk pemasaran diperlukan kerjasama melalui pihak asosiasi pariwisata seperti ASITA, ASATI, INCA dan lainnya. Kerjasama antar asosiasi pariwisata didorong dengan melakukan *joint venture* baik untuk skala nasional maupun skala international pada pasar-pasar sasaran.

BAB 7

KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian ini akan menguraikan analisis kondisi kelembagaan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan salah satu komponen penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan. Muatan materi kelembagaan kepariwisataan yang akan dibahas pada bagian ini adalah sumberdaya manusia (SDM) pariwisata, asosiasi pariwisata, kelembagaan pemerintah terkait pariwisata, kelembagaan terkait terkait pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

7.1 Sumber Daya Manusia Pariwisata

Di banyak negara, dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, pembahasan tentang SDM yang dibutuhkan dalam pelayanan kegiatan kepariwisataan yang benar dan efektif seringkali mendapat perhatian yang rendah. Dalam beberapa kasus, bahkan sama sekali diabaikan. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya permasalahan serius dalam industri kepariwisataan, dan memungkinkan terhalangnya partisipasi masyarakat setempat dalam kegiatan ekonomi yang dikembangkan dari pengembangan kepariwisataan.

Sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata menjadi tulang punggung dalam pembangunan kepariwisataan di suatu daerah. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas SDM harus dapat memenuhi kebutuhan pembangunan kepariwisataan daerah tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata

adalah semua aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. SDM Pariwisata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan wisatawan, serta berdampak positif pada ekonomi.

Keberadaan SDM berperan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja (employment). Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut (Setiawan, 2016).

SDM merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata. Pentingnya SDM di sektor pariwisata adalah manusia (people) merupakan sumber daya yang sangat penting di sebagian besar organisasi. Khususnya di organisasi berbasis jasa (service-based organization), SDM berperan sebagai faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan kinerja (Evans et al., 2003). Pada beberapa industri, faktor manusia berperan penting dan menjadi faktor kunci sukses terhadap pencapaian kinerja. Seperti pada industri pariwisata, dimana perusahaan memiliki hubungan langsung yang bersifat intangible (tak berwujud) dengan konsumen yang sangat bergantung pada kemampuan individu karyawan dalam membangkitkan minat dan menciptakan kesenangan serta kenyamanan kepada para konsumennya. Demikian juga atraksi wisata di suatu daerah tujuan wisata, intinya merupakan faktor manusia yang akan menentukan apakah para pengunjung (wisatawan) akan memperoleh pengalaman total dan akan berkunjung kembali.

Pengembangan SDM di industri pariwisata saat ini menghadapi tantangan global yang memerlukan solusi dengan menembus batasan-batasan Negara, wilayah dan benua. Salah satu solusi yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki suatu Negara termasuk Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang tepat. Dari uraian di

atas, maka dapatlah dikatakan bahwa terdapat beberapa peran penting keberadaan SDM di industri pariwisata, yaitu sebagai motor penggerak kelangsungan industri; pelaku utama yang menciptakan produk inti pariwisata (pengalaman); dan salah satu faktor penentu daya saing industri.

Tabel 7.1
Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata di Indonesia
Menurut Jenis Pekerjaan, 2018 – 2022

Jenis Pekerjaan	2018	2019	2020	2021	2022
1. Tenaga Profesional, Teknisi dan tenaga lain yang berhubungan dengan itu	355.365	441.693	288.236	278.018	362.025
2. Tenaga Kepemimpinan Dan Ketatalaksanaan	108.584	138.470	129.012	139.627	158.880
3. Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha Dan Tenaga yang berhubungan dengan itu	748.216	853.912	617.452	606.699	748.457
4. Tenaga Usaha Penjualan	10.774.919	11.148.460	11.363.922	12.615.967	13.435.298
5. Tenaga Usaha Jasa	2.535.615	2.828.541	2.735.569	2.487.200	2.736.824
6. Tenaga Produksi Op Alat Angkutan Dan Pekerja Kasar	4.682.929	5.074.128	5.067.033	4.902.792	5.219.887
7. Lainnya ¹⁾	251.926	275.420	233.072	225.232	232.986
Total	19.457.554	20.760.624	20.434.296	21.255.535	22.894.357

Sumber : Publikasi Statistik Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekraf, 2018-2022

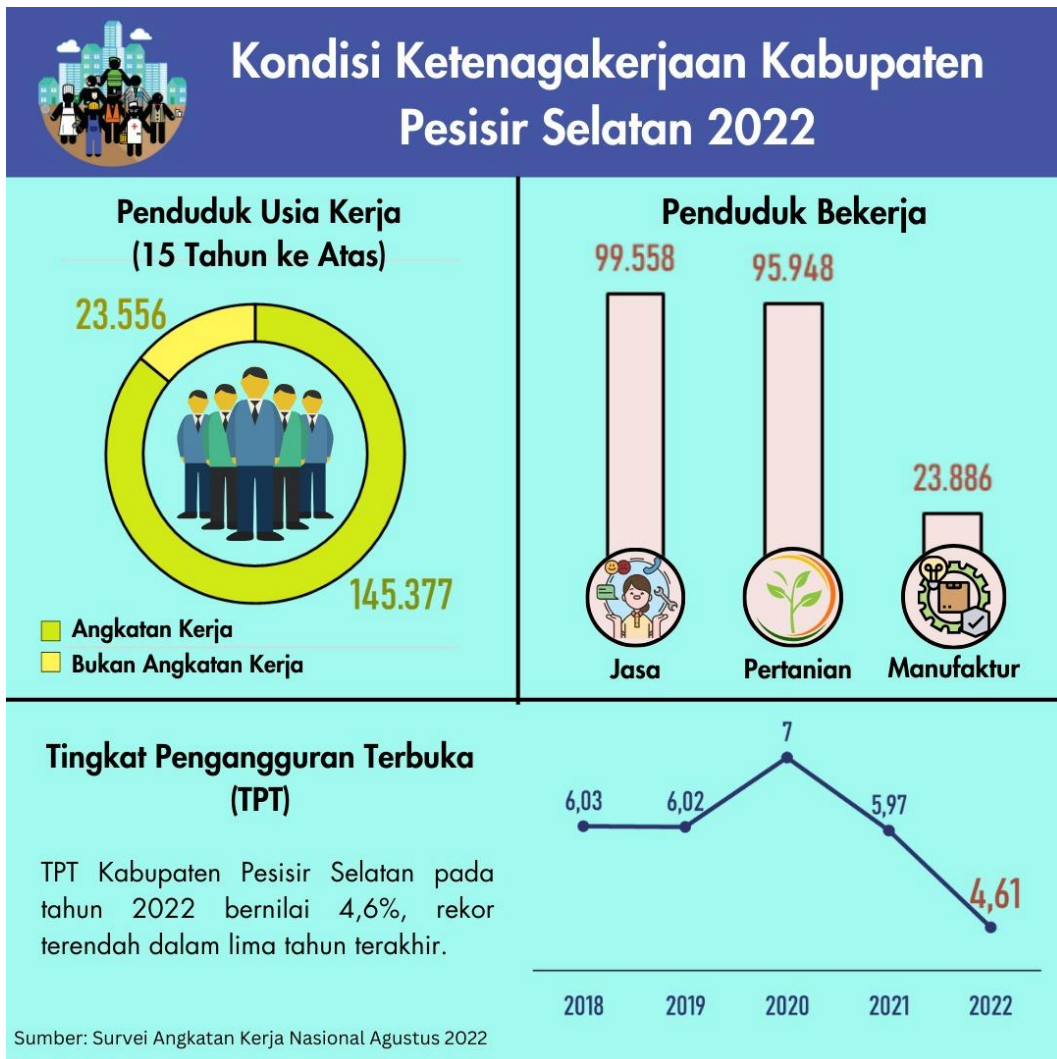
Data tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan lapangan pekerjaan pada tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2023

No	Lapangan Usaha	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)		
		2021	2022	2023
1	A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	895.668	939.746	964.493
2	B. Pertambangan dan Penggalian	27.803	38.347	35.487
3	C. Industri Pengolahan	231.074	230.775	245.568
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	9.270	12.579	13.031
5	E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang			
6	F. Konstruksi	132.230	117.992	130.233
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	514.512	543.335	529.285
8	H. Transportasi dan Pergudangan	78.276	89.098	110.681
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	192.101	212.594	237.846
10	J. Informasi dan Komunikasi	15.713	18.413	24.953
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	27.071	24.723	25.651
12	L Real Estat			
13	M, N. Jasa Perusahaan	28.968	32.739	44.776
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	129.045	122.595	140.148
15	P. Jasa Pendidikan	169.268	169.700	187.278
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	58.394	55.036	55.009
17	R, S, T, U. Jasa Lainnya	72.051	80.492	100.496
Jumlah		2.581.444	2.688.164	2.844.925

Sumber: Kompilasi Data Statistik Sektorial Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Selanjutnya data kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Selanjutnya daftar kegiatan pelatihan bidang kepariwisataan yang pernah dilaksanakan semenjak tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2
Daftar Kegiatan Pelatihan Bidang Kepariwisataan

No	Tahun	Program/ Kegiatan
1	2015	Program Pengembangan SDM dan Kemitran
		a. Penyuluhan dan Pelatihan Sadar Wisata
		b. Pengembangan SDM Wisata Minat Khusus
		c. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
2	2016	Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Kepariwisataan
		a. Penyuluhan Sadar Wisata
		b. Pengembangan SDM Wisata

		c. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
		d. Pemberdayaan masyarakat Kawasan Wisata Mandeh
3	2017	Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Kepariwisata
		a. Kegiatan Penyuluhan Sadar wisata
		b. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
4	2018	Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Kepariwisata
		a. Pelatihan dan sertifikasi pelaku wisata (pemilik homestay dan pemilik kapal wisata)
5	2019	Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Kepariwisata
		• Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Wisata (DAK Nonfisik)
		a. Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
		b. Pelatihan Manajemen Homestay
		c. Pelatihan Kuliner dan Belanja
		d. Pelatihan Arung Jeram / Tubing
		e. Pelatihan Paralayang
		f. Pelatihan Selam
		g. Pelatihan Snorkling
		h. Pelatihan Ekowisata
		i. Pelatihan Outbound
		j. Pelatihan Sejarah
		k. Pelatihan Warisan Budaya

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

7.2 Asosiasi Pariwisata

Asosiasi dalam pentahelic pariwisata termasuk elemen community yang memiliki basis anggota, kepengurusan, peraturan internal, program kerja/kegiatan dan hal terkait lainnya. Secara teori disebutkan bahwa *community is a feeling that members have of belonging, a feeling that members matter to one another and to the group, and shared faith that members need will be met through their commitment to be together* (McMillan & Chavis, 1986). Jadi sangat jelas bahwa komunitas merupakan gabungan individu yang menjadi anggota suatu perkumpulan/kelompok dengan rasa saling memiliki menjadi suatu ikatan yang diyakini bahwa segala kebutuhan perkumpulan dan anggota akan terpenuhi selama ada komitmen dalam kebersamaan yang berkelanjutan. Kuncinya ada pada

komitmen yang utuh sejak awal hingga proses berjalan dari seluruh komponen yang ada di dalam komunitas.

Adapun daftar asosiasi pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI)
- 2) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA)
- 3) Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI)
- 4) Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO)
- 5) Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI)
- 6) Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia (ASPEHINDO)
- 7) Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (APJI)
- 8) Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI)
- 9) Asosiasi Spa Indonesia (ASPI)
- 10) Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI)
- 11) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)
- 12) Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau & Ferry (GAPASDAF)
- 13) Gabungan Usaha Wisata Bahari & Tirta Indonesia (GAHAWISRI)
- 14) Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI)
- 15) Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI)
- 16) Indonesia Inbound Tour Operators Association (IINTOA)

7.3 Kelembagaan Pemerintah Terkait Pariwisata

Dalam pengembangan pariwisata perlu memperhatikan kelembagaan, aspek kelembagaan merupakan komponen penting dalam menunjang keberhasilan pengembangan pariwisata. melalui upaya kelembagaan diharapkan pengembangan pariwisata dapat terus berjalan dan berkelanjutan. Dalam pengembangan ini perlu dilakukan kerjasama atau kemitraan melalui pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat serta pihak terkait yang diharapkan mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata.

Terdapat tiga unsur dalam kelembagaan pariwisata (Alfianor et al., 2020) yaitu 1). Pemerintah Pemerintah dalam hal ini mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Pemerintah berperan sebagai penyedia layanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan membangun lingkungan yang kondusif untuk mencapai tujuan pembangunan yang baik. 2). Sektor Swasta Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan yang aktif dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan, perdagangan, jasa dan kegiatan sektor swasta informal lainnya. Sektor swasta sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi public, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi 3). Masyarakat Masyarakat merupakan perseorangan atau kelompok yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai check and balance terhadap kewenangan dan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta. Masyarakat juga berperan memantau kinerja kedua stakeholder lainnya.

Lembaga pemerintah terkait pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Peran pemerintah daerah dalam pariwisata adalah memastikan lingkungan yang bersih, aman, sehat, dan mudah diakses bagi penduduk setempat dan pengunjung. Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga meliputi empat aspek, yaitu: Industri pariwisata, Destinasi pariwisata, Pemasaran, Kelembagaan kepariwisataan.

Selanjutnya kelembagaan pemerintah terkait pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut (Sisparnar, 2024):

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretriat DPRD
3. Inspektorat
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SATPOL PP - DAMKAR)
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)
6. Dinas Kesehatan (DINKES)

7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP)
9. Dinas Sosial (DINSOS)
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS)
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)
12. Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
13. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP)
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
17. Dinas Perhubungan (DISHUB)
18. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG)
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
20. Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA)
21. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
22. Dinas Perikanan (DP)
23. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (DISPAREKRAF)
24. Dinas Pertanian (DP)
25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERSIP)
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
27. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
28. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
30. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
32. Kecamatan Bangkunt
33. Kecamatan Ngaras
34. Kecamatan Ngambur
35. Kecamatan Pesisir Selatan
36. Kecamatan Pesisir Tengah
37. Kecamatan Way Krui

38. Kecamatan Karya Penggawa
39. Kecamatan Krui Selatan
40. Kecamatan Pesisir Utara
41. Kecamatan Lemong
42. Kecamatan Pulau Pisang

Selanjutnya kelembagaan pemerintah yang terkait dengan pariwisata adalah desa wisata. Desa wisata dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu Rintisan, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Desa wisata rintisan adalah desa wisata yang baru mulai beroperasi dan masih dalam lingkup yang terbatas. Desa wisata berkembang adalah menunjukkan desa wisata yang telah stabil dan memiliki kepengurusan yang jelas. Desa wisata maju adalah memiliki peran aktif terhadap perkembangan ekonomi warga desa dan sekitarnya. Desa wisata maju adalah desa yang sudah memiliki pengunjung dari lingkup yang lebih luas.

Pada saat ini jumlah desa wisata di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah sebanyak 23 desa wisata, dengan rincian sebagai berikut:

1. Desa Wisata Kampung Batik Lumpo
2. Desa Wisata Sulaman Bayangan
3. Desa Wisata Sungai Nyalo
4. Desa Wisata Sungai Pinang
5. Desa Wisata Limau Gadang Lumpo
6. Desa Wisata Sako
7. Desa Wisata Salido Sari Bulan
8. Desa Wisata Budaya Mandeh Rubiah
9. Desa Wisata Kampung Dilan
10. Desa Wisata Siguntur Tua
11. Desa Wisata Batu Kalang
12. Desa Wisata Muaro Bantiang
13. Desa Wisata Labuang Baruak
14. Desa Wisata Sungai Tawa
15. Desa Wisata Tansridano

16. Desa Wisata Ampang Parak
17. Desa Wisata Salido
18. Desa Wisata Air Duku Lubuak Batu Nan Duo Tambulun
19. Desa Wisata Pantai Carocok Pantai Painan
20. Desa Wisata Pasar Lamo Air Haji
21. Desa Wisata Ganjantino
22. Desa Wisata Agro Taratak Surantiah
23. Desa Wisata Agro Pasar Surantiah

7.4 Kelembagaan Lain Terkait Pariwisata

Kelembagaan lain terkait pariwisata adalah Pokdarwis. Pokdarwis adalah singkatan dari Kelompok Sadar Wisata, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata. Pokdarwis berkedudukan di tingkat desa atau kelurahan. Jumlah Pokdarwis mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2022 ada sebanyak 29 Pokdarwis, 2023 sebanyak 30 Pokdarwis dan tahun 2024 sebanyak 36 Pokdarwis. Adapun daftar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.4
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

No	Nama Pokdarwis	Alamat	Aggt	Daya Tarik Wisata	Tahun
1	Pokdarwis Carocok Pantai Painan	Carocok Painan Nagari Painan Selatan Kec. IV Jurai	22	Wisata Pantai, Pulau, Atraksi Bahari, Permainan Anak2, Kuliner, dll	2022
2	Pokdarwis Gunjantino	Nagari Puluik2 Kec. Ampek Nagari Bayang Utara	15	Trecking, Alam/Pegunungan	2022
3	Pokdarwis Batu Puti Indah	Nagari Api-api Kec. Bayang	12	Pantai/Bahari	2018
4	Pokdarwis Nagari Sago	Nagari Sago, Kec. IV Jurai	20	Pantai/Bahari	2018
5	Pokdarwis Nagari Salido	Nagari Salido Kec. IV Jurai	16	Pantai/Bahari	2021

6	Pokdarwis Sako Indah Alami	Nagari Sei. Gambir Sako Kec. Ranah IV Hulu Tapan	11	Alam / pegunungan	2018
7	Pokdarwis Pesona sei. Nyalo mudiak aie	Nagari Sei. Nyalo Mudiak Aie Kec. Koto XI Tarusan	39	Wisata Bahari	2022
8	Pokdarwis Mandeh	Nagari Mandeh Kec. Koto XI Tarusan	50	Wisata Bahari	2023
9	Pokdarwis Sarasah Kamumuan	Nagari Salido Sari Bulan Kec. IV Jurai	40	Alam/Pegunungan, Terowongon, PLTA	2020
10	Pokdarwis Kmb Carocok Anau	Nagari Carocok Anau Kec. Koto XI Tarusan	48	Perahu wisata	2018
11	Pokdarwis Tansridano	Nagari Taluk Kec. Batang Kapas	12	Pantai / Bahari	2018
12	Pokdarwis Labuang Baruak	Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kec. Batang Kapas	12	Pantai / Bahari / Pegunungan	2022
13	Pokdarwis Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (Lppl)	Nagari Amping Parak, Kec. Sutera	20	Konservasi lingkungan, penangkaran penyu, mangrove, pantai dan perahu wisata	2019
14	Pokdarwis Wastam	Nagari Limau Gadang Lumpo Kec. IV Jurai	42	Konservasi TNKS, Air Terjun, Sungai, Arung Jeram dan Trecking	2020
15	pokdarwis Suta Mandiri	Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kec. Batang Kapas	9	Pantai, wisata air dan Atraksi wisata,	2020
16	Pokdarwis Ekowisata Ikan Larangan	Nagari Kambang Timur, Kec. Lengayang	55	Embung, Ikan larangan, atraksi wisata	2020
17	Pokdarwis Muara Kandih	Nagari Muara Kandis Punggasan Kec. Linggo Sari baganti	17	Jembatan Pelangi, Sungai dan Atraksi	2020
18	Pokdarwis Moelati Mas	Nagari Ampang Pulai Kec. Koto XI Tarusan	23	Pantai Taluk Sikulo, Pantai Batu Kalang	2022
19	Pokdarwis Batu Baiduang	Nagari Pancuang Taba Kec. IV Nagari Bayang Utara	37	Negeri diatas awan, pegunungan, kuliner kacang dilan	2021
20	pokdarwis Talun 7 Bidadari	Nagari Inderapura Selatan Kec. Pancung Soal	22	Air terjun 7 bidadari	2021
21	pokdarwis Siguntur Tua	Nagari Siguntur Tua Kec. Koto XI Tarusan	26	Air terjun Sarasah Siguntur Tua	2022

22	Pokdarwis Karang Putih Kapujan	Nagari Kapujan Koto Berapak Bayang, Kec. Bayang	14	Air Terjun, alam yg indah dan kuliner	2022
23	Pokdarwis Anugerah Pantai	Nagari Pasar Lama Air Haji, Kec. Linggo Sari Baganti	47	Wisata Bahari, Pantai, dan kuliner	2022
24	Pokdarwis Gunung Gadang	Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kec. Batang Kapas	23	Wisata Bahari, Pantai, dan kuliner	2022
25.	Pokdarwis Pesona Timbulun	Nagari Painan Timur Painan, Kec. IV Jurai	74	Air Terjun, alam yg indah, kuliner dan seni budaya	2022
26	Pokdarwis le paradisi . Sp	Nagari Sungai Pinang Mandeh Kec. Koto XI Tarusan	34	Ekowisata mangrove, pantai, selam, dan surfing	2021
27	Pokdarwis Rumah Gadang Mande Rubiah	Nagari Lunang Kec. Lunang	9	Wisata Budaya, Sejarah dan Makam Raja-raja	2022
28	Pokdarwis Sariak Geopark	Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih	33	Wisata alam, mangrow, geopark dll	2022
29	Pokdarwis Taratak Sepakat Wisata	Nagari Taratak Kec. Sutera	38	Agro Wisata, Tambak Ikan, Tambak Udang Kebun Lengkeng, Durian, dan Kuliner	2022
30	Pokdarwis Sinar Utama	Nagari Pondok Parian Kec. Lunang	8	Tabek/Embung, Agro Wisata, dll	2022
31	Pokdarwis Tluk Kualo Inderapura	Nagari Tluk Kualo Kec. Airpura	23	Agro Wisata, Sejarah Raja-raja, Sungai dan Kuliner	2023
32	Pokdarwis Boat Wisata Batu Kalang	Nagari Ampang Pulai Kec. Koto XI Tarusan	21	Boat Wisata, wisata Taluk Sikulo	2023
33	Pokdarwis Balai Lamo Salido	Nagari Salido Kec. IV Jurai	30	Pantai, kuliner dan seni budaya	2023
34	Pokdarwis Muaro Bantiang	Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Kec. Koto XI Tarusan	41	Pantai, kuliner dan seni budaya	2023
35	Pokdarwis Nagari Koto Baru Koto Berapak	Nagari Koto Baru Koto berapak Kec. Bayang	18	Air terjun, trekking, kolam pemandian, seni budaya dan kuliner	2023
36	Pokdarwis Pantai Taman Kayangan Lakitan	Nagari Lakitan Kec. Lengayang	30	Pantai, kuliner, atraksi wisata dan seni budaya	2024

Pokdarwis yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa peran, di antaranya:

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan
- 3) Meningkatkan manfaat kepariwisataan bagi masyarakat
- 4) Mensukseskan pembangunan kepariwisataan
- 5) Meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata
- 6) Bermitra dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan Sadar Wisata

Pokdarwis yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki beberapa kegiatan, di antaranya:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan
- 2) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota Pokdarwis dalam mengelola bidang usaha pariwisata
- 3) Mendorong masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan
- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat

BAB 8

PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bab ini berisikan tantangan dan isu strategis pembangunan pariwisata, prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan, dan dirumuskan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan

8.1 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Pariwisata

Seiring dengan semakin menggeliatnya pertumbuhan sektor pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian negara yang dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang semakin membaik, menjadikan setiap daerah dengan potensi alam dan budaya yang sangat beragam mulai dilirik dan dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang menarik bagi wisatawan.

Tantangan dan isu strategis pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari masing-masing pilar pembangunan pariwisata yang terdiri dari pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Beberapa isu strategis pada pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Optimalisasi pengembangan pariwisata berkelanjutan
2. Pengembangan atraksi wisata yang memberikan pengalaman untuk kunjungan ulang dan wisata berkelompok
3. Ketersediaan amenities di wilayah destinasi
4. Kualitas konektivitas dan aksesibilitas antar dan inter wilayah destinasi unggulan dan pendukung.
5. Penerapan protokol kesehatan dan standar layanan pariwisata ramah muslim, dan mitigasi bencana
6. Penguatan desa wisata
7. Pengembangan digitalisasi pada sektor pariwisata
8. Dukungan *blue tourism event*
9. Peningkatan nilai tambah pada sektor pariwisata
10. Penguatan rantai pasok, industri, dan investasi pariwisata

11. Penguatan branding destinasi unggulan dan pendukungnya.
12. Perluasan pasar wisatawan mancanegara
13. Optimalisasi pengelolaan destinasi (DMO) yang terintegrasi
14. Penguatan skill SDM pariwisata yang berstandar profesional

8.2 Prinsip Pembangunan Kepariwisata

Prinsip pembangunan kepariwisataan suatu daerah merupakan ideologi yang harus dianut dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan di daerah tersebut (Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berdasarkan hal itu maka prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan akan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pondasi yang mendasari pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Nilai-nilai dasar dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan; serta
- c. Nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan perlu mempertimbangkan prinsip pembangunan kepariwisataan di tingkat internasional dan nasional; serta potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan.

8.2.1 Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan di tingkat internasional

Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan di tingkat internasional mencakup pembangunan kepariwisataan berkelanjutan, serta kode etik kepariwisataan dunia.

- a. Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan merupakan prinsip yang menjadi ideologi pembangunan kepariwisataan sejak awal tahun 2000-an. Pembangunan kepariwisataan global saat ini dihadapkan pada tantangan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs muncul sebagai respon dari kerusakan lingkungan yang masih menjadi masalah penting diantara keberhasilan negara-negara di dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, SDGs mengusung 3 (tiga) pilar penting dalam pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

b. Kode Etik Kepariwisata Dunia

Kepariwisata global saat ini juga mengedepankan etika dalam pembangunan maupun pengelolaan pariwisata. Kode Etik Kepariwisata Dunia (*Global Code of Ethics for Tourism*) yang menjadi kesepakatan seluruh negara, perusahaan, institusi, dan lembaga kepariwisataan di dunia terdiri dari 10 (sepuluh) pasal: sembilan pasal berisi prinsip-prinsip umum yang menjadi etika kepariwisataan dunia, dan satu pasal berisi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Kode Etik Kepariwisata Dunia.

Terdapat sembilan prinsip umum dalam Kode Etik Kepariwisata Dunia yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepariwisata untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antarpenduduk dan masyarakat;
- 2) Kepariwisata sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorangan maupun secara kolektif;
- 3) Kepariwisata sebagai alat pembangunan berkelanjutan;
- 4) Kepariwisata sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri;
- 5) Kepariwisata adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan;
- 6) Kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan;
- 7) Hak dasar berwisata;
- 8) Kebebasan bergerak wisatawan;

9) Hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata.

Beberapa pasal lain yang terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisata Dunia yang juga perlu dipertimbangkan adalah:

- 1) Pemerintah dan para pelaku usaha pariwisata harus bekerjasama dalam melaksanakan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisata Dunia serta memantau efektifitas pelaksanaannya
- 2) Para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus mengakui peranan berbagai organisasi internasional, diantaranya Organisasi Kepariwisata Dunia, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi serta bergerak di bidang pembangunan kepariwisataan, perlindungan Hak Azasi Manusia, lingkungan hidup maupun kesehatan, dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip umum hukum internasional
- 3) Para pemangku kepentingan yang sama harus menyampaikan keinginannya, dalam hal terjadi perselisihan dalam penerapan atau penafsiran terhadap Kode Etik Kepariwisata Dunia untuk melakukan mediasi kepada lembaga ketiga yang tidak memihak yang disebut sebagai Komisi Dunia untuk Etika Kepariwisata.

8.2.2 Prinsip-prinsip Pembangunan Kepariwisata di Tingkat Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 5, menyebutkan bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia adalah:

- 1) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan
- 2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal
- 3) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas
- 4) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup

- 5) Memberdayakan masyarakat setempat;
- 6) Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan
- 7) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata
- 8) Memperkuat keutuhan negara kesatuan republik indonesia.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas) Tahun 2010-2025 juga menetapkan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan dengan berprinsip pada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Selain itu, pertimbangan penetapan prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan juga perlu dilakukan dengan melihat potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan yang terkait dengan:

- 1) Sumber daya alam daratan dan pesisir laut Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari hutan, bukit, sungai, laut, pulau-pulau kecil dengan hamparan pantai berpasir yang potensial. Kegiatan ekowisata trekking di hutan, menyusuri sungai, mangrove, maupun kegiatan rekreasi pantai, dan ekowisata bahari lainnya menjadi potensi pengembangan pariwisata yang besar, khususnya pariwisata bahari. Saat ini beberapa destinasi pariwisata bahari yang dapat dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan domestik adalah :
 - (1) Mandeh Boat Tour: Paket wisata yang mengitari perairan dan singgah di beberapa pulau
 - (2) View Point Mandeh: Menikmati pemandangan Kawasan Mandeh
 - (3) Area Kawasan Wisata Mandeh: Kegiatan atraksi wisata
 - (4) Wisata Bawah Air, Surfing, Pancing: Kegiatan wisata bawah air, surfing, memancing, dan permainan laut
 - (5) Pantai Salido: Destinasi wisata yang terletak di kampung Koto Salido, Kenagarian Salido, kecamatan IV Jurai
 - (6) Pulau Semangki: Destinasi wisata eksklusif dan strategis

- 2) Sumber daya wisata budaya dengan terdapatnya sejarah yang memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan, dipahami, dijaga, dirawat dan diangkat melalui pariwisata.
- 3) Dukungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan masyarakat Pesisir Selatan untuk mengembangkan potensi pariwisatanya.
- 4) Aksesibilitas yang belum merata ke seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, mengingat karakteristik wilayah yang berupa daratan, pesisir dan pulau-pulau, membutuhkan konektivitas antar moda yang aman, nyaman, terjangkau dan dapat diandalkan.
- 5) Sarana dan prasarana umum pendukung pariwisata yang belum tersebar merata dengan kualitas yang memenuhi standar pelayanan bagi wisatawan.

Berdasarkan pertimbangan prinsip pembangunan pariwisata di tingkat nasional maupun internasional serta potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirumuskan 4 (empat) prinsip yang perlu dianut dalam pembangunan kepariwisataannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pariwisata biru adalah kegiatan pariwisata yang berbasis pantai, daratan, dan perairan di wilayah pesisir. Konseptualisasi pariwisata biru berkaitan dengan konsep ekonomi biru
- 2) Pariwisata berbasis masyarakat, yaitu kegiatan kepariwisataan yang sepenuhnya dimiliki, dijalankan, dan dikelola oleh masyarakat sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan dan melindungi tradisi sosial-budaya yang bernilai maupun sumber daya alam dan warisan budaya.
- 3) Pariwisata halal, yaitu pariwisata yang memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk melakukan ibadah, mendapatkan makanan halal, dan terjaga dari kemaksiatan dan kemunkaran selama melakukan kegiatan wisata.
- 4) Pariwisata terintegrasi, yaitu pembangunan pariwisata yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah di Kabupaten Pesisir Selatan maupun dengan wilayah sekitarnya
- 5) Pariwisata berkelanjutan, yaitu pembangunan pariwisata yang menekankan pemanfaatan lingkungan untuk memenuhi kepentingan pariwisata masa kini

dan meningkatkan peluang di masa mendatang dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku

Berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan tersebut di atas, maka konsep pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan akan mengacu pada konsep pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang fokus pada keunikan dan keunggulan budaya dan alam Pesisir Selatan, untuk memberikan kualitas pengalaman bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

8.3 Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisata

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan gambaran tentang kondisi kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan yang dicita-citakan dalam jangka panjang
- 2) Sebagai dasar dalam merumuskan misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan
- 3) Memberikan arah bagi perumusan tujuan, kebijakan, strategi, dan indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk itu visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan dirumuskan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Isu-isu Strategis Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

Perumusan visi pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan. Prinsip-prinsip Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan. Prinsip-prinsip yang harus diacu dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat
 - b. Pembangunan pariwisata halal
 - c. Pembangunan pariwisata terintegrasi
 - d. Pembangunan pariwisata berkelanjutan
2. Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat

Dalam Review Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ini, visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat adalah “Terwujudnya Sumatera Barat sebagai Destinasi Utama pariwisata Berbasis Agama dan Budaya di Wilayah Indonesia Bagian Barat Yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat”

Berdasarkan visi tersebut, misi pembangunan pariwisata Provinsi Sumatera Barat, adalah:

1. Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berbasis agama dan budaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 2. Mengembangkan Pemasaran Pariwisata secara selektif, fokus, sinergis, efektif dan efisien berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif produk wisata;
 3. Mengembangkan Industri Pariwisata yang profesional dan berdaya saing, mampu menggerakkan kemitraan usaha yang berwawasan lingkungan; d
 4. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dengan pola kemitraan, kualitas manajemen, regulasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan Kepariwisata yang berkelanjutan.
3. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, memiliki visi “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”. Untuk mencapai visi pembangunan tersebut dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dirumuskan beberapa misi yaitu:

- a. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
- b. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
- c. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah

- d. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
- e. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
- f. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka usulan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Ripparkab ini adalah sebagai berikut: **“Mewujudkan Pariwisata Biru Berkelanjutan Dan Berdaya Saing di Indonesia bagian Barat dan ASEAN, berasas Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”**.

Penjelasan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berkelanjutan yaitu menekankan pemanfaatan sumberdaya untuk memenuhi kepentingan pariwisata masa kini dan meningkatkan peluang di masa mendatang dengan pengelolaan secara bijaksana
- b. Berdaya saing adalah memiliki nilai dan keunggulan yang lebih dibandingkan destinasi pariwisata lain, karena kualitas produk pariwisatanya dengan pelayanan yang prima.
- c. Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS, SBK) merupakan identitas masyarakat Minangkabau yang lahir dari kesadaran sejarah dan perjuangan hidup. Falsafah ini menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara adat dan agama, melainkan keduanya berkembang selaras dan berjalan seiring. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang modern yang tetap berakar budaya daerah, dengan menjunjung tinggi Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah. Dengan demikian akan terwujud kehidupan masyarakat yang berakhlakul kharimah, harmonis, demokratis dan taat hukum.

Perumusan misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan ini mempertimbangkan: (1) visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan; (2) isu strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan; serta (3) prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, rumusan misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan destinasi pariwisata berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan lingkungan dan mampu mendorong pembangunan wilayah
- b. Membangun dan mengembangkan struktur industri pariwisata berbasis kemitraan antara masyarakat dan industri, dengan mengutamakan nilai-nilai budaya lokal, sesuai standar nasional dan internasional.
- c. Membangun dan mengembangkan citra Kabupaten Pesisir Selatan sebagai destinasi pariwisata alam, budaya dan buatan, melalui pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab, terpadu antar sektor dan antar wilayah, berbasis teknologi informasi.
- d. Membangun dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang sinergis dan terpadu, melalui dukungan kinerja SDM yang kompeten, regulasi yang efisien dan efektif, serta kemitraan antar pemangku kepentingan dengan berpedoman adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS, SBK).

8.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepariwisata

Tujuan pembangunan kepariwisataan merupakan kondisi yang harus dicapai kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan pada akhir masa perencanaan Ripparkab pada tahun 2045. Fungsi dari perumusan tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Memberikan arah dalam perumusan rencana pengembangan perwilayahan pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana Destinasi Pariwisata Kabupaten, rencana kawasan pengembangan pariwisata kabupaten, dan rencana kawasan strategis pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Memberikan arah dalam perumusan indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan

d. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, tujuan pembangunan kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut, perumusan tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan
- (2) Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan
- (3) Isu strategis pembangunan wilayah dan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan
- (4) Prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IX

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

9.1 Kebijakan pembangunan kepariwisataan

Kebijakan pembangunan kepariwisataan merupakan arahan pembangunan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah merupakan arah tindakan pembangunan kepariwisataan yang bersifat multi dimensi dan lintas sektor.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan memiliki fungsi:

- a) Sebagai dasar dalam perumusan strategi pembangunan kepariwisataan;
- b) Memberikan arah bagi perumusan rencana pembangunan perwilayahan pariwisata yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan pengembangan pariwisata, dan rencana kawasan strategis pariwisata;
- c) Memberikan arah bagi perumusan program pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan; dan
- d) Sebagai dasar dalam perumusan ketentuan pengendalian kepariwisataan.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan dirumuskan berdasarkan:

- a) Visi dan misi pembangunan kepariwisataan;
- b) Tujuan pembangunan kepariwisataan; dan
- c) Peraturan perundang-undangan yang terkait

Secara umum pembangunan kepariwisataan Pesisir selatan merujuk kepada potensi yang dimiliki yang merupakan competitive advantage bagi pariwisata Pesisir Selatan. Dalam hal ini potensi bahari yang dimiliki Pesisir Selatan dapat dikembangkan kedalam bentuk konsep pariwisata Biru.

Pariwisata biru (blue tourism) adalah konsep pariwisata yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pesisir, laut, dan ekosistem laut secara berkelanjutan. Konsep ini menggabungkan prinsip keberlanjutan dengan

pengelolaan destinasi wisata berbasis alam laut, seperti pantai, pulau, terumbu karang, serta ekosistem pesisir lainnya.

Tujuan utama dari pariwisata biru adalah untuk mempromosikan kunjungan wisatawan ke kawasan pesisir yang memiliki keindahan alam laut, sambil menjaga keberlanjutan sumber daya alam tersebut dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal

Prinsip utama dalam pariwisata biru mencakup:

1. Keberlanjutan Ekologis

- **Pelestarian Laut dan Ekosistem Pesisir:** Pariwisata biru bertujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian ekosistem laut, seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun, yang seringkali menjadi daya tarik utama dalam destinasi wisata berbasis laut.
- **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Pengelolaan yang baik terhadap sumber daya alam pesisir dan laut sangat penting untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pariwisata yang tidak terkendali.

2. Ekowisata dan Edukasi

- **Edukasi Wisatawan:** Pariwisata biru sering kali dikombinasikan dengan kegiatan edukasi untuk meningkatkan kesadaran wisatawan tentang pentingnya menjaga laut dan pesisir.
- **Prinsip Ekowisata:** Pengunjung didorong untuk menikmati keindahan alam laut tanpa merusak atau mengeksploitasi sumber daya alam tersebut secara berlebihan.

3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

- **Manfaat Ekonomi untuk Komunitas Pesisir:** Pariwisata biru memberikan peluang bagi masyarakat pesisir untuk terlibat dalam industri pariwisata dengan menjadi pengelola destinasi wisata, pemandu, atau penyedia jasa terkait pariwisata seperti akomodasi, restoran, dan transportasi.
- **Partisipasi dalam Pengelolaan:** Masyarakat lokal juga dilibatkan dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam pesisir, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian kawasan tersebut.

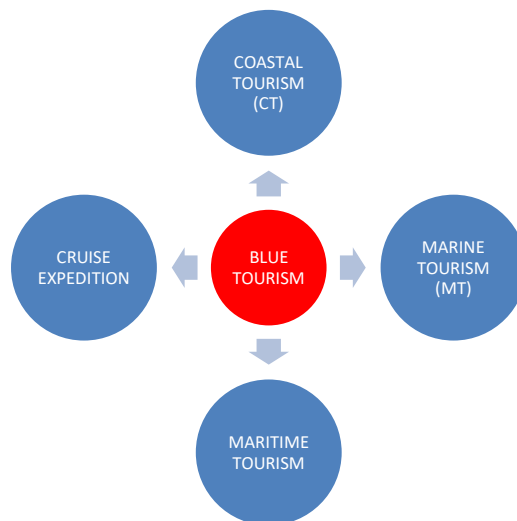
4. Aktivitas Wisata Berbasis Laut

- **Aktivitas yang Ramah Lingkungan:** Aktivitas seperti snorkeling, diving, wisata kapal, dan pengamatan kehidupan laut dapat dilakukan dalam kerangka yang memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan.
- **Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan:** Infrastruktur yang dibangun di kawasan pesisir harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan disesuaikan dengan karakteristik alam setempat.

5. Perlindungan Terhadap Keanekaragaman Hayati Laut

- **Konservasi Terumbu Karang dan Flora Fauna Laut:** Salah satu fokus pariwisata biru adalah menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati laut, termasuk terumbu karang yang rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia.
- **Zona Perlindungan Laut:** Beberapa destinasi pariwisata biru menerapkan zona perlindungan laut yang membatasi kegiatan komersial untuk menjaga kelestarian alam.

Secara umum adapaun gambaran dari konsep pariwisata biru meliputi konsep konsep berikut



Blue tourism meliputi konsep marine tourism, coastal tourism, cruie tourism dan maritime tourism

1. Marine tourism

Marine Tourism (pariwisata maritim) adalah jenis pariwisata yang berfokus pada pengalaman wisata yang terkait dengan lingkungan laut dan perairan. Tujuan

utama dari marine tourism adalah untuk memberi wisatawan kesempatan untuk menikmati keindahan alam laut serta mempelajari lebih dalam tentang ekosistem perairan, sambil mendukung pelestarian lingkungan. Aktivitas wisata yang dapat dikembangkan dalam konsep marine tourism adalah sebagai berikut :

- a) Rekreasi berbasis air aktivitas
- b) Ekowisata yang berfokus pada keanekaragaman hayati laut
- c) Pengalaman budaya terkait dengan lautan, danau, dan sungai

2. Coastal Tourism

Coastal Tourism (pariwisata pesisir) adalah jenis pariwisata yang berfokus pada kawasan pesisir, yaitu daerah yang berada di sepanjang pantai atau dekat dengan laut. Pariwisata ini mencakup berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keindahan alam pesisir, baik itu di pantai, pulau-pulau, atau kawasan pesisir yang memiliki daya tarik alam dan budaya tertentu. Kegiatan pariwisata pesisir sering melibatkan wisatawan yang datang untuk menikmati pemandangan laut, berlibur di pantai, atau terlibat dalam kegiatan laut. Aktivitas yang termasuk dalam coastal tourism adalah

- a) Rekreasi pantai
- b) Resort pinggir laut
- c) Berendam, berenang, dan aktivitas di pantai lainnya

3. Maritime Tourism

Maritime Tourism (pariwisata maritim) adalah jenis pariwisata yang berfokus pada pengalaman wisata yang berhubungan dengan laut, perairan, dan kegiatan yang terkait dengan sektor kelautan. Pariwisata maritim mencakup berbagai aktivitas dan destinasi yang melibatkan laut, seperti kapal pesiar, berlayar, menyelam, atau aktivitas olahraga air lainnya. Tujuan utama dari pariwisata maritim adalah untuk menikmati keindahan alam laut dan pesisir, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya sektor kelautan bagi kehidupan manusia.. Aktivitas yang termasuk dalam maritime tourism adalah

- a) PELAYARAN
- b) PERAHU

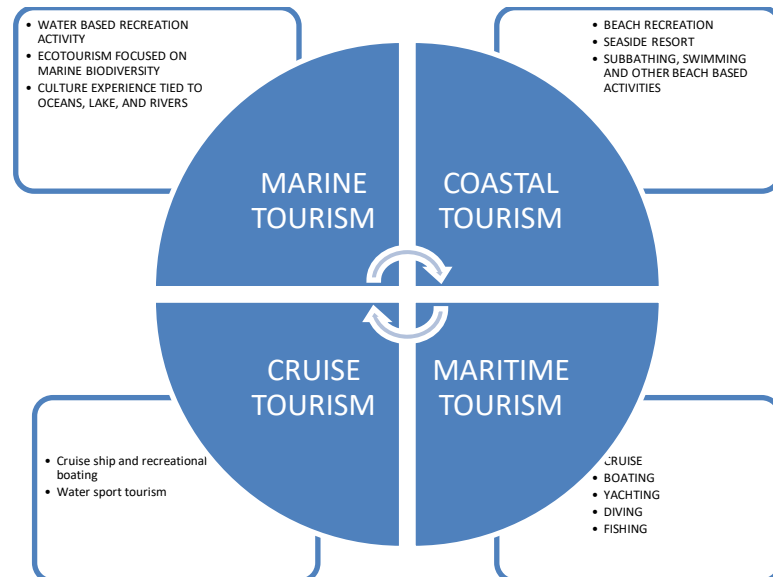
- c) YACHTING
- d) MENYELAM
- e) MEMANCING

4. Cruise Tourism

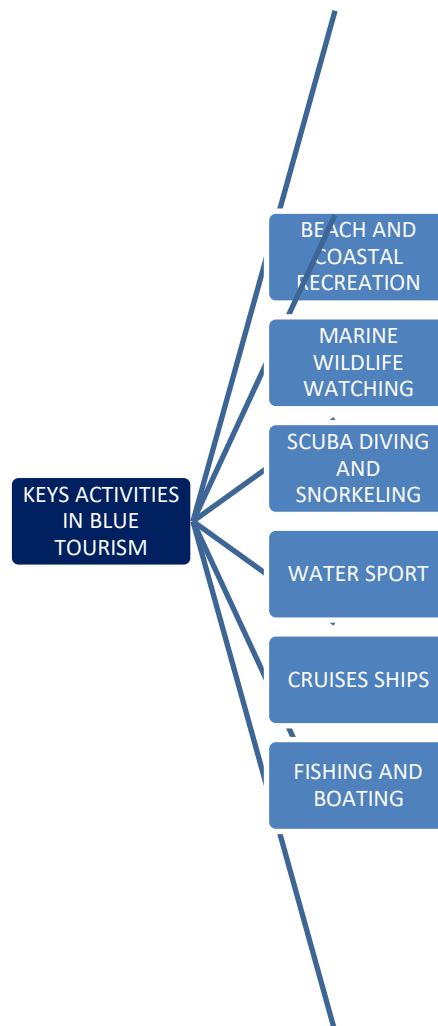
Cruise Tourism (pariwisata kapal pesiar) adalah jenis pariwisata yang melibatkan perjalanan menggunakan kapal pesiar sebagai sarana transportasi utama sebagai sarana transportasi utama untuk mengunjungi berbagai destinasi, terutama yang terletak di sepanjang pesisir atau pulau-pulau. Wisatawan yang mengikuti cruise tourism biasanya menikmati perjalanan laut yang mewah dan nyaman, sambil mengunjungi beberapa destinasi berbeda selama perjalanan mereka. Aktivitas yang termasuk dalam cruise tourism adalah sebagai berikut :

- a) Kapal pesiar dan perahu rekreasi
- b) Wisata olahraga air

Untuk detailnya aktivitas pada masing masing konsep dapat dilihat pada diagram berikut



Beberapa aktivitas utama dalam blue tourism adalah sebagai berikut



Terkait Kebijakan pembangunan pariwisata disusun berdasarkan pilar pembangunan Kepariwisataan yaitu destinasi pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan pariwisata dan pemasaran pariwisata. Kebijakan pariwisata rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai berikut:

A. Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

- 1) Pembangunan Perwilayahan Pariwisata biru
- 2) Mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata biru, budaya dan sejarah yang bernilai tambah
- 3) Mewujudkan pembangunan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang berstandar internasional dengan menerapkan pengelolaan pariwisata halal

- 4) Mewujudkan aksesibilitas pariwisata internasional, nasional, dan wilayah yang terintegrasi dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan
- 5) Pembangunan akomodasi yang berstandar internasional
- 6) Pengembangan aktivitas pariwisata berbasis pengalaman pada zona wisata
- 7) Mewujudkan masyarakat sadar wisata sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ABS SBK dan/atau kearifan local

B. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

- 1) Mewujudkan iklim investasi pariwisata yang kondusif melalui penguatan kolaborasi dengan para pihak dan masyarakat adat
- 2) Mewujudkan ekosistem industri pariwisata yang kondusif dan inklusif berdasarkan ABS SBK dan/atau kearifan local
- 3) Mewujudkan industri pariwisata yang mampu bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang Panjang
- 4) Mewujudkan industri pariwisata berdaya saing melalui penerapan pengelolaan pariwisata berkualitas dan berstandar internasional
- 5) Memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dan sosial di sekitar destinasi wisata.

C. Pembangunan Pemasaran Kabupaten Pesisir Selatan

- 1) Mewujudkan pemasaran pariwisata yang akuntabel dengan menjunjung tinggi norma dan nilai budaya untuk memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata
- 2) Mewujudkan sistem pemasaran dan promosi pariwisata terpadu, efektif, efisien, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan pasar wisatawan yang berkualitas
- 3) Meningkatnya kualitas promosi pariwisata yang terintegrasi antar DTW, dan dengan destinasi pariwisata
- 4) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

D. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

- 1) Membangun sistem kelembagaan kepariwisataan yang mandiri dan berdaya saing dalam mengoptimalkan pembangunan kepariwisataan dan sekaligus membuka peluang investasi
- 2) Mewujudkan organisasi pariwisata yang andal dan tangguh melalui transformasi sistem kepemimpinan inklusif
- 3) Mewujudkan tata kelola pariwisata yang berbasis ABS SBK dan/atau kearifan lokal dengan menerapkan pengelolaan pariwisata berkualitas
- 4) Menciptakan luaran penelitian dan pengembangan kepariwisataan yang mampu memperkuat tata kelola pariwisata berkualitas

E. Pembangunan SDM Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

- 1) Mewujudkan sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata serta sarana prasarana yang mampu mendorong profesionalisasi dan kompetensi yang bertaraf internasional
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia pariwisata yang kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia sebagai agen perubahan di lingkungan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
- 3) Meningkatkan jumlah SDM pariwisata yang memiliki sertifikat keahlian

9.2 Strategi Pembangunan Kepariwisataan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perumusan strategi disesuaikan dengan permasalahan dan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan. Strategi pembangunan kepariwisataan dirumuskan sebagai berikut

A. Destinasi Pariwisata

- 1) Pembangunan Perwilayahan Pariwisata biru

Strategi

1. Memperkuat zonasi pariwisata berdasarkan potensi pariwisata biru

2. Mapping potensi destinasi wisata berdasarkan daya tampung dan daya dukung
 3. Menyusun konsep pengembangan jangka panjang semua zonasi wisata
 4. Penataan kawasan wisata berwawasan lingkungan
 5. Digitalisasi zonasi wisata biru
- 2) Mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata biru, budaya dan sejarah yang bernilai tambah

Strategi

1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata biru, alam, budaya dan sejarah yang bernilai tambah
 2. Mengembangkan tema wisata pada kawasan pengembangan
 3. Mengembangkan konsep sustainability pada semua destinasi wisata unggulan
 4. Mengembangkan konsep digital tourism untuk meningkatkan kinerja wisata disemua zonasi
- 3) Mewujudkan pembangunan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang berstandar internasional dengan menerapkan pengelolaan pariwisata halal

Strategi

1. Membangun dan mengembangkan amenities di zonasi pariwisata biru
 2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
 3. Pengembangan amenities di objek wisata prioritas dan menonjol
- 4) Mewujudkan aksesibilitas pariwisata internasional, nasional, dan wilayah yang terintegrasi dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan

Strategi

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aksesibilitas menuju lokasi destinasi wisata
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan moda transportasi menuju destinasi wisata

3. Meningkatkan kualitas informasi untuk memudahkan pergerakan wisatawan inter dan intra destinasi wisata

5) Pembangunan akomodasi yang berstandar internasional

Strategi

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas akomodasi berstandar internasional

6) Pengembangan aktivitas pariwisata berbasis pengalaman pada zona wisata

Strategi

1. Mengembangkan daya tarik wisata berbasis experience

2. Melakukan penguatan desa wisata

7) Mewujudkan masyarakat sadar wisata sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ABS SBK dan/atau kearifan local

Strategi

1. penerapan protokol kesehatan pada semua destinasi wisata

2. Penerapan pariwisata ramah muslim pada layanan wisatawan pada destinasi wisata

3. Meningkatkan kesiap siagaan bencana disemua zonasi wisata

4. Pelestarian kesenian tradisional masyarakat Pesisir Selatan

B. Industri Pariwisata

1) Mewujudkan iklim investasi pariwisata yang kondusif melalui penguatan kolaborasi dengan para pihak dan masyarakat adat

Strategi

1. Debirokratisasi investasi di bidang pariwisata biru pada semua kawasan

2. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat adat selaku pemilik asset dalam investasi pariwisata biru

3. Meningkatkan Promosi investasi di bidang pariwisata

- 2) Mewujudkan ekosistem industri pariwisata yang kondusif dan inklusif berdasarkan ABS SBK dan/atau kearifan local

Strategi

1. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi pada industri pariwisata
3. Melakukan penguatan rantai pasok, industri, dan investasi pariwisata
4. Menciptakan kredibilitas bisnis

- 3) Mewujudkan industri pariwisata yang mampu bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang Panjang

Strategi

1. Melakukan peningkatan nilai tambah pada industri pariwisata
2. Mengembangkan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

- 4) Mewujudkan industri pariwisata berdaya saing melalui penerapan pengelolaan pariwisata berkualitas dan berstandar internasional

Strategi

1. Melakukan pengembangan digitalisasi pada industri pariwisata

- 5) Memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dan sosial di sekitar destinasi wisata

Strategi

1. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan
2. Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif)

C. Pembangunan Pemasaran Kabupaten Pesisir Selatan

- 1) Pemasaran pariwisata yang akuntabel dengan menjunjung tinggi norma dan nilai budaya untuk memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata

Strategi

1. *Branding* destinasi wisata
 2. Membangun citra destinasi pariwisata
- 2) Penyediaan sistem pemasaran dan promosi pariwisata terpadu, efektif, efisien, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan pasar wisatawan yang berkualitas

Strategi

1. Peningkatan program pemasaran pariwisata daya tarik, destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPP)
 2. Peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar baru, berkembang, dan utama
 3. Peningkatan kualitas promosi pariwisata
- 3) Peningkatan kualitas promosi pariwisata yang terintegrasi antar DTW, dan dengan destinasi pariwisata

Strategi

1. Program pengembangan promosi berbasis tema dan teknologi informasi dan komunikasi
2. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata
3. Melakukan pengembangan pasar wisatawan mancanegara

D. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

- 1) Penyediaan sistem kelembagaan kepariwisataan yang mandiri dan berdaya saing dalam mengoptimalkan pembangunan kepariwisataan dan sekaligus membuka peluang investasi

Strategi

1. Melakukan optimalisasi pengelolaan destinasi (DMO) yang terintegrasi
2. Layanan pendaftaran usaha pariwisata

- 2) Mewujudkan organisasi pariwisata yang andal dan tangguh melalui transformasi sistem kepemimpinan inklusif

Strategi

1. Pengembangan kerjasama usaha pariwisata dengan perusahaan besa
2. Penguataan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
3. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPBD)

- 3) Mewujudkan tata kelola pariwisata yang berbasis ABS SBK dan/atau kearifan lokal dengan menerapkan pengelolaan pariwisata berkualitas

Strategi

1. Pembinaan Pokdarwis
2. Pembinaan desa wisata

- 4) Menciptakan luaran penelitian dan pengembangan kepariwisataan yang mampu memperkuat tata kelola pariwisata berkualitas

Strategi

1. Melakukan penelitian dan pengembangan kepariwisataan

E. Pembangunan SDM Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

- 1) Mewujudkan sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata serta sarana prasarana yang mampu mendorong profesionalisasi dan kompetensi yang bertaraf internasional

Strategi

1. Melakukan penguatan skill SDM pariwisata yang berstandar professional
2. Kewirausahaan pariwisata

- 2) Mewujudkan sumber daya manusia pariwisata yang kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia sebagai agen perubahan di lingkungan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan kepariwisataan

Strategi

1. Pengembangan kurikulum bimtek/pelatihan/ workshop bagi pelaku pariwisata yang sesuai dengan tuntutan wisatawan premium
2. Fasilitasi Sertifikasi profesi

- 3) Peningkatan jumlah SDM pariwisata yang memiliki sertifikat keahlian
Strategi
 1. Meningkatkan kualitas pengelola destinasi pada bidang kepariwisataan
 2. Mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

BAB 10

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bab rencana pembangunan perwilayahan pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi rencana struktur perwilayahan pariwisata dan penentuan kluster perwilayahan pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, rencana pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Pesisir Selatan, serta rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Pesisir Selatan dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Pesisir Selatan

Keberadaan RIPPARKAB sebagai dasar dalam mengembangkan strategi kepariwisataan yang disesuaikan dengan arah rencana pengembangan tata ruang terkait dalam memahami karakteristik dan keunikan konsep destinasi yang dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan. Proses pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan sistem keruangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah terkait dalam memahami konsep wisata yang relevan dalam memperkuat *positioning* wisata Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini kemudian menjadi implikasi penguatan tawaran destinasi wisata Kabupaten Pesisir Selatan pada tingkat persaingan yang dihadapi.

Proses arah pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan meliputi perencanaan pembangunan destinasi utama pariwisata, Pembangunan kawasan strategis pariwisata, dan pengembangan kawasan potensial pariwisata. Penguatan dan penegakkan regulasi pengembangan kawasan utama pariwisata kota (DPK) dan kawasan strategis pariwisata kota (KSPK) dan kawasan potensial pariwisata kota (KPPK). Melalui arah kebijakan ini maka konsep destinasi wisata yang dikembangkan berdasarkan karakteristik dan keunikan wisata alam, wisata budaya, daya tarik lingkungan dan daya tarik event- event dilokasi destinasi pariwisata, wisata minat khusus serta wisata belanja dan wisata kuliner diharapkan mampu memberikan penguatan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Relevansi pengembangan destinasi wisata terhadap arah pengembangan konsep destinasi gastrowisata berbasis alam, sungai, sejarah dan event memiliki

konsekwensi terhadap pendekatan strategis yang dikembangkan. dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesiapan aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pendukung kepariwisataan diharapkan dapat memberikan penguatan atas konsep destinasi wisata yang dikembangkan wisatawan. Hal ini tentunya memberikan dampak terhadap proses pendekatan strategi yang dikembangkan hendaknya juga memberikan multiplier efek yang lebih luas.

10.1 Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata

Rencana struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dalam mengembangkan pusat pelayanan pariwisata primer maupun sekunder Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Sebagai dasar dalam mengembangkan fungsi setiap Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Pesisir Selatan dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Pesisir Selatan;
3. Sebagai dasar dalam melakukan perencanaan dan pembangunan fisik dan nonfisik Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Pesisir Selatan dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Pesisir Selatan;
4. Memberikan arah dalam perumusan indikasi program dan kegiatan pembangunan untuk aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan.

Perumusan rencana struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan ini dimaksudkan untuk:

- a. Membagi peran dan positioning (memposisikan) antarkawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan karakteristik dan potensi pariwisata yang dimiliki setiap kawasan;
- b. Menetapkan pusat pelayanan pariwisata (primer dan sekunder) yang melayani kegiatan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan;

- c. Menunjukkan perbedaan tema produk pariwisata antara satu kawasan pariwisata dengan kawasan pariwisata lainnya, sehingga tema produk pariwisata yang ditawarkan di tiap kawasan dapat lebih fokus, namun menjadi lebih beragam dan menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan,
- d. Meningkatkan daya saing wilayah dengan menawarkan produk yang beragam dan saling melengkapi;
- e. Memberikan prioritas pada satu kawasan dibanding kawasan lainnya dengan pertimbangan- pertimbangan tertentu, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; dan
- f. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam upaya percepatan pembangunan pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam merumuskan rencana struktur perwilayahan pembangunan pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, pertimbangan yang mendasarinya adalah :

- a. Kajian kebijakan Kawasan Perbatasan, kajian kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan (RPJMD, RTRW Kabupaten) dan/atau kajian kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Sebaran potensi dan karakteristik daya tarik wisata, serta aksesibilitas menuju daya tarik wisata di tiap kawasan;
- c. Kesamaan dan/atau kemiripan tema produk pariwisata, baik itu wisata budaya, alam, maupun buatan yang membentuk kluster wisata bertema;
- d. Aksesibilitas yang saling berdekatan dan saling terkait;
- e. Daya dukung lingkungan fisik, sosial budaya, dan sosial ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Multiplier efek terhadap daya tarik wisata dan wilayah lain di sekitarnya.

Rencana struktur perwilayahan pariwisata merupakan kerangka perwilayahan pariwisata kabupaten, yang terdiri dari pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki dan saling terintegrasi, sesuai dengan fungsi dan kedudukan wilayah, dan dihubungkan oleh sistem jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.

Perwilayahan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

- a. 4 (empat) DPK ;

b. 9 (sembilan) KSPK ; dan

c. 2 (dua) KPPK

DPK di Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau kecamatan yang berkualitas dan dikenal luas secara provinsi dan nasional;
- b. memiliki daya tarik alam, budaya, lingkungan dan buatan serta iven pariwisata yang berskala provinsi dan nasional dalam bentuk paket perjalanan wisata dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan;
- d. memiliki kontribusi terhadap ekonomi wilayah (khususnya sub sektor hotel, restoran dan rekreasi); dan
- e. memiliki fasilitas pendukung pariwisata yang memadai.

KSPK ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan dengan cakupan wilayah kecamatan yang berkualitas dan dikenal luas secara regional;
- b. Memiliki daya tarik alam, budaya, lingkungan dan buatan serta iven pariwisata yang berskala regional;
- c. Memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang belum mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan;
- d. Memiliki kontribusi yang relative kecil terhadap ekonomi wilayah (khususnya sub sektor hotel dan restoran); dan
- e. Memiliki fasilitas pendukung pariwisata yang belum memadai.

Selanjutnya KPPK ditetapkan dengan kriteria :

- a. Kawasan dengan cakupan wilayah kecamatan yang potensial;
- b. Memiliki potensi daya tarik alam, budaya dan lingkungan;
- c. Memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang belum memadai;
- d. Memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap ekonomi wilayah (khususnya sub sektor hotel dan restoran)
- e. Belum memiliki fasilitas pendukung pariwisata.

Perwilayahan pembangunan pariwisata terdiri dari :

- a. DPK Mandeh - Kecamatan Koto XI Tarusan, yang terdiri dari KSPK Kecamatan Bayang dan Kecamatan Bayang Utara;
- b. DPK Carocok Painan - Kecamatan IV Jurai, yang terdiri dari KSPK Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Sutera;
- c. DPK Pasir Putih - Kecamatan Lengayang yang terdiri dari KSPK Kecamatan Ranah Pesisir serta KPPK Kecamatan Linggo Sari Baganti; dan
- d. DPK Rumah Gadang Mandeh Rubiah - Kecamatan Lunang yang terdiri dari KSPK Kecamatan Airpura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa IV Balai Tapan dan Kecamatan Silaut serta KPPK Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan.

10.2 Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata

Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) adalah destinasi pariwisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata yang memiliki kesesuaian tema skala kabupaten (berdaya saing provinsi), dan nantinya dapat ditetapkan menjadi kewenangan kabupaten. Rencana Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) merupakan arahan pembangunan destinasi pariwisata dalam sistem perwilayahan pariwisata, yang terdiri dari:

- 1) Lingkup wilayah Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK); dan
- 2) Penetapan kawasan pariwisata kabupaten yang akan dikembangkan sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).

Adapun Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Pesisir Selatan mencakup seluruh wilayah administrative Kabupaten Pesisir Selatan, dengan fokus pada kawasan-kawasan yang memiliki daya tarik wisata yang potensial, untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dengan temanya masing-masing. Berdasarkan sebaran daya tarik wisata, khususnya daya tarik wisata unggulan dan jenis wisatanya, aksesibilitas serta kedekatan lokasi daya

tarik wisata, maka dapat ditetapkan pembagian kluster perwilayahan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan dengan tema produk wisata unggulan masing-masing kluster.

Tema setiap kluster perwilayahan didasarkan pada potensi daya tarik wisata yang dominan di masing-masing kluster, tanpa mengabaikan adanya potensi jenis daya tarik wisata lain. Tema kluster diharapkan dapat membentuk citra yang jelas bagi kluster tersebut, dan memfokuskan pembangunan kepariwisataan di tiap kawasan sesuai dengan temanya masing-masing. Berikut ini tema masing-masing Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) disajikan pada table berikut ini.

Tabel 10.1
Tema Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Pesisir Selatan

Destinasi Pariwisata Kabupaten (KUPK)	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)	Kawasan Potensial Pariwisata Kabupaten (KPPK)	Tema Blue Tourism
Mandeh dan Sekitarnya	Destinasi wisata di Bayang dan Bayang Utara		Coastal and maritime tourism
Carocok dan Sekitarnya	Destinasi Batang Kapas, dan Sutera		Marine and cruiser tourism
Pasir Putih, Kecamatan Lenggayang	Destinasi di Ranah Pesisir,	Linggosari Baganti	Coastal and Marine Tourism
Rumah Gadang Mandeh Rubiah	Destinasi di air pura, Silaut, Pancung Soal, Basa 4 Balai Tapan	Ranah 4 Hulu Tapan	Coastal tourism and culture/historical Tourism

Adapun kawasan strategis Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kawasan strategis Panasahan, wisata Carocok- Bukik Lankisau (PACAR BULAN)
2. Kawasan Strategis Agropolitan Peternakan: Kecamatan Sutera, Lenggayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti.
3. Kawasan Strategis Istana Indrapura, di Pancuang Soal

4. Kawasan strategis Mandeh Rubiah. Di Kecamatan Lunang dan sekitarnya.
5. Kawasan Strategis Jembatan AKA- Bayang Sani, di kecamatan Bayang Utara.

BAB 11

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan yang dirumuskan dalam Ripparkab ini merupakan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan pemangku kepentingan lain yang terkait, secara bertahap dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sebagai bentuk pengejawantahan strategi pembangunan kepariwisataan.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan merupakan penjabaran operasional dari strategi pembangunan kepariwisataan, sekaligus menjadi indikator pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan. Indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan berfungsi: 1) Sebagai acuan dasar pelaksanaan Ripparkab Pesisir Selatan, 2) Sebagai acuan untuk mengevaluasi pencapaian sasaran dan target pembangunan kepariwisataan Ripparkab Pesisir Selatan.

Program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan perlu diatur dan dimonitor dalam bentuk program pembangunan kepariwisataan yang dapat dievaluasi setiap lima tahun sekali atau sesuai kebutuhan. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan seperti yang telah dijelaskan dalam Bab 9 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, yang kemudian didetailkan dalam 5 aspek program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

1. Program pembanguan destinasi pariwisata
2. Program pembangunan industri pariwisata
3. Program pemasaran pariwisata
4. Program pembangunan kelembagaan kepariwisataan
5. Program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Struktur program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 11.1
Tahapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Strategi	Program	Kegiatan	Waktu				Indikator	Penanggung Jawab
				2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045		
1. Pembangunan Perwilayahan Pariwisata biru	1. Menguatkan zonasi pariwisata berdasarkan potensi pariwisata biru	1. Melakukan zonasi potensi pariwisata biru pada kawasan coastal, marine, maritime, dan cruise	1. Penyusunan rencana pengembangan pada kawasan coastal, marine, maritime, dan cruiser					1. Teridentifikasinya DPK, KSPK, KPPK zona coastal, marine, maritime, dan cruiser tourism	Dispar, DKP, Bappeda, PU, PT
			2. Penataan tata ruang wilayah konservasi potensial destinasi pariwisata sesuai dengan potensi daya tarik wisata pada kawasan coastal, marine, maritime, dan cruise					2. Jumlah dokumen tata ruang wilayah konservasi potensial destinasi pariwisata di wilayah DPK, KSPK, KPPK	Dispar, Bappeda, PU, PT
			3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana detail pembangunan destinasi pariwisata					3. Dokumen monev pembangunan pada kawasan DPK, KSPK, KPPK	Dispar, Bappeda, PU, DLH, PT
	2. Mapping potensi destinasi wisata berdasarkan daya tampung dan daya dukung	2. Kajian destinasi pariwisata berbasis daya dukung dan daya tampung	4. Kajian destinasi pariwisata berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan					4. Jumlah dokumen kajian destinasi pariwisata berbasis daya dukung dan daya tampung	Dispar, PT
			5. Pengembangan destinasi wisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung (<i>Crying Capacity dan Bio Diversity</i>)					5. Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan dengan memperhatikan <i>Crying Capacity dan Bio Diversity</i>	Dispar, BPBD, Damkar, Dinkes, DLH, DMO, Komunitas

			6. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan destinasi wisata dengan prinsip 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)					6. Jumlah destinasi yang menerapkan prinsip 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	Dispar, BPBD, Damkar, Dinkes, DLH, DMO, Komunitas, Masyarakat
	3. Menyusun konsep pengembangan jangka panjang semua zonasi wisata	3. Penyusunan roadmap pengembangan <i>blue tourism</i>	7. Penyusunan roadmap pengembangan <i>blue tourism</i>					7. Dokumen roadmap <i>blue tourism</i>	Dispar, PT
	4. Penataan kawasan wisata berwawasan lingkungan	4. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ripparkab	8. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ripparkab					8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ripparkab	
	5. Digitalisasi zonasi wisata biru	5. Merancang dan mengembangkan peta digital area destinasi wisata	9. Penyusunan dan pengembangan peta digital destinasi wisata pada semua zonasi wisata					9. Jumlah destinasi yang memiliki peta kawasan secara digital	Dispar, Diskominfo, DMO, PT
2. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata biru, budaya dan sejarah yang bernilai tambah	6. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata biru, alam, budaya dan sejarah yang bernilai tambah	6. Membangun daya tarik pada wilayah/zonasi pariwisata biru	10. Membangun daya tarik pada zonasi coastal tourism					10. Teridentifikasinya daya tarik wisata beach recreation, seaside resort, swimming, aktivitas lain berbasis pantai	Dispar, DKP, Bappeda, PU, PT
			11. Membangun daya tarik pada zonasi marine tourism					11. Teridentifikasinya daya tarik wisata snorkeling, diving, memancing, berperahu	Dispar, DKP, Bappeda, PU, PT
			12. Membangun daya tarik pada zonasi maritime tourism					12. Teridentifikasinya daya tarik wisata menyelam, perahu pesiar, olahraga berkaitan laut	Dispar, DKP, Bappeda, PU, PT

			13. Membangun daya tarik pada zonasi cruise tourism					13. Teridentifikasinya daya tarik wisata kuliner laut	Dispar, DKP, Bappeda, PU, PT
7. Pengembangan pariwisata sesuai tema utama dan tema pendukung masing-masing kawasan	7. Pengembangan pariwisata sesuai tema utama dan tema pendukung masing-masing kawasan	14. Percepatan pengembangan destinasi pantai dan pulau (<i>Marine Tourism</i>)						14. Jumlah paket wisata tematik berbasis pantai dan pulau	Kememparekraf, Dispar Prov, Dispar Pessel, DMO
		15. Pengembangan wisata lain diluar tema utama kawasan (wisata alam, budaya, dan buatan) yang mendukung tema utama						15. Jumlah jasa wisata lain diluar tema utama kawasan	Dispar, Disbud, PU, DMO
8. Mengembangkan konsep sustainability pada semua destinasi wisata unggulan	8. Pengembangan wisata berbasis konservasi lingkungan	16. Merintis pengembangan daya tarik wisata baru untuk mendorong pertumbuhan disetiap wilayah destinasi						16. Jumlah destinasi baru terbentuk	Dispar, DMO, Komunitas
		17. Mengembangkan wisata diving, snorkling, dan event bahari						17. Jumlah destinasi wisata diving, snorkling, dan event bahari	Dispar, DMO, Komunitas
		18. Menyusun paket wisata berbasis konservasi lingkungan						18. Jumlah paket wisata berbasis lingkungan	Dispar, DLH, DMO, Komunitas
9. Mengembangkan konsep digital tourism untuk meningkatkan kinerja wisata disemua zonasi	9. Pengembangan dan penerapan digitalisasi <i>tourism</i>	19. Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan komunikasi di area destinasi						19. Jumlah infrastruktur jaringan telekomunikasi dan komunikasi pada setiap area destinasi	Dispar, Diskominfo, Telkom, PLN, DMO
		20. Mengembangkan website di setiap destinasi wisata yang interaktif dan informatif						20. Jumlah website, fitur dan konten yang ada disetiap destinasi	Dispar Prov, Dispar Kab/Kota, Diskominfo, PT
		21. Pengembangan system transaksi dan pembayaran						21. Jumlah POT di setiap destinasi	Dispar, Bank, Geray Fast Pay, DMO

			non tunai (<i>Payment Online Transaction</i>)						
			22. Pendataan dan pelaporan data wisatawan berbasis digital secara berkala					22. Jumlah DMO destinasi yang melakukan pelaporan	Dispar, Diskominfo, Bank, Telkom, PLN, PT, DMO
3. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang berstandar internasional dengan menerapkan pengelolaan pariwisata halal	10. Membangun dan mengembangkan amenitas di zonasi pariwisata biru	10. Membangun dan mengembangkan amenitas di zonasi pariwisata biru sesuai standar internasional	23. Membangun dan mengembangkan amenitas pada zonasi coastal					23. Kualitas dan kuantitas amenitas pada zonasi coastal	Pemkab, Dispar, PU, DLH, DMO, Swasta, Komunitas
			24. Membangun dan mengembangkan amenitas pada zonasi marine					24. Kualitas dan kuantitas amenitas pada zonasi marine	Pemkab, Dispar, PU, DLH, DMO, Swasta, Komunitas
			25. Membangun dan mengembangkan amenitas pada zonasi maritime					25. Kualitas dan kuantitas amenitas pada zonasi maritime	Pemkab, Dispar, PU, DLH, DMO, Swasta, Komunitas
			26. Membangun dan mengembangkan amenitas pada zonasi cruise					26. Kualitas dan kuantitas amenitas pada zonasi cruise	Pemkab, Dispar, PU, DLH, DMO, Swasta, Komunitas
	11. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	11. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	27. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten					27. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Pemkab, Dispar, PU, DLH, DMO, Swasta, Komunitas
			28. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten					28. Dokumen monev	Dispar, PT
	12. Pengembangan amenitas di objek wisata prioritas dan menonjol	12. Pengembangan amenitas di objek wisata prioritas dan menonjol	29. Menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pembangunan					29. Jumlah skema kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pembangunan prasarana	Pemkab, Dispar, PU, DLH, DMO, Swasta, Komunitas

			prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata					umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	
			30. Melengkapi dan meningkatkan kualitas fasilitas wisata di daya tarik wisata unggulan: rumah makan/gerai kuliner, toilet, mushola, tempat santai/gazebo, jalan masuk objek, homestay, gerai souvenir/oleh-oleh, pusat informasi objek wisata dan tempat sampah					30. Tersedianya fasilitas wisata di daya tarik wisata unggulan/prioritas	Pemkab, Dispar, LSP, DMO, Swasta, Komunitas
4. Mewujudkan aksesibilitas pariwisata internasional, nasional, dan wilayah yang terintegrasi dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan	13. Pembangunan aksesibilitas fisik menuju lokasi destinasi wisata	13. Pembangunan aksesibilitas fisik menuju lokasi destinasi wisata	31. Membangun, memperbaiki, dan menambah jalan utama dan alternatif menuju destinasi wisata					31. Panjang dan luas jalan menuju DPK, KSPK, KPPK	Dispar, PU, Dishub
			32. Pengembangan sistem transportasi wisata dengan konsep <i>Transit Oriented Development (TOD)</i>					32. Jumlah ketersediaan transportasi	PU, Dishub
			33. Menyediakan media informasi pendukung destinasi wisata					33. Jumlah dan Jenis rambu lalulintas di daerah destinasi	PU, Dishub
	14. Peningkatan ketersediaan moda transportasi yang aman, nyaman, cukup untuk wisatawan menuju dan pergerakan pada wilayah destinasi	14. Peningkatan ketersediaan moda transportasi yang aman, nyaman, cukup untuk wisatawan menuju dan pergerakan pada wilayah destinasi	34. Penyediaan transportasi pariwisata (darat, laut dan sungai) dengan standar kualitas yang terjamin.					34. Jumlah moda transportasi pariwisata (darat, laut dan sungai)	Dispar, Dishub, DMO, Swasta, Komunitas
			35. Mendorong kelompok masyarakat untuk mengembangkan usaha transportasi, penyewaan kendaraan bermotor					35. Jumlah moda transportasi milik masyarakat	Dispar, Dishub, DMO, Swasta, Komunitas

	15. Ketersediaan informasi pelayanan transportasi dan kemudahan reservasi moda transportasi dari berbagai pilihan jenis moda transportasi	15. Ketersediaan informasi pelayanan transportasi dan kemudahan reservasi moda transportasi dari berbagai pilihan jenis moda transportasi	36. Membangun tersedianya website dan call center tentang pelayanan Informasi transportasi di setiap wilayah KUPK, KSPK, KPCK					36. Jumlah website dan nomor call center tentang pelayanan Informasi transportasi di setiap wilayah KUPK, KSPK, KPCK	Dispar, Dishub, Diskominfo, DMO, Swasta, Komunitas
			37. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan rambu-rambu dan petunjuk arah pada setiap wilayah KUPK, KSPK, KPCK					37. Jumlah rambu-rambu dan petunjuk arah pada setiap wilayah KUPK, KSPK, KPCK	Dispar, Dishub, Diskominfo, DMO, Swasta, Komunitas
5. Pembangunan akomodasi yang berstandar internasional	16. Peningkatan kualitas dan kuantitas akomodasi berstandar internasional	16. Peningkatan kualitas dan kuantitas akomodasi berstandar internasional	38. Mendorong pembangunan homestay dan hotel berstandar internasional					38. Mendorong pembangunan homestay dan hotel sesuai standar internasional	Dispar, Swasta, Komunitas, PHRI
			39. Membentuk peraturan untuk menetapkan harga layanan homestay dan hotel					39. Membentuk peraturan untuk menetapkan harga layanan homestay dan hotel	Dispar, Swasta, Komunitas, PHRI
6. Pengembangan aktivitas pariwisata berbasis pengalaman pada zona wisata	17. Mengembangkan daya tarik wisata berbasis experience	17. Pengembangan manajemen atraksi	40. <i>Visiting management tourism</i> pada destinasi wisata					40. Jumlah dokumen <i>visiting management tourism</i> pada destinasi	Dispar, DMO
			41. Menggelar event-event seni budaya berskala internasional setiap tahun					41. Jumlah event seni budaya berskala internasional	Dispar, KONI, DMO, Pelaku Seni
			42. Mengembangkan atraksi berbasis budaya dan kreatifitas masyarakat					42. Jumlah atraksi berbasis budaya dan kreatifitas masyarakat setiap tahun	Dispar, KONI, DMO, Pelaku Seni
			43. Menjadikan Pesisir Selatan sebagai pusat pertunjukan seni budaya Melayu sedunia					43. Jumlah pertunjukan seni budaya Melayu sedunia	Dispar, KONI, DMO, Pelaku Seni

	18. Melakukan penguatan desa wisata	18. Masterplan desa wisata	44. Penyusunan masterplan desa wisata (Desa Wisata Rintisan, Berkembang, Maju, dan Mandiri)				44. Jumlah masterplan desa wisata Rintisan, Berkembang, Maju, dan Mandiri	Dispar, PT, Kecamatan, Nagari
			45. Pembentukan desa wisata tangguh bencana				45. Jumlah desa wisata tangguh bencana	Pemkab/Kot, Dispar Prov, Dispar Kab/Kota
		19. Pembinaan dan pengembangan Desa Wisata	46. Pembinaan dan pengembangan Desa Wisata				46. Jumlah Desa Wisata yang dibina	Dispar, Nagari, Pokdarwis, Komunitas, TP2Dewi
			47. Pelatihan dan Bimbingan Teknis pengelolaan Desa Wisata				47. Jumlah pelatihan dan Bimtek pengelolaan Desa Wisata	Dispar, Nagari, Pokdarwis, Komunitas, TP2Dewi
		20. Inovasi desa wisata dalam merevitalisasi nilai budaya dan kearifan lokal lainnya	48. Desa wisata dengan keunikan daya tarik destinasi yang dimiliki melalui revitalisasi nilai budaya dan kearifan lokal lainnya				48. Jumlah keunikan daya tarik desa wisata	Dispar, Nagari, Pokdarwis, Komunitas, TP2Dewi
		21. Anugerah Desa Wisata (ADW Kabupaten)	49. Pergelaran pelaksanaan ADW (Anugerah Desa Wisata) pada tingkat Kabupaten				49. Jumlah desa wisata yang berkualitas	Dispar, Nagari, Pokdarwis, Komunitas, TP2Dewi
7. Mewujudkan masyarakat sadar wisata sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan	19. Melakukan penerapan protokol kesehatan	22. Protokol kesehatan CHSE (<i>Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability</i>)	50. Pengadaan layanan kesehatan di setiap kawasan destinasi				50. Jumlah fasilitas layanan kesehatan	Dinkes, Dispar, Puskesmas, DMO
			51. Fasilitasi protokol kesehatan CHSE setiap daya tarik Wisata, hotel, pusat keramaian/				51. Jumlah fasilitas protokol kesehatan terpasang	Dispar, Dinkes

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ABS SBK dan/atau kearifan local			perbelanjaan, transportasi darat, restoran						
			52. Pengadaan klinik, apotek, dan tenaga medis pada setiap kawasan destinasi					52. Jumlah klinik, apotek, dan tenaga medis	Dispar, Dinkes
	20. Penerapan pariwisata ramah muslim pada layanan wisatawan pada destinasi wisata	23. Penerapan pariwisata ramah muslim pada layanan wisatawan pada destinasi wisata	53. Sertifikasi layanan pariwisata ramah muslim pada destinasi wisata oleh lembaga sertifikasi					53. Jumlah sertifikat layanan wisata ramah muslim	Dispar, DSN, MUI, BPOM, Dinkes, LSP, DMO
			54. Percepatan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mengembangkan destinasi pariwisata ramah muslim					54. Jumlah program prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk destinasi pariwisata ramah muslim	Pemkab, Dispar, PU, DLH, DMO, Swasta, Komunitas
	21. Meningkatkan kesiap siagaan bencana disemua zonasi wisata	24. Pengembangan fasilitas mitigasi bencana	55. Pengelolaan destinasi dengan memperhatikan perubahan iklim, proses adaptasi dan mitigasi bencana					55. Jumlah destinasi yang berbasis mitigasi bencana	Dispar, BPBD, Damkar, Dinkes, DLH, DMO
			56. Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami					56. Jumlah peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami	PU, Dispar
			57. Fasilitasi pos keamanan dan keselamatan (SAR) dan petugas di daya tarik wisata atau objek lainnya yang diduga rawan kecelakaan					57. Jumlah pos keamanan (SAR) di daya tarik wisata	PU, Dispar, BNPB
	22. Pelestarian kesenian tradisional masyarakat Pesisir Selatan	25. Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	58. Pengembangan objek-objek kesenian tradisional pengembangan dan pemanfaatan					58. Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Dispar, Disbud, PT

		26. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten Pesisir Selatan	59. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional					59. Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Dispar, Disbud, PT
			60. Standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan					60. Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	
			61. Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisiona					61. Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	

Tabel 11.2
Tahapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Strategi	Program	Kegiatan	Waktu				Indikator	Penanggung Jawab
				2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045		
1. Mewujudkan iklim investasi pariwisata yang kondusif melalui penguatan kolaborasi dengan para pihak dan masyarakat adat	1. Debirokratisasi investasi di bidang pariwisata biru pada semua kawasan	1. Optimaisasi Pelayanan investasi pada sektor pariwisata biru	1. Digitalisasi Pelayanan investasi satu pintu					1. Jumlah hari pengurusan izin investasi pariwisata	Bappeda, Dispar, DPMPTSP
			2. Meringkaskan system birokrasi investasi di bidang pariwisata untuk menghilangkan high-cost economy					2. Lama tunggu izin investasi dikeluarkan	Bappeda, Dispar, DPMPTSP
		2. Penyediaan informasi peluang investasi pariwisata	3. Penyediaan buku peluang investasi pariwisata					3. Jumlah buku peluang investasi pariwisata	Bappeda, Dispar, DPMPTSP
			4. Kegiatan promosi peluang investasi pariwisata ke dalam dan luar negeri					4. Jumlah informasi peluang investasi pariwisata	Bappeda, Dispar, DPMPTSP
			5. Meningkatkan sinergi dan koordinasi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait					5. Jumlah promosi investasi di bidang pariwisata	Bappeda, Dispar, DPMPTSP
		3. Pemberian insentif investasi di bidang pariwisata	6. Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi dari dalam negeri dan luar negeri					6. Jumlah investasi dari dalam negeri dan luar negeri	Bappeda, Dispar, DPMPTSP

	2. Meningkatkan kerjasama dengan masarakat adat selaku pemilik asset dalam investasi pariwisata biru	4. Penyusunan pakta integritas kerjasama dalam berbagai bentuk investasi yang menguntungkan bagi masyarakat adat	7. Memberikan literasi dan sosialisasi pengembangan pariwisata serta manfaatnya kepada masyarakat adat					7. Jumlah pakta integritas kerjasama dengan masyarakat adat	Dispar, DPMPSTSP ,
	3. Meningkatkan Promosi investasi di bidang pariwisata	5. Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata melalui “Pesisir Selatan Tourism Investment Profile (PSTIP)” untuk stakeholders bisnis	8. Membuat cetak biru program informasi cetak dan elektronik “Pesisir Selatan Tourism Investment Profile” (PSTIP)					8. Jumlah investasi PMA dan PMDN pada zonasi pariwisata biru	DPMPSTSP, Dispar
2. Mewujudkan ekosistem industri pariwisata yang kondusif dan inklusif berasaskan ABS SBK dan/atau kearifan lokal	4. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif	6. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	9. Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif					9. Jumlah pendanaan dan pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif	DPMPSTSP, Dispar, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf
			10. Penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif					10. Jumlah infrastruktur ekonomi kreatif	DPMPSTSP, Dispar, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf
			11. Pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif					11. Jumlah dokumen hasil pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif	DPMPSTSP, Dispar, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf
	5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sertifikasi usaha	7. Peningkatan jumlah UMKM yang sudah memiliki NIB dan tersertifikasi halal	12. Sosialisasi dan bantuan pengurusan NIB					12. Jumlah usaha wiasta yang sudah memiliki NIB	Dispar, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf, LSP

	dan sertifikasi profesi pada industri pariwisata		13. Sertifikasi halal bagi usaha wisata				13. Jumlah usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal	Dispar, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf, LSP
			14. Workshop manajemen usaha bagi hotel dan restaurant				14. Jumlah workshop bagi hotel dan restaurant	Dispar, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf, LSP
			15. Bimbingan teknis bagi pelaku usaha untuk peningkatan hospitality				15. Jumlah bimbingan teknis bagi pokdawis dan pelaku usaha	DISPAR, DISKOP UMKM
	6. Melakukan penguatan rantai pasok, industri, dan investasi pariwisata	8. Penguatan struktur industri untuk peningkatan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata, pelaku ekonomi kreatif dan sektor lain yang terkait	16. Kerjasama antara industri kecil, menengah dengan industri besar pariwisata melalui penyusunan kontrak				16. Jumlah dokumen kerjasama	Dispar, BMCKTR, PU, Pelaku Ekraf
			17. Membangun jaringan kerjasama pelaku ekraf dengan pelaku bisnis lainnya				17. Jumlah kontrak kerjasama bisnis pelaku ekraf yang terbentuk	Dispar, Bank, Industri, Disperindag, UMKM
			18. Pembentukan dan pengembangan asosiasi usaha pariwisata sejenis				18. Jumlah asosiasi usaha pariwisata	Dispar, Pelaku Ekraf
	7. Menciptakan kredibilitas bisnis	9. Penciptaan kredibilitas bisnis	19. Menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal				19. jumlah sertifikasi usaha berstandar internasional	Dispar, Pelaku Ekraf
			20. Memonitor pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.				20. Jumlah Kunjungan ke pelaku usaha	Dispar, Pelaku Ekraf

3. Mewujudkan industry pariwisata yang mampu bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang Panjang	8. Melakukan peningkatan nilai tambah pada industri pariwisata	10. Peningkatan daya saing produk pariwisata	21. Meningkatkan daya saing daya tarik wisata melalui pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata;					21. Jumlah atraksi wisata	Dispar, Diskominfo, Bank, Telkom, PLN, PT, DMO
			22. meningkatkan daya saing fasilitas pariwisata melalui pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal;					22. Jumlah fasilitas pariwisata yang berstandar internasional	Dispar, Swasta, DMO
			23. Peningkatan daya saing aksesibilitas pariwisata melalui pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.					23. Jumlah agent perjalanan wisata	Dispar, Diskominfo, Bank, Telkom, PLN, PT, DMO
			24. Training manajemen dan teknis usaha kecil dan mikro wisata					24. Jumlah kegiatan training manajemen dan teknis usaha	Dispar, Diskominfo, Bank, Telkom, PLN, PT, DMO
		11. Peningkatan daya saing industri pariwisata dan ekraf	25. Pengembangan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing melalui pendaftaran HAKI					25. Jumlah produk ekraf yang memiliki HAKI	Dispar, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf
			26. Pengembangan penyediaan fasilitas makan dan minum yang berstandar higienis					26. Jumlah UMKM penyedia makanan dan minuman yang terstandar higienis	Dispar, Dinkes, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf

			27. Pengembangan potensi kuliner lokal di setiap Daya Tarik Wisata					27. Sebaran dan keragaman Daya Tarik Wisata kuliner	Dispar, Dinkes, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf
			28. Penguatan storynomics (cerita/narasi/konten kreatif) daya tarik wisata, kuliner, dan kerajinan					28. Tersedianya informasi dan cerita lengkap tentang sejarah dan profil daya tarik wisata	Dispar, Dinkes, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf
			29. Pelatihan peningkatan kualitas produk bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif					29. Jumlah pelaku pariwisata dan ekraf yang mengikuti pelatihan	Dispar, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf
			30. Fasilitasi usaha pariwisata dan ekraf untuk mendapatkan akses permodalan					30. Jumlah kredit untuk pelaku ekraf	Dispar, Diskop UMKM, DMO, Bank, Pelaku Ekraf
			31. Pelatihan/bimtek/workshop dalam meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif					31. Jumlah produk ekraf yang berkualitas SNI dan ISO	Dispar, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf, PT, Komunitas
	9. Mengembangkan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.	12. Penguatan implementasi kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat	32. Fasilitasi MoU dan MoA antar pemda dengan pemprov dan dengan dunia usaha					32. Jumlah MoU dan MoA	
		13. Penguatan monitoring dan evaluasi kerjasama antara	33. Evaluasi tindak lanjut kerjasama					33. Jumlah kunjungan evaluasi	

		pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat.							
4. Mewujudkan industri pariwisata berdaya saing melalui penerapan pengelolaan pariwisata berkualitas dan berstandar internasional	10. Melakukan pengembangan digitalisasi pada industri pariwisata	14. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan Big Data dalam industri pariwisata	34. Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dan Big Data dalam industri pariwisata di DPK, KSPK, dan KPPK					34. Jumlah operator pariwisata yang menggunakan AI dan Big data	Dispar, Diskominfo, Bank, Telkom, PLN, PT, DMO
			35. Pengembangan transaksi bisnis online untuk semua jenis Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif					35. Jumlah usaha wisata yang sudah tergabung kedalam market place dan sharing economy platform	Dispar, Diskominfo, Bank, Telkom, PLN, PT, DMO
		15. Penyediaan data base industri kepariwisataan	36. Pengembangan website industri yang informatif dan komunikatif					36. Jumlah industri wisata yang memiliki website dengan fitur lengkap	Dispar, Diskominfo, Telkom, PLN, PT, DMO
			37. Pelatihan pengembangan website bagi pelaku industri pariwisata					37. Jumlah pelaku industri yang mengikuti pelatihan pengembangan website	Dispar, Diskominfo, PT
5. Memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dan sosial	11. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan	16. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan	38. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten					38. Jumlah program Pemberdayaan Masyarakat	Dispar, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf
			39. Meningkatkan kualitas produk dan kemampuan pelaku usaha UMKM sebagai komponen					39. Jumlah produk UMKM yang bersertifikasi	Dispar, Diskop UMKM, DMO,

di sekitar destinasi wisata			pendukung pariwisata di Destinasi Pariwisata						Pelaku Ekraf, LSP
			40. Perluasan akses pasar terhadap produk industri UMKM yang dikembangkan masyarakat lokal					40. Jangkauan pasar produk industri UMKM	Dispar, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf,
			41. Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk UMKM yang dikembangkan masyarakat lokal					41. Jumlah kredit permodalan yang diserap oleh UMKM	Dispar, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf,
			42. Peningkatan pemahaman dan kapasitas masyarakat untuk mendukung pengembangan Kepariwisata di setiap wilayah					42. Persentase peran serta masyarakat dalam industri pariwisata	Dispar, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf,
		17. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	43. Melakukan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten					43. Jumlah destinasi pariwisata berkelanjutan	Dispar, Diskop UMKM, DMO, Pelaku Ekraf
		18. Pengembangan manajemesn usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi biru	44. Pelatihan, workshop dan bimtek dalam mendorong pengurangan penggunaan plastic dan bahan yang merusak lingkungan dalam setiap rantai industry pariwisata biru					44. Persentase pengurangan bahan plastic dalam produk wisata	Dispar, Diskop UMKM, DLH
			45. Bimtek mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.					45. Bimtek pelaku wisata tentang pelestarian lingkungan	Dispar, Diskop UMKM, DLH, Akademisi
			46. Bimtek pengelolaan mitigasi bencana disemua zonasi kawasan wisata					46. Jumlah bimtek mitigasi bencana	Dispar, Diskop UMKM, DLH, BPBD

	12. Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif)	19. Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif)	47. Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten					47. Jumlah Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif)	Dispar, Diskop UMKM
		20. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	48. Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif					48. Dokumen pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	Dispar, PT

Tabel 11.3
Tahapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Pemasaran Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Strategi	Program	Kegiatan	Waktu				Indikator	Penanggung Jawab
				2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045		
1. Mewujudkan pemasaran pariwisata yang akuntabel dengan menjunjung tinggi norma dan nilai budaya untuk memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata	1. <i>Branding</i> destinasi wisata	1. <i>Branding</i> destinasi wisata yang peduli kelestarian alam (<i>environmental friendly</i>), dan kearifan lokal (<i>local indigenous</i>)	1. Branding destinasi wisata yang memuat <i>environmental friendly</i> dan <i>local indigenous</i>					1. Jumlah destinasi yang memiliki branding yang memuat <i>environmental friendly</i> , dan <i>local indigenous</i>	Dispar, DMO, Pokdarwis, Komunitas,
			2. Pengembangan strategi pemasaran berbasis pengalaman wisatawan (<i>tourism experience</i>)					2. Jumlah wisatawan minat khusus	Dispar, DMO, Pokdarwis, Komunitas
	2. Membangun citra destinasi pariwisata	2. Membangun citra pariwisata masing-masing destinasi pariwisata	3. Pengembangan citra pariwisata melalui peningkatan <i>tourism experience</i>					3. Jumlah program untuk membangun citra pariwisata	Dispar, DMO, BPPD, Pokdarwis, Komunitas
			4. Peningkatkan kemampuan diplomasi dan komunikasi petugas pariwisata					4. Jumlah petugas pariwisata yang menguasai bahasa inggris	Dispar, DMO, Pokdarwis, Komunitas
			5. Melakukan standarisasi gallery, restoran dan usaha lain terkait pariwisata					5. Dokumen standarisasi harga produk pariwisata	Dispar, Dinas Kop UMKM, Diperindag, DMO, Komunitas, Masyarakat

2. Mewujudkan sistem pemasaran dan promosi pariwisata terpadu, efektif, efisien, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan pasar wisatawan yang berkualitas	3. Peningkatan program pemasaran pariwisata daya tarik, destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPP)	3. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPP)	6. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri					6. Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	
		4. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri					7. Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	
	4. Peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar baru, berkembang, dan utama	5. Peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar baru, berkembang, dan utama	8. Peningkatan peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar baru, berkembang dan utama					8. Jumlah wisatawan yang berasal dari pasar baru, berkembang dan utama	Dispar, DMO, Komunitas, Travel Agent
			9. Pelaksanaan strategi pemasaran pariwisata dengan e-marketing.					9. Jumlah akun emarketing pariwisata	Dispar, DMO, Komunitas, Travel Agent
			10. Membangun jaringan (networking) dengan pelaku promosi pariwisata di dalam negeri dan luar negeri					10. Jumlah dokumen Kerjasama networking) dengan pelaku promosi pariwisata	Dispar, DMO, Komunitas, Travel Agent
	5. Peningkatan kualitas promosi pariwisata	6. Peningkatan kualitas promosi pariwisata secara offline dan online	11. Meningkatkan kelengkapan dan kualitas bahan promosi cetak, elektronik dan publikasi kepariwisataan					11. Jumlah bahan promosi cetak, elektronik dan publikasi	Dispar, DMO, Komunitas, Travel Agent
			12. Meningkatkan intensitas promosi melalui kegiatan pertemuan, perjalanan					12. Jumlah kegiatan promosi	Dispar, DMO, Komunitas, Travel Agent

			insentif, konferensi dan pameran						
3. Meningkatnya kualitas promosi pariwisata yang terintegrasi antar DTW, dan dengan destinasi pariwisata	6. Program pengembangan promosi berbasis tema dan teknologi informasi dan komunikasi	7. Program pengembangan promosi berbasis tema dan teknologi informasi dan komunikasi	13. Pengembangan promosi berbasis tema teknologi informasi dan komunikasi					13. Jumlah program promosi berbasis tema dan teknologi digital	Dispar, DMO, Komunitas, Travel Agent
			14. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam promosi pariwisata berbasis ICT					14. Jumlah promosi berbasis ICT	Dispar, BPPD, Diskominfo
			15. Pembuatan buku profil pariwisata					15. Jumlah buku profil pariwisata	Dispar, BPPD, Diskominfo
			16. Meningkatkan kelengkapan dan kualitas bahan promosi cetak, elektronik dan publikasi kepariwisataan					16. Jumlah bahan promosi cetak, elektronik dan publikasi kepariwisataan	Dispar, BPPD, Diskominfo
	7. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata	8. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata	17. Membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Pesisir Selatan					17. Terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Pesisir Selatan	Dispar, Diperindag, DMO, Komunitas
			18. Memperkuat kemitraan antara BPPD Pesisir Selatan dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Pesisir Selatan					18. Dokumen kerjasama kemitraan	Dispar, Pemkab, DMO
			19. Mengembangkan pola-pola kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan					19. Jumlah dokumen kerjasama pemasaran	Dispar, DMO, Pokdarwis, Komunitas
			20. Membangun kerjasama dengan pelaku pariwisata					20. Jumlah dokumen kerjasama pemasaran untuk	Dispar, DMO, Pokdarwis, Komunitas

			melalui pelaksanaan <i>familiarization trip</i>				pelaksanaan <i>familiarization trip</i>	
			21. Pengembangan pelestarian nilai-nilai seni budaya melalui pembinaan sanggar dan organisasi seni				21. Jumlah sanggar seni yang dibina	Dispar, DMO, Pokdarwis, Komunitas
			22. Membangun kerjasama dengan Tour Operator, Travel Agencies, Travel Writer dan Media Crew				22. Jumlah Tour Operator, Travel Agencies, Travel Writer dan Media Crew yang bergabung dalam kerjasama	Dispar, DMO, Pokdarwis, Komunitas
4. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	8. Melakukan pengembangan pasar wisatawan mancanegara	9. Peningkatan pemasaran dan promosi untuk pemantapan segman pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar global	23. Pengembangan pemasaran dan promosi untuk pertumbuhan segmen ceruk pasar pariwisata				Jumlah kunjungan wisatawan dari ceruk pasar	Dispar, DMO, Komunitas, Travel Agent
			24. Melakukan <i>direct selling</i> dan <i>roadshow</i> destinasi wisata unggulan kepada pasar sasaran				Jumlah kegiatan <i>direct selling</i> dan <i>roadshow</i> destinasi wisata	Dispar, DMO, Komunitas, Travel Agent
			25. Memperkuat kerjasama pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata dengan negara-negara sumber wisatawan ke berbagai destinasi				Dokumen kerjasama pemanfaatan informasi pasar pariwisata	Dispar, DMO, Komunitas, Travel Agent
		10. Pengembangan bentuk promosi event pariwisata daerah ke pasar utama dan pasar pendukung di luar negeri	26. Promosi event-event unggulan pada pasar utama (Malaysia, Australia, Singapura, Jepang)				Jumlah kunjungan wisatawan asing dari pasar utama	Dispar, DMO, Komunitas, Travel Agent
			27. Promosi event-event unggulan pada pasar pendukung (Amerika,				Jumlah kunjungan wisatawan asing dari pasar pendukung	Dispar, DMO, Komunitas, Travel Agent

			Jerman, Belanda, India, Negara-negara Timur Tengah)						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Tabel 11.4
Tahapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Strategi	Program	Kegiatan	Waktu				Indikator	Instansi Pelaksana
				2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045		
1. Membangun sistem kelembagaan kepariwisataan yang mandiri dan berdaya saing dalam mengoptimalkan pembangunan kepariwisataan dan sekaligus membuka peluang investasi	1. Melakukan optimalisasi pengelolaan destinasi (DMO) yang terintegrasi	1. Penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan yang berasaskan ABS SBK	1. Pengembangan struktur organisasi pariwisata di DPK, KSPK, KPPK yang melibatkan pentahelix					1. Jumlah organisasi kepariwisataan di DPK, KSPK, KPPK	Dispar, DMO
			2. Pembentukan Pokja Pentahelix pada destinasi wisata					2. Jumlah Pokja pentahelix pada destinasi wisata	Dispar, DMO. Pentahelix
			3. Melakukan pengelolaan destinasi pariwisata yang berasas ABS SBK					3. Bentuk pengelolaan destinasi pariwisata yang berasas ABS SBK	Pemkab, Dispar, PT, DMO
	2. Layanan pendaftaran usaha pariwisata	2. Program layanan pendaftaran usaha pariwisata	4. Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata Kabupaten					4. Layanan pendaftaran usaha pariwisata	Dispar, DMO, Komunitas
			5. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah Kabupaten					5. Jumlah daftar usaha pariwisata Kabupaten	Dispar, DMO, Komunitas
			6. Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten					6. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten	Dispar, DMO, Komunitas
			7. Pengembangan kerjasama usaha pariwisata dengan dunia usaha untuk pemanfaatan dana CSR perusahaan					7. Besarnya CSR yang diterima destinasi wisata	Pemkab, Dispar, PT, DLH, BPBD, DMO, Perusahaan, KADIN

transformasi sistem kepemimpinan inklusif	4. Penguataan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan	4. Penguataan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan	8. Penguataan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan masing-masing DMO					8. Dokumen rencana strategis masing-masing DMO	Dispar, DMO
			9. Penguataan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi anantara masing-masing DMO					9. Dokumen kerjasama antar DMO	Dispar, DMO, Komunitas
	5. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPBD)	5. Pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang berkedudukan di ibukota kabupaten	10. Memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibukota kabupaten					10. Jumlah Badan Promosi Pariwisata Daerah	Dispar, DMO
3. Mewujudkan tata kelola pariwisata yang berbasis ABS SBK dan/atau kearifan lokal dengan menerapkan pengelolaan pariwisata berkualitas	6. Pembinaan Pokdarwis	6. Pembinaan Pokdarwis	11. Pembinaan, pendampingan dan pengembangan Pokdarwis					11. Jumlah Pokdarwis yang mendapat pembinaan	Pemkab, Dispar, PT, DMO, Komunitas
	7. Pembinaan desa wisata	7. Pembinaan desa wisata	12. Pembinaan, pendampingan dan pengembangan desa wisata					12. Jumlah Pokdarwis yang mendapat pembinaan	Pemkab, Dispar, PT, DMO, Komunitas
4. Menciptakan luaran penelitian dan pengembangan kepariwisataan yang mampu memperkuat tata kelola pariwisata berkualitas	8. Melakukan penelitian dan pengembangan kepariwisataan	8. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata	13. Penelitian tentang objek-objek wisata yang berpotensi dikembangkan					13. Jumlah objek wisata yang berpotensi dikembangkan	Dispar, Balitbang Bappeda, PT
			14. Penelitian tentang daya dukung lingkungan untuk daerah wisata baru					14. Jumlah penelitian tentang daya dukung lingkungan untuk daerah wisata baru	
			15. Melakukan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan produk pariwisata					15.	

			16. Penelitian dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata				16. Jumlah penelitian untuk pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata	Dispar, Balitbang Bappeda, PT
			17. Penelitian-penelitian dalam rangka peningkatan investasi pada sektor pariwisata				17. Jumlah penelitian untuk peningkatan investasi	Dispar, Balitbang Bappeda, PT
	9. Peningkatan jumlah penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata		18. Penelitian terhadap persoalan dalam pengembangan industri pariwisata di kawasan DPK, KSPK, KPPK				18. Jumlah penelitian terhadap industri pariwisata di kawasan DPP, KSPP, KPPP	Dispar, Balitbang Bappeda, PT
			19. Melakukan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata				19. Jumlah penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata	Dispar, Balitbang Bappeda, PT
			20. Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata				20. Jumlah penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata	Dispar, Balitbang Bappeda, PT
			21. Melakukan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis industri pariwisata				21. Jumlah penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis industri pariwisata	Dispar, Balitbang Bappeda, PT
			22. Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata di kawasan DPK, KSPK, KPPK				22. Jumlah penelitian untuk pengembangan citra, kemitraan dan promosi pariwisata	Dispar, Balitbang Bappeda, PT
	10. Peningkatan jumlah penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata		23. Melakukan penelitian permintaan wisata dan segmentasi pasar wisata dalam dan luar negeri				23. Jumlah penelitian permintaan wisata dan segmentasi pasar	Dispar, Balitbang Bappeda, PT

							wisata dalam dan luar negeri	
			24. Melakukan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru wisatawan				24.	
			25. Melakukan penelitian pengembangan kemitraan pariwisata Pesisir Selatan				25. Jumlah penelitian tentang penelitian pengembangan kemitraan	Dispar, Balitbang Bappeda, PT
	11. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata		26. Penelitian tentang pengembangan kelembagaan pariwisata di DPK, KSPK, KPPK				26. Jumlah kajian kelembagaan untuk pengembangan organisasi pariwisata	Dispar, Balitbang Bappeda, PT
			27. Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan				27. Jumlah penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan	Dispar, Balitbang Bappeda, PT
			28. Melakukan penelitian pengembangan SDM pariwisata				28. Jumlah penelitian pengembangan SDM pariwisata	Dispar, Balitbang Bappeda, PT
	12. Pendirian pusat penelitian dan aquarium bawah laut		29. Mendirikan pusat penelitian dan aquarium bawah laut				29. Jumlah pusat penelitian	Dispar, Balitbang Bappeda, PT

Tabel 11.5
Tahapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan SDM Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Strategi	Program	Kegiatan	Waktu				Indikator	Instansi Pelaksana
				2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045		
1. Mewujudkan sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata serta sarana prasarana yang mampu mendorong profesionalisasi dan kompetensi yang bertaraf internasional	1. Melakukan penguatan skill SDM pariwisata yang berstandar professional	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui sertifikasi keahlian	1. Peningkatkan kualitas SDM pariwisata melalui sertifikasi keahlian					1. Jumlah sertifikat keahlian yang dimiliki oleh SDM	Dispar, Disnaker, DMO, LSP
			2. Pelatihan bagi pemandu wisata, pelayan restoran dan hotel, sopir kendaraan umum, masyarakat di sekitar destinasi wisata tentang kepariwisataan					2. Jumlah pemandu wisata, pelayan restoran dan hotel, sopir kendaraan umum yang memiliki sertifikat keahlian	Dispar, Disnaker, DMO, LSP
			3. Workshop bagi operator seni budaya (pelaku seni minang kabau) untuk menambah pengalaman wisatawan di destinasi					3. Jumlah operator seni budaya lokal yang telah mengikuti workshop	Dispar, Disbud, DMO, PT
			4. Melaksanakan uji ketrampilan / pemberian sertifikat bagi pramuwisata					4. Jumlah pramuwisata yang bersertifikat	Dispar, Disbud, DMO, LSP
	2. Kewirausahaan pariwisata	2. Peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan	5. Pelatihan tentang kewirausahaan bagi pelaku industri dan usaha kecil kepriwisataan di semua destinasi					5. Jumlah bisnis pemula yang muncul di kawasan DPK, KSPK, KPPK	Dispar, Disbud, DMO, PT, LSP
2. Mewujudkan sumber daya manusia	3. Pengembangan kurikulum bimtek/pelatihan/	3. Pengembangan kurikulum bimtek/pelatihan/	6. Pengembangan kurikulum bimtek/pelatihan/ <i>workshop</i> bagi pelaku pariwisata yang					6. Jumlah SDM yang sudah dibimtek	Dispar, Disbud, DMO, PT

pariwisata yang kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia sebagai agen perubahan di lingkungan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	workshop bagi pelaku pariwisata yang sesuai dengan tuntutan wisatawan premium	workshop bagi pelaku pariwisata yang sesuai dengan tuntutan wisatawan premium	sesuai dengan tuntutan wisatawan premium						
			7.					7.	
	4. Sertifikasi profesi	4. Pemberian sertifikasi promosi	8. Sertifikasi profesi bagi SDM pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata					8. Jumlah sertifikat profesi usaha pariwisata	Dispar, Disbud, DMO, PT, LSP
3. Meningkatnya jumlah SDM pariwisata yang memiliki sertifikat keahlian	5. Peningkatan kualitas pengelola destinasi pada bidang kepariwisataan	5. Peningkatan kualitas pengelola destinasi pada bidang kepariwisataan	9. Pelatihan pengelola destinasi tentang standar kinerja pengelola destinasi wisata					9. Jumlah pengelola yang ikut seminar dan pelatihan	Dispar, Disbud, DMO, PT, LSP
	6. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	6. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	10. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					10. Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Dispar, Disbud, DMO, PT
			11. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					11. Pemetaan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dispar, Disbud, DMO, PT
			12. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					12. Tingkat peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Dispar, Disbud, DMO, PT

			13. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				13. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Dispar, Disbud, DMO, PT
			14. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				14. Jumlah fasilitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Dispar, Disbud, DMO, PT

BAB 12

PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Pesisir Selatan.

12.1 Kesimpulan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan kepariwisataan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan alam dan budaya lokal, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Pesisir Selatan merupakan acuan bagi pembangunan kepariwisataan daerah dan menjadi salah satu kebijakan yang bersinergi dengan pengembangan sektor lain di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dokumen Ripparkab Pesisir Selatan disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dokumen ini juga dirumuskan berdasarkan kajian terhadap berbagai dokumen perencanaan lainnya untuk menciptakan hirarki perencanaan yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

Penyusunan Laporan Akhir Ripparkab ini didasarkan pada kerangka pemikiran yang sistematis dan tergambar dalam rangkaian bab per bab yang saling terkait satu sama lain. Adapun dua belas bab yang dibahas dalam Laporan Akhir ini adalah Pendahuluan; Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam Kebijakan Pembangunan; Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Mendukung Pembangunan Kepariwisata; Kabupaten Pesisir Selatan sebagai

Destinasi Pariwisata; Industri Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan; Pasar dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan; Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan; Arahan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan; Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan; Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan; Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan; dan Penutup.

Laporan Akhir ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara yang menjadi landasan berpikir dari penyusunan Ripparkab Pesisir Selatan. Untuk menjadikan dokumen ini memiliki kekuatan hukum, Laporan Akhir ini nantinya perlu dilanjutkan dengan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan. Peraturan Daerah inilah yang diharapkan memiliki kekuatan hukum dan menjadi arahan pengembangan yang dipatuhi oleh segenap pemangku kepentingan terkait.

12.2 Saran

Beberapa saran yang diusulkan terkait Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Pesisir Selatan untuk segera dilaksanakan;
2. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Pesisir Selatan harus menjadi prioritas bagi Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Sosialisasi peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Pesisir Selatan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait baik dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, pelaku industri pariwisata, akademisi, media, serta masyarakat secara lebih luas.

4. Materi-materi yang dianggap penting dan perlu diatur lebih lanjut untuk mendukung pembangunan kepariwisataan perlu diatur dalam Peraturan Bupati atau peraturan lain yang sejenis.
5. Koordinasi yang menerus antarsektor terkait pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan secara rutin dan menerus, diikuti dengan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang konsisten mendukung pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan.